



# *Etika Pendidikan*

**KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT**

**Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.**

**Hj. Safarina Hd., M.Pd., M.Si.**



# Etika Pendidikan

KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

# Etika Pendidikan

KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

**Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.**  
**Hj. Safarina Hd., M.Pd., M.Si.**



Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
J A K A R T A

Abdullah Idi, Haji

Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat/H. Abdullah Idi, Hj. Safarina.  
— Ed. 1. — Cet. 1. — Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

x, 278 him., 23 cm  
Bibliografi: hlm. 261  
ISBN 978-979-769-842-3

1. Etika.

I. Judul.

II. Safarina, Haji

170

Hak cipta 2015, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2015.1480 RAJ

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.

Hj. Safarina HD., M.Pd., M.Si.

**ETIKA PENDIDIKAN:**

**Keluarga, Sekolah dan Masyarakat**

Cetakan ke-1, April 2015

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) [Http://www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

**Perwakilan:**

**Jakarta**-14240 Jl. Pelepah Asri 1 Blok Qj 2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.  
**Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 08 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Resmi Gg. Eka Rossa No. 3A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 17/07, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg. 100/v No. 58, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, *alhamdulillah*, penulis haturkan kepada Allah Swt., akhirnya penulisan buku ini dapat dirampungkan. Ide awal penulisan buku ini sesungguhnya tidak terlepas dari keterpanggilan akademis, rasa cinta, dan empati terhadap berbagai persoalan berbangsa dan bernegara. Tidak cukup bijak rasanya bila dengan hanya menghujat dan mengkritisi tajam saja; tetapi, lebih baik bila adanya kontribusi pemikiran dan pengetahuan terhadap perlunya solusi atas 'nasib' generasi muda agar memiliki masa depan yang lebih baik. Hanya dengan 'bekal' ilmu pengetahuan-teknologi dan moral, etika, akhlak, dan berkarakter generasi muda akan terselamatkan dari berbagai bentuk 'krisis etika sosial' atau 'krisis akhlak' yang sedang melanda bangsa ini. Karenanya, penulis tergugah untuk merampungkan penulisan buku ini, yang berjudul: *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, setidaknya, sebagai suatu refleksi dan respons akademik terhadap problema sosial-berbangsa. Suatu yang *mafhum*, bahwa era Reformasi dan 'Transisi Demokrasi' telah berdampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat.

Pada 1998, di mana era Reformasi lahir, tentunya banyak pihak berharap akan adanya perubahan mendasar atas kehidupan berbangsa yang lebih baik, daripada era Orde Baru. Kenyataannya, sejumlah butir Agenda Reformasi 1998 justru kini agaknya belum menunjukkan hasil

menggembirakan. Bila pada era Orde Baru disinyalir korupsi bersifat sentralistik, pada era Reformasi dan 'Transisi Demokrasi' kini, perilaku serupa justru semakin meluas, ke berbagai daerah. Otonomi daerah, diklaim oleh berbagai kalangan, belum banyak membawa perbaikan atas hajat hidup orang banyak. Justru banyak elit yang berurusan dengan pihak penegak hukum.

Atas hal itu, pendidikan, sebagai suatu elemen fundamental berbangsa, memiliki peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika, moralitas, *akhlak al-karimah* kepada 'anak bangsa'. Mereka memiliki peluang dan harapan besar guna memperbaiki 'carut-marut' perilaku berbangsa yang kini banyak sorotan dari sejumlah pihak. Hal ini, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki 'bekal' sains-pengetahuan dan sains-agama: beriman, bertakwa, dan berakhlak. Karenanya, fenomena kecenderungan terjadinya degradasi etika sosial dapat diperbaiki dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya jangka panjang melalui pembangunan sumber daya manusia (*human-resources*) ini diharapkan para 'anak-bangsa' akan menatap masa depannya dengan gemilang dan percaya diri; dan bangsa besar ini ke depan akan diperhitungkan dunia karena peradaban dan jati dirinya.

Materi buku ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data sekunder melalui *review of literature* terhadap berbagai sumber terkait: buku, jurnal, koran, majalah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya. Karenanya, kepada Ibu Hj. Safarina Hd., M.Pd., M.Si., seorang guru, yang mencintai 'tuliskan-menulis', diucapkan terima kasih atas kontribusi tulisannya, dan sekaligus telah meluangkan waktu melakukan *editing* terhadap naskah ini.

Sebagian 'sumber' naskah buku ini diperoleh penulis dari hasil *Visiting Professor*. Kepada Prof. Dr. Irene Sneider, *Dean of Arabic and Islamic Studies Department, Georg-August-Universität Göttingen, Germany* dan Prof. Dr. Fritz Schultze, diucapkan terima kasih atas izin kepada penulis menggunakan *Asian Studies Library* dan *Max Planck Institute Library*. Diucapkan terima kasih pula kepada Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI, yang telah memberi kesempatan kepada

penulis mengikuti program *Professor Fellowships/Program Academic Recharging for Islamic Studies (ARFI)*, Germany, 2012.

Selanjutnya, buku *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat* ini agaknya lebih tepat ditujukan kepada para mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) di IAIN, STAIN dan UIN atau mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Perguruan Tinggi Umum, serta pembaca budiman lainnya. Akhirnya, bila adanya kekurangan dari buku ini, menjadi tanggung jawab penulis, insya Allah, akan direvisi pada edisi berikutnya. *Wallahu a'lam bil al-shawwab*.

Talang Jambi, 17 Maret 2015

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	ix
Bab 1 TRANSISI DEMOKRASI DAN ETIKA PENDIDIKAN	1
A. Transisi Demokrasi dan Etika Sosial	2
B. Etika Pendidikan	18
Bab 2 ANAK DIDIK, REMAJA DAN PERILAKU MENYIMPANG	27
A. Perilaku Menyimpang ( <i>Social Deviance</i> )	27
B. Remaja, Pemuda dan Korupsi	37
C. Remaja, Pemuda dan Ajaran Agama	47
Bab 3 AJARAN ISLAM, MANUSIA DAN ETOS KERJA	53
A. Ajaran Islam dan Hakikat Manusia	54
B. Pendidikan dan <i>Human Resources</i>	61
C. Islam dan Etos Kerja	73
Bab 4 KODE ETIK GURU DAN PROFESIONALISME	83
A. Etika, Etiket, Norma dan Akhlak	87
B. Kode Etik dan Profesionalisme Guru	98

<b>Bab 5</b>	<b>KELUARGA, ORANGTUA DAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK</b>	<b>115</b>
	A. Akhlak, Karakter, dan Kepribadian	118
	B. Keluarga dan Karakter Anak	138
<b>Bab 6</b>	<b>PENDIDIKAN PESANTREN, MADRASAH, DAN LEADERSHIP</b>	<b>151</b>
	A. Pesantren	151
	B. Madrasah	161
	C. PAI di Sekolah	167
	D. Madrasah dan Leadership	172
<b>Bab 7</b>	<b>PLURAL-SOCIETIES, PENDIDIKAN KARAKTER DAN TOLERANSI</b>	<b>197</b>
	A. Indonesia : <i>Plural Societies</i>	198
	B. Pendidikan Karakter dan Toleransi	207
<b>Bab 8</b>	<b>ABAD KE-21 DAN ORIENTASI PENDIDIKAN NASIONAL</b>	<b>229</b>
<b>Bab 9</b>	<b>PENUTUP: Anak Didik, Etika Pendidikan dan Masa Depan Bangsa</b>	<b>251</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>261</b>
	<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>275</b>

# Bab 1

## TRANSISI DEMOKRASI DAN ETIKA PENDIDIKAN

Sejak memasuki era Reformasi pada 1998, bangsa Indonesia memasuki proses kehidupan demokrasi atau demokratisasi dengan *'plus-minus'*nya. Salah satu permasalahan mendasar yang dialami kehidupan berbangsa di era demokrasi ini, adalah kecenderungan terjadinya proses degradasi *'etika sosial'* atau terjadi kecenderungan *'krisis akhlak'* di tengah masyarakat, sehingga telah memunculkan terjadinya beragam bentuk anomali sosial di masyarakat. Dari banyak persoalan berbangsa, sejak dari persoalan perilaku: korupsi, narkoba, minuman keras dan *oplosan*, eksploitasi sumber daya alam, pergaulan bebas, rendahnya sopan santun, dan rasa hormat antara muda dan lebih tua, malas-malasan, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu lalu lintas, meningkatnya perilaku kriminal, konflik sosial, dan lain-lain, yang sekaligus merupakan indikator-indikator krusial yang menunjukkan telah terjadinya degradasi akhlak, moral dan etika sosial. Jika kondisi ini terus berlanjut, sangatlah mungkin akan memunculkan terjadinya ancaman krisis sosial yang semakin parah dan mengarah pada *'proses'* disintegrasi sosial, bahkan tidak berlebihan bila mengarah pada proses disintegrasi bangsa di kemudian hari. Selain itu, jika demikian halnya, bangsa ini akan sulit menjadi bangsa yang maju dan berkompetitif dengan bangsa lain.

## A. Transisi Demokrasi dan Etika Sosial

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dibedakan dalam tiga pengertian utama, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>1</sup>

Antara *etika* dan *etiket* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah etika dan etiket bertalian dengan tindakan dan perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Perbedaan antara etika dan etiket, seperti dikatakan Darmodiharjo dan Shidarta adalah *pertama*, etika berkaitan dengan cara perbuatan yang harus dilakukan seorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan dapat dilakukan antara *ya* dan *tidak*. *Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain. Beda halnya, etika tidak memerhatikan orang lain atau tidak. *Ketiga*, etiket bersifat relatif, di mana terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika lebih bersifat mutlak, dan prinsip etika sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar-menawar. *Keempat*, etiket hanya bertalian dengan lahiriah saja, dan etika bertalian dengan dimensi internal manusia. Dalam kaitannya dengan etiket seorang bisa berbeda, tetapi dalam kaitannya dengan perilaku etis, seorang tidak bisa bersifat kontradiktif.<sup>2</sup>

K. Berten menulis bahwa kerap kali dua istilah ini dicampuradukkan. Padahal, perbedaan di antara keduanya sangat hakiki. Etika berarti "moral" dan etiket berarti "sopan santun". Dilihat dari bentuk kata, sebetulnya,

<sup>1</sup>Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 173.

<sup>2</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 257.

tidak ada hubungan antara keduanya. Dalam bahasa Inggris, “etika” berasal dari kata *ethics* dan “etiket” berasal dari kata *etiquette*. Akan tetapi, dilihat dari arti atau maknanya, kedua kata ini, juga memiliki persamaan. Yakni, *pertama*, etika dan etiket bertalian dengan perilaku manusia. *Kedua*, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Justru karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut mudah dicampuradukkan.<sup>3</sup>

Di samping adanya persamaan, terdapat sejumlah perbedaan antara etika dan etiket. *Pertama*, etiket bertalian dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. di antara sekian banyak cara, etiket memperlihatkan cara yang tepat, maksudnya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, bila seorang karyawan memberikan suatu kepada pimpinan sebagai atasannya, yang bersangkutan harus memberikannya dengan menggunakan tangan kanan. Seorang dipandang melanggar etiket, bila seorang memberikan suatu barang tersebut dengan tangan kiri. Tetapi, etika tidak terbatas pada cara dilakukan seorang pada suatu perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ‘ya’ atau ‘tidak’. Suatu ilustrasi: Mengambil barang orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Di sini, cara melakukan perbuatan tidak perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perbuatan etisnya. “Jangan mencuri” merupakan norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, di sini, sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak sebatas cara perbuatan dilakukan, melainkan bertalian dengan perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.<sup>4</sup>

*Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Sekadar ilustrasi, seorang dipandang melanggar etiket bila makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, dan sejenisnya. Tapi, jika dia makan sendiri, dia tidak akan melanggar etiket, karena tidak ada saksi mata. Sebaliknya, etika tidak berlaku atas hadir tidaknya orang lain. Bila

---

<sup>3</sup>K. Berten, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 9.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

sesudah makan di restoran, seorang kabur tanpa bayar, dia telah berlaku tidak etis, juga tidak diketahui oleh pemilik. "Larangan mencuri" selalu berlaku, apakah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.<sup>5</sup>

Ketiga, etiket bersifat relatif. Suatu yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sebagai ilustrasi, makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Beda halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolut. 'Jangan berbohong', 'jangan mencuri', 'jangan membunuh' merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi 'dispensasi'. Jadi, relativitas etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi. Keempat, bila berbicara tentang etiket, berarti memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etiket memandang manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai 'musang berbulu ayam': 'dari luar sangat sopan dan halus tetapi dari dalam kebusukan'. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan suatu kontradiksi, bila seorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersikap munafik. Tapi, orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik, sebab, seandainya dia munafik, hal itu dengan sendirinya berarti dia tidak bersikap etis. Di sini, memang terdapat kontradiksi. Orang yang bersikap etis merupakan orang yang sungguh-sungguh baik. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan terakhir ini paling penting di antara empat perbedaan yang dibahas tadi.<sup>6</sup>

Dari perbedaan antara *etis* dan *etiket* ini akan berimplikasi lebih luas bila mencampuradukkan kedua istilah ini tanpa berpikir lebih jauh. Bisa sampai fatal—dari segi etis--, bila orang menganggap etiket saja apa yang sebenarnya termasuk ranah moral. Sebuah ilustrasi dari Berten<sup>7</sup> yang diambil dari lingkungan perguruan tinggi. Dikatakan Berten bahwa dibanyak kampus di Indonesia, diperoleh larangan memakai sandal. Jika larangan ini dilanggar, sering ada sanksi cukup berat. Di sisi lain, dalam hal kejujuran, perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya tidak terlalu

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

ketat. Menyontek pada waktu ujian banyak dilakukan, dengan beragam variasi. Plagiarisme dalam menyusun *paper*, skripsi atau tesis tidak begitu dipedulikan. Banyak tulisan mahasiswa sebagian besar diambil dari internet atau dikerjakan orang lain dengan pembayaran. Jika dikritisi lebih jauh, dilarang memakai sandal di kampus sebenarnya hanya suatu etiket saja, sedangkan ketidakjujuran yang jauh lebih penting karena merupakan masalah etika. Dari segi pendidikan, soal sandal, kata Berten, bukanlah terlalu penting, karena di tempat kerja nanti si mahasiswa dengan mudah akan menyesuaikan diri dengan aturan tentang cara berpakaian yang berlaku di perusahaan. Namun, jika sejak pendidikan profesionalnya dia sudah akrab dengan praktik-praktik tidak jujur otomatis dia akan ikut juga dalam praktik-praktik kotor di perusahaan.

Antara etika dan estetika mempunyai sejumlah perbedaan: (1) pembahasan etika lebih menitikberatkan pada baik-buruknya atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban tanggung jawab manusia. (2) etika berhubungan dengan dasar pertimbangan tentang baik-buruk, salah-benar tindakan manusia. (3) etika terapan menjadi fokus perhatian, misalnya adanya etika profesi, kode etik, rambu-rambu etis, etika politik, etika lingkungan, dan lain-lain. *Estetika* itu sendiri memiliki sejumlah karakter: (1) mempersoalkan seni atau keindahan yang dihasilkan manusia, dan persoalan apresiasi yang harus dilakukan dalam proses kreatif manusia. (2) estetika: estetika deskriptif (menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan) dan estetika normatif (menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan). (3) estetika berhubungan dengan imitasi atau reproduksi realitas. Seni sebagai ekspresi sosial atau ekspresi personal atau suatu realitas.<sup>8</sup>

Muhammad Mufid menulis, *sifat dasar etika* adalah sifat kritis, dikarenakan etika bertugas: *Pertama*, untuk mempermasalahkan norma yang dipandang berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan kenyataan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. *Kedua*, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan

<sup>8</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op.cit.*, hlm. 178.

diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. *Ketiga*, etika memperlakukan juga hak setiap institusi, seperti orangtua, sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah atau larangan yang mesti ditaati. *Keempat*, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. *Kelima*, etika menjadi alat pemikiran rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau dibingungkan oleh norma yang ada. Etika sering dinamakan *filsafat moral*. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika mengkaji baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, dan sekaligus menyoroiti kewajiban-kewajiban manusia. Etika memperlakukan bagaimana manusia semestinya berbuat dan bertindak. Tindakan manusia itu sendiri ditentukan beragam norma. Etika membantu manusia untuk menentukan sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara *etika deskriptif* dan *etika normatif*. *Etika deskriptif* memberi gambaran dari gejala kesadaran moral, dari norma dan konsep etis. *Etika normatif* tidak berbicara lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Dalam etika normatif, norma dinilai dan setiap manusia ditentukan.<sup>9</sup>

Hubungan antara *filsafat* dan *etika*. Seperti diketahui bahwa filsafat adalah sejumlah keyakinan, sikap, cita-cita, aspirasi, dan tujuan, nilai, norma, aturan, dan prinsip etis. Filsafat juga mencari kebenaran, suatu persoalan nilai-nilai dan pertimbangan nilai untuk melakukan hubungan kemanusiaan secara benar dan beragam pengetahuan apa yang buruk atau baik untuk menentukan bagaimana seorang mesti memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Florence Kluckhohn<sup>10</sup> mengidentifikasi sejumlah orientasi nilai bertalian dengan masalah kehidupan dasar: *Pertama*, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukan alam. *Kedua*, manusia menilai sifat/hakikat manusia sebagai yang baik, atau campuran antara baik dan

<sup>9</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat Komunikasi...", *loc.cit.*, hlm. 173-174.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 175-176.

buruk. *Ketiga*, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa datang. *Keempat*, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. *Kelima*, manusia menilai hubungan dengan orang lain, dalam kedudukan langsung, individualistis, atau posisi yang sejajar. Orientasi nilai itu tampak berbeda di antara berbagai kebudayaan dan sub-kebudayaan dalam masyarakat. Orientasi nilai budaya itu dinyatakan dalam konsep, sikap, harapan orang, yang bertalian dengan diri mereka atau orang lain, khususnya sebagai bagian dari beragam peranan sosial mereka miliki dalam masyarakat.

Nilai-nilai sekurangnya mempunyai empat tingkatan. *Pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. *Keempat*, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etik itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia; motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia.<sup>11</sup>

Haryatmoko mengungkapkan bahwa konsep etika sering digunakan sebagai persamaan dengan moral. Di balik kedua istilah ini, terkandung nuansa dua tradisi pemikiran filsafat moral berbeda. Aristoteles, dalam buku *Ethique a'Nicomaque*, menulis selain kata '*ethos*' yang bermakna

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 176-177.

"kualitas suatu sifat" digunakan juga istilah '*ethos*' yang bermakna kebiasaan. Arti '*ethos*' adalah suatu cara berpikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas cara kepemilikan seorang terhadap kelompok. Istilah yang kedua ini relevan dengan terjemahan kata '*moralis*' (*mos, moris* = adat, kebiasaan) dalam bahasa Latin. Istilah *moralis* selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti moral sebagaimana digunakan dalam definisi terkini.<sup>12</sup>

Diungkapkan Mufid<sup>13</sup>, etika lebih cenderung ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. *Moralitas* adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan/atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua kaidah dasar moral: *Pertama*, kaidah sikap baik, di mana seorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkret, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. *Kedua*, kaidah keadilan, di mana sebagai

---

<sup>12</sup>*Moral* dihubungkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan yang relatif atau mutlak. Jadi "moral" merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam konteks baik/buruk, benar/salah yang dipandang sebagai nilai mutlak atau transenden. Isinya berupa kewajiban-kewajiban. Konsep "moral" merujuk kepada semua aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam konteks baik dan buruk, benar dan salah.

Etika dilihat sebagai suatu refleksi filosofis tentang moral. *Etika* merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena dapat pula kemungkinan bertindak) yang membicarakan tentang baik dan buruk. *Etika* lebih dilihat sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan kebijaksanaan. Paul Ricoeur (1990) mengatakan istilah "moral" dan "etika" dihubungkan pada dua tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Istilah "moral" dihubungkan dengan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi). *Moral* merujuk ke kewajiban, norma, prinsip bertindak, imperatif ("kategoris" = aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang merujuk ke dirinya sendiri sebagai keharusan). *Etika* dihubungkan dengan tradisi pemikiran Aristoteles yang bersifat "teologis" (*telos* = finalitas atau tujuan). Paul Ricoeur mendefinisikan "etika" sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Biasanya etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. *Moral* merujuk pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Tekanan etika diletakkan pada dimensi reflektif dalam upaya mencari bagaimana bertindak (bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma). Lihat: (Haryatmoko, 'Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi', *loc.cit.*, hlm. 2-3).

<sup>13</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat...", *op.cit.*, hlm. 180.

prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

Antara *moral* dan *hukum* terdapat suatu hubungan yang erat. Antara satu dengan yang lainnya saling memengaruhi dan membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh moral, karenanya, hukum harus dinilai atau dapat diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti jika dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya telah menempatkan tahap cukup matang. Moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang jika tidak dikukuhkan, diungkapkan, dan dilembagakan dalam masyarakat. Sehingga, hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas. Meskipun terdapat hubungan erat, antara moral dan hukum juga memiliki sejumlah perbedaan. Yakni, *pertama*, hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka, hukum lebih mempunyai kepastian yang lebih besar. *Kedua*, norma bersifat subjektif dan dampaknya menimbulkan pertanyaan terhadap pentingnya kejelasan tentang etis dan tidaknya. *Ketiga*, hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja. *Keempat*, sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seorang. *Kelima*, sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan. *Keenam*, sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang. *Ketujuh*, sanksi hukum pada dasarnya didasarkan pada kehendak masyarakat. *Kedelapan*, moralitas tidak akan dapat diubah oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Adanya perbedaan antara *etika* dan *agama*. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika dapat membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional. *Agama* menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama terdapat etika, dan agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama lain, tetapi terpisahkan secara teoretis. Dalam konteks praktis, akan sulit mengenyampingkan salah satu di antaranya. Seorang tidak bisa berbuat

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

hanya atas dasar agama saja tanpa memerhatikan etika atau sebaliknya. Keberagaman agama pada prinsipnya memerhatikan etika yang berlaku, sebaliknya, seorang dikatakan memiliki etika, jika kemudian memerhatikan agama yang ada.<sup>15</sup>

Mufid selanjutnya mengungkapkan bahwa wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki individu atau kolektif. Wacana etika memiliki sejumlah unsur utama: *kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip moral dasar*. *Kebebasan* merupakan unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandaikan *kebebasan*. *Kebebasan* adalah unsur hakiki etika. *Kebebasan* eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini bermakna bahwa *kebebasan* ini bersifat positif. Tentu saja, *kebebasan* dalam praktik hidup sehari-hari memiliki banyak jenis: *kebebasan jasmani-rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral*. *Tanggung jawab* merupakan kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul dari tindakan. *Tanggung jawab* mengandaikan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. *Pertanggungjawaban* adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. *Kebebasan* merupakan syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. *Hati nurani* merupakan penghayatan tentang nilai baik atau buruk bertalian dengan situasi konkret. *Hati nurani* memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Jadi, *hati nurani* berhubungan dengan kesadaran.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op.cit.*, hlm. 180.

<sup>16</sup>*Kesadaran* merupakan kesanggupan manusia mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. *Hati nurani* sangat bersifat retrospektif dan prospektif. *Hati nurani* juga bersifat personal. *Hati nurani* juga merupakan suatu ungkapan atau norma yang bersifat subjektif. Prinsip kesadaran moral merupakan beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi semua program tindakan moral. Prinsip kesadaran moral mengandaikan pemahaman totalitas individu atas semua tindakan dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada tiga *prinsip dasar* dalam kesadaran moral: *prinsip sikap baik, keadilan dan hormat* terhadap diri sendiri dan orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Prinsip sikap baik menjadi dasar seorang untuk bersikap adil dan hormat. Lihat: *Ibid.*, hlm. 181.

Dalam studi ilmu sosial dan politik modern, *demokratisasi* merupakan salah satu konsep penting. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai proses implementasi sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, di mana negara itu sebelumnya menganut sistem politik nondemokrasi. Suatu negara dipandang melaksanakan sistem politik demokrasi apabila negara itu memiliki proses penetapan presiden melalui pemilihan umum. Para calon presiden berkompetisi dengan jujur, adil, terbuka, dan taat aturannya. Ada pula pandangan mengatakan suatu negara demokrasi harus mempunyai masyarakat sipil atau masyarakat madani dan kultur demokrasi. Demokratisasi sebagai suatu proses di mana suatu negara mengangkat dan menetapkan pemerintahan. Selain indikator jujur, adil, dan terbuka, terdapat indikator lain dari demokrasi, yakni adanya perpindahan kekuasaan pemerintahan secara periodik dan damai, dari pemerintah sebelumnya ke pemerinatahan baru.<sup>17</sup> Transfer kekuasaan yang terjadi secara lancar dan damai sangat penting bagi suatu proses demokrasi, karena pengakuan atas kekalahan dan kemenangan ketika bisa kembali berkompetisi untuk merebut kekuasaan. Memilih "posisi" di luar pemerintahan atau oposisi dengan melakukan kontrol dan kritik konstruktif merupakan suatu hal wajar dalam demokrasi.

Pada 1980-an, sejarah menunjukkan bahwa meskipun Anglo-Saxon telah menempatkan sebagai kelompok yang paling besar (*the largest group*), penduduk Amerika Serikat selalu memasukkan beragam latar belakang bangsa, ras, dan agama. Hubungan antarkelompok (*groups*) di Amerika Serikat sering kali tampak antagonis, tetapi, secara historis, ekspresi ideal dari banyak orang Amerika telah diantisipasi dan reduksi dukungan dari kelompok melalui beragam bentuk aktivitas umum dalam suatu kerangka masyarakat demokratis. Sehingga, suatu hal lazim untuk mengatakan Amerika Serikat sebagai "*a melting pot*". Dalam perkembangan tahun-tahun selanjutnya, sikap terhadap eksistensi subkelompok dan subbudaya telah menjadi lebih disetujui dan diapresiasi. Sistem-sistem pendidikan pun diharapkan dapat membantu beragam kelompok untuk mempertahankan beragam perbedaan budaya mereka dan *Commisioner of*

---

<sup>17</sup>Zamroni, *Pendidikan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2012, hlm. 97.

Education, mencapai tujuan-tujuan budaya mereka dalam suatu kerangka kerja kooperatif. Sehingga, James E. Allen, Jr., mantan *United States Commissioner of Education*, merekomendasikan dukungan terhadap ASPIRA, suatu organisasi masyarakat Puerto Reco, menulis:

*The day the melting pot is over. No longer is the ideal of each minority to become an indistinguishable part of the majority. Today, each strives to maintain its identity while seeking its rightful share of the social, economic, and political fruits of our system. Self-help and self-determination have become the rallying cries of all minorities.*<sup>18</sup>

Pluralitas sosial (*plural-society*) atau multikultural dan tradisi yang terpisah dan berbeda itu, selanjutnya, merupakan suatu hal yang "menyehatkan" dalam suatu masyarakat demokratis yang kompleks. Pada waktu yang sama, masyarakat terbuka untuk menerima anggota baru dan menawarkan sejumlah penghargaan terhadap anggota masyarakat kelompok minoritas yang ikut dalam masyarakat utama (*mainstream society*), dan konsekuensinya, adalah telah mengurangi partisipasi dan ikatan terhadap suatu kelompok minoritas mereka. Hal ini merupakan suatu keadaan yang berhubungan antara kekuatan sosial (*social forces*) yang menekan suatu "kultural pluralisme-demokratik" (*a democratic cultural pluralism*) dan mereka yang bekerja terhadap suatu "integrasi sosial-demokratik" (*a democratic social integration*).

Pada periode 1965, slogan-slogan pluralisme atau multikulturalisme telah menjadi populer, tetapi integrasi terus menjadi suatu tujuan sosial terpenting (*an important social goal*). Dengan *social integration*, dimaksudkan bercampurnya kelompok rasial dan kelompok budaya melalui asosiasi dalam bisnis, pendidikan, pemerintah dan budaya, dan beberapa level perkawinan antarkelompok atau etnis dengan tujuan menjadi kultur utama (*common culture*). Dengan *democartic cultural pluralism* diartikan sebagai koeksistensi damai daripada suatu keberagaman ras, etnis, agama, dan kelompok ekonomi, dan setiap kelompok menjaga sub-kultur masing-masing secara lengkap.

---

<sup>18</sup>Daniel U. Livine and Robert J. Havighurst, *Society and Education*, Seven Edition, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, and Toronto, 1989, hlm. 360.

Jika kesamaan penghargaan, peluang, dan hak-hak istimewa diberlakukan pada semua kelompok (*groups*), kemudian suatu kondisi pluralistik-demokratik (*democratic pluralism*) mungkin dikatakan untuk eksis, seperti dilakukan di Switzerland, dengan wilayahnya French, German, dan Italia, dan di Holland, di mana sejumlah sub-kultur agama menempatkan diri mereka sendiri sebagai bagian dari politik dan negara, sebagaimana halnya urusan sosial dan agama. Hal itu telah menunjukkan adanya suatu kondisi dinamika dari perkembangan pluralisme dan diversitas karakteristik dari masyarakat kontemporer dan pendidikan di Amerika Serikat.

Pada abad ke-19, Amerika Serikat merupakan suatu masyarakat pluralistik. Dari awal, Amerika Serikat memiliki sekitar 30 koloni representatif dari suatu beragam dari nasionalitas Eropa dan terdiri dari berbagai kelompok agama, dengan Indian yang "dikeluarkan" dari tanah airnya, dan dengan Afrikan yang dijual sebagai budak (*slaves*). Pluralisme ini sulit dapat dikatakan sebagai demokratis. Bagi banyak imigran Eropa yang datang ke negara ini pada abad ke-19, di sana terdapat menonjolnya diskriminasi. Sebagai contoh, imigran Irlandia yang datang pada sekitar tahun 1840 dan 1860, sebagai akibat dari kelaparan di Irlandia, telah menghasilkan suatu kelas rendah (*a lower class*) Irlandia di Amerika Serikat yang hanya diberikan pekerjaan kasar.

Apa yang menyelamatkan situasi bagi pendatang baru (*new comers*) dan menarik mereka ke mobilitas adalah adanya permintaan konstan terhadap tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil (*unskilled labor and semi-skilled labor*) dalam pengembangan ekonomi. *Free schools* juga telah menempatkan anak-anak kelompok imigran berbeda memiliki kesempatan memperoleh sejumlah jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan para orang kulit putih (*white-collar jobs*), kebebasan tanah yang terbatas, ekspansi pemerintah lokal dan bisnis, yang telah menciptakan sejumlah peranan para imigran yang memiliki pendidikan formal yang rendah. Suatu campuran integrasi sosial dan pluralisme budaya terletak pada lingkungan pekerjaan. Tiap gelombang imigran Eropa yang awalnya tiba tanpa memiliki uang dan posisi, selanjutnya berkembang statusnya secara cepat, walaupun kehidupan tertinggal dalam kenaikan statusnya.

Setelah satu atau dua generasi, masih terdapat sejumlah anggota imigran yang tidak bernasib baik.<sup>19</sup>

Tetapi, pada abad ke-19, sejumlah kelompok tidak bersama-sama ikut serta dalam suatu masyarakat pluralistik-demokratis dan integrasi sosial: Indian Amerika yang terpinggirkan ke tanah pinggiran (*inferior lands*) dan dibinasakan oleh tentara Amerika jika mereka memilih untuk melawan; dan persoalan pembebasan budak-budak Afrika. Periode sejarah sosial Amerika hingga 1900 telah didominasi oleh suatu kebijakan yang dikatakan seorang ahli sosiologi Amerika, Milton Gordon, sebagai *Anglo-conformity*. Kebijakan ini berasumsi bahwa kesadaran mempertahankan institusi-institusi sosial Inggris, bahasa Inggris, orientasi pola-pola kultural Inggris yang dominan di kehidupan orang Amerika. Masyarakat juga lebih dominan pengikut Protestan, di mana terdapat banyak prasangka terhadap Katolik dan imigran baru Katolik. Imigran Jerman, Irlandia, dan Skandinavia merupakan paling dominan selama periode 1840 hingga 1890 yang diterima dengan perasaan tidak aman atau "was-was". Hampir semua imigran Irlandia dan Jerman berlatar belakang Katolik. Imigran Skandinavia dikenal sebagai suka menyatu dalam satu kelompok dan mereka mempertahankan bahasa mereka sendiri. Masih, suatu negara yang luas, dan pertumbuhan industri memerlukan tenaga kerja, dan perbatasan telah dibuka. Dampaknya, masyarakat menunjukkan lebih pluralistik dari sebelumnya.<sup>20</sup>

Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan suatu konsep baru, di mana komposisi kebangsaan melalui agen dari pembatasan kehidupan yang menyebar menyilang ke tengah dan menuju ke Barat. Seorang ahli sejarah, Fredrick Jakson Turner dalam bukunya, *The Frontier in American History*, menulis perbatasan bagian Barat bertindak sebagai "suatu pelarut bagi warisan nasional dan kecenderungan separatisme". Sekitar pertengahan abad ke-19, bebas pendidikan bagi masyarakat (*free public education*) semakin meluas, untuk memberi bantuan pada setiap orang dengan mengajar bahasa Inggris dan konsep sosial Amerika yang ideal.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 362.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Meskipun sistem pendidikan publik paling berpengaruh, tetapi tidak seefektif dalam kenyataannya, pada periode 1880-1920. Banyak anak dari keluarga imigran miskin mengalami putus sekolah dan selanjutnya bekerja pada pekerjaan yang tanpa memerlukan keterampilan (*unskilled jobs*). Sekolah-sekolah bagi pengikut Roma Katolik didirikan yang tidak hanya mengajar agama Katolik tetapi juga mengajar budaya etnis Eropa bagi khusus umat Katolik.<sup>21</sup>

Sejak lahirnya, Indonesia sebagai suatu negara yang bebas dan mendapat pengakuan dari berbagai negara di dunia, telah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara lainnya. Karakteristik ini terlihat dari kondisi wilayah Indonesia yang terdapat setidaknya 17.058 buah pulau, dan dihuni sekitar 450 suku bangsa yang memiliki bahasa, hukum dan adat berbeda. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam hal alat komunikasi yang digunakan, hingga saat ini baru sekitar 10-15% yang dapat berbahasa Indonesia terutama mereka yang tinggal di perkotaan dengan taraf pendidikan lebih baik.<sup>22</sup> Di satu sisi, setelah mengalami kemerdekaan pada 1945, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses pembangunan dilakukan.

Di sisi lain, dalam usianya yang masih 'belia' itu, bangsa Indonesia juga masih memiliki dan mengalami masalah sebagai bentuk 'krisis' atau degradasi etika sosial yang menghambat proses pembangunan itu. Salah satunya, terutama justru ketika memasuki dalam era reformasi dan demokrasi (sejak 1998), perilaku korupsi di negeri ini tampak sangat kompleks, akut, dan bersifat sistemik. Sebagian kalangan, mengatakan bahwa korupsi itu telah terjadi pada level yang parah dan akut. Mengharapkan korupsi agar dapat terkikis sama sekali berarti mengharapkan adanya tertib sosial yang sempurna. Padahal, dalam suasana perubahan pesat karena pembangunan, tertib sosial itu jauh ketinggalan. Gerakan antikorupsi apa pun yang direncanakan membutuhkan strategi dan taktik yang pesannya lebih mudah dipahami masyarakat. Hal ini

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Lembaga Administrasi Negara, "Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya", Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Edisi Tahun 2008, Jakarta, hlm. 1.

menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di negeri ini sudah semakin kompleks dan tidak mudah menemukan solusinya. Perilaku korupsi juga semakin menarik di negeri ini karena pelakunya tidak melihat rentang usia, bisa usia muda, bisa aparat pemerintah, bisa pihak swasta. Ada benar kiranya, bahwa korupsi di negeri ini cenderung 'menggurita'.

Suatu kenyataan karenanya bahwa fenomena demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan kondisi demokrasi dalam proses 'belajar' atau 'miniatur' atau juga dapat disebut sebagai demokrasi 'transisi'. Demokrasi Indonesia dalam proses 'transisi' justru memperlihatkan anomali sosial dan sejumlah perilaku menyimpang (*social deviance*) di tengah masyarakat pascareformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah kepada 'krisis' etika sosial. Hal ini, sesungguhnya kontras dengan cita-cita Reformasi 1998, yakni sebagai suatu era Reformasi yang menggantikan era Orde Baru yang dikatakan sebagai era 'Otoriter'.

Pergantian rezim yang dikatakan 'otoriter' ke rezim demokrasi ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari 'satu tangan' beralih kepada kekuasaan menempatkan lembaga perwakilan memiliki posisi dan porsi kekuasaan yang lebih besar. Suatu kekuasaan yang dijalankan oleh suatu institusi di mana mereka (wakil rakyat) yang duduk di dalamnya adalah dipilih rakyat. Hal ini, diharapkan aspirasi dan cita-cita masyarakat lebih mudah dipahami dan dimanifestasikan dalam program pembangunan. Kehidupan politik dan budaya masyarakat juga menunjukkan perubahan signifikan, di mana kebebasan berpendapat memiliki tempat. Penguatan masyarakat sipil menjadi agenda bersama bagi seluruh komponen masyarakat. Otorianisme merupakan masa lalu.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Pada era Reformasi 1998, suatu iklim demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan gelombang besar arus demokratisasi. Demokrasi menjelaskan dan menguji proses di mana pemerintah, negara dan masyarakat mencoba beralih dari bentuk pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis. Dalam hal ini, memang terdapat perdebatan mengenai arti demokrasi, jenis demokrasi dan level demokrasi yang secara realistis diharapkan dapat diwujudkan, seperti dalam Jean Grugel (2002). Sebuah gelombang demokratisasi, dalam pandangan Samuel Huntington adalah sekelompok dari rezim nondemokratis ke rezim demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam jumlah signifikan dan lebih besar daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya meliputi liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis.

Demokrasi yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari arus besar gelombang ketiga di negara-negara dunia ketiga dan negara bekas komunis. Dalam konteks gelombang demokratisasi, Huntington membagi proses peradaban manusia modern menjadi tiga gelombang, di mana tiap gelombang tersebut telah memengaruhi sejumlah negara, dan selama tiap-tiap gelombang itu sejumlah transisi rezim terjadi ke arah yang tidak demokratis. Dalam melakukan pembagian gelombang demokratisasi itu, Huntington memberikan catatan bahwa sejarah bukanlah suatu yang teratur dan perubahan politik tidak dapat dipilah-pilah agar tepat masuk ke dalam kotak sejarah yang rapi. Menspesifikasikan secara ketat kapan sebuah transisi rezim terjadi sering kali merupakan upaya yang subjektif. Bagaimana pula subjektivitas pada upaya menspesifikasi secara tepat waktu terjadinya gelombang demokratisasi dan gelombangbaliknya.<sup>24</sup>

Secara keseluruhan, gerakan menuju demokratisasi merupakan suatu gerakan yang bersifat global. Gelombang demokratisasi dan arus sebaliknya menggambarkan suatu pola 'dua langkah maju, satu langkah mundur'. Transisi gelombang ketiga yang terjadi di Indonesia merupakan proses politik yang kompleks yang melibatkan beragam kelompok yang berupaya memperoleh kekuasaan dan mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan-tujuan lainnya. Dari perspektif proses demokratisasi, para peserta penting dalam proses ini terdiri dari kelompok konservatif, pembaru liberal, pembaru demokratis dalam koalisi pemerintah, dan kelompok moderat demokratis serta ekstremis revolusioner di pihak oposisi.<sup>25</sup> Dalam hal ini, Huntington menggambarkan bahwa ada tiga proses transisi dalam demokrasi: *transformation*, *replacement*, dan *transplacement*.<sup>26</sup>

---

Lihat pendapat Huntington dalam kutipan: (Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Jakarta: Faham Indonesia, 2012, hlm. 5).

<sup>24</sup>Fahri Hamzah, "Demokrasi, Transisi, Korupsi....", *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>26</sup>Yakni: (1) *Transformation*, di mana pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem. Transformasi menjadi penyebab sekitar 16 dari 35 transisi gelombang ketiga yang telah berlangsung atau mulai berlangsung menjelang akhir dasawarsa 1980. Interaksi antara kelompok pembaru dengan konservatif dalam pemerintah koalisi merupakan interaksi yang terpenting. Transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaru lebih kuat dari kelompok oposisi, dan jika kelompok moderat lebih kuat dari kelompok ekstremis. (2) *Replacement*, di

Jika memerhatikan sifat transisi di Indonesia, demokratisasi yang terjadi dikategorikan *replacements*. Di mana ketika itu kelompok pembaru masih lemah dan bahkan mungkin tidak ada dalam rezim pemerintahan Orde Baru. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Konservatisme ini terjadi dapat saja dikarenakan keengganan untuk berubah sehingga cenderung mempertahankan *status quo* atau bisa pula dikarenakan *pressure* dari rezim berkuasa Orde Baru. Situasi demikian tentu akan sulit terjadi adanya isu peralihan kepemimpinan nasional yang dimunculkan secara formal dari dalam tubuh pemerintahan rezim Orde Baru sendiri.<sup>27</sup>

## B. Etika Pendidikan

Seperti diketahui bahwa secara mendasar, etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Dilihat dari cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Sebagai

---

mana kelompok pembaru masih lemah atau tidak ada dalam rezim tersebut. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah hingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Demokratisasi yang terjadi dalam gelombang ketiga umumnya merupakan kerja sama dengan penguasa. Hanya enam *replacement* terjadi menjelang tahun 1990. Dalam *replacement*, interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi serta interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstremis berperan penting. Kelompok oposisi pada akhirnya mesti lebih kuat daripada pemerintah, dan kelompok moderat mesti lebih kuat daripada kelompok ekstremis. (3) *ransplacements*, di mana demokrasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Dalam pemerintah itu, keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaru sedemikian rupa, sehingga pemerintah bersedia merundingkan, tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi di mana kelompok konservatif menimbulkan *replacements*. Sekitar 11 dari 35 kasus liberalisasi dan demokratisasi yang dimulai berlangsung pada 1970-an dan 1980-an mendekati model *transplacements*, misalnya Polandia, Ceko, Slovakia, Uruguay dan Korea. Dalam *transplacements*, interaksi utama adalah interaksi antara kelompok pembaru dengan kelompok moderat yang perbedaan kekuatannya tidak begitu timpang dan masing-masing kelompok mampu mendominasi kelompok anti demokrasi yang berada pada masing-masing sisi dari garis pemisah antara pemerintah dengan pihak oposisi. Lihat Huntington dalam Fahri Hamzah: (*Ibid.*, hlm. 7-9).

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa seorang mengikuti suatu ajaran tertentu. Sebagai ilmu, etika dikategorikan menjadi dua jenis: *etika umum* dan *etika khusus*. Etika umum mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah Barat dan Timur, aliran-aliran pemikiran etika tampak beragam. Tetapi, pada dasarnya falsafah tersebut mempelajari asas-asas tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai yang terkandung di dalamnya. Etika khusus dibagi menjadi dua jenis, yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama dianutnya serta panggilan nurani, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap Tuhannya. Sedangkan, etika sosial mengkaji tentang kewajiban serta norma-norma sosial yang sepatutnya ditaati dalam konteks interaksi antarindividu atau antarmanusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial meliputi beberapa cabang secara khusus lagi, seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan etika politik.<sup>28</sup> Jadi, etika pendidikan sebagai cabang dari etika sosial lebih fokus mengkaji kewajiban dan norma-norma dalam proses pendidikan, yakni terutama seorang dalam suatu masyarakat negara (memiliki sistem pendidikan tertentu) berinteraksi secara edukatif dengan individu (terlibat dalam proses pendidikan) dan kelompok lain (seperti orang tua dan masyarakat).

Sekadar mengingatkan kembali di sini pentingnya memahami mengenai arti moral dan etika. Moral merupakan aturan-aturan normatif (dalam Islam dinamakan *akhlak*) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Penerapan tata nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu merupakan bidang kajian antropologi, sedangkan etika merupakan bidang kajian filsafat. Realitas moral dalam masyarakat dijelaskan melalui studi kritis (*critical studies*) yang dibidangi oleh etika. Jadi, studi kritis terhadap moralitas

---

<sup>28</sup>Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013, hlm. 15.

merupakan bidang etika, sehingga moral adalah objek material dari etika.<sup>29</sup> Jadi, akhlak atau moralitas merupakan seperangkat tata nilai yang 'sudah jadi' dan 'siap pakai' tanpa dibarengi dan bahkan terkesan menjauhi kritis. Sedangkan etika, sebaliknya, bertugas untuk mempertanyakan secara kritis rumusan-rumusan masa lalu yang sudah 'baku' dalam masyarakat.

Zakiah Daradjat berpandangan bahwa dalam merespons degradasi moral remaja dan pelajar sebagai produk pendidikan, pentingnya sebuah institusi pendidikan yang secara serius dan terorganisir membina akhlak atau moral anak didiknya. Pembinaan moral meliputi dua hal penting, yakni tindak moral (*moral behavior*) dan pengertian tentang moral (*moral concept*). Tindak moral adalah pembinaan akhlak sejak dini untuk mengarah kepada moral yang baik. Sebab moral tumbuh bersamaan dengan pengalaman langsung dari lingkungan di mana anak-anak hidup, berkembang menjadi kebiasaan, baik dimengerti ataupun tidak. Kelakuan atau perilaku adalah hasil dari pembinaan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, formil atau tidak formil. Pembinaan moral fokus kepada keteladanan pendidik atau orangtua. Sedangkan *moral concept* adalah pengajaran mengenai konsep-konsep akhlak kepada anak didik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada mereka mengenai berbagai akhlak yang baik dalam bergaul dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Seorang tokoh sosiologi pendidikan, Emile Durkheim, dalam pemikiran pendidikan yang dikembangkannya menulis tentang pendidikan moral yang dituangkan dalam bukunya *L'Education Morale; Cours de Sociologie Dispens' a'la Sorbone en 1902-1903*. Menurut Durkheim, moralitas terdiri dari seperangkat aturan dan prinsip-prinsip, karakteristik yang sangat khusus yang membedakan mereka dari aturan dan standar lainnya. Dikatakan bahwa dalam konsep moral terdapat 'hukum' moralitas. Menurut Durkheim dimensi hukum moralitas hanya sebagian kecil daripada apa yang dinamakan fenomena moral. Moralitas dibangun atas tiga elemen

<sup>29</sup>Clyde Kluckhohn, 'Ethical Relativity' dalam 'Ethical Relativism', John Ladd (ed.) dalam Herman Khaeron, 'Etika Politik....', *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>30</sup>Daradjat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1971, hlm. 119.

yakni disiplin, keterikatan sosial, dan otonomi. Disiplin memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter dan kepribadian secara umum.<sup>31</sup>

Memasuki era demokratisasi di Indonesia sejak 1998, menunjukkan situasi berbangsa yang mengalami 'krisis etika sosial' berbangsa di mana tidak selalu simetris dengan spirit reformasi itu. Mantan Presiden RI, B.J. Habibie, mengungkapkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada era Orde Baru, dalam hal sains dan teknologi, tidak kalah dibanding Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari prestasi yang pernah diperoleh Indonesia, terutama ketika berhasil memproduksi pesawat terbang N-250 yang dikatakan Habibie sebagai pesawat terancang di kelasnya pada waktu itu. B.J. Habibie mengungkapkan pula bahwa N-250 menjadi tonggak penting sejarah Kedirgantaraan Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan pada 1995, dan telah tercatat dalam sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Tetapi, karena kebijakan politis pada era Reformasi kemudian yang 'melenceng', pengembangan industri pesawat terbang yang merupakan bagian dari program 'Indonesia Tinggal Landas' itu telah terabaikan dan terhenti. Dampaknya, antara lain terdapat ribuan putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja di Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) di Bandung 'hengkang' ke luar negeri. Dikatakan B.J. Habibie bahwa Indonesia justru kembali terjerumus ke dalam 'penjajahan'

---

<sup>31</sup>Disiplin dan kolektivitas ideal dalam pandangan Durkheim adalah dua karakter dari fakta moral dalam masyarakat. *Elemen pertama, moralitas* adalah disiplin yang memberikan kebebasan dari keinginan yang tak terbatas. Kehidupan kolektif dipahami sebagai sumber dari keseluruhan kehidupan moral yang dipraktikkan dan dipahami dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dengan permintaan untuk memahami keseimbangan moral ideal dengan perbedaan lingkungan serta abstraksi ekspresi ideal dalam kehidupan kolektif secara keseluruhan. *Elemen kedua, moralitas* mengacu pada isi dari moralitas dan Durkheim menyebutnya "Keterikatan pada kelompok-kelompok sosial". Ini berarti bahwa untuk bertindak atas cahaya dari suatu kepentingan kolektif. *Elemen yang ketiga, moralitas* adalah otonomi yang bersangkutan dengan keadaan pikiran agen moral. Ini berarti bahwa pelaku moral harus memahami semua alasan dari tindakannya, benar-benar dan sepenuhnya. Dengan kata lain, elemen ketiga dari moralitas pemahaman. Durkheim melihat otonomi pokok yang membedakan unsur karakteristik moralitas sekuler. Elemen ini mengubah konsep aturan yang merupakan inti dari disiplin moral dan perubahan makna dari keterikatan kelompok sosial. Lihat: (Rahmad Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 114-117).

ala VOC gaya baru, di mana kekayaan Indonesia dialihkan pengolahannya ke negara lain, kemudian setelah menjadi produk bernilai tinggi dijual kembali ke Indonesia. B.J. Habibie mengatakan jangan sampai karena euforia reformasi atau pertimbangan politis sesaat membuat bangsa ini tega 'menghabisi' karya nyata anak bangsa yang tekun dan memiliki spirit patriotisme tinggi, seperti terjadi dengan Pesawat N-250 Gatotkoco. B.J. Habibie mengharapkan ke depan 'jangan sampai pengalaman pahit industri kedirgantaraan terulang lagi, hanya karena kebijakan politik sesaat'.<sup>32</sup> Agaknya, iklim demokratisasi Indonesia terkini mesti diakui sebagai demokrasi 'transisi' yang memperlihatkan 'krisis' etika sosial dalam realitas kehidupan berbangsa.

Di dalam bidang ekonomi, fakta memperlihatkan bahwa bangsa besar ini masih cenderung mengandalkan sumber daya alam (*natural resources*). Di era desentralisasi dalam wujud era Otonomi Daerah, justru proses pembangunan terkesan tanpa kendali. Kekayaan alam, terutama dalam bidang pertambangan dan perkebunan lebih diandalkan pada investor asing. Seharusnya, seperti disinyalir berbagai kalangan, bahwa Indonesia tidak seharusnya terlalu mengandalkan investor asing karena berdasarkan sejumlah penelitian akademis yang kompeten memperlihatkan bahwa eksistensi perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan kurang berpihak dalam hal menyejahterakan rakyat. Untuk posisi-posisi penting tertentu di struktur organisasi perusahaan swasta milik investor asing pun agak sulit diduduki putra-putri terbaik di negeri ini. Pejabat atau *elite formal* di era Otonomi Daerah agaknya terlalu mudah memberi izin dan memberi 'kekuasaan' ekonomi kepada investor asing. Padahal, tentunya dapat dipahami bahwa kebijakan Presiden Soekarno, pentingnya mengambil alih kekuasaan ekonomi dari pihak swasta Belanda, dengan menasionalisasi sejumlah perusahaan milik swasta itu menjadi perusahaan nasional.

---

<sup>32</sup> Seperti pesan pidato disampaikan B.J. Habibie pada acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Lapangan Gedung Sate, Bandung pada 10/8/2012 (*diakses pada 25 Oktober 2012*).

Sebagian *elite* daerah sering 'terjebak' pada perilaku korupsi. Banyak yang bercita-cita menjadi 'raja-raja kecil' di daerah daripada mengabdikan dengan ikhlas dalam memperbaiki harkat dan martabat masyarakat. Jika pada era Orde Baru korupsi dilakukan pada level 'pusat', tersentralistik, dan sistemik; pada era Otonomi Daerah, korupsi justru sering kali memperlihatkan terdesentralistik dan sistemik. Jika tujuan paradigma pembangunan otonomi daerah untuk menghapuskan korupsi di Jakarta, justru perilaku korupsi terjadi pada banyak daerah. Karenanya, tidak hanya aspek kuantitas, kualitas pelaku korupsi pun meningkat. Suatu yang patut disayangkan, dari *Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2013* memperlihatkan bahwa kasus korupsi di sektor pendidikan meningkat pesat dalam kurun dasawarsa (2003-2013). Selama satu dasawarsa telah diungkap 296 kasus korupsi yang menyeret 479 tersangka dengan total nilai kerugian mencapai Rp619 miliar. Angka kerugian negara meningkat empat kali lipat pada 2013 menjadi Rp99,2 miliar jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Puncak kasus korupsi terjadi pada 2007 dengan 84 kasus dan kerugian negara mencapai Rp151 miliar.<sup>33</sup>

Berbagai fenomena sosial tersebut sudah mengarah pada suatu kondisi 'kerapuhan' atau 'krisis' etika sosial dalam berbangsa dan bernegara yang jika terus terjadi dan tanpa terkendali cenderung terjadinya disharmoni sosial dan intoleransi antarsesama. Karenanya, sangat diperlukan upaya penguatan etika sosial dari berbagai elemen terkait dalam proses pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia keseluruhan yang heterogen dan pluralistik. Memang iklim demokrasi dalam makna sesungguhnya tidak dapat diraih dalam waktu singkat, sehingga Indonesia pun mesti menempuh proses 'transisi' dalam berdemokrasi. Untuk memperbaiki itu semua, diperlukan suatu komitmen yang tulus dalam melaksanakan program pembangunan nasional dan otonomi daerah yang telah direncanakan dengan mengedepankan penegakan *cleant government* dan *good governance*. Mendambakan Indonesia Maju harus dimulai pentingnya membangun etika sosial berbangsa pada era 'transisi' demokrasi dengan

---

<sup>33</sup>Jajak Pendapat Kompas: Miskinkan Koruptor Paling Dikehendaki', *Kompas*, 2 Desember 2013.

sungguh-sungguh, yakni, harus dimulai dari kesadaran kolektif berbagai elemen bangsa dengan kebijakan aktual pembangunan nasional dan daerah yang senantiasa berpihak kepada masyarakat keseluruhan tanpa terkecuali. Suatu bangsa tidak pernah akan mengalami kemajuan dan berperadaban apabila anomali sosial mengarah pada 'krisis' etika sosial yang akut terjadi pada negara itu.

Selanjutnya, di era Demokrasi transisi ini, kecenderungan terjadinya proses degradasi, krisis, atau kerapuhan etika sosial dalam bentuk lainnya, berupa kecenderungan kurang intoleransi. Dari hasil survei yang dilakukan lembaga studi *Center of Strategic and International Studies (CSIS)* yang menunjukkan bahwa toleransi beragama orang Indonesia masih rendah. Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips Vermote mengungkapkan kurangnya toleransi bisa dilihat dari penolakan pembangunan tempat ibadah. Mayoritas orang Indonesia bisa menerima tetangga yang beda agama, namun tidak bisa menerima jika ada pembangunan tempat ibadah agama lain di sekitar lingkungannya. Lembaga studi CSIS sudah melakukan survei pada Februari 2012 di 23 provinsi Indonesia. Dari 23 provinsi tersebut ada 2.213 responden yang disurvei. Survei dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan toleransi beragama. Hasilnya, sebanyak 59,5% responden tidak keberatan bertetangga dengan orang yang beda agama. Sedangkan 33,7% lainnya memilih menolak tetangga yang beda agama dengan mereka. Kemudian survei beralih ke pertanyaan soal pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitar lingkungan mereka. Sebanyak 68,2% responden memilih menolak pembangunan tersebut. Sementara 22,1% lainnya mengaku tidak keberatan.

Dengan hasil survei di atas, Philips mengatakan bahwa tingkat toleransi beragama masyarakat Indonesia masih rendah. Tak terkecuali mereka yang berada di tingkat pendidikan yang dikategorikan sudah tinggi. Philips menyimpulkan faktor pendidikan tidak akan menjamin tingginya tingkat toleransi dari orang tersebut. Terbukti dari hasil survei, mereka yang berpendidikan di atas SMA ternyata justru tidak toleran terhadap orang yang beragama lain. Mereka cenderung menolak dan tidak menerima orang beda agama tinggal di lingkungan hidup mereka. Menurut Philips

ini sangat berbeda dengan pandangan negara Indonesia yang demokratis. Padahal toleransi adalah salah satu nilai-nilai demokrasi dalam menghargai perbedaan. Ini masih batu sandungan bagi Indonesia ke depan.<sup>34</sup>

Suatu hal menarik karena jarang terjadi sebelumnya, yakni perilaku korupsi di negeri yang mayoritas sudah mengalami pergeseran paradigma, di mana para pegawai negeri sipil berusia relatif muda justru melakukan korupsi dalam jumlah prestisius. Melalui berita media massa cetak dan elektronik serta internet, telah diramaikan dengan isu korupsi kalangan 'belia' itu yang terutama dilakukan mereka yang berkecimpung di dunia politik atau 'rekening gendut' mereka yang berlatar belakang birokrasi, sebagai pegawai negeri sipil. Terlepas nanti fakta hukum menunjukkan ada yang mengandung kebenaran atau sebaliknya, tetapi paling tidak isu ini layak menjadi perhatian semua elemen bangsa. Karena, adalah suatu yang *mafhum* bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan generasi mudanya. Banyak bangsa di dunia ini menempatkan kebijakan investasi sumber daya manusia (*man power*) pada urutan terdepan dalam pembangunan bangsa.

Para *founding fathers* pun telah menempatkan generasi muda menjadi harapan penting dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh penting di negeri ini, pada awalnya, berasal dari pelajar/mahasiswa/generasi muda yang memiliki talenta, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kerja keras, jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Tetapi, di era Reformasi ini, khalayak dikejutkan dengan 'musibah' di mana justru sebagian kalangan generasi muda terindikasi rawan terhadap perilaku korupsi yang diperlihatkan sejumlah kasus korupsi dalam jumlah miliaran dan triliunan rupiah. Sudah barang tentu adanya slogan: '*Pemuda adalah Harapan Bangsa*' menjadi kontradiktif ketika sejumlah kasus korupsi besar di negeri ini justru di dalamnya melibatkan sebagian kalangan muda.

Sebagai upaya menyelamatkan anak didik, remaja, dan generasi muda dari 'ancaman' berbagai bentuk perilaku menyimpang (*social deviances*) dalam kehidupan berbangsa yang akan datang, pendidikan memiliki

---

<sup>34</sup><http://civicara.com/penelitian-toleransi-antar-agama-di-indonesia-rendah/> (diakses, 4/4/2013).

peranan strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (*man power*) yang diharapkan. Proses pendidikan yang mengedepankan pengembangan potensi anak didik dapat dikembangkan secara optimal, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor--Taxonomi Benyamin Bloom; atau pengembangan 'aql, qolbu, dan jasmani, seperti dalam konsep pendidikan Islam. Proses pendidikan dan pembelajaran di keluarga, sekolah, dan masyarakat, karenanya, sedapat mungkin dikembangkan sedemikian rupa yang secara hierarki berkesinambungan. Selanjutnya, proses pembelajaran edukatif pada lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal; atau di sekolah dan luar sekolah, sesuai dengan falsafah berbangsa—menciptakan anak didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menguasai pengetahuan agama yang berakhlak (imtak), berkeribadian dan berkarakter—merupakan substansi dari proses pendidikan, yang menggambarkan etika pendidikan.

# Bab 2

## ANAK DIDIK, REMAJA DAN PERILAKU MENYIMPANG

Perilaku menyimpang (*social deviance*) pada kalangan pelajar/remaja dan pemuda rawan terjadi. Isu ini menjadi penting ketika adanya indikasi semakin meningkatnya tawuran telah mengorbankan sejumlah “anak muda” sebagai harapan bangsa. Bahkan, akibatnya ada yang telah gugur sebagai “korban” dari sistem sosial edukatif yang tidak menguntungkan yang dapat disebabkan faktor internal sekolah dan eksternal sekolah. Perilaku menyimpang di sebagian kalangan usia muda atau usia remaja terkadang telah mengarah kepada perilaku kekerasan. Zakiah Daradjat<sup>1</sup> menuturkan bahwa usia remaja merupakan umur peralihan dari anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa, di mana permasalahannya tidak sedikit.

### A. Perilaku Menyimpang (*Social Deviance*)

Perilaku menyimpang, sesungguhnya, beragam bentuknya, salah satunya adalah tawuran remaja dan pemuda. Misalnya, pada beberapa waktu lalu, telah terjadi tawuran pelajar yang telah membuat sejarah ‘kelam’ pada dunia pendidikan di tanah air. Pada 2012, Alawy Yusianto,

---

<sup>1</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 145.

pelajar SMA 6 misalnya, meninggal dunia akibat serangan dilakukan pelajar SMA tetangga, SMA 70, di Jakarta Selatan. Dua hari setelah kejadian, masih di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, Deni Yanuar, siswa SMA Yayasan Karya 66, meninggal dunia akibat serangan kelompok pelajar lainnya, ketika turun dari angkutan umum. Hal ini telah menambah angka statistik korban kekerasan pelajar Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak menyebutkan, sepanjang 2012, di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, perkelahian antarpelajar telah menelan korban 17 orang.<sup>2</sup> Tampak bahwa permasalahan kekerasan pelajar yang menjurus pada perilaku kriminal di kalangan pelajar semakin meningkat akhir-akhir ini.

Pada umumnya, tawuran diamati sebagai kenakalan remaja. Ada yang melihat sebagai perilaku bermasalah dan deprivasi sosial, frustrasi agresi, dan ada juga dari perspektif yuridis. Berbagai upaya ditempuh dengan melibatkan kepolisian, dengan hasil belum optimal. Yang terjadi, kekerasan dalam tawuran terus meningkat. Sejumlah penelitian menunjukkan tidak ada korelasi antara pelaku tawuran dan keluarga yang tidak harmonis. Juga, tidak ada korelasi antara siswa terlibat tawuran dan penyalahgunaan narkoba. Justru, untuk menyelamatkan diri dari tawuran, seorang siswa harus punya kesadaran dan kewaspadaan tinggi serta kondisi fisik prima. Jadi, teori yang mencoba menghubungkan pelajar yang terlibat tawuran dari keluarga yang tidak harmonis agaknya menjadi mitos yang salah. Penelitian menunjukkan bahwa baik siswa yang terlibat maupun tidak mengaku memiliki hubungan dekat dengan orangtuanya. Sama halnya, pendapat yang mengatakan bahwa sekolah yang buruk kualitasnya dan berdisiplin rendah sering terlibat tawuran tidak sepenuhnya benar.<sup>3</sup> Hal ini agaknya, dapat dibenarkan mengingat pada kasus tawuran pelajar antara siswa SMA 70 dan SMA 6, Jakarta Selatan merupakan kategori sekolah "papan atas" dalam hal kualitas akademik.

Tampaknya permasalahan tawuran bukan hanya sekadar kenakalan pelajar atau kenakalan remaja. Kriteria kenakalan pelajar terasa tidak

<sup>2</sup>Tempo, Edisi 8-14 Oktober 2012, hlm. 124.

<sup>3</sup>Seperti dikatakan TB Ronny Nitibaskara, "Kompleksitas Tawuran Pelajar", Kompas, 2 Oktober 2012.

terlalu relevan lagi, karena sudah mengarah kepada perilaku kekerasan. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa perilaku kekerasan pelajar ini telah menelan korban sepanjang 2012 dalam jumlah belasan orang di Jakarta. Sudah barang tentu di sejumlah tempat di daerah telah memperlihatkan seringnya tawuran antarpelajar yang terkadang tidak jarang 'menelan' korban. Tentu hal ini tidak hanya meninggalkan duka sedih bagi semua pihak, terutama orangtua dan keluarga yang terkena musibah. Bangsa ini ke depan pun akan dirugikan karena pelajar dan generasi muda merupakan generasi penerus penyambung estafeta kepemimpinan bangsa. Karenanya, masalah tawuran merupakan keprihatinan bagi semua pihak elemen bangsa, sejak dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Dengan mengacu teori Freud, kemungkinan pelaku tidak segan membunuh lawannya merupakan wujud dari *insting-agresif*. *Insting* ini mendorong manusia memusnahkan manusia lain, berupa tingkah laku agresif yang mengandung kebencian, ditandai kepuasan yang diperoleh karena lawan menderita, luka, atau mati, dan yang memberikan kepuasan dengan melihat lawan gagal mencapai objek yang diinginkan. Terdapat perbedaan persepsi dari mereka yang terlibat tawuran tentang kenakalan dan kekerasan pelajar yang mengarah ke premanisme. Pelajar beranggapan bahwa kenakalan yang dilakukan hanya manifestasi simbolis aspirasi mereka karena sering diperlakukan tidak adil. Mereka mencoba mengidentifikasi diri sebagai remaja yang berbeda dari orang di sekitarnya: di sekolah, di jalan, dan di masyarakat. Hal ini merupakan cara mempromosikan diri ketika mereka bertemu dengan teman senasib-sepenanggungan yang kemudian membentuk kelompok (*group*) tertentu.

Sebaliknya, masyarakat lebih menganggap perilaku kekerasan itu sebagai suatu kejahatan dan selanjutnya menuntut diperlakukan sanksi pidana kriminal. Tetapi, suatu tindakan agresi diklasifikasikan tindakan kekerasan sangat bersifat situasional dan dipengaruhi motivasi tindakan. Dalam kriminologi perlu adanya penjelasan kapan tindakan kekerasan dikatakan *deviant* dan kapan dipandang murni perilaku pidana/kriminal. Penggolongan itu sangat terletak pada apakah perilaku kekerasan itu sudah menjadi karakter pelaku dan apakah dalam situasi serupa akan

dilakukan berulang-ulang atau tidak.<sup>4</sup> Dari perspektif hukum, perilaku tawuran tidaklah mudah untuk ditentukan sanksi hukumnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dikenal pertanggungjawaban kolektif. Sanksi lebih ditujukan pada individu. Menjatuhkan sanksi kepada kelompok secara merata hampir sangat tidak biasa. Melihat sifat kolektif tawuran yang begitu kompleks perlu tindakan yang bersumber dari piranti hukum pidana berupa sanksi yang adil dan efektif.<sup>5</sup>

Kekerasan kelompok sering dicoba diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini berbunyi: '*Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan*'. Pasal ini mengandung kendala dan kontroversial. Subjek '*barangsiapa*' menunjuk pelaku satu orang. Sedangkan istilah "*dengan tenaga bersama*" mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik itu, menurut penjelasannya, tidak ditujukan pada kelompok yang tidak turut melakukan kekerasan. Ancaman hanya ditujukan kepada yang benar-benar terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan tawuran. Mengingat suatu kelompok massa, khususnya pelajar unik sifatnya, delik Pasal 170 sukar diterapkan karena banyak pelaku tawuran sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya ikut-ikutan dalam kerumunan. Orientasi lebih ditekankan pada penegakan isi Pasal 170 dengan mempertimbangkan semua aspek yang saling memengaruhi.

<sup>4</sup>Tawuran pelajar tampak mirip gejala premanisme. Kultur ini cenderung terkait dengan masyarakat bawah. Sempitnya lapangan kerja, krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan, mendorong mereka semakin terpinggirkan. Pada level marginalisasi tinggi, mereka berpotensi melakukan perbuatan menyimpang ataupun kejahatan dalam memenuhi kebutuhan. Dewasa ini, perilaku pelajar yang terlibat meniru cara-cara preman, antara lain pencarian pengakuan status dengan menunjukkan ketangguhan, keberanian, dan kenekatan. Pelajar cenderung menganggap tawuran sebagai cara memperoleh pengakuan dan status tinggi serta disegani dalam kelompoknya. Kian tinggi intensitas dan frekuensi dalam tawuran (melakukan pelanggaran hukum) dan kain berat pelanggaran di mata hukum dengan melakukan pemukulan dan penganiayaan, semakin tinggi prestise dan status. Budaya premanisme yang ditiru selanjutnya ialah mitos ketangguhan dan keberanian. Pada nilai ini, yang tampak adalah kehebatan fisik, ditandai kekuatan menanggung pukulan, menerima serangan, hingga diintimidasi polisi dan pihak lain ketika tertangkap akibat tawuran, serta keberanian melakukan perbuatan berisiko dan nekat. Lihat: (T.B. Ronny R. Nitibaskara, *Kompas*, 2 Oktober 2012).

<sup>5</sup>*Ibid.*

Karena masalahnya bukan pada materi hukumnya, faktor psikologis, sosiologis, ataupun budaya harus diperhitungkan.<sup>6</sup>

Perilaku menyimpang dikalangan anak muda (pelajar dan remaja) menjadi penting ketika adanya indikasi semakin meningkatnya tawuran telah mengorbankan sejumlah besar 'tunas muda' sebagai harapan bangsa. Mereka gugur sebagai "korban" dari sistem sosial edukatif yang tidak menguntungkan yang dapat disebabkan faktor internal sekolah dan eksternal sekolah. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai kenakalan remaja.

Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di SLTP maupun SLTA atau usia remaja, bila ditinjau dari segi usianya, sedang mengalami periode yang sangat potensial bermasalah. Periode ini sering digambarkan sebagai "storm" and 'drang' period (topan dan badai). Dalam kurun ini timbul gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Dari situasi konflik dan problem ini remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Salah satu aksesnya, yaitu "tawuran".

Berkaitan dengan agresi, Craig A. Anderson dan Brad J. Bushman dalam penelitiannya *Effect Of Violent Video Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognitiom, Aggressive Affect, Physiological Arousal, And Prosocial Behavior* menemukan bahwa *video game* kekerasan mengajukan suatu ancaman kesehatan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja, khususnya para individu usia mahasiswa di mana *video game* kekerasan berkorelasi positif terhadap tingkat agresi pada usia dewasa muda dan anak-anak. Selain itu, *video game* kekerasan juga berkorelasi positif terhadap mekanisme-mekanisme utama yang mendasari efek-efek jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian yang agresif – kognisi agresif.<sup>7</sup>

M. Brent Donnellan, Kali H. Trzesniewski, Richard W. Robins, Terrie E. Moffit dan Avshalom Caspi dalam penelitiannya *Low Self Esteem*

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Brent, M. Low, "Self Esteem is Related to Aggression, Anti Social Behavior, and Delinquency. Research Article", *American Psychological Society* 2005, pp. 328-335.

is Related to Aggression, Anti Social Behavior, and Delinquency menunjukkan bahwa *self-esteem* bisa meramalkan masalah-masalah pengeksternalisasian di masa depan; anak-anak berusia 11 tahun dengan *self-esteem* yang rendah cenderung meningkat agresinya pada umur 13.<sup>8</sup> Andreas Diekmann, Monika Jung Baeur-gans, Heinz Krassing, Sigrid Lorenz dalam penelitiannya *Social Status and Aggression* menunjukkan bahwa status sosial yang lebih tinggi tidak hanya menghambat respons agresif namun juga dapat memperhebat kecenderungan agresif seseorang, namun penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena perbedaan budaya dapat juga memainkan peran dalam agresi.<sup>9</sup>

Dari perspektif Teori Agresi, suatu perilaku agresi merupakan konsep yang sangat familiar tetapi tampaknya tidak mudah untuk mendefinisikannya. Agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, jika menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut bukan dikategorikan perilaku agresi. Rasa sakit akibat tindakan medis misalnya, walaupun sengaja dilakukan bukan termasuk agresi. Sebaliknya, niat menyakiti orang lain tetapi tidak berhasil, hal ini dapat dikatakan sebagai perilaku agresi.

Perilaku agresi adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Jenis Agresi digolongkan menjadi dua, yaitu (1) agresi permusuhan (*hostile aggression*) semata-mata dilakukan dengan maksud menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresi dalam jenis pertama ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri dan (2) agresi instrumental (*instrumental aggression*) pada umumnya tidak disertai emosi. Perilaku agresi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain selain penderitaan korbannya. Agresi instrumental mencakup perkelahian untuk membela diri, penyerangan terhadap seseorang ketika terjadi perampokan, perkelahian untuk membuktikan kekuasaan atau dominasi seseorang. Perbedaan kedua jenis agresi ini terletak pada tujuan

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 335.

<sup>9</sup>Diekmann, Andreas. "Social Status and Aggression". *The Journal of Social Psychology*, 1996, 136(6), hlm. 761-768.

yang mendasarinya. Jenis pertama semata-mata untuk melampiaskan emosi, sedangkan agresi jenis kedua dilakukan untuk mencapai tujuan lain.

Bentuk perilaku agresi dapat berupa fisik maupun verbal. Agresi yang berbentuk fisik seperti memukul, menendang, melempar, merusak serta bentuk-bentuk lain yang dapat mengakibatkan sakit/luka pada objek atau sumber frustrasi. Sedangkan bentuk agresi yang bersifat verbal seperti mencaci-maki, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata yang kasar/kotor dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya verbal/lisan.

Teori frustrasi-agresi atau hipotesis frustrasi-agresi (*frustration-aggression hypothesis*) berasumsi bahwa bila usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan, akan timbul dorongan agresi yang pada gilirannya akan memotivasi perilaku yang dirancang untuk melukai orang atau objek yang menyebabkan frustrasi. Menurut formulasi ini, agresi bukan dorongan bawaan, tetapi karena frustrasi merupakan kondisi yang cukup universal, agresi tetap merupakan dorongan yang harus disalurkan.<sup>10</sup>

Teori Kualitas Lingkungan<sup>11</sup> menjelaskan bahwa strategi yang dipilih seseorang untuk stimulus mana yang diprioritaskan atau diabaikan pada suatu waktu tertentu akan menentukan reaksi positif atau negatif terhadap lingkungan. Berikutnya adalah teori Kualitas Lingkungan yang salah satunya meliputi kualitas fisik (*ambient condition*). Berbicara mengenai kualitas fisik, beberapa kualitas fisik yang memengaruhi perilaku yaitu: kebisingan, temperatur, kualitas udara, pencahayaan dan warna. Keadaan bising dan temperatur yang tinggi akan memengaruhi emosi para penghuni. Tingginya suhu dan polusi udara paling tidak dapat menimbulkan dua efek, yaitu efek kesehatan dan efek perilaku. Tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi, karena dalam tawuran terdapat perilaku baik fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti dan merugikan orang lain.

Masa usia sekolah dan remaja merupakan masa manusia mencari jati diri. Pencarian tersebut direfleksikan melalui aktivitas berkelompok

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

dan menonjolkan kearoganannya. Yang dinamakan kelompok tidak hanya lima atau sepuluh orang saja. Satu sekolah pun bisa dinamakan kelompok. Kalau kelompok sudah terbentuk, akan timbul adanya semacam ikatan batin antara sesama kelompoknya untuk menjaga harga diri kelompoknya. Maka, apabila kelompoknya diremehkan, perilaku destruktif dan penuh emosional yang akan mudah terjadi. Pada fase ini, remaja termasuk kelompok yang rentan melakukan berbagai perilaku negatif secara kolektif (*group deviation*). Mereka patuh pada norma kelompoknya yang sangat kuat dan biasanya bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan kelompok, umumnya sebagai akibat pengaruh pergaulan atau teman. Kesatuan dan persatuan kelompok dapat memaksa seseorang untuk ikut dalam kejahatan kelompok, supaya jangan disingkirkan dari kelompoknya. Di sinilah letak bahayanya bagi perkembangan remaja, yakni apabila nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebaya adalah nilai yang negatif.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan sosial kolektif remaja dan perilaku agresi yang marak terjadi di daerah perkotaan. Penyebab tawuran kadang tidak jelas. Di sinilah uniknya, sejumlah tindakan preventif penanggulangan masalah tawuran terkesan belum mampu memberi solusi mengenai apa penyebabnya. Mungkin dianggap telah menjadi tradisi. Kadang juga hanya sekadar untuk balas dendam ataupun unjuk kekuatan saja. Tak jarang pula melibatkan penggunaan senjata tajam atau bahkan senjata api, bom molotov, sehingga menimbulkan korban. Aksi-aksi yang dilakukan para pelajar dalam tawuran semakin beringas saja. Selain itu, tawuran juga melahirkan dendam berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya dan sering berlanjut pada tahun berikutnya. Dalam teori agresi, tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi.

Frustrasi terjadi bila seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu cara berespons terhadap frustrasi. Remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustrasi yang berhubungan dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan dan adanya kebutuhan yang harus segera terpenuhi tetapi sulit sekali tercapai. Akibatnya, mereka menjadi mudah marah dan berperilaku agresi.

Frustrasi yang berujung pada perilaku agresi sangat banyak contohnya, salah satunya tawuran pelajar yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar, ada kemungkinan faktor frustrasi ini memberi sumbangan yang positif. Bila banyaknya anak-anak sekolah yang bosan dengan waktu luang yang sangat banyak dengan cara nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan ditambah lagi saling ejek-mengejek yang bermuara pada terjadinya perkelahian. Banyak juga perkelahian disulut oleh karena frustrasi yang diakibatkan hampir setiap saat dipalak (diminta uangnya) oleh anak sekolah lain padahal sebenarnya uang yang dipalak adalah untuk kebutuhan dirinya. Pada mulanya mereka menyatakan bahwa dalam setiap frustrasi selalu menimbulkan perilaku agresi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga "games" ataupun mainan yang bertema kekerasan. Acara-acara yang menampilkan adegan kekerasan hampir setiap saat dapat ditemui dalam tontonan yang disajikan di televisi mulai dari film kartun, sinetron, sampai film laga. Ada pula acara TV yang menyajikan acara khusus perkelahian yang sangat populer di kalangan remaja seperti *Smack Down*, *UFC (Ultimate Fighting Championship)* atau sejenisnya. Walaupun pembawa acara berulang kali mengingatkan penonton untuk tidak mencontoh apa yang mereka saksikan namun diyakini bahwa tontonan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa penontonnya. Model pahlawan di film-film sering kali mendapat imbalan setelah mereka melakukan tindak kekerasan. Hal ini sudah barang tentu membuat penonton akan semakin mendapat penguatan bahwa hal itu merupakan hal yang menyenangkan dan dapat dijadikan suatu sistem nilai bagi dirinya. Dengan menyaksikan adegan kekerasan tersebut terjadi proses belajar peran model kekerasan dan hal ini menjadi sangat efektif untuk terciptanya perilaku agresi.<sup>12</sup>

Craig A. Anderson dan Brad J. Bushman dalam penelitiannya *Effect Of Violent Video Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognitiom, Aggressive Affect, Physiological Arousal, And Prososial Behavior* menemukan bahwa

---

<sup>12</sup>Craig A. Anderson dan Brad J. Bushman, "Effect Of Violent Video Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognitiom, Aggressive Affect, Physiological Arousal, And Prososial Behavior", *American Psychological Society* 2001, pp. 353-359.

*video game* kekerasan mengajukan suatu ancaman kesehatan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja, khususnya para individu usia mahasiswa di mana *video game* kekerasan berhubungan secara positif dengan tingkat agresi yang dipertinggi pada dewasa muda dan anak-anak. Selain itu, *video game* kekerasan berhubungan secara positif dengan mekanisme-mekanisme utama yang mendasari efek-efek jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian yang agresif – kognisi agresif.<sup>13</sup>

Selain model dari yang disaksikan di televisi belajar model juga dapat berlangsung secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang yang sering menyaksikan tawuran di jalan, mereka secara langsung menyaksikan kebanggaan orang yang melakukan agresi secara langsung. Atau dalam kehidupan bila terbiasa di lingkungan rumah menyaksikan peristiwa perkelahian antarorangtua di lingkungan rumah, ayah dan ibu yang sering cekcok dan peristiwa sejenisnya, semua itu dapat memperkuat perilaku agresi yang ternyata sangat efektif bagi dirinya.

Model kekerasan juga sering ditampilkan dalam bentuk mainan yang dijual di toko-toko. Sering kali orangtua tidak terlalu perduli mainan apa yang diminta anak, yang penting anaknya senang dan tidak nangis lagi. Sebenarnya permainan sangat efektif dalam memperkuat perilaku agresif anak di masa mendatang. Permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan yang dapat kita temui di pasaran misalnya pistol-pistolan, pedang, model mainan perang-perangan, bahkan ada mainan yang dengan model Goyloline (alat penggal kepala sebagai hukuman mati di Prancis zaman dulu). Mainan kekerasan ini bisa memengaruhi anak karena memberikan informasi bahwa kekerasan (agresi) adalah sesuatu yang menyenangkan. Permainan lain yang sama efektifnya adalah permainan dalam *video game* atau *play station* yang juga banyak menyajikan bentuk-bentuk kekerasan sebagai suatu permainan yang mengasikkan.

Teori Kualitas Lingkungan dilihat dari kualitas lingkungan sekolah setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi tingkat kerawanan sekolah. *Pertama*, faktor kondisi fisik sekolah, seperti berdekatan dengan pusat-pusat hiburan/keramaian, kurangnya sistem pengamanan lingkungan, serta tidak

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

tersedianya sarana-prasarana yang membuat anak-anak betah belajar di sekolah. *Kedua*, faktor psiko-edukatif, yaitu ketertiban dan kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah. *Ketiga*, faktor efektivitas interaksi edukatif di sekolah. *Keempat*, dari manajemen rumah tangga yang tidak efektif. Pola asuh yang tidak tepat (pola asuh keras menguasai maupun pola membebaskan) serta hubungan yang tidak harmonis antar anggota keluarga dapat menyebabkan anak tidak betah di rumah dan mencari pelampiasan kegiatan di luar bersama teman-temannya. Hal ini tidak jarang menyeret mereka kepada pergaulan remaja yang tak sehat, seperti tawuran atau perkelahian.<sup>14</sup>

Kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak berkualitas, tidak nyaman dan tidak layak, akan memengaruhi remaja dalam menyikapi dan membangun hubungan dengan dunia sekitarnya. Bagi remaja yang hidup di tempat kumuh dan kotor kemungkinan besar mereka tidak akan nyaman tinggal di rumah sehingga akan melarikan diri dari kenyataan. Pada kondisi inilah remaja mudah tergiur untuk berbuat menyimpang karena lepas dari norma dan pengawasan di rumah. Remaja yang tidak merasa dihargai, tidak dipahami, dan tidak diterima seperti apa adanya oleh orangtua di rumah juga akan cenderung untuk lari dari situasi nyata. Dalam kondisi ini remaja yang secara psikologis mudah goyah dalam pendirian akan mudah terangsang untuk berperilaku menyimpang.

## **B. Remaja, Pemuda dan Korupsi**

Daniel Dhakidai mengungkapkan bahwa korupsi lebih bertalian dengan perkembangan modern terbesar, yakni birokrasi dan kapitalisme, atau modal dan birokrasi, tergantung mana yang lebih dahulu berada dalam suatu masyarakat tertentu. Modal pada masa kolonial berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan birokrasi negara, sehingga, perkembangan birokrasi terutama untuk menunjang modal. Ketika pemerintah kolonial Belanda diusir, modalnya dinasionalisasi pada akhir tahun 1950-an. Birokrasinya yang didukung oleh hukum administrasi juga diambil

---

<sup>14</sup>Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan, S2/S3 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang*, 2014.

alih. Dengan pengambilalihan modal dan birokrasi terjadi penumpukan kekuasaan luar biasa besar dan di luar kendali siapa pun.<sup>15</sup>

Hal ini menjadi dasar dari apa yang disebut Richard Robinson sebagai modal yang berada dalam tangan birokrat –dikuasai kalangan birokrat— dan tidak akan pernah berlangsung tanpa ‘persetujuan’ kalangan birokrat. Dalam perkembangannya, hal itu, menjadi sistem dan menjadi *bureaucratic capitalism* yang beranak-pinak pada masa Orde Baru. Ketika semuanya menjadi kapital, maka korupsi tidak pernah lagi menjadi ‘pencurian subsistem’ tetapi seperti dikatakan Richard Robison dalam bukunya: *Indonesia: The Rise of Capital* yang dua puluh tahun lalu, *The Expropriation of The State Resources by Its Own Servents*.<sup>16</sup>

Pada 1950-an, yang dinamakan korupsi oleh seorang pejabat negara dan menjadi bahan berita media massa ketika itu penggelapan beberapa ratus rupiah untuk ‘merenovasi kandang mobil’ atau garasi. Secara kuantitatif nilai uang sejumlah itu kurang berarti, dan secara kualitatif, hanya berada sedikit di atas pencurian subsistem—dengan pengertian garasi telah menjadi ‘kebutuhan hidup’ sang pejabat. Tetapi, ketika seorang Direktur Pertamina tidak mampu mempertanggungjawabkan utang perusahaan ini sejumlah sepuluh juta dolar AS pada 1975, peningkatan

<sup>15</sup>Sehingga, birokrat militer dan sipil pascaperang dalam tempo singkat menjadi pemilik modal yang tidak pernah dipupuknya. Menjadi penguasa *financial capital* yang tidak pernah disimpannya; menjadi tuan atas barang/benda (*economic goods*) yang tidak pernah menjadi barang dagang miliknya. Karenanya, modal Belanda menjadi ‘harta kekayaan’ pihak pribumi. Yang terjadi di sini *capital* tidak dilihat sebagai modal, tetapi sebagai *wealth* di tangan pribadi-pribadi atau kolektif sebagai kumpulan pribadi-pribadi dan karena itu konsumsi atasnya diumbar tanpa kendali. Korupsi bukan dimulai pada waktu itu, tetapi pada masa itu memberi peluang awal terbesar yang pernah ada dalam sejarah bangsa ini untuk perilaku korupsi yang tak terkendali sampai berdasawarsa nantinya. Lihat: (Daniel Dhakidae, ‘Kapital, Korupsi, dan Keadilan’, *Prisma*, Volume 32, 2013, hlm. 84-87).

<sup>16</sup>Jika dalam masyarakat sederhana/primitif ada ‘pencurian subsistem’, maka di sini terjadi perkembangan berlipat ganda berbeda secara kualitatif, yakni berupa ‘penjarahan sumber daya negara oleh para abdi negaranya’, dan inilah korupsi *in optima forma*. Letak perbedaan kualitatif itu, adalah ‘pencurian subsistem’ memiliki motivasi dalam upaya pembelaan hidup sendiri-sendiri atau kolektif. Sementara itu, dalam ‘penjarahan sumber daya negara oleh para abdi negaranya sendiri’ kehidupan orang lain dihancurkan. Modal dan/atau kekayaan diambil alih bagi kepentingan hidup sendiri yang berakumulasi menuju tujuh keturunan. Lihat: (Daniel Dhakidae, ‘Kapital, Korupsi, dan Keadilan...’, *op.cit.*, hlm. 86-87).

kuantitatif itu sekaligus menjadi peningkatan kualitatif, dalam pengertian, jauh berada di atas kebutuhan hidup karena membangun kehidupannya sendiri dengan mematikan sejuta kehidupan orang lain.<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul perilaku korupsi pada suatu negara tidak terlepas dari konteks sosio-historis. Sama halnya, fenomena 'budaya' korupsi di tanah air merupakan sistemik dan bermula ketika peralihan 'transisi' kekuasaan dari kolonial Belanda ke bangsa Indonesia, seperti diungkapkan Daniel Dhakidae. Karena korupsi sangat merugikan orang banyak atau rakyat dan menjadikan suatu bangsa sulit mengalami percepatan menjadi maju, maka para remaja dan generasi muda mestilah dijauhkan dari bahaya korupsi. Dari perspektif agama sangat dilarang dan dari perspektif sosial pun sangat merugikan individu pelaku dan masyarakat luas. Inilah pentingnya anak didik, remaja, dan pemuda memahami bahaya perilaku korupsi, karena merekalah yang akan mengemban tugas dalam 'estafeta' kepemimpinan yang akan datang.

Suatu fenomena yang menarik karena jarang terjadi sebelumnya, bahwa perilaku korupsi di negeri ini sudah mengalami pergeseran paradigma, di mana para pegawai negeri sipil berusia relatif muda justru melakukan korupsi dalam jumlah prestisius. Melalui media cetak dan elektronik serta internet, telah diramaikan dengan isu korupsi kalangan 'belia' itu yang terutama dilakukan mereka yang berkecimpung di dunia politik atau 'rekening gendut' mereka yang berlatar belakang pegawai negeri sipil. Terlepas nanti fakta hukum menunjukkan ada yang mengandung kebenaran atau sebaliknya, tetapi paling tidak isu ini layak menjadi perhatian semua elemen bangsa. Karena, adalah suatu yang *mafhum* bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan generasi mudanya. Banyak bangsa di dunia ini menempatkan kebijakan investasi sumber daya manusia (*man-power*) pada urutan terdepan dalam pembangunan bangsa.

---

<sup>17</sup>Ketika seorang mendengar adanya korupsi senilai puluhan triliun pada era Reformasi, ini juga bermakna terjadi peningkatan berlipat ganda secara kuantitatif dan kualitatif dibandingkan 'kasus' Pertamina pada 1975, untuk tidak perlu disejajarkan dengan korupsi renovasi 'kandang mobil' pada 1950-an. Dalam konteks itu, korupsi pada masa Reformasi merupakan korupsi absolut karena terjadi peningkatan kuantitatif yang melipatgandakan perubahan kualitatif dan menjadikannya sesuatu yang sistematis. (*Ibid.*, hlm. 87).

Para *founding fathers* pun telah menempatkan generasi muda menjadi harapan penting dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh penting di negeri ini, pada awalnya, berasal dari pelajar/mahasiswa/generasi muda yang memiliki talenta, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kerja keras, jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Tetapi, di era Reformasi ini, kita dikejutkan dengan 'musibah' di mana justru sebagian kalangan generasi muda terindikasi rawan terhadap perilaku korupsi yang diperlihatkan dalam sejumlah kasus korupsi dalam jumlah miliaran dan triliunan rupiah. Sudah barang tentu adaya slogan: "*Pemuda Adalah Harapan Bangsa*" menjadi kontradiktif ketika sejumlah kasus korupsi besar di negeri ini justru di dalamnya melibatkan kalangan muda.

Ternyata setelah hampir 14 tahun era Reformasi (1998-2014), perilaku korupsi semakin memburuk. Berdasarkan hasil survei pada 2010 memperlihatkan bahwa Indonesia menempatkan peringkat ke-1 terkorup dari 10 negara ASEAN yang disurvei. Buruknya peringkat korupsi ini berkorelasi pula terhadap peringkat ke-2 negara terburuk kinerja birokrasi dari 10 negara yang di survei. Beberapa fenomena menarik yang masih hangat diperbincangkan, di mana kasus-kasus tersebut disinyalir kuat dengan indikasi korupsi. Diungkapkan Syed Hussein Alatas dan Michael Johnston, korupsi terungkap dalam sejumlah perilaku, antara lain penyuapan, pemerasan, penggelapan, manipulasi, persekongkolan atau kolusi, dan nepotisme. Dalam praktiknya, bentuk perilaku korupsi tersebut memiliki sebutan tersendiri.

Dalam perspektif sosiologi korupsi, suatu perilaku korupsi memiliki sejumlah unsur. Unsur-unsur dimaksudkan, antara lain: *pertama*, perilaku itu terjadi dalam bidang penggunaan kekuasaan yang pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan bagi kekuasaan tersebut. *Kedua*, perilaku yang menyimpang dalam menggunakan kekuasaan itu dilakukan dalam penuh kerahasiaan—ketika melakukan korupsi tidak diketahui orang lain dan tidak ada bukti-buktinya. *Ketiga*, penyimpangan penggunaan kekuasaan itu bersifat mendua. Dari luar, penggunaan kekuasaan terlihat wajar, tetapi pada saat bersamaan justru memperlihatkan sebaliknya, dalam hubungan antara pemegang kekuasaan dengan anggota (masyarakat, staf/karyawan). *Keempat*, mereka yang

terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan itu mendapat keuntungan, terutama prestasi berupa uang; di sisi lain, tampak terjadi kontraprestasi di mana kecenderungan buruknya kinerja dan pelayanan. *Kelima*, mereka yang terlibat korupsi berusaha saling memengaruhi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, sebagai akibat dari perilaku korupsi itu masyarakat/negara/instansi mengalami kerugian, baik berbentuk politis, ekonomis, dan psikologis.

Persepsi selama ini staf/karyawan pada lapisan bawah melakukan korupsi paling berbahaya dan serius. Tindakan korupsi pun banyak ditujukan terhadap mereka yang berada pada lapisan ini. Sering kali, mereka yang berada pada lapisan menengah ke atas atau lapisan elit sangat sedikit tersentuh oleh tindakan hukum atas korupsi. Mereka yang berada pada lapisan menengah ke bawah kadang kala dianggap “pembangkang”, mereka dianggap melakukan perilaku korupsi tanpa persetujuan atau pengetahuan elit-atasan (pimpinan, manajer). Karenanya, kelompok lapisan kedua ini paling banyak menjadi “korban”. Sebagai pihak yang bersalah dalam suatu kasus korupsi, kelompok lapisan kedua ini cenderung memiliki kultur dan sikap *ewuh pakewuh* terhadap elit-atasan. Mungkin dikarenakan sudah banyak menerima bantuan jasa atas kebaikan karier dan materi dari atasan, atau bisa juga karena merasa takut kalau adanya ancaman dan sanksi tertentu dari atasan yang memiliki jaringan birokrasi dan politik yang luas. Di sini, elit-atasan berposisi sebagai *superordinate* dan lapisan bawahan sebagai *subordinate*, yang sering tak berdaya dalam banyak hal, meskipun harus siap sebagai “korban” kasus korupsi.

Bila jauh sebelumnya mereka yang berada pada lapisan bawah, *subordinate*, sering dinyatakan bersalah dan harus dihukum karena korupsi. Dalam perkembangannya, terutama setelah memasuki era Reformasi (sejak 1998) sejumlah kasus korupsi di tanah air justru menunjukkan sebaliknya, mengarah pada adanya keterlibatan secara kolektif, *berjemaah*. Era Reformasi, dengan *plus-minus*-nya, telah berdampak positif terhadap penegakan hukum di negeri ini. Hal ini sekaligus telah mengubah “paradigma lama” bahwa pelaku korupsi cenderung dilakukan mereka yang berada pada posisi lapisan bawah telah mulai berubah ke arah “paradigma baru”, bahwa korupsi dilakukan secara kolektif.

Kompleksnya penanganan perilaku korupsi di negeri ini dikarenakan melibatkan multidimensi, dan lebih dari itu keterkaitan erat dengan *life style* seseorang. Dari dimensi sosial-ekonomi, misalnya adanya tuntutan dari keluarga untuk menaikkan kebutuhan. Adanya keinginan besar untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan tanpa kerja keras. Impian ini, bisa saja dapat mendorong seseorang memperoleh sesuatu "pendapatan tambahan" dengan 'jalan pintas', yang tidak jarang sebagian dari mereka tampak berbenturan dengan norma, etika dan aturan berlaku pada suatu instansi, yang akhirnya dikategorikan perilaku korupsi.

Perilaku korupsi yang dilakukan seorang dapat saja dimotivasi oleh gaya hidup (*life style*) yang mengarah ke perilaku individu, yang dapat berawal dari motif internal maupun eksternal. Motif memenuhi kebutuhan pribadi secara berlebihan, *unrealistic*, dan tidak seimbang dengan pendapatan atau gaji dapat berdampak pada perilaku negatif, termasuk perilaku 'jalan pintas' sebagai cikal-bakal perilaku korupsi. Akan berbahaya lagi bila *gaya hidup* yang cenderung *hedonism-materialistic*, ingin lebih unggul dari orang lain, tidak menyukai bila ada orang yang lebih dalam hal tertentu, juga akan lebih mempermudah berperilaku negatif dan jalan pintas. Para ahli psikologi-sosial, menyebut seorang berperilaku demikian itu dengan istilah *melinging*, yakni suatu gejala gangguan mental atau fisik untuk memalsukan atau melebih-lebihkan untuk memperoleh keuntungan sekunder, seperti keuntungan uang (diambil dari uang instansi/perusahaan) dengan cara ilegal untuk kepentingan pribadi. Dan yang berpendapat bahwa seorang yang pengalaman masa kecilnya kurang tercukupi secara materi, bisa pula melakukan korupsi untuk mengangkat status sosial.

Akan tetapi, suatu hal negatif dilakukan berulang-ulang demi keuntungan tertentu (materi misalnya), maka korupsi dapat dipandang sebagai pandangan positif. Korupsi juga dapat mendatangkan keuntungan materi (uang) yang dapat menyejahterakan pribadi keluarga. Dalam bidang politik, korupsi dapat menurunkan resistensi oposisi dengan tindakan suap. Seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi juga dapat melakukan 'jalan pintas' dengan *ngepek*, yang dilakukan berulang-ulang di mana sebagai cikal-bakal tumbuhnya perilaku korupsi pada bersangkutan agar lulus ujian dengan nilai memuaskan. Ketika perilaku

perilaku demikian secara berulang dilakukan tanpa dibatasi oleh aturan dan sanksi yang ditegakkan, maka cikal-bakal dan 'akar' budaya korupsi akan tumbuh. Di sini, korupsi dipandang sebagai hal yang biasa dan positif bagi kehidupan.

Sementara itu, kalangan *moralis*, memandang korupsi sebagai parasit, dalam bidang ekonomi dapat menimbulkan biaya yang tinggi karena *mark-up*; langkanya barang kebutuhan masyarakat; rendahnya kualitas barang; diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan proyek pembangunan; dan menguatnya sikap primordialisme kelompok. Secara sosial, korupsi dapat menjangkit ke masyarakat luas; muncul sikap apatis; kesenjangan sosial; munculnya potensi konflik; dan tindakan kriminal.

Perilaku korupsi sesungguhnya sangat tergantung cara pandang seseorang tentang korupsi, bisa positif dan negatif. Cara pandang tentang korupsi itu akan membentuk *gaya hidup* seseorang dan kelompok yang akan menentukan sejauhmana perilaku akan mungkin terjadi. Semakin seseorang memandang korupsi suatu hal yang negatif, kecil kemungkinan melakukan korupsi. Semakin seseorang memandang korupsi sebagai suatu hal yang biasa dan positif, perilaku korupsi akan semakin meningkat dan bahkan bisa menjadi budaya. Akar budaya korupsi pada usia remaja dan pemuda akan dapat diminimalisir apabila mereka mengedepankan *gaya hidup* yang realistik, kesederhanaan, menjauhi hedonisme, menjunjung disiplin dan kejujuran.

Sebagai upaya preventif agar generasi muda terhindar dari perilaku korupsi kelak, demi menuju kemajuan bangsa ke depan, setidaknya ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian: *Pertama*, perlunya kesadaran orang tua, sekolah/institusi pendidikan dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter yang sedang didengungkan pemerintah, sebagai cikal-bakal pembentukan kepribadian anak didik yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, kerja keras dan moral. Bangsa ini membutuhkan anak didik yang tidak hanya memiliki talenta-intelektual tetapi membutuhkan moralitas, *akhlakul karimah*, yang tercermin dalam niat, pikiran, lisan, dan tindakan.

*Kedua*, pelaksanaan pendidikan nasional tidak sepenuhnya sudah sempurna, karena itu, perlu pembenahan seiring dengan dinamika

masyarakat di tengah perubahan sosial. Ujian Nasional (UN) yang sering diperdebatkan sejumlah kalangan, sarat dengan *target-target* tanpa memerhatikan *proses* perlu dibenahi, karena dalam pelaksanaannya tampak 'misterius' yang cenderung mengorbankan etika profesional pendidik. Anak didik juga terkondisi jauh dari jujur, disiplin, kerja keras, tapi cenderung santai, sebagai cikal bakal tumbuhnya mentalitas dan 'potensi' perilaku korupsi.

Ketiga, persoalan-persoalan korupsi perlu menjadi perhatian serius dan prioritas kebijakan pemerintah. Ke depan, tidak mungkin kasus korupsi akan dapat direduksi seoptimal mungkin apabila elemen pemerintah lemah dan tidak berdaya dalam memberantas mafia korupsi. Kemajuan bangsa ke depan sangat tergantung dengan sejauh mana keberanian pemerintah dan masyarakatnya dalam memberantas potensi perilaku korupsi demi menuju masa depan Indonesia yang lebih maju ke depan. Anak didik sedini mungkin harus sejauh mungkin terhindar dari potensi perilaku korupsi dan dampak buruknya.<sup>18</sup>

Pemahaman perilaku korupsi menjadi penting bagi remaja, pelajar, dan generasi muda serta mahasiswa, karena, perilaku korupsi di negeri ini sudah akut dan mengkhawatirkan, bahkan sudah dianggap salah satu negara terkorup di dunia, sekaligus sebagai negara terkenal dengan religiusitasnya. Tetapi, bangsa ini telah terlanjur 'populer' dengan korupsi dan budaya 'jalan pintas' dan 'budaya curang' yang telah endemik dan sistemik. Di satu sisi, akhir-akhir ini, tingkat keberagaman umat Islam di tanah air meningkat drastis: bertambahnya rumah ibadah (masjid), jumlah jemaah haji, majelis taklim, pengajian, dan wirid remaja. Di sisi lain, perilaku demoralisasi dan krisis akhlak dan etika meningkat pula. Seakan, belum terlalu kuat korelasi antara meningkatnya perilaku keagamaan dengan peningkatan akhlak dan etika sosial dalam kehidupan berbangsa.<sup>19</sup> Agaknya, di sinilah peran penting ajaran agama atau religiusitas individu

---

<sup>18</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan, S2/S3 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2014.

<sup>19</sup>Sofyan Hadi, 'Islam Melawan Korupsi', *Dakwah Transformatif*, Editor: Mujtaba Hamdi. Pengantar: Lilis Nurul Husna, Jakarta: PP LAKPESDAM NU, 2006, hlm. 83-84.

dan umat dalam mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam peran, status, dan kedudukan (mereka) berbeda dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Dari perspektif ajaran Islam, sebetulnya, sudah jelas tentang konsep harta kekayaan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menyebut harta, uang atau kekayaan yang bersifat materi dengan sebutan *mal*, yang secara harfiah berarti cenderung atau senang. Penamaan itu menyiratkan pengertian bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan dan keinginan memilikinya. Seperti tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran: 14:

*Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita, anak laki-laki, harta yang tak berbilang lagi berlipat ganda dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*

Dalam QS Ali 'Imran: 14 tersebut, ditegaskan Allah Swt. bahwa salah satu yang dijadikan indah bagi manusia, sehingga manusia memiliki kecenderungan dan kesenangan untuk memilikinya berupa harta yang berlebih.<sup>20</sup> Di samping Allah Swt. menyebut harta benda dengan sebutan *mal*, dia juga menggunakan sebutan *khair* (QS al-Baqarah: 180). *Khair*, secara harfiah berarti baik. Agaknya disebutnya harta benda dengan istilah *khair* memiliki arti bahwa harta bukan saja dianggap baik oleh Allah Swt. dan manusia perlu memilikinya, tetapi juga berarti bahwa harta pun mesti diperoleh melalui cara yang baik dan digunakan dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga harta benda itu sungguh membawa kebaikan bagi pemiliknya. Karenanya, Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

<sup>20</sup>Kata *al-qanathir* adalah bentuk jamak dari *qinithar*. Ada yang mengartikan *qinithar* dalam bilangan tertentu, seperti 100 kilogram, atau uang dengan jumlah tertentu, dan ada juga yang tidak menetapkan jumlah. *Qinithar* berdasarkan pendapat yang kedua ini adalah timbangan tanpa batas, yang berupa sejumlah harta yang menjadikan pemiliknya dapat menghadapi kesulitan hidup dan membelanjakannya guna meraih kenyamanan bagi diri dan keluarganya. Kata *muqanatharah* adalah pelipatgandaan dari *al-qanathir*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa betapa kecintaan manusia terhadap harta sangat besar dan luar biasa. Bukan saja satu *qinithar*, yakni jumlah yang terbatas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi malah *qanathir*, yakni banyak *qinithar*, bahkan bukan hanya banyak, yang banyak itu pun berlipat ganda, yakni menjadi *muqanatharah*. Lihat penjelasan dalam tulisan: (Sofyan Hadi, 'Islam Melawan Korupsi....', *op.cit.*, hlm. 84).

*Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (salah), dan kamu membawanya kepada hakim supaya kamu mengambil harta orang lain dengan cara dosa sementara kamu mengetahui.*

Kata *batil* memiliki makna mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan Allah Swt. Mengambil harta orang lain dengan cara *batil* ada dasarnya telah merugikan orang lain.<sup>21</sup> Bentuk mengambil harta orang lain, dapat berupa mencuri, merampok, dan yang masih populer kini berupa korupsi. *Mencuri* bisa dilakukan secara individu dan kelompok; *korupsi* sering kali dilakukan berkelompok, berjemaah, sistematis, dan yang rugi bisa individu, kelompok, perusahaan, dan negara. Dampak selanjutnya, korupsi bisa memiskinkan rakyat dalam jumlah besar. Kalau begitu, korupsi sangat berbahaya, pantaslah bila Al-Qur'an telah mengingatkan agar menjauhinya. Bisa saja, karena angka korupsi di negeri ini sangat tinggi, berdampak pada masih tinggi pula angka kemiskinan.

Jadi, Islam sebetulnya sangat mendambakan kebaikan bagi umatnya, dengan memberi tuntunan bagi umatnya agar terhindar dari perilaku merugikan orang lain, seperti korupsi. Pelajar, remaja, pemuda dan mahasiswa, karenanya, perlu dididik jujur. Nabi diutus ke dunia juga untuk memperbaiki akhlak umat manusia, salah satunya pentingnya memiliki sifat jujur. Karena kejujurnya Nabi, beliau disebut *al-amin*. Pelajar, remaja, pemuda dan mahasiswa merupakan salah satu elemen usia produktif bangsa ke depan, mesti diarahkan dengan mengedepankan kejujuran. Tidak ada makna apa pun mereka menjadi cerdas secara akademik tetapi lemah dalam hal kejujuran integritas. Dipastikan, di era global memerlukan bekal kehidupan yang sama kuatnya antara pentingnya memiliki cerdas pengetahuan dan teknologi dan cerdas *sains-agama/spiritual*. Sebagai generasi masa depan, disadari atau tidak, mereka harus siap menggantikan dan meneruskan estafeta kepemimpinan dalam berbagai level dan proporsinya. Dalam memimpin, dalam ajaran Islam, seorang *leader*, perlu mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (profesional), dan *fathanah* (cerdas).

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

Kenyataan, memang memperlihatkan bahwa terdapat banyak perilaku menyimpang (*social deviance*) lainnya yang bisa terjadi pada sebagian anak didik dan generasi muda. Seperti, pergaulan bebas, kebut-kebutan di jalan raya, minuman keras dan *oplosan*, narkoba, dan berbagai tindakan kriminal (pencurian, perampokan dan pembunuhan). Hal ini akan berkonsekuensi terhadap masa depan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Di sinilah, pentingnya intervensi berbagai elemen masyarakat (orangtua, sekolah, masyarakat, tokoh agama dan pemerintah) yang memiliki tanggung jawab terdepan, dalam tugas dan porsi yang berbeda, terhadap keselamatan mereka, agar mereka dapat menjadi 'tunas bangsa' yang sehat jasmani dan rohani: berilmu pengetahuan, berketerampilan, berkepribadian, dan bertakwa terhadap Allah Swt., sebagai proses manusia seutuhnya. Di sinilah, urgensi penanaman nilai-nilai ajaran agama (di keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah), tradisi budaya leluhur yang positif dalam warisan nenek moyang bangsa ini. Intervensi kebijakan pemerintah/negara, melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka, tentunya sangat diharapkan. Menyelamatkan masa depan mereka secara tidak langsung adalah menyelamatkan masa depan bangsa, karenanya pemerintah mestinya berjanji bersama publik untuk menegakkan moralitas antikorupsi.<sup>22</sup>

### C. Remaja, Pemuda dan Ajaran Agama

Usia remaja merupakan umur peralihan dari anak menuju dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir dalam pembinaan kepribadian atau masa persiapan usia dewasa. Pada masa remaja, anak mengalami permasalahan yang kompleks. Dari waktu ke waktu problem usia remaja semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial sebagai dampak dari kemajuan sains dan teknologi pada suatu negara, tidak terkecuali di tanah air. Akan tetapi, dari sekian banyak permasalahan anak usia remaja dan pemuda, Zakiah Daradjat<sup>23</sup> mengungkapkan bahwa permasalahan anak usia remaja dan pemuda dapat diklasifikasikan menjadi:

<sup>22</sup>Seperti diungkapkan Zainal Arifin Mochtar, 'Berdiri Bersama Memberantas Korupsi', *Kompas*, 11 Februari 2015.

<sup>23</sup>Zakiah Daradjat, 'Ilmu Jiwa Agama', *op.cit.*, hlm. 145-147.

*Pertama*, permasalahan masa depan. Setiap remaja akan mendambakan masa depan yang lebih baik dengan penuh kepastian. Setelah tamat sekolah atau studi di universitas, seorang anak atau remaja/pemuda akan berpikir dan berusaha di mana akan mengabdikan ilmunya yang diperoleh. Akan tetapi, antara cita-cita (*ideal*) dengan realitas kehidupan (*actual*), atau antara *das sein* dengan *das sollen*, tidak selalu sejalan. Di sinilah, sering kali, seorang remaja dan pemuda, sekalipun terdidik, akan mengalami tantangan dan cobaan yang tidak jarang akan terjadi kecemasan akan masa depannya. Terlebih bagi remaja dan pemuda yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu serta timbul adanya rasa tertekan pada dirinya. Keadaan ini akan memudahkan mereka untuk berperilaku yang negatif yang dikenal dengan kenakalan remaja, terjerumus pada narkoba, kekerasan dan kriminal.

*Kedua*, permasalahan bertalian dengan keluarga/orangtua. Sering kali ditemukan permasalahan adanya pertentangan anak remaja atau pemuda dengan orangtua. Kadang-kadang hubungan yang tidak baik itu muncul karena pengaruh eksternal anak yang kurang edukatif, di mana misalnya anak mengikuti arus dan mode: rambut gondrong, pakaian kurang sopan, bertato, lagak lagu, *geng* motor/mobil, dan tidak hormat terhadap orang yang lebih tua. Ada remaja yang kurang semangat belajar, menjadi nakal, melawan orangtua, merusak barang-barang berharga di rumah, merusak aset negara, lari dari rumah, dan benci terhadap orangtua, dan bahkan melalui media massa diberitakan pula bahwa anak remaja dan pemuda telah membunuh orangtuanya.

*Ketiga*, permasalahan bertalian dengan moral dan agama. Di kota-kota besar dampak terhadap sentuhan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar dan hubungan langsung dengan orang asing (turis) yang datang dengan beragam sikap dan kelakuan. Biasanya kemerosotan moral diikuti dengan sikap menjauh terhadap agama. Nilai-nilai moral yang tidak didasarkan dengan agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah itu akan berakibat kegoncangan pula bagi diri anak usia remaja dan pemuda, yang mengakibatkan mereka merasa hidup tanpa pegangan pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah adalah nilai

agama itu absolut dan berlaku sepanjang zaman dan tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan. Karenanya, orang yang kuat keyakinan beragamanyalah yang mampu mempertahankan nilai agama yang absolut dalam kehidupan sehari-harinya dan tidak terpengaruh oleh arus kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat dan menjaga ketenangan jiwanya.

Zakiah Daradjat<sup>24</sup> mengungkapkan bahwa problema remaja dan pemuda sesungguhnya sangat banyak yang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Daradjat menganjurkan pentingnya upaya pembinaan anak usia remaja, pemuda dan mahasiswa. Membina kehidupan beragam di sekolah/universitas. Sasaran pembinaan kehidupan beragam di sekolah dan kampus adalah usia muda dalam pertumbuhan, yakni mereka yang berada pada umur akan dan sedang pembinaan terakhir. Kalau di perguruan tinggi umur mereka berkisar 18-24 tahun. Pemuda dalam usia tersebut dikelompokkan pada usia remaja dan dewasa muda. Mereka bukan lagi anak-anak, yang selalu dapat dinasihati, dididik dan diajarkan dengan mudah. Mereka juga bukan orang dewasa yang dapat dilepaskan untuk bertanggung jawab sendiri atas pembinaan pribadinya, tapi mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk memperoleh kedudukan sosial yang diinginkan, dan bertarung dengan beragam persoalan hidup untuk memastikan diri, serta mencari pegangan untuk menentramkan batin dalam proses kehidupan yang kompleks.

Keadaan remaja dan pemuda usia yang khas dan unik di mana mereka sedang belajar di perguruan tinggi memerlukan perhatian dalam upaya membawa mereka kepada penghayatan agama, yang akan menjadi bekal hidup yang abadi bagi mereka. Tidak cukup rasanya dengan cara memikirkan dengan cara dan metode pendidikan agama saja, tapi, diperlukan juga pengalaman dan pengertian yang mendalam terhadap mereka secara individu maupun kolektif. Selanjutnya, barulah perlu dipikirkan metode dan cara menghadai mereka, sehingga seorang guru/dosen diharapkan dapat membuat mereka merasa perlu hidup beragama, mencari solusi dan berusaha untuk lebih mengetahui dan mengerti

---

<sup>24</sup>Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama', *op.cit.*, hlm. 147.

ajaran agama yang digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi.<sup>25</sup>

Tidak sederhana cara atau metode yang tepat dan baik yang digunakan terhadap mereka, namun, setidaknya ada beberapa pertimbangan atau konsideran.

*Pertama*, menunjukkan kepada mereka bahwa seorang guru memahami anak didik/mahasiswa. Seorang guru, sebagai pembina jiwa, mesti dapat memahami mereka yang dibina. Secara individu, seorang guru atau dosen perlu memahami permasalahan umum (ciri, sifat dan masalah) remaja dan pemuda, dan apa yang mereka rasakan. Bisa saja mereka telah melakukan sesuatu yang dilarang ajaran agama, lalu mereka bertahan (membela diri dengan diam-diam atau terang-terangan). Suatu sikap dan tindakan yang bijak bila persoalan mereka bisa diketahui dan dianalisis (hukum agamanya) sebelum memutuskan untuk penunjukan hukum dan ketentuan agama. Setelah itu, selanjutnya barulah dikemukakan ajaran agama tentang hal itu dengan mencarikan hikmah dan manfaat dari ketentuan agama, yang secara sederhana mungkin terasa berat oleh remaja/pemuda di kampus. Mereka (remaja/pemuda) akan merasa senang jika ada orang lain dapat memahaminya dan mengerti perasaannya. Mereka akan merasa simpati kepada orang yang mau merasakan dan mengerti penderitaannya. Jika rasa simpati itu telah tercipta, biasanya mereka akan mudah menerima saran dan nasihat dari orang lain (guru, dosen). Sedapat mungkin memerhatikan mereka yang sedang mengalami gejolak jiwa yang sedang mengamuk dalam jiwanya.<sup>26</sup>

*Kedua*, pembinaan dan konsultasi. Setiap pembina kehidupan beragama (guru dan dosen) menyadari bahwa yang akan dibina itu adalah jiwa, yang tidak terlihat, tidak dapat diketahui langsung. Seorang pembina mesti terbuka menampung dan mendengar ungkapan perasaan yang dialami mereka. Perlu disediakan waktu untuk mendengar keluhan mereka secara individu atau kelompok. Yang sangat diperlukan adalah kemampuan untuk mendengar secara baik dan aktif, yang dinamakan seni mendengar. Dengan terungkapnya perasaan galau mereka, akan

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 148-149.

terbuka pula hati mereka selanjutnya untuk saran atau alternatif-alternatif penyelesaian bagi beragam permasalahan mereka, yang diambil dari ajaran agama yang telah terjamin manfaatnya. Sukses-tidaknya pembina (guru, dosen) dalam melakukan pembinaan tergantung pada kemampuan dan kompetensi mereka dalam pembinaan.<sup>27</sup>

Ketiga, pendekatan keagamaan dalam kehidupan. Hukum dan ketentuan agama perlu mereka ketahui. Perlu menggerakkan hati mereka untuk secara otomatis terdorong dalam mematuhi hukum dan ketentuan agama. Sedapat mungkin pengetahuan agama mereka bermakna dan berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan pendekatan agama dengan segala ketentuannya kepada kehidupan sehari-hari dengan cara mencari hikmah dan manfaat dari ketentuan agama itu. Jangan sampai mereka berpandangan bahwa hukum dan ketentuan agama sebagai perintah Tuhan yang terpaksa mereka taati, tanpa merasakan manfaat dari ketaatan itu. Hal ini, tidak dapat diperoleh dengan penjelasan sederhana, tetapi memerlukan pendekatan dan usaha yang sungguh-sungguh dan optimal.<sup>28</sup>

Jadi, upaya pembinaan perilaku menyimpang (*social-deviance*) pada remaja dan pemuda (mahasiswa) dalam berbagai bentuknya bukanlah pekerjaan sederhana. Seorang pembina atau konsultan (guru, dosen) perlu memiliki pengetahuan, kompetensi, semangat tanpa pamrih, dan profesional dalam memecahkan berbagai persoalan yang menimpa mereka. Selain itu, optimalisasi peran dan fungsi dalam sistem sekolah dan perguruan tinggi (staf, guru, dosen, pimpinan) yang berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan tata-tertib siswa di sekolah dan kode etik mahasiswa di perguruan tinggi, dengan prinsip kejujuran, keadilan, dengan *reward* dan sanksi yang proporsional dan bernilai edukatif, sangatlah membantu dalam membina dan membimbing anak didik, remaja, dan mahasiswa dalam menghadapi kemungkinan berbagai persoalan yang dihadapi mereka. Selain itu, kerja sama dan pengertian sekolah dan perguruan tinggi dengan pihak orangtua anak yang bermasalah, sedikit banyak dapat dimanfaatkan dalam ikhtiar mencari solusi dari beragam

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 150.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 150-151.

persoalan pribadi dan akademik yang dihadapi mereka. Hal ini, semua merupakan bentuk pelayanan institusi pendidikan terhadap pentingnya proses penciptaan anak didik, dan mahasiswa (remaja, pemuda), yang berpengharapan bagi dirinya sendiri, keluarga, dan bernegara.

# Bab 3

## AJARAN ISLAM, MANUSIA DAN ETOS KERJA

Manusia merupakan ciptaan Allah Swt. yang paling istimewa bila dilihat dari sosok diri, beban dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang perbuatannya mampu mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak Tuhan yang mampu menjadi sejarah memperoleh kemenangan. Manusia juga adalah makhluk kosmis yang sangat penting, karena dilengkapi dengan semua pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan. Syarat itu menyatakan bahwa manusia sebagai kesatuan jiwa raga dalam hubungan timbal balik dengan dunia dan antarsesamanya. Di samping itu, terdapat unsur lain yang membuat dirinya dapat mengatasi pengaruh dunia sekitarnya serta problema dirinya, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur ini sudah terlihat pada sejumlah makhluk lain yang diberi nama jiwa (*soul*), *anima* dan *psyche*. Tetapi pada kedua unsur itu, manusia memiliki nilai tambah di mana kualitasnya di atas kemampuan yang dimiliki makhluk lainnya. Dengan keistimewaannya, manusia mampu menopang keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Manusia juga makhluk yang berperdaban yang mampu membuat sejarah generasinya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2003, hlm. 12-13.

Namun, pengertian *khalifah* dalam hal kedudukan manusia adalah pengganti. Jadi, *khalifah Allah* berarti pengganti Allah. Sedangkan tugas manusia sebagai *khalifah* adalah memakmurkan bumi dengan jalan memanifestasikan potensi Tuhan dalam dirinya.<sup>5</sup> M. Quraish Shihab menyimpulkan kata *khalifah* meliputi pengertian: (1) orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas; dan (2) *khalifah* memiliki potensi untuk mengemban tugasnya, namun juga dapat berbuat kesalahan dan kekeliruan.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang anak merupakan manusia yang sedang mengalami proses perkembangan. Syahminan Zaini dan Murni Alwi<sup>7</sup> menjelaskan bahwa Islam mengajarkan anak merupakan:

1. Sebagai makhluk ciptaan bagi kehidupan Allah Swt. Salah satu ayat Al-Qur'an mengatakan, di antaranya dalam surat Al-'Alaq ayat 2: "Dia (Allah) telah menciptakan manusia dari 'alaq". Karenanya manusia harus taat kepada aturan-Nya. Allah juga menuntut dan menghukum orang-orang yang membuat aturan bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai makhluk yang berjanji kepada Allah Swt. untuk menaati-Nya. Ketika dalam alam arwah, Allah Swt. bertanya kepada roh-roh manusia: "Bukankah Aku ini Tuhan mu? Roh-roh menjawab: Benar, kami telah menyaksikan" (QS Al-A'raf: 172). Konsekuensinya, manusia harus menaati aturan-Nya.
3. Sebagai makhluk yang sudah menerima amanah Allah Swt. Dalam QS Al-Ahzab: 72, Allah Swt. berfirman:

<sup>5</sup>Hasan Langgulung mengatakan selaku *khalifah Allah* di bumi, manusia memiliki karakteristik: (1) sejak awal penciptaannya, manusia adalah baik secara fitrah. Ia tidak mewariskan dosa karena Adam meninggalkan surga; (2) interaksi antara badan dan roh menghasilkan *khalifah*. Karakteristik ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain; (3) manusia sebagai *khalifah* memiliki kebebasan berkehendak (*free will*), suatu kebebasan yang menyebabkan manusia dapat memilih tingkah lakunya sendiri; dan (4) manusia dibekali dengan akal yang dengan akal itu manusia mampu membuat pilihan antara yang benar dan salah (*Ibid*, hlm. 90-91).

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab dalam Jalaluddin: ('Teologi Pendidikan', *op.cit.*, hlm. 31).

<sup>7</sup>Syahminan Zain dan Murni Alwi, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Kalani Mulia, 2004, hlm. 1-12.

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan satu amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka enggan menerimanya karena mereka tidak akan sanggup melaksanakannya, lalu diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah aniaya dan bodoh.*

Amanah dimaknai sebagai amanah agama Allah (Islam), karenanya manusia harus memeluk agama Islam dan menaati aturan-Nya.

4. *Sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah Swt. beribadah kepada-Nya.* Allah berfirman dalam QS Adz-Dzariat: 56, "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah pada-Ku". Sedangkan malaikat diciptakan untuk menaati perintah Allah Swt. saja (QS At-Tahrim: 6), dan benda mati serta tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah untuk bertasbih (QS Al-Isra': 44), mereka mengerti tasbih masing-masing (QS An-Nur: 41). Tetapi, manusia tidak mengerti tasbih mereka itu (QS Al-Isra': 44), karenanya manusia beribadah kepada Allah.
5. *Sebagai makhluk yang telah dianggap Allah Swt. untuk menjadi khalifah-Nya di bumi.* Dalam QS Al-Baqarah: 30, Allah Swt. berfirman: "Dan ingatlah, ketika Tuhan-Mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Sebagai khalifah, manusia wajib memakmurkan bumi (QS Al-Hud: 61) dan membahagiakan manusia (QS Ar-Ra'du: 29 dan Al-Ahzab: 71).
6. *Sebagai makhluk yang memiliki martabat paling tinggi.* Manusia diciptakan Allah Swt. dalam sebaik-baiknya kejadian (QS At-Tin: 4) dan dijadikannya semulia-mulia makhluk (QS Al-Isra': 70). Martabat manusia, dalam Al-Qur'an, hanya bisa dipertahankan dengan iman dan amal saleh (QS At-Tin: 6).
7. *Sebagai makhluk yang berakhlak.* Manusia karenanya merupakan makhluk yang terbaik dan termulia, tingkah lakunya punya nilai dan akan menyesal bila mengerjakan perbuatan tidak bermanfaat. Nabi Muhammad Saw. mengatakan: "Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan Akhlak" (HR Bukhari, Hakim, dan Baihaqi).

8. Sebagai makhluk yang memiliki beragam *fitrah*<sup>8</sup>. Nabi Muhammad Saw. mengatakan: "Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas *fitrah*" (HR Muslim). Dalam QS Ar-Rum: 30, Allah Swt. mengatakan bahwa agama-Nya itu sudah diciptakan-Nya sesuai dengan *fitrah* manusia.
9. Sebagai makhluk pencari kebenaran. Manusia merupakan makhluk berpikir karena telah diberi akal oleh Allah Swt. (QS An-Nahl: 78), kebenaran hanyalah bersumber dari Allah Swt. (QS Al-Baqarah: 147).
10. Sebagai makhluk yang memiliki sifat baik dan buruk. Selain memiliki sifat baik, manusia juga memiliki sifat buruk, antara lain: suka berkeluh-kesah (QS Al-Ma'rij: 19); zalim dan ingkar (QS Ibrahim: 34); pembantah (QS Al-Kahfi: 54); durhaka (QS Al-'Alaq: 7); dan tergesa-gesa (QS Al-Isra': 11). Manusia diharapkan dapat mengembangkan sifat-sifat baiknya seoptimal mungkin dan menekankan berbagai sifat buruknya.
11. Sebagai makhluk yang punya musuh. Manusia ada dua macam musuh, yakni *nafsu* dan *setan*. *Nafsu* sebagai musuh manusia karena *nafsu* selalu menyuruh manusia untuk berbuat buruk (QS Yusuf: 53). Allah Swt. memperingatkan bahwa jika *nafsu* diperturutkan, maka akan rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (QS Al-Mu'minun: 71). *Setan* terdiri dua jenis pula, yakni *setan manusia* dan *setan jin*. Bila manusia dan jin memusuhi Nabi, jadilah mereka menjadi *setan* (QS Al-An'am: 112). *Setan manusia* dinyatakan sebagai musuh

<sup>8</sup>*Fitrah* manusia itu cukup banyak, yang di antaranya adalah *fitrah* agama, intelektual, sosial, ekonomi, politik, seks, seni, kemerdekaan, keadilan, persamaan, persaudaraan, persatuan, kebenaran, dan musyawarah. *Fitrah* harus dikembangkan secara berimbang. Jika salah satu saja *fitrah* itu tidak dikembangkan, kehidupan manusia akan "pincang". Karena Islam memandang bahwa setiap manusia lahir ke dunia sudah dibekali potensi (*fitrah*) yang baik dan suci, maka pandangan Islam ini merupakan pandangan optimistik. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pesimistik yang memandang adanya unsur jahat dalam potensi manusia. Pandangan pesimistik pada hakikatnya merupakan implikasi dari suatu pemikiran yang berpandangan manusia terlahir dengan membawa dosa warisan. Pandangan optimistik juga berbeda dengan pandangan behavioristik yang memandang manusia itu netral, bukan baik dan bukan pula jahat, yang dinamakan teori *tabularasa*, putih seperti kertas. Pandangan Islam ini merupakan pandangan moderat yang berupaya menyintesis antara pandangan pesimistik dengan pandangan behavioristik. Lihat: (Syahminan Zaini dan Murini Alwi, "Pendidikan Anak dalam Islam", *op.cit.*, hlm. 5; dan Toto Suharto, "Filsafat Pendidikan Islam", *op.cit.*, hlm. 93).

karena ia hendak memurtadkan manusia dari agama Allah (QS Al-Baqarah: 217). Sedangkan setan jin dinyatakan sebagai musuh karena ia selalu menyuruh manusia untuk berbuat buruk (QS An-Nur: 21). Manusia sedapat mungkin harus mengalahkan musuh-musuh itu.

12. Sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Mengenai jasmani, Al-Qur'an mengatakan: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia (jasmaninya) dari tanah yang kering, dari tanah hitam yang berubah bau" (QS Al-Hijr: 28). Mengenai rohani Al-Qur'an mengatakan: "Maka aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan kepadanya roh dari-Ku" (QS Al-Hijr: 29). Allah Swt. juga mengatakan: "Hanya orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu lah yang akan diangkat-Nya derajatnya" (QS Al-Mujadalah: 11). Al-Qur'an selanjutnya melarang mengerjakan sesuatu yang belum punya ilmu tentangnya (QS Al-Isra': 36). Jika hendak mengerjakan sesuatu tetapi belum mempunyai ilmu tentangnya, maka bertanyalah terlebih dahulu kepada orang-orang yang sudah punya ilmu tentangnya (QS An-Nahl: 43).

13. Sebagai makhluk yang dilahirkan berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam QS Az-Zuhruf: 32, Allah Swt. berfirman: "Dan Kami angkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain". Karena itu, pekerjaan mereka akan berbeda pula (QS Al-Lail: 4). Semua itu, untuk hidup saling membantu (QS Az-Zuhruf: 32). Karenanya, pendidikan mereka akan berbeda-beda pula.

14. Sebagai makhluk yang dilahirkan dalam lingkungan yang berbeda. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 13, Allah Swt. berfirman: "Dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal". Dalam hal ini, karakter manusia akan berbeda, karena itu, mereka harus memperoleh pendidikan berbeda pula.

15. Sebagai makhluk yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem tertentu. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrah, maka orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR Muslim). Islam menganjurkan bahwa bila orangtua ingin menciptakan manusia yang baik, maka lingkungan yang baik harus diciptakan pula.

16. Sebagai makhluk yang akan hidup di muka bumi ini sementara saja. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 36, Allah Swt. berfirman: "Dan bagi kamu di bumi adalah tempat tetap dan kesenangan hidup sampai satu masa". Selanjutnya, Allah Swt. berfirman: "Kemudian mereka harus kembali ke surga" (QS Ali Imran: 133).
17. Sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang harus dipertanggungjawabkan manusia adalah: 1) semua nikmat Allah yang telah diterimanya (QS At-Takatsur: 8); 2) semua aktivitasnya (QS An-Nahl: 93); 3) semua ide, ilmu dan teknologi yang didapatkannya (QS An-Nahl: 56); dan 4) semua janji yang telah diikrarkannya, terutama janji untuk menaati aturan Allah (QS Al-Isra': 34).

Dari berbagai kutipan ayat Al-Qur'an di atas dan penjelasannya bertalian dengan ajaran Islam mengenai manusia bahwa seorang anak (manusia) dalam selalu berproses. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'la: 2, Allah Swt. berfirman: "Yang telah menciptakan, lalu menyempurnakan". Seorang anak (manusia) pun mengalami suatu proses berkembang dan menjadi manusia yang dalam arti sesungguhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt. yang menciptakannya. Orangtualah yang memiliki kewajiban pertama dan utama untuk memproses perkembangan anaknya.

Dalam sejarah, Islam pernah menjadi pusaran peradaban dunia. Semua mata tertuju pada kemajuan Islam yang saat itu di bawah kendali Dinasti Abbasiyah II. Pada era keemasan itulah lahir pemikir-pemikir Muslim yang menjadi rujukan dunia ilmu pengetahuan, seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, dan lainnya. Pascamerebaknya penjajahan pada abad ke-18 dan 19 di negara-negara mayoritas Muslim, kedigdayaan umat Islam nyaris tenggelam. Umat Islam sudah tidak lagi menjadi barometer ilmu pengetahuan, apalagi pusaran peradaban. Bahkan, sudah tidak ada lagi kebanggaan internal di kalangan umat Islam itu sendiri.<sup>9</sup>

Peluang untuk kembali membangun peradaban Islam tetap terbuka lebar. Indonesia, dengan kelebihanannya diyakini memiliki potensi paling

---

<sup>9</sup>Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-13 Tahun 2013, Menuju Kebangkitan Peradaban Islam', *Republika*, 18 November 2013.

besar untuk memimpin peradaban Islam modern. Kekayaan alam melimpah, posisi geografis strategis, jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan 'modal' yang tidak bisa ditandingi negara Islam mana pun. Islam yang berkembang di Indonesia telah mampu mengayomi seluruh masyarakat, termasuk non-Muslim. Islam di Indonesia juga memperlihatkan peradaban yang menjunjung tinggi perdamaian. Beberapa ratus tahun yang lalu negeri ini didominasi oleh non-Muslim. Namun, menjadi negara yang mayoritas penduduknya Muslim tanpa pertumpahan darah. Islam melakukan pendekatan dakwah yang tidak menimbulkan kekerasan dan rasa sakit pada orang lain.<sup>10</sup>

## B. Pendidikan dan *Human Resources*

Sejarah Indonesia, pendidikan nasional dan pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan suatu yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan sumber daya manusia (*human resources*) di negeri ini. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak hasil perjuangan bangsa Indonesia yang paling hakiki. Dalam pernyataan kemerdekaan itulah *founding fathers* bertekad untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", di mana "tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" dan "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang" (UUD 1945, Pasal 31, Ayat 1, sebelum diamandemen). Pandangan dan pemahaman tentang pendidikan nasional seperti dirumuskan dalam UU Sisdiknas No. 20/2003, Pasal 1, Ayat 2, bahwa:

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.<sup>11</sup>

Para *founding fathers* dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beberapa bulan sebelumnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah memberikan "Garis-

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Abdul Malik Fajar, *Sketsa Pendidikan Nasional (Perspektif Sejarah dan Politik)*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012, hlm. 2.

*Garis Besar*" tentang Pendidikan dan Pengajaran, bahwa: "Dalam garis-garis adab kemanusiaan, seperti terkadang di dalam segala pengajaran agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat". Bahkan menyadari akan pluralitas bangsa dan sekaligus sebagai pengakuan atas perannya dalam merintis dan memperjuangkan pendidikan nasional, BPUPKI menyatakan:

Untuk dapat memerhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan/atau, kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraannya, sebagian atau sepenuhnya, boleh dibiayai oleh pemerintah. Pengawasan dari pemerintah atas usaha-usaha sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketentraman umum.<sup>12</sup>

Karenanya keberadaan pendidikan Islam, baik dari aspek aktivitas-operasional dan kelembagaan, sudah menjadi bagian totalitas dari bangunan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan Nasional telah memandu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicita-citakan dalam kemerdekaan. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 diharapkan menjadi arah dalam pembangunan bangsa yang *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk menuju ke arah tercapinya cita-cita tujuan itu, perlu adanya peneguhan dan penguatan kembali komitmen dari semua pihak untuk menempatkan pendidikan nasional sebagai "paradigma" pembangunan nasional, bukan sebagai "bagian" dari pembangunan nasional. Pendidikan nasional perlu diperankan sebagai arah yang mendukung wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan—yang telah menjadi tekad maupun perjuangan menjadi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi Pancasila. Jangan politik dijadikan "panglima" untuk melemahkan pendidikan nasional sebagai wahana memelihara dan meneruskan cita-cita kebangsaan<sup>13</sup>.

Sejalan dengan itu, suatu peradaban yang ingin ditawarkan Islam Indonesia adalah Islam dan kebhinnekaan, Islam dan pluralisme, dan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

Islam dan multikulturalisme. Karenanya, sesungguhnya peradaban modern ialah peradaban yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya dan kebudayaan. Nursyam mengatakan:

... suatu peradaban Islam yang bisa beradaptasi dan menerima multikulturalisme. Dan itu yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. pada awal keberadaan Islam di Madinah. Yang paling mendekati model Islam pada masa Nabi itu adalah Islam Indonesia. Isinya umat Islam, tetapi mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki sikap dan tindakan mengembangkan pluralitas dan etnisitas.<sup>14</sup>

Dapat dijelaskan bahwa dalam proses mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya— ber-Iptek dan ber-Imtak— pendidikan Islam sejak awal memiliki andil terdepan dan signifikan. Dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang peranan pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah) dalam membentuk *akhlakul karimah*, perilaku atau kepribadian anak didik.

Dalam konteks proses mewujudkan anak didik yang ber-*akhlakul karimah* dan berkarakter, pendidikan Islam sesungguhnya memiliki peranan strategis bahkan terdepan. Paparan berikut, karenanya, akan dijelaskan tentang implementasi pendidikan Islam dalam berbagai bentuknya dalam membentuk anak didik yang berkarakter dan berakhlak yang pada akhirnya mereka dapat memperkuat karakter bangsa, sebagaimana diharapkan Pancasila dan UUD 1945. Intinya, karakter anak Muslim Indonesia yang diharapkan akan terbentuk dengan pentingnya memerhatikan peran strategis beragam institusi pendidikan Islam, seperti pendidikan madrasah, pesantren, dan PAI di sekolah umum.

Dalam praktik pembelajaran seorang guru sering kali mendominasi dan memiliki otoritas untuk memaksa siswa memenuhi semua yang diinginkan, dan terkesan kurang bijak memerhatikan kebutuhan belajar siswa. Model belajar demikian cenderung mengakibatkan perbedaan kemampuan belajar yang ekstrem antara satu kelompok dengan lainnya. Dalam model belajar sistem komando dan penyampaian atau model bank

<sup>14</sup>Nursyam, 'Indonesia Berpotensi Memimpin Peradaban Dunia', *Republika*, 18 November 2013.

dalam istilah Freire, guru tidak hanya didorong untuk bisa menstimulasi siswanya belajar, tapi juga harus mampu memerhatikan keragaman yang ada, karena daya serap siswa bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum, seorang guru setidaknya perlu memenuhi dua kategori, yakni *capability* dan *loyalty*, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi hingga evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan setelah kelas.<sup>15</sup>

Salah satu faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian guru akan menentukan seorang guru sebagai pendidik dan pembina bagi anak didiknya, atau sebagai penghancur bagi masa depan anak didik. Kepribadian sesungguhnya adalah abstrak (maknawi), sulit dilihat secara nyata, yang dapat dilihat adalah penampilan atau bekasnya dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti tindakan, ucapan, cara bergaul, berpakaian dan ketika berhadapan dengan masalah, baik yang ringan maupun yang berat.<sup>16</sup>

Jalaluddin<sup>17</sup> menulis bahwa kepribadian Muslim dapat dilihat dari kepribadian orang perorang (individu) dan kepribadian dalam kelompok masyarakat (*ummah*). Kepribadian individu meliputi ciri khas seorang dalam sikap dan tingkah laku, dan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Karena adanya unsur kepribadian yang dimiliki masing-masing, maka sebagai individu, seorang Muslim akan menampilkan ciri khas yang berbeda pula. Dengan demikian, terdapat perbedaan kepribadian antara seorang Muslim dengan lainnya. Secara fitrah, perbedaan ini memang tampak adanya. Islam berpandangan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang berbeda, hingga setiap orang didorong untuk melaksanakan perintah agamanya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

Secara individu, kepribadian Muslim menggambarkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas itu dimiliki berdasarkan potensi bawaan.

<sup>15</sup>Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 113.

<sup>16</sup>Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 9.

<sup>17</sup>Jalaluddin, 'Teologi Pendidikan', *op.cit.*, hlm. 196.

Dengan demikian, secara potensi (pembawaan) akan dijumpai adanya perbedaan kepribadian antara seorang Muslim dengan lainnya. Akan tetapi, perbedaan itu terbatas pada seluruh potensi yang mereka miliki berdasarkan faktor bawaan masing-masing, meliputi aspek jasmani dan rohani. Pada aspek jasmani seperti perbedaan bentuk fisik, warna kulit dan ciri-ciri fisik lainnya. Dari aspek rohaniah, misalnya sikap mental, bakat, tingkat kecerdasan dan sikap emosi. Dari aspek roh, ciri-ciri itu menyatu dalam kesatuan fitrah untuk mengabdikan kepada Sang Khalik. Latar belakang penciptaan manusia memperlihatkan bahwa secara fitrah manusia memiliki roh sebagai 'bahan baku' yang sama.<sup>18</sup>

Dalam proses belajar, tidak hanya terbatas pada memperoleh pengetahuan (membaca, menulis, dan keterampilan lainnya). Belajar lebih luas dari hal itu, di mana anak didik mempelajari berbagai kebiasaan (kebiasaan menyikat gigi setelah makan), beragam sikap (menjaga kecermatan dalam ucapan, cinta tanah air, kebersihan, mencegah hama atau serangga), dan beragam nilai (menghormati orangtua atau mematuhi aturan). Anak didik juga mempelajari peranan yang tepat bagi dirinya dan pergaulan dengan orang lain, belajar menyayangi dan membenci, percaya terhadap diri dan belajar takut. Selain itu, anak didik juga belajar memperoleh keperluan-keperluan, bakat dan ciri-ciri kepribadian dan akhlak. Seorang guru hendaknya memahami tentang cara anak didik belajar dengan baik dan bisa sukses.<sup>19</sup>

Gilbert H. Hunt dalam Dede Rosyada menyatakan bahwa seorang guru yang baik memiliki tujuh kriteria:

1. *Sifat*; seorang guru yang baik memiliki sifat antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan pekerja keras, toleran, sopan, bijaksana, dapat dipercaya, fleksibel dan mudah beradaptasi, demokratis, penuh harapan bagi siswa, tidak semata mencari reputasi pribadi, mampu mengatasi stereotipe siswa, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, dan memiliki pendengaran yang baik;

<sup>18</sup>Jalaluddin, 'Teologi Pendidikan', *ibid.*, hlm. 196.

<sup>19</sup>Zakiah Daradjat, 'Kepribadian Guru', *ibid.*, hlm. 14.

2. *Pengetahuan*; seorang guru yang dikatakan baik memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang diampunya, dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya itu;
3. *Apa yang Disampaikan*; seorang guru yang baik mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikan meliputi semua sub-bahasan yang diharapkan siswa dengan optimal;
4. *Bagaimana Mengajar*; seorang guru yang baik dapat menjelaskan beragam informasi dengan jelas, terang, memberikan layanan yang variatif, menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok kecil dengan efektif, mendorong semua siswa untuk berpartisipasi, memonitor dan sering mendatangi siswa, mampu mengambil beragam keuntungan dari kejadian yang tidak diharapkan, memonitor tempat duduk siswa, senantiasa melakukan *formatif test* dan *post test*, melibatkan siswa dalam tutorial atau pengajaran sebaya, menggunakan kelompok besar untuk pengajaran instruksional, menghindari kesukaran yang rumit dengan menyederhanakan sajian informasi, menggunakan beberapa bahan sajian tradisional, menunjukkan kepada siswa tentang pentingnya pelajaran yang mereka pelajari, menunjukkan proses berpikir yang penting untuk belajar, berpartisipasi dan mampu memperbaiki perbaikan terhadap kesalahan konsepsi yang dilakukan siswa;
5. *Harapan*; seorang guru yang baik dapat memberikan pada siswa, dapat membuat siswa akuntabel, dan mendorong partisipasi orangtua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya;
6. *Reaksi Guru terhadap Siswa*; seorang guru yang baik dapat menerima berbagai masukan, risiko, dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada siswanya, konsisten dalam berbagai kesepakatan dengan siswa, bijaksana terhadap berbagai kritik siswa, beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan siswa, pengajaran yang memerhatikan individu, memberikan waktu yang pantas untuk siswa bertanya, cepat memberi *feedback* dalam membantu siswa dalam belajar, sensitif terhadap perbedaan latar belakang sosial-ekonomi dan kultur siswa, dan menyesuaikan pada kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai perbedaan;

7. **Manajemen:** seorang guru yang baik mampu menunjukkan sifat keahlian dalam perencanaan, mengorganisasikan kelas dengan baik sejak awal bertugas, melewati masa transisi dengan baik, efisien dan konsisten menggunakan waktu dalam bekerja, memiliki dua atau lebih aktivitas dalam waktu yang sama kelas, menerima keadaan kelas yang ribut dengan aktivitas pembelajaran, dapat meminimalisir gangguan, memberi hukuman dengan bentuk yang paling ringan, dapat menjaga suasana yang tenang dalam belajar, dan dapat menjaga siswa untuk belajar menuju sukses.<sup>20</sup>

Dalam proses pembelajaran di kelas, sesungguhnya, suatu usaha aktual dalam mengimplementasikan kurikulum ideal (*ideal curriculum*) ke dalam pembelajaran kurikulum aktual (*actual curriculum*). Suatu proses pembelajaran yang dikatakan berhasil, apabila kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam perencanaan teks kurikulum tidak berbeda jauh dengan realitas-implementasi kurikulum dalam pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, adalah seorang gurulah yang paling menentukan dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau bahkan kegagalan dari proses pembelajaran pelaksana dan pengembang kurikulum (*a curriculum developer*).

Untuk suatu proses belajar yang relevan dan berkualitas, *up to date* dengan kebutuhan upaya pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) masa depan yang diimplementasikan dengan benar; seorang guru didorong untuk selalu memiliki perhatian terhadap betapa pentingnya dimensi profesional dalam proses pembelajaran di sekolah.

Seorang guru diharapkan memiliki perhatian terhadap beberapa konsekuensi kecenderungan globalisasi dalam perubahan paradigma belajar, yakni dari suatu "paradigma lama" (*an old paradigm*) kepada suatu paradigma baru (*a new paradigm*). Dampak globalisasi pada perkembangan peradaban dunia merupakan suatu pelajaran penting bagi para guru yang senantiasa perlu mengembangkan profesi sebagai pendidik dan sekaligus pengajar, senantiasa responsif terhadap problem belajar dan inovatif dalam perubahan sosial pendidikan.

---

<sup>20</sup>Dede Rosyada, 'Paradigma Pendidikan Demokratis....', *op.cit.*, hlm 114.

Usaha-usaha untuk mengembangkan kualitas guru profesional dalam pembelajaran di sekolah merupakan suatu perhatian penting. Dalam respons terhadap globalisasi dan permintaan pada kualitas kebutuhan pentingnya pendidik profesional, kebutuhan belajar siswa dalam menciptakan kualitas pembelajaran, kompetitif, dan independen, persyaratan-persyaratan, dan pentingnya guru profesional diharapkan dapat dikembangkan secara terus-menerus. Sudarwan Damin<sup>21</sup> mengungkapkan bahwa mengingat kompetisi dalam berbagai perspektif sosial, ekonomi, sains-teknologi, dan kemanusiaan yang berkembang secara luas, kapabilitas diperlukan dalam merespons beragam jenis pekerjaan yang berkembang pesat itu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dunia kerja sesuai dengan permintaan sejumlah persyaratannya dengan realitas di sekolah, di mana sering kali direpons sekolah dengan sangat lamban. Ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada guru sering kali dibatasi oleh kalender kerja, dan juga masih rendahnya etos kerja guru itu sendiri.

Dalam perkembangannya, telah terjadinya pergeseran dan perkembangan tugas dan peran seorang guru dalam menjalankan profesinya. Melalui tugas dan beragam peran guru inilah kualitas suatu sekolah/madrasah ditentukan. Sebagai suatu elemen dari sistem sosial sekolah/madrasah, seorang guru bahkan memiliki peranan terdepan dalam memobilisasi suatu sekolah menjadi lebih berkualitas. Pada beberapa waktu yang lalu, kita mengenal adanya sekolah dan madrasah unggulan berstandar nasional dan internasional. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari kerja keras guru dan elemen sekolah/madrasah lainnya dalam upaya membentuk kinerja kolektif yang terfokus pada peningkatan kualitas sekolah.

Kualitas sekolah/madrasah terletak pada sejauh mana tingkat profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Karenanya, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru setidaknya memiliki sejumlah tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih, dan peneliti. Sebagai *pendidik* bermakna meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sebagai

---

<sup>21</sup>Sudarwan Damin, *Inovasi Pendidikan, dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 19.

*pengajar* bermakna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai *pelatih* bermakna mengembangkan beragam keterampilan pada siswa.<sup>22</sup> Selain itu, guru sebagai *peneliti*, sebagai upaya inovasi dan pembaruan sebagai pengajar di kelas agar lebih berkualitas. Seorang guru perlu memiliki kompetensi dan kemampuan meneliti bertalian dengan tugas mengajarnya, yakni Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Sebagai konsekuensi keberadaan guru sebagai pengajar dan pendidik, selanjutnya guru memiliki peran-peran tertentu dalam hubungannya dengan manajemen sekolah. Peran itu meliputi peran guru dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan manajemen kelas:

1. *Peran Guru dalam Manajemen Kelas.* Peranan dan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran, memiliki sejumlah hal, antara lain: guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pemimpin, pengatur lingkungan, partisipan, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Peningkatan kemampuan dan keahlian guru dalam bidang *subject matter* merupakan esensial. Ketika keadaan sekolah semakin kompleks, ukuran kelompok belajar semakin besar, beban belajar-mengajar semakin intensif, tingkat stres dan terelinasian siswa semakin menggejala, dan ekstensif, sumber dan fasilitas pembelajaran semakin modern, dan prosedur kerja semakin perlu dipercanggih, terminologi metodologi pengajaran yang dikenal selama ini mengalami perluasan makna, yakni lazim dinamakan *manajemen kelas*. Suatu hal yang terpenting dalam proses pembelajaran diperlukannya suatu kemampuan guru dalam mengelola kelas yang efektif dan efisien.<sup>23</sup> Kinerja manajemen kelas yang efektif, antara lain tercermin dalam bentuk keberhasilan guru dalam mengkreasi lingkungan belajar secara positif (*creative positive learning environment*) dan memberdayakan siswa (*empowering student*) untuk memahami dan menjadikan efektif dalam melibatkan diri pada proses pengelolaan kelas dan proses pembelajaran.

---

<sup>22</sup>Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 175.

<sup>23</sup>Adam dan Decey dalam Daryanto, 'Administrasi dan Manajemen Sekolah...', *op.cit.*, hlm. 176.

2. *Peran Guru sebagai Manajer Kelas.* Dari banyak riset tentang keefektifan guru (*teacher effectiveness*) yang dilakukan menunjukkan bahwa keterampilan manajemen kelas menduduki posisi utama dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang memosisikan manajemen kelas sebagai proses pemapanan dan pemeliharaan lingkungan belajar efektif cenderung lebih sukses daripada guru-guru yang memosisikan sebagai figur otoritas atau penegak disiplin.
3. *Peran Guru sebagai Manajemen Perilaku Siswa.* Seorang guru di kelas akan menemukan beragam keadaan siswa, sejak dari siswa yang baik-baik, sopan, santun, arogan, cuek, pengganggu, dan nakal. Ada pula siswa yang kuat, sedang, lemah fisiknya. Dari perspektif sosial-ekonomi, kultur, kebiasaan, agama, kepedulian dan derajat kohesivitasnya yang beragam pula. Kondisi latar belakang siswa yang beragam tersebut, sebaiknya dijadikan peluang bagi guru untuk mengelola kelasnya secara efektif bagi penciptaan faktor yang memengaruhi motivasi, prestasi, dan perilaku siswa. Di sini pula, manajemen kelas memosisikan posisi penting dalam keseluruhan spektrum proses pembelajaran.<sup>24</sup>

Zakiah Daradjat<sup>25</sup> menulis bahwa terdapat sejumlah unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran:

1. *Kegairahan dan kesediaan untuk belajar.* Dalam proses pembelajaran, seorang guru perlu memerhatikan keadaan anak didik, tingkat pertumbuhan dan perbedaan perorangan yang terdapat pada mereka. Guru tidak mendorong anak didik belajar di luar kemampuannya, menggunakan metode yang relevan, dan mengajarkan anak didik sesuai dengan kematangan atau sesuai dengan pengalaman masa lalu.
2. *Membangkitkan minat anak didik.* Seorang guru harus menjaga aturan kelas dan menjadikan anak didik bergairah menerima pelajaran. Guru perlu mengarahkan kelakuan mereka ke arah yang baik dan benar dengan sukarela, keinginan sendiri melakukannya. Guru juga

<sup>24</sup>Daryanto, 'Administrasi dan Manajemen Sekolah....', *op.cit.*, 176.

<sup>25</sup>Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Bulan Bintang 2005, hlm. 14-16.

berupaya memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga bakat mereka dan mengarahkan kepada yang benar.

3. *Menumbuhkan sikap dan bakat yang benar.* Beragam kegiatan yang dilakukan anak didik dalam belajar, membangkitkan minat dan keperluannya, pembentukan bakat dan sikap yang menjadi bagian dari kepribadian mereka. Menggairahkan atau bahkan bisa menjauhkannya dari sekolah bahkan memengaruhi masa depan dan kehidupan mereka pada umumnya.

4. *Mengatur proses belajar-mengajar dan pengalamannya.* Mengatur proses belajar-mengajar, pengalaman belajar, dan kegiatan bertalian dengannya, merupakan faktor utama dalam menentukan berhasilnya proses belajar karena memudahkan anak didik untuk memperoleh pengalaman dalam memanfaatkannya. Pengaturan itu terjadi dengan menghubungkan dengan unsur-unsur pelajaran dengan keperluan anak didik dan menjadikannya kesatuan yang terpadu berkisar pada persoalan yang menjadi perhatian anak didik, agar pelajaran menjadi bermakna.

5. *Berpindahnya pengaruh belajar dan pelaksanaannya ke dalam kehidupan nyata.* Agar belajar berhasil dan bermanfaat dalam kehidupan anak didik di luar sekolah, seorang guru perlu memahami dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya perindahan pengaruh belajar ke dalam kehidupan di luar sekolah.

6. *Hubungan manusiawi dalam proses belajar.* Suatu proses belajar dapat berjalan lancar atau sebaliknya terkendala tergantung pada interaksi sosial dalam kelas antara guru-anak didik, atau antara sesama anak didik. Guru perlu memahami beragam interaksi sosial di kelas dalam proses belajar-mengajar.

Zakiah Daradjat selanjutnya mengungkapkan kepribadian guru madrasah harus lebih menjadi perhatian dengan merujuk pada dasar dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah pada Bab II Pasal 2,3, dan 4. Pada Pasal 2 tercantum bahwa dasar pendidikan MI adalah agama Islam, falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang

ber-Pancasila, yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Dalam Pasal 3, dinyatakan bahwa Tujuan Institusional Madrasah Ibtidaiyah ialah agar anak didik: (1) Memiliki sikap dasar sebagai seorang Muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia; (2) Memiliki sikap dasar sebagai warga negara yang baik; (3) memiliki kepribadian yang bulat dan utuh, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani; (4) Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan Pertama lainnya; (5) Memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pasal 4, dinyatakan bahwa Tujuan Institusional Khusus Madrasah Ibtidaiyah ialah agar anak didik: (1) *Dalam Bidang Pengetahuan*: (a) Memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu agama Islam dan sejarah serta kebudayaan Islam; (b) Memiliki pengetahuan dasar-dasar kewarganegaraan dan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (c) Memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan, kesejahteraan keluarga dan kependudukan; (d) Memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional; (e) Memiliki pengetahuan Bahasa Arab sebagai alat untuk memahami Agama Islam; (f) Memiliki pengetahuan dasar tentang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; (g) Memiliki pengetahuan dasar tentang Ilmu Pengetahuan Sosial; (h) Memiliki pengetahuan dasar tentang Unsur Kebudayaan Nasional. (2) *Dalam Bidang Keterampilan*: (a) Dapat mengamalkan pokok-pokok agama Islam; (b) Dapat belajar dengan cara yang baik; (c) dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan; (d) Dapat membuat pola dasar kalimat dalam bahasa Arab; (e) Dapat memecahkan masalah sederhana berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang telah diakui; (f) Dapat bekerja sama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan masyarakat; (g) Memiliki keterampilan dasar tentang olahraga dan seni budaya; (h) Memiliki keterampilan dasar dalam memelihara kesehatan dan keluarga sejahtera menurut Islam. (3) *Dalam Bidang Nilai dan Sikap*: (a) Cinta terhadap umat Islam dan berkeinginan untuk mengamalkannya; (b) Menerima dan mau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (c) Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa, dan mencintai sesama manusia, bangsa, serta lingkungan sekitarnya; (d) Menghargai tradisi Kebudayaan Nasional; (e) Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan; (f) Mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku; (g) Berinisiatif, berdaya kreatif dan bersikap merakyat; (h) Berminat dan bersikap positif, serta konstruktif terhadap kegiatan olahraga dan kehidupan yang sehat; (i) Menghargai setiap jenis pekerjaan dan usaha yang halal; (j) Menghargai waktu, hemat dan produktif. Lihat: (Zakiah Daradjat, "Kepribadian Guru...", *op.cit.*, hlm. 43-46).

Jelaslah bahwa betapa indah dan baiknya dasar dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah, yang bila dapat dilaksanakan dengan baik, akan tercapailah pembinaan manusia yang bahagia di dunia dan akhirat yang diridhai Allah Swt. Sebagai upaya mencapai tujuan itu diperlukan persyaratan kepribadian bagi setiap guru Madrasah Ibtidaiyah (hingga Madrasah Aliyah), baik mengajar pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Kepribadian guru terlihat dalam penampilan pribadi, baik penampilan luar (cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara, cara berjalan, cara duduk, cara masuk dan keluar kelas serta cara hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya, semuanya diharapkan mencerminkan dasar dan tujuan dari pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (juga MTs, MA). Kepribadian guru madrasah ini sesungguhnya sebagai aktualisasi ajaran Islam dalam kegiatan manusia, dalam hal ini, terkhusus kegiatan dalam pendidikan dan profesi guru. Kepribadian guru yang tergambar dalam penampilannya hendaklah menari, menyenangkan dan stabil, agar anak didik memperoleh teladan yang baik dalam pertumbuhan pribadinya, dan tidak ragu-ragu bertindak dan bertingkah laku.

### C. Islam dan Etos Kerja

Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai tuntunan dan memiliki fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan pekerjaan. Rasulullah Saw. bersabda: *"bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok."* Dalam ungkapan lain dikatakan juga, *'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memikul kayu lebih mulia daripada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja'*. Dalam kenyataannya, kebanyakan orang bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi.

Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, setiap orang dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadis. *Ethos* berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter

serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. *Ethos* dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata *etos* ini dikenal pula kata *etika* yang hampir sama dengan pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral. Dalam *etos* itu terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Sama halnya, *etos kerja guru* dapat diungkapkan dengan sederhana bahwa sebagai upaya optimal seorang guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik.

Dalam Al-Qur'an dikenal kata *itqon* yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. (An-Naml: 88). *Etos kerja* seorang Muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim. Hakim berlandaskan pada *etos jalan lurus* tersebut sebagaimana Dawud ketika ia diminta untuk memutuskan perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka berilah keputusan (hukumlah) di antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah (pimpinlah) kami ke jalan yang lurus (QS Ash-Shaad: 22).

*Kerja* dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun nonmateri, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Toto Tasmara mendefinisikan makan dan bekerja bagi seorang Muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia memanusiatekan dirinya. Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Swt.

Dalam hubungan ini, Al-Qur'an banyak membicarakan tentang akidah dan keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an juga mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja positif dan negatif. Di dalam Al-Qur'an banyak kita temui ayat tentang kerja seluruhnya berjumlah 602 kata, bentuknya:

Pertama, ditemukan 22 kata *'amilu* (bekerja) di antaranya di dalam surat Al-Baqarah: 62, An-Nahl: 97, dan Al-Mukmin: 40. Kedua, kata *'amal* (perbuatan) ditemui sebanyak 17 kali, di antaranya surat Hud: 46, dan Al-Fathir: 10. Ketiga, kata *wa'amiluu* (mereka telah mengerjakan) ditemui sebanyak 73 kali, di antaranya surat Al-Ahqaf: 19 dan An-Nur: 55. Keempat, kata *Ta'malun* dan *Ya'malun* seperti dalam surat Al-Ahqaf: 90, Hud: 92. Kelima, ditemukan sebanyak 330 kali kata *a'maalahum*, *a'maalun*, *a'maluka*, *'amaluhu*, *'amalikum*, *'amalahum*, *'aamul* dan *amullah*. Di antaranya dalam surat Hud: 15, Al-Kahf: 102, Yunus: 41, Zumar: 65, Fathir: 8, dan At-Tur: 21. Keenam, terdapat 27 kata *ya'mal*, *'amiluun*, *'amilahu*, *ta'mal*, *a'malu* seperti dalam surat Al-Zalzalah: 7, Yasin: 35, dan Al-Ahzab: 31. Selain itu, terdapat sejumlah ayat yang mengandung anjuran dengan istilah seperti *shana'a*, *yasna'un*, *siru fil ardhi ibtaghu fadhillah*, *istabiqul khoirot*, misalnya ayat-ayat tentang perintah berulang-ulang dan sebagainya.

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan bagian dari iman, pembukti bahwa adanya iman seseorang serta menjadi ukuran pahala hukuman, Allah Swt. berfirman: "...barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh..." (Al-Kahfi: 110). Ada juga ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pengertian kerja secara sempit misalnya firman Allah Swt. kepada Nabi Daud As: "Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu..." (Al-Anbiya: 80). Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Swt. menyatakan: "Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumu'ah: 10)

Pengertian kerja dalam keterangan di atas, dalam Islam amatlah luas, mencakup seluruh pengerahan potensi manusia. Adapun pengertian kerja

secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidup. Inilah pengertian kerja yang bisa dipakai dalam dunia ketenagakerjaan dewasa ini, sedangkan bekerja dalam lingkup pengertian ini adalah orang yang bekerja dengan menerima upah baik bekerja harian, maupun bulanan dan sebagainya.

Pembatasan seperti ini didasarkan pada realitas yang ada di negara-negara komunis maupun kapitalis yang mengklasifikasikan masyarakat menjadi kelompok buruh dan majikan, kondisi semacam ini pada akhirnya melahirkan kelas buruh yang sering kali memunculkan konflik antara kelompok buruh ataupun pergerakan yang menuntut adanya perbaikan situasi kerja, pekerja termasuk hak mereka. Konsep klasifikasi kerja yang sedemikian sempit ini sama sekali tidak dalam Islam, konsep kerja yang diberikan Islam memiliki pengertian namun demikian jika menghendaki penyempitan pengertian (dengan tidak memasukkan kategori pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah dan aktivitas spiritual), maka pengertian kerja dapat ditarik pada garis tengah, sehingga mencakup seluruh jenis pekerjaan yang memperoleh keuntungan (upah), dalam pengertian ini tercakup pula para pegawai yang memperoleh gaji tetap dari pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya.

Pada hakikatnya, pengertian kerja semacam ini telah muncul secara jelas, praktik muamalah umat Islam sejak berabad-abad, dalam pengertian ini memerhatikan empat jenis pekerja:

1. *al-Hirafiyin*: mereka yang mempunyai lapangan kerja, seperti penjahit, tukang kayu, dan para pemilik restoran. Dewasa ini pengertiannya menjadi lebih luas, seperti mereka yang bekerja dalam jasa angkutan dan kuli.
2. *al-Muwadzofin*: mereka yang secara legal mendapatkan gaji tetap seperti para pegawai dari suatu perusahaan dan pegawai negeri.
3. *al-Kasbah*: para pekerja yang menutupi kebutuhan makanan sehari-hari dengan cara jual beli seperti pedagang keliling.
4. *al-Muzarri'un*: para petani. Pengertian tersebut tentunya berdasarkan teks hukum Islam, di antaranya hadis rasulullah Saw. dari Abdullah bin

Umar bahwa Nabi Saw. bersabda, *berikanlah upah pekerja sebelum kering keringat-keringatnya.* (HR Ibn Majah, Abu Hurairah, dan Thabrani).

Pendapat atau kaidah hukum yang menyatakan: "Besar gaji disesuaikan dengan hasil kerja." Pendapat atau kaidah tersebut menuntun kita dalam mengupah orang lain disesuaikan dengan porsi kerja yang dilakukan seseorang, sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak.

Bertalian dengan Etika Kerja dalam Islam, Rasulullah Saw. bersabda, *"Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti)."* (HR al-Baihaqi). Dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan tugas, Rasulullah melakukannya dengan selektif. Di antaranya dilihat dari segi keahlian, keutamaan (iman) dan kedalaman ilmunya. Beliau senantiasa mengajak mereka agar *itqon* dalam bekerja. Sebagaimana dalam awal tulisan ini dikatakan bahwa banyak ayat Al-Qur'an menyatakan kata-kata iman yang diikuti oleh amal saleh yang orientasinya kerja dengan muatan ketakwaan.

Penggunaan istilah perniagaan, pertanian, hutang untuk mengungkapkan secara ukhrawi menunjukkan bagaimana kerja sebagai amal saleh diangkat oleh Islam pada kedudukan terhormat. Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi Saw. yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa *"sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan."* (HR Bukhari dan Muslim).

Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang tergantung dari tinggi rendahnya niat. Niat juga merupakan dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Nilai suatu pekerjaan tergantung kepada niat pelakunya yang tergambar pada firman Allah Swt. agar kita tidak membatalkan sedekah (amal kebajikan) dan menyebut-nyebutnya sehingga mengakibatkan penerima merasa tersakiti hatinya. Seperti tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 2.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang*

yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian....

Keterkaitan ayat-ayat di atas memberikan pengertian bahwa takwa merupakan dasar utama kerja, apa pun bentuk dan jenis pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Memisahkan antara takwa dengan iman berarti mengucilkan Islam dan aspek kehidupan dan membiarkan kerja berjalan pada wilayah kemaslahatannya sendiri. Bukan kaitannya dalam pembangunan individu, kepatuhan kepada Allah Swt. serta pengembangan umat manusia.

Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa kerja mempunyai etika yang harus selalu diikutsertakan di dalamnya, oleh karenanya kerja merupakan bukti adanya iman dan barometer bagi pahala dan siksa. Hendaknya setiap pekerjaan di samping mempunyai tujuan akhir berupa upah atau imbalan, namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah Swt. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh umat Islam sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang zaman.

Jika bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur dan amanah, kesesuaian upah serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan sesuatu dan semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya. Di samping itu mereka harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja menjadi suatu tradisi kerja didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Adapun hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apa pun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "*sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.*" (HR Hambali). *Kedua*,

berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Firman Allah Swt.:

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS Al-Baqarah: 172)*

Ketiga, dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. Keempat, Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Kelima, profesionalisme merupakan kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertakwa tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan juga menyebabkan menurunnya produktivitas bahkan sampai kepada kesemrautan manajemen serta kerusakan alat-alat produksi.

Jadi, *etos kerja* seorang Muslim ialah semangat menapaki jalan lurus, mengharapkan ridha Allah Swt. *Etika kerja* dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah (1) Adanya keterkaitan individu terhadap Allah sehingga menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. (2) Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. (3) Tidak memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. (4) Tidak melakukan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. (5) Profesionalisme dalam setiap pekerjaan.

*Kerja* atau *amal* dalam pandangan Islam memiliki pengertian umum dan khusus. *Kerja* dalam pengertian umum ialah meninggalkan segala perbuatan yang diperkenankan dan dilarang agama, berupa perbuatan baik (*amal saleh*) dan buru (*maksiat*). *Kerja* dalam pengertian *khusus* ialah melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi unsur terpenting dan titik

tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Kerja dalam pengertian khusus meliputi: (1) Kerja yang berkaitan dengan aktivitas jasmani (fisik), dan (2) kerja yang berkaitan dengan aktivitas akal-pikiran (mental).

Dari kutipan hadis Rasulullah Saw., dapat dijelaskan bahwa konsep kerja dalam perspektif Islam adalah bertalian dengan segala bidang ekonomi yang dibolehkan syara' sebagai imbalan kepada upah atau bayaran. Sama halnya, dengan kerja bertalian dengan aktivitas jasmani/fisik, seperti kerja buruh, petani, tukang batu, dan lainnya; atau, kerja berkaitan dengan aktivitas akal (mental), seperti pegawai, dosen, guru, dan lain sebagainya. Seperti tertuang dalam hadis riwayat al-Bukhari, dikatakan bahwa: "*Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri*" (HR Al-Bukhari).

Para sahabat menggunakan perkataan pekerja (*amil*) bagi pegawai pemerintahan, seperti camat, bupati, gubernur, dan lain-lain. Semua pekerjaan yang dilakukan umat-Nya yang dibenarkan oleh syara' dipandang oleh ajaran Islam sebagai *kerja*. Sekecil apa pun jenis pekerjaan itu meskipun berbeda dalam peringkat jenis pekerjaan tersebut, merupakan kerja atau amal. Karenanya, dalam pandangan Islam, masyarakat dalam pelapisannya yang berbeda adalah pekerja. Berbagai jenis dan level pekerjaan itu, seperti buruh, guru, bupati, presiden, dan lain-lain, mengandung kemuliaan dalam pandangan Allah Swt. Masyarakat, dalam konteks ini, merupakan kerja sama antara sesama pekerja di dalamnya, suatu hal yang berbeda halnya dengan pekerja yang dipahami dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini, Islam berpandangan bahwa dalam bekerja, manusia tidak dibeda-bedakan karena perbedaan kasta, suku dan warna kulit. Seperti, tertuang dalam firman Allah:

*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.* (QS Al-Hujurat: 13)

Dengan menggunakan berbagai perbedaan latar belakang dan warna kulit, setiap individu (Muslim) diharapkan dapat bekerja dengan baik dan optimal demi menuju kebahagiaan diri, keluarga dan masyarakat. Jadi, bekerja merupakan keharusan bagi hamba-Nya yang beriman dan

bertakwa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah: 105 berbunyi: 'Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan.'

Sebagai makhluk pekerja (*homo creator*), manusia perlu bekerja sebagai upaya memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Muhammad Mustari<sup>27</sup> mengungkapkan bahwa dengan bekerjalah manusia dapat memenuhi keperluan hidupnya, atau lebih jauhnya dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Bekerja, sesungguhnya, merupakan banyak hal yang kompleks yang juga menyangkut masalah ketuhanan dan aspek-aspek lainnya, sehingga beberapa tujuan bekerja, antara lain:

*Pertama*, tujuan bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi, bekerja sebagai tujuan ibadah dan mencari keridhaan Tuhan, dengan niat yang baik, sehingga keikhlasan sebagai budaya kerja. Dengan keikhlasan, seorang yang bekerja akan menjadi profesional karena tidak ada kendala apa pun yang menghalangi seorang untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka menuju ridha Tuhan. *Kedua*, menafkahi keluarga. Seorang kepala keluarga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyejahterakan anak-anak dan istri dalam upaya memenuhi beragam kebutuhannya. *Ketiga*, bekerja untuk kepentingan amal sosial. Manusia sebagai makhluk sosial (*homo-socius*), saling membutuhkan satu sama lainnya dalam memenuhi hajat hidupnya yang membutuhkan bantuan tenaga, pikiran, dan uang; atau guna melakukan peribadatan bersama seperti kurban, sedekah, dan lainnya. Di sinilah, perlunya bekerja untuk saling menolong. *Keempat*, dengan bekerja diharapkan dapat menghindari perilaku kejahatan. Dengan bekerja seorang berarti tidak sebagai pengangguran sehingga terhindar dari kemungkinan perilaku dan tindakan yang mengarah pada kejahatan.

---

<sup>27</sup>Muhammad Mustari, "Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan", Pengantar: Didik Suhardi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 48.

# Bab 4

## KODE ETIK GURU DAN PROFESIONALISME

Analisis bagian ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang hubungan filsafat, etika dan etika profesi. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang konsep etika, etiket dan agama, dan moral. Selain itu, akan dijelaskan hubungan etika profesi keguruan Indonesia (KEGI). Ilmu Filsafat, dikatakan Hasbullah Bakry adalah suatu ilmu yang mempelajari sesuatu secara mendetail, seperti ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana tentang sikap manusia semestinya ketika telah memperoleh pengetahuan.<sup>1</sup> Sutari Imam Barnadib menulis bahwa filsafat merupakan ilmu yang berusaha memahami semua hal yang muncul di dalam keseluruhan ruang lingkup pandangan dan pengalaman umat manusia.<sup>2</sup> Hasan Shadily mengatakan filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat merupakan orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Wijaya, 1992, hlm. 9.

<sup>2</sup>Sutari Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hlm. 11.

<sup>3</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Ikhtiar, 1984, hlm. 1.

Sehingga, *berfilsafat* adalah suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam beragam bidang kehidupan manusia. Jalaluddin dan Usman Said<sup>4</sup> menulis, jawaban yang dimaksud merupakan suatu hasil pemikiran yang sistematis, menyeluruh dan mendasar. Jawaban seperti itu juga digunakan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan beragam dimensi kehidupan manusia, termasuk dimensi pendidikan.

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani Kuno, *philos* dan *sophia*. *Philos* berarti cinta dan *sophia* berarti kebajikan, kebaikan atau kebenaran, atau bisa juga diartikan cinta atau hikmah. Terminologi cinta dalam filsafat bukanlah seperti gambaran orang yang duduk terasing dari alam yang diangankannya. Seorang filsuf bukanlah seorang yang kurang andil secara gigih dalam upaya menemukan beragam tanda yang mendalam mengenai kehidupan manusia. Jadi, *filsuf* adalah orang mencintai hikmah dan berupaya mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Filsuf juga mencari hakikat sesuatu, berupaya menautkan sebab dan akibat, dan berusaha melakukan penafsiran-penafsiran atas pengalaman-pengalaman manusia.<sup>5</sup>

Beragam definisi itu, pada prinsipnya, menempatkan suatu berdasarkan kemampuan nalar manusia. Kebenaran yang dimaksud dalam konteks filsafat adalah kebenaran yang tergantung sepenuhnya pada kemampuan daya nalar manusia. Karenanya, dikatakan Jujun Srisumantri kebenaran menurut Plato dan Aristoteles adalah “apabila pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya”.<sup>6</sup> Jadi, kebenaran berfungsi sebagai tolok ukur antara suatu peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Jika cocok dianggap benar dan jika tidak cocok tidak diterima sebagai kebenaran. Kebenaran demikian cenderung pengertian relatif karena tergantung dari faktor ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu, belum tentu

---

<sup>4</sup>Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Pengembangan Pemikirannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 11.

<sup>5</sup>Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Edisi ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

<sup>6</sup>Jujun Srisumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000, hlm. 20-21.

dinilai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lain walaupun dalam kurun waktu yang sama. Karenanya, suatu hal yang wajar jika pengertian filsafat mengalami perbedaan dalam penafsirannya. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman memiliki corak dan ciri yang berbeda. Kondisi ini cenderung memacu manusia untuk selalu berpikir mencari nilai kebenaran itu. Namun, karena ada perbedaan cara pandang dalam menafsirkan kebenaran tersebut, maka belum ada kesepakatan tentang hakikat dan definisi filsafat. Menurut Titus, Smith dan Nolan, perbedaan definisi ini paling tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, antara lain adat-istiadat, kebiasaan dan sejarah.<sup>7</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, mengutip Harold Titus, Jalaluddin dan Abdullah Idi mengatakan: *Pertama*, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. *Kedua*, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. *Ketiga*, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. *Keempat*, filsafat merupakan analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep. *Kelima*, filsafat merupakan sejumlah permasalahan yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat.<sup>8</sup>

Imam Barnadib menjelaskan bahwa filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Dikatakan "menyeluruh", karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus hingga dibalik pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, hubungan dan pertalian antara semua elemen yang mengarahkan perhatian dan kedalaman tentang kebajikan dimungkinkan untuk dapat ditemukan. Dikatakan "sistematis", karena filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Sebagai ilustrasi, di zaman Yunani, filsafat bukan merupakan suatu disiplin teoretis dan spesial, akan tetapi suatu cara hidup yang konkret, suatu pandangan hidup yang total mengenai manusia dan alam yang menyinari seluruh kehidupan seorang. Selanjutnya, dengan kehidupan atau perkembangan peradaban manusia dan permasalahan

---

<sup>7</sup>Jalaluddin dan Usman Said, "Filsafat Pendidikan Islam...", *loc.cit.*, hlm. 8.

<sup>8</sup>Jalaluddin dan Abdullah Idi, "Filsafat Pendidikan...", *op.cit.*, hlm. 1-2.

kehidupan yang dihadapinya. pengertian yang bersifat teoretis seperti yang dilahirkan filsafat Yunani itu kehilangan kemampuannya untuk memberi jawaban yang layak tentang kebenaran. Peradaban itu telah mengakibatkan manusia melakukan loncatan besar dalam sains, teknologi, kedokteran, dan pendidikan. Perubahan itu mendorong manusia memikirkan kembali pengertiannya tentang kebenaran atau nilai-nilai kebenaran. Karena setiap terjadi perubahan dalam peradaban akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang berlaku, karena antara perubahan peradaban dan cara berpikir manusia terdapat hubungan tibal balik. Perubahan dalam adat dan kebiasaan serta sejarah biasanya dimulai dengan adanya sekelompok orang yang yakin akan suatu nilai ideal atau yang tertarik oleh pandangan hidup yang lain.<sup>9</sup>

Jadi, berpikir seperti ini, merupakan sebagai karakteristik dan berpikir filosofis. Berpikir secara filsafat merupakan berpikir radikal, sistematis, menyeluruh dan mendasar untuk suatu permasalahan yang mendalam. Sama halnya berpikir secara "spekulatif", termasuk dalam rangkaian berpikir dengan cara merenung, memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya, tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objek sesuatu tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengerti hakikat sesuatu.

Jalaluddin dan Abdullah Idi<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa kebenaran filsafat merupakan kebenaran yang relatif. Maksudnya, kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar itu masih tergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain, belum tentu akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lain. Sebaliknya, suatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain dalam suatu zaman, akan berbeda pada zaman berikutnya. Filsafat diperlukan manusia sebagai upaya merespons atau menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil

---

<sup>9</sup>Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hlm. 11-12.

<sup>10</sup>Lihat: (Jalaluddin dan Abdullah Idi, "Filsafat Pendidikan....", *op.cit.*, hlm. 4-5).

pemikiran sistematis, integral, menyeluruh dan mendasar. Jawaban seperti itu juga digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan bertalian dengan beragam bidang kehidupan manusia.

Jadi, pemikiran filsafat itu berbeda dengan pemikiran yang lain. Berpikir filosofis memiliki sejumlah ciri yang jelas, antara lain, tertuju pada upaya mengadakan pemeriksaan dan penemuan. Berpikir filosofis juga pengertian mengenai berpikir radikal dengan menggunakan kemampuan yang optimal dari akal budi manusia.

## A. Etika, Etiket, Norma dan Akhlak

Secara etimologi (kebahasaan), *etika* berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, *akhlak*, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dibedakan dalam tiga pengertian utama, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>11</sup>

Antara *etika* dan *etiket* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah etika dan etiket bertalian dengan tindakan dan perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Perbedaan antara etika dan etiket, seperti dikatakan Darmodiharjo dan Shidarta adalah *pertama*, etika berkaitan dengan cara perbuatan yang harus dilakukan seorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan dapat dilakukan antara ya dan tidak. *Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain. Beda halnya, etika tidak memerhatikan orang lain atau tidak. *Ketiga*, etiket bersifat relatif, di mana terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika lebih

<sup>11</sup>Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 173.

bersifat mutlak, dan prinsip etika sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar-menawar. Keempat, etiket hanya bertalian dengan lahiriah saja, dan etika bertalian dengan dimensi internal manusia. Dalam kaitannya dengan etiket seorang bisa munafik, tetapi dalam kaitannya dengan perilaku etis, seorang tidak bisa bersifat kontradiktif.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya, antara *etika* dan *etiket* ini, K. Berten menulis bahwa kerap kali dua istilah ini dicampuradukkan. Padahal, perbedaan di antara keduanya sangat hakiki. Etika berarti "moral" dan "etiket" berarti "sopan santun" (tentu saja, ada arti lain: "secarik kertas yang ditempelkan pada botol atau kemasan barang"). Dilihat dari bentuk kata, sebetulnya, tidak ada hubungan antara keduanya. Dalam bahasa Inggris, "etika" berasal dari kata *ethics* dan "etiket" berasal dari kata *etiquette*. Akan tetapi, dilihat dari arti atau maknanya, kedua kata ini, juga memiliki persamaan. Yakni, *pertama*, etika dan etiket bertalian dengan perilaku manusia. *Kedua*, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Justru karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut mudah dicampuradukkan.<sup>13</sup>

Di samping adanya persamaan, terdapat sejumlah perbedaan antara etika dan etiket. Yakni, *pertama*, etiket bertalian dengan *cara* suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara sekian banyak cara, etiket memperlihatkan cara yang tepat, maksudnya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, bila seorang karyawan memberikan suatu kepada pimpinan (atasan), yang bersangkutan harus memberikannya dengan menggunakan tangan kanan. Dipandang melanggar etiket, bila seorang memberikan suatu dengan tangan kiri. Tetapi, etika tidak terbatas pada cara dilakukan seorang pada suatu perbuatan, etika memberi norma tentang *perbuatan* itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ya atau tidak. Suatu ilustrasi: Mengambil barang orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Di sini, cara melakukan perbuatan tidak

<sup>12</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 257.

<sup>13</sup>K. Berten, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 9.

perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perbuatan etisnya. “Jangan mencuri” merupakan norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, di sini, sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak sebatas cara perbuatan dilakukan, melainkan bertalian dengan perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.<sup>14</sup>

*Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Sekadar ilustrasi, seorang dipandang melanggar etiket bila makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, dan sejenisnya. Tapi, jika dia makan sendiri, dia tidak akan melanggar etiket, karena tidak ada saksi mata. Sebaliknya, etika tidak berlaku atas hadir tidaknya orang lain. Bila sesudah makan di restoran, seorang kabur tanpa bayar, dia telah berlaku tidak etis, juga tidak diketahui oleh pemilik. “Larangan mencuri” selalu berlaku, apakah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.<sup>15</sup>

*Ketiga*, etiket bersifat relatif. Suatu yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sebagai ilustrasi, makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Beda halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolut. “Jangan berbohong”, “jangan mencuri”, “jangan berbohong”, “jangan membunuh” merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi “dispensasi”. Jadi, relativitas etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi. *Keempat*, bila berbicara tentang etiket, berarti memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etiket memandang manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai “musang berbulu ayam”: “dari luar sangat sopan dan halus tetapi dari dalam kebusukan”. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan suatu kontradiksi, bila seorang selalu berpegang pada tiket dan sekaligus bersikap munafik. Tapi, orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik, sebab, seandainya dia munafik, hal itu dengan sendirinya berarti dia tidak bersikap etis. Di sini, memang terdapat kontradiksi. Orang yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>15</sup>*Ibid.*

bersikap etis merupakan orang yang sungguh-sungguh baik. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan terakhir ini paling penting di antara empat perbedaan yang dibahas tadi.<sup>16</sup>

Setelah membedakan antara etis dan etiket akan berimplikasi lebih luas bila mencampuradukkan kedua istilah ini tanpa berpikir lebih jauh. Bisa sampai fatal—dari segi etis—, bila orang menganggap etiket saja apa yang sebenarnya termasuk ranah moral. Sebuah ilustrasi dari Berten<sup>17</sup> yang diambil dari lingkungan perguruan tinggi. Yakni, dibanyak kampus di Indonesia, diperoleh larangan memakai sandal. Jika larangan ini dilanggar, sering ada sanksi cukup berat. Di sisi lain, dalam hal kejujuran, perguruan tinggi kita pada umumnya tidak terlalu ketat. Menyontek pada waktu ujian banyak dilakukan, dengan beragam variasi. Plagiarisme dalam menyusun *paper*, skripsi atau tesis tidak begitu dipedulikan. Banyak tulisan mahasiswa sebagian besar diambil dari internet atau dikerjakan orang lain (dengan pembayaran). Jika dikritisi lebih jauh, dilarang memakai sandal di kampus sebenarnya hanya suatu etiket saja, sedangkan ketidakjujuran yang jauh lebih penting karena merupakan masalah etika. Dari segi pendidikan, soal sandal, kata Berten, bukanlah terlalu penting, karena di tempat kerja nanti si mahasiswa dengan mudah akan menyesuaikan diri dengan aturan tentang cara berpakaian yang berlaku di perusahaan. Namun, jika sejak pendidikan profesionalnya dia sudah akrab dengan praktik-praktik tidak jujur otomatis dia akan ikut juga dalam praktik-praktik kotor di perusahaan.

Antara *etika* dan *estetika* mempunyai sejumlah perbedaan. Yakni: (1) pembahasan etika lebih menitikberatkan pada baik-buruknya atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban tanggung jawab manusia. (2) etika berhubungan dengan dasar pertimbangan tentang baik-buruk, salah-benar tindakan manusia. (3) etika terapan menjadi fokus perhatian, misalnya adanya etika profesi, kode etik, rambu-rambu etis, etika politik, etika lingkungan, bietika, dan lain-lain. Estetika itu sendiri memiliki sejumlah karakter: (1) mempersoalkan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

seni atau keindahan yang dihasilkan manusia, dan persoalan apresiasi yang harus dilakukan dalam proses kreatif manusia. (2) estetika: estetika deskriptif (menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan) dan estetika normatif (menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan). (3) estetika berhubungan dengan imitasi atau reproduksi realitas. Seni sebagai ekspresi sosial atau ekspresi personal atau suatu realitas.<sup>18</sup>

Muhammad Mufid menulis, *sifat dasar etika* adalah sifat kritis, dikarenakan etika bertugas: *Pertama*, untuk mempermasalahkan norma yang dipandang berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. *Kedua*, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. *Ketiga*, etika mempermasalahkan juga hak setiap lembaga/institusi, seperti orangtua, sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah atau larangan yang mesti ditaati. *Keempat*, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. *Kelima*, etika menjadi alat pemikiran rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau dibingungkan oleh norma-norma yang ada. *Etika* sering dinamakan *filsafat moral*. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika mengkaji baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, dan sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempermasalahkan bagaimana manusia semestinya berbuat dan bertindak. Tindakan manusia itu sendiri ditentukan beragam norma. Etika membantu manusia untuk menentukan sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara *etika deskriptif* dan *etika normatif*. *Etika deskriptif* memberi gambaran dari gejala kesadaran moral, dari norma dan konsep-konsep etis. *Etika normatif* tidak berbicara

<sup>18</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op.cit.*, hlm. 178.

lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Dalam etika normatif, norma dinilai dan setiap manusia ditentukan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, hubungan antara *filsafat* dan *etika*. Seperti diketahui bahwa filsafat adalah sejumlah keyakinan, sikap, cita-cita, aspirasi, dan tujuan, nilai, norma, aturan, dan prinsip etis. Filsafat juga mencari kebenaran, suatu persoalan nilai-nilai dan pertimbangan nilai untuk melakukan hubungan kemanusiaan secara benar dan beragam pengetahuan apa yang buruk atau baik untuk menentukan bagaimana seorang mesti memilih atau bertindak dalam kehidupannya.

Florence Kluckhohn<sup>20</sup> mengidentifikasi sejumlah orientasi nilai bertalian dengan masalah kehidupan dasar: *Pertama*, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukan alam. *Kedua*, manusia menilai sifat/hakikat manusia sebagai yang baik, atau campuran antara baik dan buruk. *Ketiga*, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. *Keempat*, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. *Kelima*, manusia menilai hubungan dengan orang lain, dalam kedudukan yang langsung, individualistis, atau posisi yang sejajar. Orientasi nilai itu tampak berbeda di antara berbagai kebudayaan dan sub-kebudayaan dalam masyarakat. Orientasi nilai budaya itu dinyatakan dalam konsep, sikap, harapan orang, yang bertalian dengan diri mereka atau orang lain, khususnya sebagai bagian dari beragam peranan sosial mereka miliki dalam masyarakat.

Sementara itu, nilai-nilai sekurangnya mempunyai empat tingkatan. Yakni, *pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang

<sup>19</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat Komunikasi...", *loc.cit.*, hlm. 173-174.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 175-176.

profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. Keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etik itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia; motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia.<sup>21</sup>

Haryatmoko mengungkapkan bahwa konsep "etika" sering digunakan sebagai persamaan dengan "moral". Di balik kedua istilah ini, terkandung nuansa dua tradisi pemikiran filsafat moral berbeda. Aristoteles, dalam buku *Ethique a'Nicomaque*, menulis selain kata 'ethos', yang bermakna "kualitas suatu sifat" digunakan juga istilah 'ethos', yang bermakna kebiasaan. Arti 'ethos' adalah suatu cara berpikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas cara kepemilikan seorang terhadap kelompok. Istilah yang kedua ini relevan dengan terjemahan kata "moralis" (*mos, moris*= adat, kebiasaan) dalam bahasa Latin. Istilah *moralis* selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti "moral" sebagaimana digunakan dalam definisi terkini.<sup>22</sup> Edi Harapan dan Syarwani Ahmad,<sup>23</sup> mengungkapkan bahwa etika dan moral hampir sama pengertiannya, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yakni moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Dua istilah itu selalu ada dalam kehidupan manusia, dalam interaksi sosial satu sama lain.

Moral dihubungkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan entah relatif entah mutlak. Jadi, "moral" merupakan wacana normatif dan imperatif yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 176-177.

<sup>22</sup>Haryatmoko, *Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 2-3.

<sup>23</sup>Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, *Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 169.

diungkapkan dalam konteks baik/buruk, benar/salah yang dipandang sebagai nilai mutlak atau transenden. Isinya berupa kewajiban-kewajiban. Konsep "moral" merujuk kepada semua aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam konteks baik dan buruk, benar dan salah.

Etika dilihat sebagai suatu refleksi filosofis tentang moral. Etika merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena dapat pula kemungkinan bertindak) yang membicarakan tentang baik dan buruk. Etika lebih dilihat sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan kebijaksanaan. Paul Ricoeur (1990) mengatakan istilah "moral" dan "etika" dihubungkan pada dua tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Istilah "moral" dihubungkan dengan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi). Moral meruju ke kewajiban, norma, prinsip bertindak, imperatif ("kategoris" = aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang merujuk ke dirinya sendiri sebagai keharusan). Etika dihubungkan dengan tradisi pemikiran Aristoteles yang bersifat "teleologis" (telos = finalitas atau tujuan). Paul Ricoeur mendefinisikan "etika" sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Biasanya etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral merujuk pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Tekanan etika diletakkan pada dimensi reflektif dalam upaya mencari bagaimana bertindak (bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma).<sup>24</sup>

Norma sosial merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota kelompok dan anggota kelompok itu diharapkan akan mematuhi. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagian besar anggota masyarakat tentang layak atau tidak layaknya suatu tingkah laku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat dalam menghadapi keadaan tertentu. Penerimaan dan

<sup>24</sup>Seperti dalam kutipan: (Haryatmoko, "Etika Publik....", *op.cit.*, hlm. 2-3).

kepatuhan terhadap norma sosial sangat krusial dalam upaya menjaga harmoni antarkelompok dalam masyarakat. Sejumlah norma sosial yang diterima oleh masyarakat pada umumnya antara lain ialah larangan terhadap pembunuhan, pencurian dan perampokan. Tanpa norma sosial kehidupan manusia akan terganggu dan masyarakat menjadi kacau-balau.<sup>25</sup>

Diungkapkan Mufid<sup>26</sup>, etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan/atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua kaidah dasar moral: *Pertama*, kaidah sikap baik, di mana seorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik, baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkret, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. *Kedua*, kaidah keadilan, di mana

---

<sup>25</sup>Ketika suatu perilaku dianggap sebagai suatu norma yang bersifat normatif, dari situlah muncul hakikat bahwa tindakan itu mematuhi atau sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat pada umumnya. Tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial atau bertentangan dengannya dianggap sebagai perilaku menyimpang (*deviance*). Misalnya, perilaku *homo-sexual* yang dianggap *deviance*. Sedangkan *hetero-sexual* diterima sebagai norma. Adanya norma sosial sebagai akibat dari adanya interaksi sosial. Norma mencerminkan harapan bersama mengenai tingkah laku dalam suatu kelompok. Norma sosial bukan suatu yang tetap, tetapi bisa berubah dari masa ke masa. Pengetahuan yang baru dan keadaan yang berubah bisa menyebabkan berkembangnya norma-norma baru. Norma-norma sosial sangat erat hubungannya dengan konsep *folkways* dan *mores* yang dipopulerkan W.G. Sumner. *Folkways* adalah perilaku standar atau cara-cara bertindak yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat tertentu. Konsep ini berlandaskan adat-istiadat dan tradisi dan diwarisi dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. *Folkways* terdiri dari bentuk sopan santun dan cara-cara bertindak yang diterima dalam kehidupan sosial. *Folkways* tidak dilegitimasi oleh hukum, tetapi oleh kontrol sosial yang tidak formal. Perbuatan yang bertentangan dengan *folkways* biasanya tidak dianggap sebagai suatu yang serius.

*Mores* merupakan norma sosial yang lebih besar bagi kehidupan sosial. *Mores* menentukan standar moral suatu perilaku. Anggota suatu masyarakat wajib mematuhi *mores* dan mereka yang ingkar akan menghadapi hukuman tidak formal yang keras, seperti ejekan, hinaan dan penyingkiran dari kelompok-kelompok yang berhubungan. Jadi, *mores* juga merupakan satu bentuk kontrol sosial. Suatu contoh *mores* yang bisa dikatakan mendunia adalah *incest taboo* atau larangan kawin dengan saudara. Bagi sosiolog penganut fungsional, norma sosial adalah penting dalam kontrol sosial dalam upaya melestarikan ratanan sosial. Talcott Parsons, misalnya, memberi satu keutamaan kepada peraturan normatif dalam teorinya mengenai sistem sosial. Dengan berbuat demikian, ia mengabaikan unsur konflik sosial yang senantiasa mengancam konsensus sosial. Lihat: (Muhammad Mustari, *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan*, Pengantar: Didik Suhardi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 112-113).

<sup>26</sup>Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op.cit.*, hlm. 180.

sebagai prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

Selanjutnya, antara *moral* dan *hukum* terdapat suatu hubungan yang erat. Antara satu dengan yang lainnya saling memengaruhi dan membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh moral, karenanya, hukum harus dinilai atau dapat diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti jika dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya telah menempatkan tahap cukup matang. Moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang jika tidak dikukuhkan, diungkapkan, dan dilembagakan dalam masyarakat. Sehingga, hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas. Meskipun terdapat hubungan erat, antara moral dan hukum juga memiliki sejumlah perbedaan. Yakni, *pertama*, hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka, hukum lebih mempunyai kepastian yang lebih besar. *Kedua*, norma bersifat subjektif dan dampaknya menimbulkan pertanyaan terhadap pentingnya kejelasan tentang etis dan tidaknya. *Ketiga*, hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja. *Keempat*, sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seorang. *Kelima*, sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan. *Keenam*, sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang. *Ketujuh*, sanksi hukum pada dasarnya didasarkan pada kehendak masyarakat. *Kedelapan*, moralitas tidak akan dapat diubah oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Dapat dijelaskan, bahwa adanya perbedaan antara *etika* dan *agama*. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika dapat membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional. Agama menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama terdapat etika, dan agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama lain, tetapi terpisahkan secara teoretis. Dalam konteks praktis, akan sulit mengenyampingkan salah satu di antaranya. Seorang tidak

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

bisa berbuat hanya atas dasar agama saja tanpa memerhatikan etika atau sebaliknya. Keberagamaan pada prinsipnya memerhatikan etika yang berlaku, sebaliknya, seorang dikatakan memiliki etika, jika kemudian memerhatikan agama yang ada.<sup>28</sup>

Dikatakan Mufid selanjutnya bahwa wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki seorang individu atau kolektif masyarakat. Wacana etika memiliki sejumlah unsur utama: *kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip moral dasar*. Kebebasan merupakan unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandaikan kebebasan. Kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kebebasan eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini bermakna bahwa kebebasan ini bersifat positif. Tentu saja, kebebasan dalam praktik hidup sehari-hari memiliki banyak jenis: kebebasan jasmani-rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. *Tanggung jawab* merupakan kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul dari tindakan. *Tanggung jawab* mengandaikan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan merupakan syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. *Hati nurani* merupakan penghayatan tentang nilai baik atau buruk bertalian dengan situasi konkret. *Hati nurani* memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Jadi, *hati nurani* berhubungan dengan kesadaran.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

<sup>29</sup>Kesadaran merupakan kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. *Hati nurani* sangat bersifat retrospektif dan prospektif. *Hati nurani* juga bersifat personal. *Hati nurani* juga merupakan suatu ungkapan atau norma yang bersifat subjektif. Prinsip kesadaran moral merupakan beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi semua program tindakan moral. Prinsip kesadaran moral mengandaikan pemahaman totalitas individu atas semua tindakan dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam kesadaran moral: *prinsip sikap baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri dan orang lain*. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat

## B. Kode Etik dan Profesionalisme Guru

Profesi guru, pada masa lalu, identik dengan suatu pekerjaan kurang diminati dan cenderung terpinggirkan. Hanya orang tua yang anaknya berlatar belakang sosial-ekonomi menengah kebawah umumnya berkeinginan agar anak-anaknya kelak menjadi guru. Hal itu, sangat bertalian dengan rendahnya penghargaan terhadap profesi ini. Mulai dari kesejahteraan, lingkungan kerja yang buruk, dan lainnya. Tidak sedikit pula guru, pada waktu itu, harus mencari pekerjaan sambilan guna memperoleh pendapatan tambahan. Setelah adanya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan dalam hampir sepuluh tahun selanjutnya, profesi guru ini mulai diminati kalangan menengah yang berlatar belakang sosial-ekonomi lebih baik, terutama setelah diterapkannya pelaksanaan sertifikasi guru yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

"*Professional*" berasal dari kata "*profesi*" yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut. Pendidikan lebih lanjut ini terutama bertalian dengan bidang sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral.<sup>30</sup>

"*Profesi*" itu sendiri berasal dari bahasa Latin: *professus* berarti "suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius". Secara historis pemakaian istilah itu bahwa seorang yang memiliki profesi berarti adanya ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dipandang telah menodai "kesucian"

---

pelaksanaan sikap baik. Prinsip sikap baik menjadi dasar seorang untuk bersikap adil dan hormat. Lihat: Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op.cit.*, hlm. 181).

<sup>30</sup>Satandar moral dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping harus memiliki keahlian, kemampuan atau keterampilan tinggi, yang bersangkutan dituntut berperilaku baik dan berbudi luhur atau akhlak yang baik (*akhlakul karimah*).

profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi itu perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. Pentingnya menjaga "kesucian" atau "kemuliaan" profesi ini agaknya relevan dengan pendapat Suparlan,<sup>31</sup> bahwa profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan.

Kecenderungan terkini, era globalisasi, sesuai dengan dinamika bidang dan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan bisa meliputi: jasa konsultan, aktivitas bisnis, artis, seniman, wartawan, dokter, sosial, hukum, politik, juru bicara (komunikator), dan lain-lain. Di era globalisasi dengan kemajuan sains dan teknologi ini, semakin berkembang berbagai jenis profesi pekerjaan dan memunculkan sejumlah kalangan profesional berdasarkan jenis pekerjaan itu.

Suatu aspek terpenting dari proses pembelajaran adalah kualitas pendidik atau guru. Suatu asumsi bahwa, meskipun sejumlah pendidik memiliki sama profesi sebagai pendidik atau guru; dalam faktanya, mereka memiliki perbedaan dan beragam level atau derajat profesionalnya. Seorang guru profesional dapat dikatakan bahwa dia memiliki tidak hanya pengalaman pendidikan atau titel sarjana tertentu sebagai persyaratan normatif dan administratif sebagai seorang guru; tetapi juga, dia perlu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu lainnya. Myra Pollack and David Miller Sadker mengatakan bahwa seorang profesional:

*".... a professional is a person who is an expert, and by view of that expertise is permitted to operate fairly, independently, to make decisions, to exercise discretion to cut a little to the left or to the right. If we are to achieve that professional status, we have to take a step beyond collective bargaining—not to abandon it, but to build on it, develop new processes, new institutions, new procedures that will bring us what teachers want in addition: status, dignity, a voice in professional matters, the compensation of a professional".<sup>32</sup>*

Hal ini jelas bahwa seorang guru profesional merupakan seorang yang dipandang kompeten dan profesional dalam mengajar atau proses pembelajaran, di mana dia juga dapat membuat keputusan-keputusan

<sup>31</sup>Suparlan, *Guru sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat, 2006, hlm. 7.

<sup>32</sup>Myra Polack Sadker & David Miller Sadker, *Teachers, Schools, and Society*, Second Edition, USA: McGraw-Hill, Inc., 1991, p. 45.

secara adil dan independen. Jika seorang menjadi seorang profesional dalam mengajar dan mendidik dalam kegiatan pembelajaran.

Suatu yang pasti bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan tertentu. Frank Horton Blackington dan Robert S. Patterson<sup>33</sup>, dalam bukunya *School, Society and The Professional Educator*, terdapat sejumlah kriteria dalam menerapkan profesi: *Pertama*, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dan didasarkan pada persoalan yang mapan (berkedudukan baik) serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat. *Kedua*, profesi harus menuntut adanya suatu pelatihan profesional yang memadai dan membudaya. *Ketiga*, profesi menuntut adanya suatu badan pengetahuan yang sistematis dan terspesialisasi. *Keempat*, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya, yakni sebagai keterampilan sebagian murni dan sebagian lagi diperoleh. *Kelima*, profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengalaman yang teruji.

Hal ini tampak bahwa profesionalisme merupakan ide yang berkembang sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karenanya, dalam mengambil keputusan yang tepat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, makin lama makin sulit, karena memerlukan informasi dan data memadai. Profesi, dalam hal ini, berbeda dengan pekerjaan lainnya karena fungsi sosialnya, yakni mengabdikan kepada masyarakat. Profesi guru dapat diartikan bahwa suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang diharapkan. Zakiah Daradjat (1996)<sup>34</sup> mengungkapkan bahwa guru merupakan pendidik yang profesional, karenanya secara implisit, seorang guru telah merelakan dirinya menerima sebagian tanggung jawab pendidikan dari orangtua para anak didik. Para orangtua mengharapkan amanah yang dititipkannya kepada guru dan sekolah agar dapat mengembangkan potensi, minat dan

<sup>33</sup>Lihat kutipan: (Abdullah Idi, 'Prospek Profesi Guru', *Sumatera Ekspres*, 21 Desember 2005).

<sup>34</sup>*Ibid.*

bakat anak dengan seoptimal mungkin. Tidak semua orang dapat menjadi guru karena profesi membutuhkan profesionalisme dan membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam bekerja. Seorang yang memilih profesi guru, karenanya, mesti mengembangkan sejumlah kompetensi: pribadi, sosial, dan profesional.

Dalam proses pembelajaran, sesungguhnya, suatu usaha aktual dalam mengimplementasikan kurikulum tekstual atau ideal (*ideal curriculum*) ke dalam pembelajaran kurikulum aktual (*actual curriculum*). Suatu proses pembelajaran yang dikatakan berhasil, apabila kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam perencanaan teks kurikulum tidak berbeda jauh derajatnya dengan realitas-implementasi kurikulum dalam pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, adalah seorang gurulah yang paling menentukan dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan dari proses pembelajaran itu, mengingat seorang guru merupakan tidak hanya sebagai pendidik, pengajar, dan juga sebagai seorang pelaksana dan pengembang kurikulum (*a curriculum developer*).

Untuk suatu proses pembelajaran yang relevan dan berkualitas, *up to date* dengan kebutuhan upaya pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) masa depan yang diimplementasikan dengan benar; seorang guru didorong untuk selalu memiliki perhatian terhadap betapa pentingnya dimensi profesional dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Seorang pendidik diharapkan memiliki perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi kecenderungan globalisasi dalam perubahan paradigma belajar, yakni dari suatu "paradigma baru" (*an old paradigm*) kepada suatu paradigma baru (*a new paradigm*). Dampak globalisasi pada perkembangan peradaban dunia merupakan suatu pelajaran penting bagi para pendidik yang senantiasa perlu mengembangkan profesi sebagai pendidik dan sekaligus pengajar, senantiasa responsif terhadap problem belajar, dan inovatif dalam perubahan sosial pendidikan.

Usaha-usaha untuk mengembangkan kualitas dan guru profesional dalam pembelajaran di sekolah merupakan suatu perhatian bernilai. Dalam respons terhadap globalisasi dan permintaan-permintaan pada kualitas kebutuhan pentingnya pendidik profesional, kebutuhan-kebutuhan belajar anak didik dalam menciptakan kualitas pembelajaran,

kompetitif, dan independen, persyaratan-persyaratan, dan pentingnya guru profesional diharapkan dapat dikembangkan secara terus-menerus. Seperti diungkapkan Sudarwan Damin<sup>35</sup> bahwa mengingat kompetisi dalam berbagai perspektif sosial, ekonomi, sains-teknologi, dan kemanusiaan yang berkembang secara luas, kapabilitas diperlukan dalam merespons beragam jenis pekerjaan yang berkembang pesat itu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dunia kerja sesuai dengan permintaan persyaratan-persyaratannya dengan realitas di sekolah, di mana sering kali direspons sekolah dengan sangat lamban. Ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada pendidik atau guru sering kali dibatasi oleh kalender kerja, dan juga masih rendahnya kualitas pendidik itu sendiri.

Sebagai kompetisi dalam berbagai perspektif sosial, ekonomi, teknologi, dan humanitas yang terus meningkat secara luas, sejumlah bentuk kapabilitas yang diperlukan dalam melaksanakan beragam jenis pekerjaan pun meningkat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari sekolah kadang kala tidak relevan atau tidak sesuai dengan terhadap meningkatnya permintaan standar persyaratan-persyaratan pekerjaan itu, di mana pelayanan di sekolah cenderung lambat. Ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan yang dapat diberikan oleh pendidik/guru sering dibatasi oleh kalender kerja, selanjutnya, kualitas dan kapabilitas pendidik itu sendiri dirasakan terbatas.

Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa modernisasi (*modernization*) berarti rasionalitas dalam memperoleh suatu kekuatan maksimal dari pemikiran dan bekerja untuk kebahagiaan manusia. Lebih lanjut, Madjid mengatakan bahwa modernisasi berarti pemikiran (*thinking*) dan pekerjaan dengan *sunnatullah* atau dengan peraturan (*the law of god*) yang merupakan hak (*right*), karena kebenaran *sunnatullah* itu. *Sunnatullah* telah dimanifestasikan dalam *nature*, sehingga untuk menuju modern, *pertama*, manusia harus mengetahui *sunnatullah* atau *the laws of nature*. Pengetahuan manusia terhadap *sunnatullah* adalah apa yang disumbangkan

<sup>35</sup>Sudarwan Damin, *Inovasi Pendidikan, Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 19.

terhadap tumbuhnya ilmu pengetahuan (*science*). Sebagai hasilnya, sering dikatakan bahwa cara-cara sains modern, (*modern scientific means*). Karena itu, sains pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) diperoleh rasio atau akal manusia, yang juga dapat dikatakan sebagai suatu rasional modern (*a modern rational*). Seorang dikatakan modern, apabila yang bersangkutan dapat berpikir dan bertindak secara ilmiah dan secara rasional.<sup>36</sup>

Sejalan dengan perkembangan aktivitas manusia, globalisasi mengandung sejumlah kecenderungan (*trends*). Klasifikasi kecenderungan (*trends*) itu tergantung pada sejauh mana seorang memahami dinamika-dinamika dunia, dan sejauh mana dia merasakan terlibat dalam lingkungan dan kondisi global. Emil Salim mengatakan bahwa globalisasi memiliki sejumlah kecenderungan, antara lain: perkembangan ekonomi global, lebih cepatnya perkembangan sains-teknologi, perubahan demografis, perubahan politik, dan perubahan sistem nilai.<sup>37</sup> Supriyoko menuturkan bahwa konsep dasar globalisasi dapat dilihat dari aspek dependensi dalam isu sosial, politik dan budaya, peranan informasi yang strategis, dan era industri sebagai kemajuan suatu negara.<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk beragam perkembangan peranan strategis informasi, yakni kontrol dunia sungguh ditentukan sekelompok pihak yang mengontrol informasi. Selanjutnya, kemajuan informasi itu telah mengurangi sekat dan batas dunia. Sejumlah eviden memperlihatkan di sini, misalnya, pernyataan politik para pemimpin dunia secara bersamaan dapat diserap dan dilihat oleh banyak manusia di dunia; *event-event* politik seperti pemilihan umum di berbagai belahan dunia dapat dilihat secara cepat dan akurat melalui media TV atau internet.

Tren atau kecenderungan lain dari globalisasi adalah cepatnya pertumbuhan populasi penduduk dunia. Berbagai *problem* sebagai akibat pertumbuhan populasi penduduk dunia, misalnya: ancaman kelaparan,

---

<sup>36</sup>Muslim Abdurrahman, "Bagaimana Indonesia dibaca Pemikir Islam: Sebuah Resensi Pemikiran", dalam Muntaha Azhari dan Mu'min Saleh (Eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Cetakan I, Jakarta: P3M, 1989, hm. 217.

<sup>37</sup>Emil Salim in *Kompas*, 15/4/2004.

<sup>38</sup>Supriyoko, Pendidikan Politik di Era Globalisasi, dalam Mansyur Amin dan Ismail S. Ahmad (Eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSNU, 1993, hlm. 103.

ekologi, polusi, dan masalah lainnya yang bertalian dengan kesejahteraan hidup manusia. P. Kenedy mengungkapkan:

.... *the agricultural and industrial development have also affected the quantity and quality of the earth's eater supplies. The larger cause, once again, is the increase in global population this century...*<sup>39</sup>

Problem kemiskinan (*poverty*) merupakan menjadi perhatian banyak pihak. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Sekretaris Jenderal PBB (*United Nations*), Koffi Anand, memulai suatu program, berupa Program *Mellinium Development Goals* (MDGs) untuk mengurangi angka kemiskinan di negara berkembang (*developing countries*) dan negara terbelakang (*under the developing countries*) dalam jangka waktu 15 tahun. Faktanya, sama dengan tahun 2010, secara jelas bahwa level angka kemiskinan dunia mengalami peningkatan menjadi sekitar 100 juta jiwa dari sekitar 2 miliar jiwa sebelumnya, meningkat 2,1 miliar.

Komunitas dunia juga berhadapan dengan kerusakan lingkungan. Dalam konteks kerusakan lingkungan ini, negara maju (*developed countries*) sering berargumen bahwa negara berkembang (*developing countries*) sebagai agen atau sumber terjadinya degradasi lingkungan dikarenakan prose deforesasi untuk sumber-sumber ekonomi (*economic resources*). Hal ini telah berakibat adanya sejumlah reaksi kuat dari negara berkembang dan berargumen balik bahwa yang melakukan polusi paling besar adalah negara maju melalui beragam sumber polusi yang dilakukannya. Perbedaan pandangan-pandangan antara negara maju dan negara sebenarnya hanyalah suatu bahan perdebatan tanpa final. Suatu hal pasti bahwa isu ekologi dan polusi telah menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat pada banyak negara di dunia dan bersifat mondial.

Baik negara maju maupun negara berkembang telah memperlakukan ekologi dengan buruk karena kepentingan dan motivasi industri dan ekonomi. Di negara berkembang telah terjadi kerusakan lingkungan secara masif seperti *illegal logging* tanpa kontrol, penambangan sumber alam secara besar-besaran tanpa kontrol pula, dan penambangan sumber daya alam di laut pun sering kali merusak polusi air dan merusak ekosistem laut.

---

<sup>39</sup>P. Kenedy, *Preparing for Twenty First Century*. Australia: Harper Collin, 1993, hlm. 101.

Lebih jauh, kerusakan ekologi dalam berbagai bentuknya berdampak pada proses hilangnya kekayaan yang seyogianya digunakan bagi kepentingan kehidupan manusia. Sehingga, suatu hal yang harus dilakukan para pemimpin negara-negara di dunia adalah pentingnya usaha-usaha nyata dalam memperbaiki dan mengatasi kerusakan lingkungan itu, seperti dilakukannya *Conference for (Summit) Earth* berdasarkan *The Rio Declaration on Principles Forestry*.

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia, baik sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara. Tidak seorang pun dapat menghindari globalisasi. Tiap individu berhadapan dengan dua pilihan: *pertama*, dia menempatkan dirinya sendiri dan peranannya sebagai seorang pemain (*a player*) dalam perubahan di era global. *Kedua*, dia bisa saja menjadi korban (*victim*) dari era global itu. Globalisasi juga dapat berimplikasi terhadap dunia pendidikan. Dampak itu dapat berupa dampak positif dan negatif. Dalam konteks ini, kewajiban dan peranan seorang pendidik dalam berbagai jenjangnya, sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT) sudah dipastikan sangat dituntut berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human power resources*) sebagai pendidik atau guru.

Sejalan dengan perkembangan sains-teknologi dan semakin luasnya pengaruh globalisasi, seorang pendidik senantiasa diharapkan berperan sebagai agen dan motivasi dalam mentransfer sains-teknologi kepada anak didik. Seorang guru diharapkan dapat menghasilkan anak didik sebagai yang memiliki beragam kompetensi yang siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan nyata di era global. David Held<sup>40</sup> mengungkapkan bahwa intensifikasi terhadap regionalisasi dan globalisasi, khususnya pada era Pascaperang Dunia II, telah memberikan kontribusi secara simultan bagi perluasan pertanggungjawaban negara demokratis liberal dan bagi merosotnya kemampuan negara untuk berdiri sendiri secara efektif berhadapan dengan sejumlah tuntutan yang dibebankan kepadanya. Barang, modal, rakyat, pengetahuan, citra, komunikasi dan senjata, dan kejahatan, budaya, polusi, *drug*, *fashion* dan kepercayaan

<sup>40</sup>David Held, *Demokrasi dan Tatahan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Penerjemah: Damanhuri, Penyunting: Khamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149-150.

dengan mudah mengalir ke berbagai batas wilayah. Jaringan-jaringan tradisional, gerakan-gerakan dan hubungan-hubungan sosial pada hakikatnya meluas melalui semua bidang kegiatan manusia. Keberadaan sistem perdagangan, keuangan dan produksi global mengikat bersama-sama kemakmuran dan nasib rumah tangga, masyarakat dan bangsa seantero dunia. Agaknya, batas-batas wilayah semakin kurang penting sejauh kegiatan dan hubungan sosial tidak lagi berhenti.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Louis V. Gerstner, Jr., et al. dalam Abdullah Idi (2014)<sup>41</sup> mengatakan sekolah hendaknya memiliki karakteristik:

- (1) *the principal dynamic and communicative with the freedom to lead towards the vision of educational excellence,*
- (2) *has the vision, mission, and strategies to achieve the objectives have been clearly formulated,*
- (3) *competent educators who are always enthusiastic in implementing tasks by professionals with innovative,*
- (4) *students who are busy, vibrant and hard work in the learning process,*
- (5) *community and parents who play a role in supporting education.*

Dari pandangan Gerstner di atas dapat dijelaskan bahwa di era global, sekolah hendaknya memiliki seorang pimpinan (*principal*) yang dinamis dan komunikatif yang memiliki kebebasan dalam membawa visi pendidikan yang yang terbaik (*excellent*). Sekolah juga perlu memiliki visi, misi, dan strategi-strategi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah diformulasikan secara jelas. Selanjutnya, komponen pendidik (guru) diharapkan antusias dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan inovasi. Anak didik juga terlihat kerja keras dan sibuk dalam proses belajar. Dikatakan berikutnya, komunitas dan orangtua yang memiliki peranan sebagai pendukung (*support*) pendidikan.

Globalisasi sesungguhnya memiliki sejumlah tantangan, sebagaimana ditulis oleh Abdullah Idi dan Toto Suharto<sup>42</sup>, yang perlu diketahui dan diperhatikan para pendidik dalam kaitannya menuju pendidik yang profesional dalam mengajar.

<sup>41</sup>Dalam kutipan Abdullah Idi: (*Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan, Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2014*).

<sup>42</sup>Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Pengantar: J. Suyuthi Pulungan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 103-107.

Pertama, perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat dan fundamental. Dengan kondisi ini, seorang pendidik atau guru diharapkan menjadi responsif terhadap perkembangan sains-teknologi dan implikasinya terhadap dunia pendidikan. Responsif berteknologi yang baik, terutama terkait dengan dunia pendidikan yang menjadi dunia profesi mereka, seperti perlunya penggunaan multimedia dalam belajar. Tanpa adanya penguasaan sains dan teknologi dengan baik, maka seorang pendidik akan tertinggal bahkan sangat mungkin akan menjadi *victim* dari perkembangan sains dan teknologi itu.

Kedua, suatu krisis moral dan juga krisis akhlak yang menerpa bangsa dan negara tercinta, Indonesia, terutama sejak 1998 hingga kini, merupakan suatu krisis moral yang berdampak negatif terhadap bangsa dan negara Indonesia. Perubahan sosial terutama ditandai dengan perkembangan sains-teknologi yang pesat telah berdampak pula terhadap perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional pada masyarakat pun telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi di era global ini. Perkembangan sains dan teknologi berdampak positif maupun negatif terhadap generasi anak-anak dan pemuda bangsa, terutama berhubungan dengan efek dari hiburan dari media cetak maupun elektronik: TV, internet, dan lain-lain. Pascapemilu 2014, misalnya terdapat banyak contoh perilaku yang mengarah degradasi dan krisis akhlak, di mana masyarakat dipertontonkan dengan perilaku elit politik (eksekutif dan legislatif) yang kurang edukatif, baik dalam ucapan dan perilakunya, dalam dinamika politik di tanah air.

Ketiga, krisis sosial, seperti kriminal, pengangguran, dan kemiskinan seakan terus berkembang dan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dunia di era global ini. Sebagai hasil dari perkembangan industri dan kapitalisme munculnya berbagai problem sosial tersebut. Tidak semua lapisan masyarakat berbeda dapat berpartisipasi dan menikmati dunia industri dan kapitalisme itu. Mereka yang berlatar belakang lemah dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, akses, ekonomi, di era global ini, sangat besar kemungkinan jatuh pada "korban" (*victim*) daripada dampak industrialisasi dan kapitalisme.

Hal ini merupakan suatu tantangan bagi guru dalam merespons realitas sosial, khususnya berhubungan dengan pendidikan. Sekolah sebagai institusi formal pendidikan telah memperoleh kepercayaan agar dapat menghasilkan anak didik (*learners*) yang siap hidup dalam kondisi masyarakat yang senantiasa dinamis dan berbeda dari satu ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, sekolah diharapkan dapat menjadi suatu solusi (*a solution*) terhadap beragam problema sosial, terutama bertalian dengan kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan yang sering kali bukan sekadar bagian dari problem tetapi menjadi sebab dari *problem* sosial itu.

*Keempat*, krisis identitas sebagai suatu bangsa. Sebagai suatu bangsa dan negara di tengah pergaulan dengan negara dan bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa ini perlu memiliki suatu identitas (*nationalism*), suatu level kualitas warga negara yang tinggi (*a high-citizens*). Sebagai warga negara yang memiliki nasionalisme yang tinggi akan mendorong warga negara lainnya untuk "berkorban" terhadap negaranya sehingga hal itu akan menciptakan suatu sikap positif dan terbaik terhadap bangsa dan negara.

Pada dekade lalu, para generasi muda cenderung memiliki spirit nasionalisme yang cenderung degradasi. Hal ini, dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti kurangnya apresiasi generasi muda terhadap budaya asli bangsa Indonesia, gaya hidup (*life styles*) yang terkadang cenderung jauh dari budaya ke-Timuran: pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang, kebut-kebutan atau *geng* motor, kekerasan, perkelahian, dan lain-lain. Dengan melihat realitas perilaku negatif dari sebagian generasi muda ini, seorang guru sebagai "penjaga" nilai-nilai (*values*), termasuk nilai-nilai nasionalisme hendaknya dapat membawa dan mendorong kesadaran generasi muda terhadap pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Kelima*, keberadaan perdagangan bebas (*free trade*), baik di ASEAN, Asia Pasifik, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dan berbagai organisasi di bagian dunia lainnya. Kondisi ini memerlukan persiapan yang baik dan tepat, terutama dalam konteks kualitas sumber daya manusia (*human resources*). Suatu bangsa yang mendambakan kemajuan ke depan, memerlukan sumber daya manusia yang handal yang siap berkompetisi dengan bangsa lain di dunia. Karenanya, dunia pendidikan memiliki

suatu peranan begitu penting dan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia. Seorang guru, diharapkan memiliki suatu visi, integritas, jujur, disiplin, dedikasi, dan komitmen dalam menciptakan lulusan (*output*) pendidikan yang disertai dengan beragam kompetensi dan kekuatan moralitas yang diperlukan dalam profesi dan kehidupan sosial yang secara konstan mengalami perubahan.<sup>43</sup>

Berhubungan pada kecenderungan adanya suatu perubahan paradigma kehidupan sosial dalam berbangsa, setidaknya terdapat tiga prinsip (*baselines*) dari pendidikan nasional. *Pertama*, suatu referensi filosofis. Yakni, untuk dapat membangun kreativitas, budaya, dan peradaban; mendukung diseminasi nilai-nilai terbaik, membangun nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, agama, dan membangun keberlanjutan dan produktivitas berhubungan dengan kinerja yang kreatif dengan nilai-nilai moralitas.

*Kedua*, referensi nilai-nilai budaya. Yakni, nilai-nilai inti dari pendidikan sebagai referensi ideal dari kekuatan untuk independen dan terbaik, level instrumen, otonomi, kompeten, demokrasi, kesadaran, kreativitas, kompetitif, estetika, *wisdom*, moral, harkat, dignity, dan *pride*; pada level operasional, pentingnya kerja keras, *sportsmanship*, *readiness to compete*, *cooperate*, and *self-discipline*. *Ketiga*, strategi referensi lingkungan. Yakni, *still on going crises*, *reform birokrasi total life*, *economic*, *social*, *political*, *legal*, and *religious*; *early retirement*.

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar suatu kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. *Nilai profesional* dapat disebut juga dengan istilah *asas etis*. Chung dalam kutipan Abdullah Idi (2011) mengungkapkan nilai profesional atau asas

---

<sup>43</sup>Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 111.

etik terdiri dari: *Kejujuran*, menghargai hak-hak dan martabat, *Keterbacaan*, *keadilan* dan bertanggung jawab; *Keterbacaan*, *integritas* dalam hubungan; dan *Kemampuan* tanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>24</sup>

Dapat dijelaskan di sini bahwa kode etik dijadikan standar perilaku anggota profesi, dan sekaligus sebagai pedoman (*guidelines*). Masyarakat pun menjadikan kode etik sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi dapat berupa monopoli profesi, yang memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang kontradiksi dengan masyarakat. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan tentang perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang patut dilakukakan dan tidak dilakukakan. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Dilihat dari fungsi, kode etik memiliki fungsi ganda: *pelindung* dan *pengembangan* bagi profesi. Kode etik, dalam hal ini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Biggs dan Mocher (1986)<sup>25</sup> mengatakan ada tiga fungsi kode etik pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

K. Hartono mengungkapkan bahwa kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak lama, kode etik dipaparkan untuk mengatur perilaku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku, yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi semua kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah "Sumpah Hippokrates" yang dapat dipandang sebagai kode etik pertama bagi para dokter. Hippokrates merupakan dokter Yunani kuno yang

<sup>24</sup>Abdullah Id, *Atensi Kritis The Professional Ethics*, pada Program Pascasarjana (S2) Universitas PGRI Palembang, 2011, hlm. 5.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 7.

digelari 'bapak ilmu kedokteran' dan hidup dalam abad ke-5 SM. Sebagian ahli sejarah mengatakan belum tentu sumpah itu merupakan buah pena Hippokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan dari Hippokrates. Kendatipun memiliki riwayat yang panjang, belum pernah sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu sering dipraktikkan dan tersebar luas sebagaimana sekarang ini.<sup>46</sup>

Paul F. Cammenisch dalam K. Bertens mengatakan bahwa *profesi* adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Jadi, profesi menjadi suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan karena itu memiliki tanggung jawab khusus. Karena memiliki monopoli terhadap suatu keahlian tertentu, profesi juga memiliki bahaya, yakni seakan menutup diri bagi "orang luar" dan menempatkan diri sebagai suatu kalangan yang sukar ditembus. Bagi klien yang menggunakan jasa profesi tertentu kondisi seperti itu dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan dia dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi ini. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien memiliki kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 298.

<sup>47</sup>Dalam konteks ini, etika terapan memiliki peranan penting. Kode etik dapat dilihat sebagai produk etika terapan, etika terapan memiliki peranan penting. Kode etik dapat etis atas suatu wilayah tertentu, yakni profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu diiringi oleh refleksi etis. Kode etik yang sudah ada, sewaktu-waktu perlu dinilai kembali, dan jika perlu, direvisi atau disesuaikan. Hal itu bisa mendesak karena situasi yang berubah. Dalam beberapa dekade terakhir ini, munculnya komputerisasi, sebagai contoh, bagi sejumlah profesi telah menciptakan suatu situasi baru yang menimbulkan implikasi-implikasi etis yang baru pula. Kode etik bisa diubah juga atau dibuat baru jika sebelumnya belum ada, setelah terjadi penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu. Ini terbukti merupakan suatu cara efektif dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lihat: (*Ibid.*, hlm. 299).

Dalam kasus-kasus bertalian dengan permasalahan profesi, kode etik sudah sering membuktikan kegunaannya dalam memberi arah moral yang betul kepada profesi dan menjamin kepercayaan masyarakat. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, salah satu syarat mutlak adalah kode etik dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau dilakukan dan diinstruksikan dari "atas", baik dari instansi pemerintah maupun instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan mungkin membantu dalam merumuskannya, tapi proses pembuatan itu sendiri mesti dilakukan oleh profesi bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik mesti menjadi "pengaturan diri" (*self-regulation*) bagi profesi. Dengan membuat kode etik, profesi tertentu akan menetapkan hitam atau putih tujuannya dalam mewujudkan nilai-nilai moral yang dipandang sejati. Hal itu tidak dapat dipaksakan dari "luar". Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi tertentu menjadi harapan agar dapat dilaksanakan dengan konsisten.<sup>48</sup>

Aspek lain yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kode etik dapat berhasil dengan baik adalah agar pelaksanaannya diawasi terus-menerus. Seperti katakan Mark S. Frankel dalam Bertens bahwa pada umumnya, suatu kode etik mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu "dewan kehormatan" atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sering kali kode etik berisikan juga ketentuan bahwa profesional wajib melapor, bila melihat teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan ini merupakan kosekuensi logis dari *self-regulation* yang terwujud dalam kode etik: seperti kode etik itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Tetapi, dalam praktik sehari-hari kontrol ini kerap kali tidak berjalan dengan baik, karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam para anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 300-301.

sejawat yang melanggar.<sup>49</sup> Idealnya, kode etik profesi harus ditempatkan di atas solidaritas dan pertimbangan lainnya.

Seorang guru profesional, juga merupakan seorang pembimbing atau konselor. Sebagai konselor, seorang guru hendaknya dapat menjalankan tugas-tugas konselor. Samsul Munir Amin mengatakan bahwa sebagai konselor seorang guru dapat membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Bimbingan dan konseling itu dapat meliputi beberapa materi utama, antara lain: a). Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber lainnya, mengembangkan keterampilan belajar, mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan menjalani program penilaian hasil belajar; b). Pengembangan dan pemantapan disiplin belajar dan beralih secara mandiri maupun kelompok; c) Pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian; d) Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi; dan e) Orientasi dan informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi, dan pendidikan tambahan.<sup>50</sup>

Untuk menjawab berbagai permasalahan bertalian dengan tugas profesional guru atau pendidik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merancang Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai panduan tingkah laku guru yang akan direalisasikan mulai 1 Januari 2013. Dalam KEGI itu diatur norma guru yang bertalian dengan tujuh hal. Yakni, hubungan guru dengan peserta didik, orang tua/wali murid dengan masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, profesinya, organisasi profesi guru dan pemerintah.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>K. Bertens, "Etika....", *Ibid.*, hlm. 301.

<sup>50</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 62-63.

<sup>51</sup>Dalam hubungannya dengan anak didik, misalnya, seorang guru harus mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Hubungan guru dengan anak didik didasarkan

Jadi, keberadaan KEGI bagi guru, secara umum, agar dapat mengarahkan dan membimbing para guru menjadi guru profesional. Pada akhirnya, kualitas pendidikan nasional akan meningkat pula yang memiliki daya kompetitif dengan bangsa lain pada era global ini.

Dalam konteks guru agama, terutama guru agama di sekolah dasar, dalam menghadapi tugas yang tidak sederhana, terutama dalam pembinaan dan pengembangan anak. Seorang guru agama yang kompeten di bidangnya dan bijaksana diharapkan dapat memperbaiki dan mendekatkan semua anak ke arah perkembangan anak yang sehat. Dia dapat memupuk anak yang telah tumbuh dengan baik itu, memperbaiki yang kurang baik dan selanjutnya membawa mereka semua kepada perkembangan yang diharapkan. Hanya guru agama yang memiliki bekal atau kompetensi profesional saja yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal. Zakhiah Daradjat<sup>52</sup> menyebutkan bekal yang dimiliki guru agama: *Pertama*, memiliki kepribadian yang dapat dijadikan teladan dari pendidikan agama yang akan diembannya terhadap anak didik. Dia harus memiliki sifat-sifat sebagai guru agama: jujur, benar, berani, dan lain-lain. Kepercayaan terhadap agama tercermin dalam pribadinya. Perlakuan terhadap anak didik menyenangkan, kasih sayang yang sehat dan membangun yang terlihat ketika berhadapan dengan anak didik yang beragam latar belakangnya. *Kedua*, pengertian dan kemampuannya untuk memahami perkembangan jiwa anak serta perbedaan perorangan, antara seorang anak dengan yang lainnya, dengan kata lain, mesti memahami psikologi anak. *Ketiga*, guru agama mesti menguasai ilmu-ilmu alat, seperti didaktik, metodik, dan lain-lain, agar dapat berhasil dalam tugas mengajar dan mendidik anak.

---

pada kasih sayang dan menghindari diri dari perilaku kekerasan dalam bentuk apa pun. Guru juga harus menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik. Misalnya, seorang guru mencaci maki siswa bisa dikategorikan pelanggaran berat. Terkait hubungan guru dengan orangtua, guru harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Pada kode etik hubungan guru dengan profesinya, salah satunya guru tidak menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan profesionalnya. Intinya bahwa KEGI bertujuan menegakkan kehormatan dan wibawa guru yang profesional. Lihat: (Sriwijaya Post, 24 Oktober 2012).

<sup>52</sup>Zakhiah Daradjat, 'Ilmu Jiwa Agama', *op.cit.*, hlm. 72-73.

# Bab 5

## KELUARGA, ORANGTUA DAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK

Di era global, setiap bangsa dipastikan memiliki tantangan dan menghadapi beragam persoalan dan perubahan sosial yang *unpredictability*<sup>1</sup> yang kadang kala tidak dapat diprediksi. Hal ini menuntut adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Perubahan sosial tersebut, setidaknya, didorong tiga faktor: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kependudukan, dan faktor ekologi atau lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Kuntowijoyo mengungkapkan mengatakan setidaknya ada tiga tahapan perubahan masyarakat: (1), *Tahap masyarakat ganda*, yakni ketika terpaksa ada pemilahan antara masyarakat madani (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*) atau antara masyarakat dengan negara. Karena adanya pemilahan ini, maka dapat terjadi negara tidak memberikan layanan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya; (2). *Tahap masyarakat tunggal*, yaitu ketika masyarakat madani sudah berhasil dibangun; (3). *Tahap masyarakat etis (ethical society)*

<sup>1</sup>Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hlm. 2

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

yang merupakan tahap akhir dari perkembangan tersebut.<sup>3</sup> Masyarakat etis, yakni masyarakat yang dibentuk oleh kesadaran etis, bukan oleh kepentingan bendawi. Kesadaran etis ini pun mengimplikasikan keragaman nilai etis yang perlu dicari kompatibilitasnya dalam nilai-nilai universal dan nilai-nilai Pancasila.<sup>4</sup>

Alvin Toffler, dalam buku *Future Shock*, 1970, mengatakan bahwa garis perkembangan peradaban manusia terangkum ke dalam tiga gelombang (*third wave*). Gelombang pertama (*first wave*) disebut fase pertanian, yang menggambarkan betapa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia. Pada fase ini, keberhasilan dan kekuasaan ditentukan oleh tanah dan pertanian. Gelombang kedua (*second wave*) disebut sebagai fase industri, lantaran industri menjadi poros dan sumber pengaruh dan kekuasaan. Peradaban manusia pun didominasi oleh para penguasa industri yang umumnya terdiri kaum konglomerat dan pemilik modal. Gelombang ketiga (*third wave*) disebut fase informasi, yang telah menempatkan informasi sebagai primadona dan penentu kesuksesan. Toffler pun membuat semacam prognosis, bahwa '*siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai kehidupan*'.<sup>5</sup>

Melihat ketiga faktor perubahan dan perkembangan peradaban yang telah diramalkan oleh Toffler sejak 1970, sekarang kita berada pada fase ketiga, yaitu fase informasi. Indikatornya adalah maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai salah satu faktor pendorong perubahan sosial dan peradaban manusia. Dalam fase ini, siapa yang menguasai informasi, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, ia akan dapat menguasai dunia. Bangsa Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) karena mayoritas penduduknya masih banyak yang kurang menguasai informasi dan sulit mengakses pendidikan yang modern (maju), maka bangsa kita jauh ketinggalan dengan negara lain.

Seperti telah diketahui bahwa salah satu indikator globalisasi adalah perubahan nilai-nilai. Perubahan nilai-nilai suatu negara akibat dari

<sup>3</sup>Faisal Jalal dan Dedi Supriadi (Ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa., 2001, hlm. 42.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>5</sup>Abdullah Idi dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Kata Pengantar: Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A. Yogyakarta: Tiara Wacana., hlm. vii-viii.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mondial. Nilai-nilai moralitas pun bergeser sejalan dengan pengaruh iptek dan komunikasi. Alvin Toffler, dalam buku *Future Shock*, telah memprediksi akan terjadinya 'keterkejutan budaya' (*cultural shock*). Globalisasi, sebagai suatu produk modernisasi, telah mengubah cara hidup manusia, secara individual maupun warga negara dan dunia. Setiap individu, agaknya mesti berhadapan dengan dua pilihan: bertindak sebagai 'pemain'; atau bertindak sebagai 'korban' (*victims*).

Institusi pendidikan, sejak SD/MI hingga Perguruan Tinggi (PT) memiliki peranan strategis dalam merespons dampak globalisasi, dalam menciptakan generasi muda<sup>6</sup> berkarakter yang dapat bertindak sebagai 'pemain'. Sebagai 'pemain', generasi muda Indonesia hendaklah memiliki beragam bekal, yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan pragmatis tetapi juga perlu memiliki integritas dan karakter. Lebih jauh, tanpa mengedepankan karakter suatu bangsa akan sulit menjadi maju seperti diharapkan, karena negara menjadi maju selalu berkorelasi dengan kekuatan basis karakter atau *akhlak* yang dimiliki generasi mudanya. Fakta sosial memperlihatkan bahwa sebagian generasi muda bangsa ini mungkin telah menjadi 'korban' globalisasi, yang cenderung mengedepankan: pragmatisme, hedonisme, materialisme, dan budaya cepat saji.<sup>7</sup>

Sebagian generasi muda kita telah terjebak dalam pragmatisme sempit dan merugikan masa depan mereka, keluarga, masyarakat dan bangsa. Misalnya, terjebak dalam pergaulan bebas, narkoba, tawuran, kebut-kebutan di jalan, dan juga aksi kriminal. Hal ini menunjukkan, permasalahan krisis akhlak dan karakter pada kalangan generasi muda

---

<sup>6</sup>Generasi muda dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pandangan: pertama, dalam hal ini generasi muda dimasukkan ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja atau produktif antara 15-40 tahun. Pada 2007, jumlah penduduk dalam kategori generasi muda 40.234.823. Kedua, dari sudut pandang sosial budaya, di mana generasi muda memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili/tempat tinggal, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perkantoran/birokrasi, dan lain-lain. Hal ini juga menggambarkan adanya beragam karakter generasi muda Indonesia. Lihat: (<http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: 22/10/2011)).

<sup>7</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 235.

bila dibiarkan mereka akan menjadi generasi hanya menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan negara. Negara pun akan menjadi bangsa yang tidak produktif dan sulit berkompetisi dengan bangsa lainnya. Perilaku menyimpang di tengah masyarakat (*social deviance*) pada kalangan generasi muda ini memerlukan intervensi dan solusi dari pihak lain (orangtua, keluarga, dan masyarakat).

### A. Akhlak, Karakter dan Kepribadian

Jika, kondisi-kondisi ini terus-menerus terjadi menjadi kebiasaan selanjutnya akan menjadi karakter. Sudah barang tentu, akan berdampak buruk bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat dan bangsa ke depan. Beragam persoalan berbangsa saat ini hanya dapat diperbaiki oleh individu generasi muda yang berkarakter: cerdas, berkualitas, beretika, disiplin, jujur, kerja keras, dan berakhlak.

Karenanya kebijakan pemerintah, dikatakan Arissetyanto Nugroho<sup>8</sup>, untuk kembali memprioritaskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk *national-character building* generasi muda Indonesia. Pembangunan karakter generasi muda Indonesia diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di tengah era globalisasi dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda. Dalam kaitannya dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno, kerap kali mengungkapkan slogan *nation and character building*. Suksesnya pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa besar, dikatakan Bung Karno, mesti dimulai dengan pembangunan manusianya, yang diistilahkan beliau dengan *man behind the gun*. Selo Soemardjan menyebutnya dengan manusia pembangunan, yang di antara cirinya adalah memiliki watak bermoral tinggi.<sup>9</sup> M. Abdul Karim mengungkapkan karakter atau moral bangsa ialah bagaimana sikap, tingkah laku, dan perbuatan suatu bangsa. Moral bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari aneka ragam moral yang ada, baik yang berasal dari adat istiadat secara turun-temurun maupun

<sup>8</sup>Media Indonesia, 7 November 2011.

<sup>9</sup>Desire Zuraidah dan Jufrina Rizal (eds.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 35.

dari berbagai macam agama yang silih berganti memasuki Indonesia, di antaranya yang lebih menonjol adalah unsur-unsur budaya Islam. Hal tersebut jelas dari bagian Barat Kepulauan Nusantara, sedangkan semakin ke Timur makin berkurang hingga daerah-daerah di Papua, hampir tidak terlihat.<sup>10</sup>

Proses perkembangan moral bangsa, di samping dipengaruhi moral atau nilai-nilai Islam, juga oleh moral atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari pengembangan budaya kaum Muslim di Indonesia dengan jalan mengisi keinginan masyarakat melalui penggalan secara mendalam atas jiwa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Moral Islam, berfungsi sebagai *filter* yang memberikan seleksi terhadap moral yang ada, dalam arti moral yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan terus berkembang, sementara yang bertentangan disisihkan, diganti dengan moral yang bersesuaian dengan Islam. Terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, moral Islam sangat diperlukan untuk menyeleksi agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan agama Islam, yakni memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dari lintasan sejarah dapat dikatakan bahwa proses pembinaan moral bangsa di Indonesia dimulai sejak timbulnya cita-cita kemerdekaan, yang terlihat dengan jelas dipengaruhi moral Islam baik pada masa permulaan maupun pada masa timbulnya pergerakan kemerdekaan yang kemudian terpadu dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat-saat bangsa Indonesia mengisi kemerdekaannya. Pada masa Orde Baru, moral bangsa Indonesia diidentifikasi sebagai moral Pancasila. Lihat: (M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007, hlm. 84).

<sup>11</sup>Jika ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan tujuan Islam, maka harus dicegah, tetapi apabila bersesuaian harus didukung dan dikembangkan. Perkembangan moral bangsa Indonesia adalah hasil dari proses percampuran budaya, bersifat *penetration pacifique*. Masing-masing moral keagamaan ikut mengisi dalam pembinaan moral bangsa di Indonesia. Karena Indonesia yang mayoritas Islam, maka pengaruh Islam terhadap pembinaan moral bangsa sangat dominan di mana moral Islam dapat menghablur dalam moral bangsa tanpa adanya penekanan dan kekerasan. Untuk memelihara kesatuan bangsa akibat pergolakan moral dari berbagai macam agama, dibentuk konsep yang disebut dengan kerukunan beragama. Dari struktur budaya seperti inilah bangsa Indonesia mendapatkan moral dasar dalam pembentukan kehidupan bermasyarakat yang memiliki ikatan yang kuat, bukannya saja dalam kehidupan sosial, akan tetapi sangat berguna bagi kehidupan ideologi negara, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan nasional, suatu struktur kemasyarakatan yang memberikan modal dasar bagi terbinanya moral bangsa. Dasar pembinaan moral Islam ini sebagai manifestasi dari bimbingan wahyu, lahir dalam bentuk sikap, tingkah

Moral, dalam komunitas Islam, terkenal dengan *al-akhlaq al-karimah*, memuat sekumpulan nilai yang harus dijunjung tinggi.<sup>12</sup> Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah mempertimbangkan secara matang tentang urgensi moral atau *al-akhlaq-al-karimah* dalam kehidupan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Diskusi tentang 'Memelihara Keutuhan Pembangunan Karakter Bangsa: Generasi Muda Indonesia di Tengah Gelombang Globalisasi', UI, Depok (2007), Meutia Hatta<sup>13</sup> mengatakan berbagai sisi kehidupan manusia selama ini luput dari pembangunan karakter, jiwa dan raga manusia. Sering kali perhatian generasi muda terfokus pada pembangunan ekonomi dan orientasi fisik-material. Dengan karakter demikian, tidak mengherankan jika di kalangan generasi muda tumbuh subur sifat-sifat materialisme, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan perilaku kurang terpuji lainnya. Karakter sebagian generasi muda ini sudah mengabaikan pembangunan kemanusiaan. Karakter sebagai gambaran mentalitas sebagian generasi muda saat ini, sejalan dengan pendapat seorang antropolog, Koentjaraningrat, yakni: *pertama*, mentalitas meremehkan mutu; *kedua*, mentalitas suka menerabas; *ketiga*, sifat tidak percaya kepada diri sendiri; *keempat*, sifat tidak berdisiplin murni; dan *kelima*, sifat tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dikatakan Mutia Hatta, menghadapi globalisasi, karakter generasi muda harus lebih

---

laku, dan perbuatan. Sementara moral yang lain, jiwanya tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu, tetap berkembang dan dibiarkan berkembang sesuai dengan sikap Islam yang terkenal dengan *mura'ah al-'urf*: mengendalikan 'urf, bahkan ada di antara beberapa moral yang merupakan akulturasi di antara Islam dengan budaya-budaya yang berkembang. Kebudayaan Islam telah meresap pada rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 90% beragama Islam dipastikan mewarnai nilai-nilai moral bangsa, sehingga kebudayaan Islam yang merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Lihat: (*Ibid.*, hlm. 85).

<sup>12</sup>Dari beragam pendapat pemikir Islam, diketahui bahwa *al-akhlaq-al-karimah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah kumpulan nilai yang pertama mendasari kehidupan manusia bermasyarakat secara religius. Dalam perjalanan sejarah, *al-akhlaq al-karimah*, telah menjadi payung memelihara keutuhan bangsa. Selama moral suatu bangsa masih terpelihara dan dijunjung tinggi, maka bangsa itu dapat berkembang. Sebaliknya, jika moral bangsa sudah diabaikan, maka bangsa itu akan segera hancur menemui kebinasaan. Lihat: (*Ibid.*, hlm. 183-184).

<sup>13</sup><http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: tanggal 22/10/2011).

meningkatkan budi pekerti dan sikap menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

E. Mulyasa menulis bahwa di Indonesia pendidikan karakter bangsa telah berlangsung lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar Dewantara sebagai Pahlawan Pendidikan Nasional berpandangan tentang pendidikan karakter sebagai asas Taman Siswa 1922, yang memiliki prinsip: 1) Hak seorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan tertibnya persatuan dalam kehidupan umum; 2) Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya; 3) Pendidikan harus selaras dengan kehidupan; 4) Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi kedamaian hidup; 5) Harus bekerja menurut kekuatan sendiri; 6) Perlu hidup dengan berdiri sendiri; dan 7) Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik.<sup>14</sup>

Diungkapkan H.E. Mulyasa selanjutnya di Sumatera Barat, Lembaga Pendidikan Kayutanam (*INS Kayutanam*) yang didirikan Mohammad Syafe'i (1897-1969) memiliki hubungan pergerakan nasional. Syafe'i menolak model pendidikan Barat yang dinilai hanya mengedepankan aspek kognitif dan mendambakan anak didiknya agar menjadi seorang yang ideal, yakni tertanam cinta kebenaran dalam hatinya, dalam pengetahuan

---

<sup>14</sup>Taman Siswa memiliki Panca Dharma, yakni kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup, yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin. Diungkapkan pula bahwa pendidikan meliputi tujuan personal dan tujuan sosial. Tujuan personal bertalian dengan kuatnya tiang-tiang kemerdekaan yang mewarnai kehidupan dalam diri setiap individu. Tujuan sosial adalah terciptanya kebersamaan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkebangsaan yang khas berdasarkan kemanusiaan, sehingga terwujud kehidupan yang tertib, damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Dalam asas Pendidikan Taman Siswa, Dewantara ingin mendidik manusia Indonesia secara utuh (*kaffah*), yang dapat hidup mandiri, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Untuk kepentingan tersebut, masyarakat khususnya peserta didik perlu dibekali dasar-dasar kehidupan agar memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi, menuju masyarakat aman, tertib, dan damai. Lihat: (H.E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 6-7).

intelektualnya, dan dalam perilakunya sehari-hari.<sup>15</sup> Sebagaimana Mohammad Syafe'i, K.H. Hasim Asy'ari dalam kitabnya *Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'Allim*, juga menekankan konsernya pada pendidikan karakter. Dalam konsep ini, belajar diartikan sebagai ibadah untuk memperoleh ridha Allah, agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya Islam, dan tidak sekadar menghilangkan kebodohan. Dalam sejarah pendidikan pesantren yang didirikannya sejak awal bertujuan membentuk karakter dan kemandirian santri.<sup>16</sup>

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orangtua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan. Cerdas dan pintar saja tentunya belum cukup, tetapi juga diperlukan juga sifat yang pantang menyerah, sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab, memiliki harapan dan motivasi tinggi, peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan berkepribadian baik, berakhlakul karimah, agar anak-anak atau generasi muda menjadi tangguh dan mampu meraih impian masa depan yang lebih baik. Karakter anak ideal yang didambakan banyak orangtua antara lain adalah hormat dan berbakti kepada orangtua, guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh inisiatif, sehat dan mencintai Tanah Air. Karakter ini senada dengan karakter anak Generasi Platinum.<sup>17</sup>

Dalam sebuah buku terbitan *International Association of Character Cities* (2006), *karakter (character)* adalah motivasi batiniah untuk melakukan yang

---

<sup>15</sup>Mohammad Syafe'i merupakan putra Marah Sultan, tokoh pergerakan politik NIP di Padang, yang melanjutkan cita-cita perjuangan orangtuanya dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dibangunnya dapat menghasilkan manusia yang rajin dan ulet, serta memiliki kecakapan yang diperlukan sebagai bangsa yang bermartabat, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air dan sesama manusia, *Ibid.*, hlm.7.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Generasi Platinum yang kadang kala disebut juga Generasi Z memiliki karakter khusus, di antaranya: fisik yang sehat dan kuat, kecerdasan *multiple*, percaya diri, optimis, kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi, pantang putus asa, serta berakhlak mulia. Lihat: (Rubrik: "Karakter Anak Ideal untuk Masa Depan", *Kompas*, 4 Desember 2011).

benar berapa pun "harga" yang harus dibayar. Pengertian ini, karakter dikaitkan dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai, moral, atau etika dalam kehidupan. Perbuatan dan nilai-nilai itu sedemikian pentingnya sehingga dirasa mutlak untuk dilakukan dan siap dibayar dengan "harga" berapa pun. Karakter terkait dengan upaya mengembangkan kualitas, seperti: kejujuran, kesabaran, kesetiaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa karakter itu harus dimulai dari berbagai nilai-nilai moral yang ada dalam pikiran dan hati seseorang, kemudian nilai-nilai itu kita wujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Berikutnya, tindakan itu kita lakukan secara terus sehingga menjadi kebiasaan, serta dari kebiasaan itulah terbangun karakter. Hasilnya, karakter yang terbangun dapat mengarahkan upaya seorang dalam mencapai tujuan hidup.<sup>18</sup>

Alford dalam Supiana, mengatakan, ada istilah yang pengertiannya hampir sama dengan karakter, yakni *personality characteristic* yang memiliki arti: bakat, kemampuan, sifat, dan lain sebagainya yang secara konsisten diperagakan seorang, seperti pola perilaku, sifat-sifat fisis dan ciri-ciri kepribadian. *Trait* merupakan kecenderungan untuk memberi respons kepada berbagai tipe stimulus dalam cara yang sama. *Personality* merupakan sifat dan perilaku khas seorang yang membedakannya dengan orang lain; integrasi karakteristik dan struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang; dan segala sesuatu tentang diri seorang seperti diketahui orang lain. *Habit* merupakan perilaku yang diperoleh dan dimanifestasikan secara konsisten; tindakan yang telah dipelajari dan menjadi mapan serta relatif otomatis melalui pengulangan terus-menerus. Dalam Bahasa Arab, *character*, diartikan *khuluq, sajiyyah, thab'u* artinya *budi pekerti, tabiat* atau *watak*.<sup>19</sup>

Yusuf al-Qardawi mengklasifikasikan *akhlaq* menjadi enam kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam

<sup>18</sup>[http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-televise\(22/10/2011\)](http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-televise(22/10/2011)).

<sup>19</sup> Seperti dikutip Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam", *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011, hlm. 5.

kehidupan Muslim: *akhlaq* berhubungan dengan diri sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (*animal world*); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*).<sup>20</sup> *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (*a plural world*) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau '*a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation*'. Banyak ilmuwan terkenal Muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Razi, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. *Ilm al-akhlaq (knowledge of moral values)* merupakan komponen mayor daripada *Islamic Studies* pada semua level pendidikan Islam, di samping komponen lainnya, seperti *Ilm al-Fiqh*.<sup>21</sup>

*Karakter*, merupakan kumpulan dari beragam aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. *Karakter* merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karena itu, dikatakan Farid Anjar, dalam *Ensiklopedi Inggris-Arab*, bahwa *character education* sebagai *pendidikan akhlak*.<sup>22</sup> Sifat-sifat yang ada dalam diri seorang itu, terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang memengaruhinya. Pendidikan, dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

Dengan demikian, *karakter* merupakan kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (*fitrah* atau *nature*) dan lingkungan (*sosialisasi* atau lingkungan, *nurture*). Potensi karakter yang baik dimiliki seorang sebelum dilahirkan harus terus-menerus dikembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan. Garbarino dan Brofenbrenner (Vasta,

<sup>20</sup>Yusuf al-Qardawi dalam kutipan J. Mark Halstead, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education" *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 285.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 285.

<sup>22</sup>Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam....", *op.cit.*, hlm. 6.

1992) mengatakan jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, perlu memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang adil dan tidak adil, dan apa yang patut dan tidak patut.

Memahami 'aturan main' atau 'aturan sosial' dalam kehidupan dan menginternalisasikannya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orangtua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, *antre*, mematuhi aturan lalu lintas, mandiri, jujur, toleran, disiplin, tepat janji, dan sejenisnya, merupakan pemahaman yang baik anak didik terhadap "aturan sosial" sebagai hasil dari perkembangan kualitas moral dan mental seorang anak didik yang disebut karakter (*character*). Tentu saja kebiasaan baik atau buruk pada diri seseorang anak didik dan generasi muda- yang mengindikasikan kualitas karakter ini – tidak terjadi dengan sendirinya. Selain faktor *character*, faktor *nurture* juga berpengaruh. Lebih jauh, *proses sosialisasi atau pendidikan* dalam proses pembentukan karakter anak didik, setidaknya, terletak pada peranan: *orangtua/keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat, terlebih pemerintah.*

Dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, karakter, moral, atau *al-akhlak al-karimah*, pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan *keluarga/orangtua* pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orangtua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Baumrind mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu pola asuh: *democratic; authoritative; dan permissive.*<sup>23</sup> Keluarga memiliki peranan

<sup>23</sup>Pola asuh *permissif* yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orangtua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. Pola asuh *demokratis* tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat

terdepan dalam memberikan kebiasaan-kebiasaan, keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama.

Djaka Datuk Sati mengungkapkan, psikologi kepribadian mengidentifikasi, bahwa unsur kepribadian meliputi temperamen dan watak (*character*). Temperamen terbentuk dari komposisi kimiawi (cairan) dalam tubuh, dan bersifat tetap. Sebaliknya, watak merupakan unsur bentukan.<sup>24</sup> Sama halnya dengan pandangan Gilbert Highest (1969), bahwa 90% dari kebiasaan anak dibentuk oleh keluarga, di mana proses pembentukannya berlangsung sejak dari bangun tidur hingga anak kembali ke tempat tidur.<sup>25</sup>

Abraham Maslow<sup>26</sup> mengungkapkan bahwa seorang dapat mengaktualisasikan dirinya. Seorang yang memiliki kepribadian seimbang dan produktif dicirikan dengan sejumlah karakter pembentuk simbol proses realisasi yang terpendam dan bersifat fitrah dalam diri. Abraham mengatakan seorang tidak dapat mengaktualisasikan diri sebelum dia memiliki sarana yang cukup untuk memberi kepuasan terhadap tuntutan fisiologis, rasa aman, afiliasi, pengakuan, dan penghargaan. Jika tuntutan atau kebutuhan (*the needs*) terpenuhi, orang tersebut bisa mengarahkan potensi aktualisasi diri berupa produksi keilmuan, kerja seni, atau kerja terorganisir. Pribadi yang dapat mengaktualisasikan

---

dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung jawab. Orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggung jawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Arkoff dalam (Badingah, 1993), mengatakan bahwa anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara otoriter atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan. Anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

<sup>24</sup>Dikutip Jalaluddin, 'Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi', *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 187.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>26</sup>Rif'at Syaiki Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 18.

diri, seperti digambarkan Maslow, dijelaskan: (1) dapat menerima dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar; (2) berpandangan realistik; (3) banyak bersikap pasrah (pasif); (4) berorientasi ada *problem-problem* eksternal; (5) mengapresiasi kebebasan dan kebutuhan akan spesialisasi; (6) berkepribadian independen dan bebas dari pengaruh orang lain; (7) mengapresiasi segala sesuatu secara progresif, tidak terjebak pada pola-pola baku; (8) integratif dan akomodatif; (9) hubungan dengan orang lain sangat kuat dan mendalam, bukan sekadar formalitas; (10) arah dan norma demokratisnya diliputi oleh sikap toleran dan sensitivitasnya; (11) tidak mencampuradukkan antara sarana dan tujuan; (12) gemar mencipta, berkreasi, dan menemukan penemuan-penemuan dalam skala besar; (13) menentang ketaatan dan kepatuhan buta terhadap budaya; dan (14) berjiwa riang secara filosofis, tidak bermusuhan.

Eric Fromm selanjutnya, mengklasifikasi lima kepribadian manusia: *pertama*, kepribadian yang selalu bersikap pasrah dan pasif. Seorang yakin bahwa apa pun yang diinginkannya mesti tercapai tanpa usaha atau kegiatan untuk memperolehnya, dan harus diperolehnya dengan cara pasif dan pasrah, di mana ketergantungan pada pertolongan orang lain sangat tinggi. Dia akan gelisah apabila tidak ada penolong disaat menghadapi ancaman.

*Kedua*, kepribadian *vested interest*. Berupaya memperoleh sesuatu dari orang lain dengan cara tipuan dan kekerasan, dan menganggap semua orang sebagai sasaran baginya. Dalam meraih sesuatu kurang mengandalkan kerja keras dan jerih payah sendiri. Usahnya hanya menipu dan melanggar hak milik orang lain. Orang yang berkepribadian *vested-interest* tampak selalu ragu, cemas, iri, cemburu, dan selalu meremehkan atau merendahkan orang lain.

*Ketiga*, kepribadian yang suka menyimpan yang bersifat lemah iman setiap perolehan sesuatu dari luar. Ketenangan batin dan ketentraman hatinya tergantung pada simpanan dan tabungannya. Senantiasa melestarikan miliknya dan merasa bahwa membelanjakan sesuatu akan mengancam kehidupannya. Kikir harta, pikiran, dan perasaan. Baginya, cinta adalah memiliki. Tidak mampu berpikir kreatif, tidak percaya pada masa depan, secara emosional sangat dipengaruhi masa lalu, dan banyak

berprasangka. Umumnya, teratur dan rapi, menjadwalkan waktu dengan ketat, dan tidak senang melihat sesuatu tidak pada tempatnya. Memiliki kemampuan dalam kekuatan dan potensi intelektual. Melihat kesulitan bertalian dengan antara dirinya dan orang lain sebagai ancaman, tetapi pada saat yang sama juga berpandangan bahwa menjauhi mereka akan memberinya keamanan dan ketenangan.

*Keempat*, kepribadian berorientasi pasar, agak mirip kepribadian penjual. Dia merasa bahwa kepribadiannya dapat diperjualbelikan, dan terpengaruh oleh tuntutan eksternal yang berubah-ubah. Dalam pandangannya, orang yang sukses adalah atas mempresentasikan ragam kepribadian yang bernilai jual, karenanya pikiran mereka senantiasa berubah sesuai kondisi dan tidak memiliki kepribadian yang harmonis. Umumnya, perasaan mereka kosong dan kacau. Pola-pola kepribadian di atas menunjukkan ragam kepribadian yang tidak serasi atau tidak produktif.

*Kelima*, kepribadian produktif. Fromm berpandangan bahwa manusia bukan saja makhluk berakal dan makhluk sosial, tetapi juga makhluk produktif. Untuk hidup, seorang harus memproduksi dengan mengembangkan akal dan daya imajinasi sehingga dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan produksi. Pemahaman Fromm tidak terbatas pada produksi materiil belaka, melainkan lebih luas lagi, yakni kemampuan manusia dalam mendayagunakan potensi rasio, perasaan, indra, dan fasilitas-fasilitas lain pada dirinya.<sup>27</sup>

*Keluarga* mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan kepribadian, watak dasar atau karakter anak. Islam memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar atau pertama dan utama. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, sehingga

---

<sup>27</sup>Bila seorang mampu mengembangkan potensi berarti produktif, yakni mampu berpikir bebas dan kritis. Seorang merasa melihat lingkungan sekitar dan memengaruhinya, menghormati diri dan sahabat-sahabatnya, mengupayakan kelayakan hidup dengan prinsip keseimbangan, yakni tanpa depresi dan stres, serta menikmati pekerjaan alamiah dan seni. Dia mampu memantapkan dan mengaktualisasikan diri dan mengambil hal-hal positif dalam kehidupan. Lihat: (Rif'at Syauqi Nawawi 'Kepribadian Qur'ani...', *op.cit.*, hlm. 21-22).

Rasulullah Saw. menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah: 'Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tanggung jawab kedua orangtuanyalah yang bakal menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi'.<sup>28</sup> Al-Ghazali, dalam hal ini, mengungkapkan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), di mana orangtua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orangtualah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya kemudian hari.<sup>29</sup>

Antara peran *keluarga/orang tua* dan pengembangan karakter pribadi anak didik tidak dapat dipisahkan. Jika, anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap kemajuan bangsa ini. Haryatmoko menulis bahwa integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam organisasi. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi (pribadi berkarakter) itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya: akuntabilitas dan transparansi. Kini, di Indonesia, etika publik menjadi isu penting. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik.

Ada yang menafsirkan hanya sekadar etiket bermasyarakat, dan ada juga berpandangan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika. Etika publik mulai serius dibahas setelah kasus *Watergate*. Kasus itu mendorong pengesahan *The Ethics in Government Act of 1978*. Sejak itu, orang mulai menggunakan istilah *etika publik* bukan *etika pemerintahan* karena fokus pada pelayanan publik. Etika publik menekankan tidak hanya kode etik atau norma, tetapi juga dimensi refleksinya. Etika publik membantu dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Maka, fokus ditujukan kepada moralitas etika, yakni bagaimana menjembatani jurang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>29</sup>Hamid Reza Alavi, 'Islamic Values: a distinctive framework for moral education', *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007, hlm. 283-296.

antara *norma moral* (apa yang semestinya dilakukan) dan *tindakan faktual*. Keprihatinan etika publik pada modalitas membedakan diri dengan ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain.<sup>30</sup>

Institusi pendidikan, sejak *play group*, *Rauthatul Atfhal (RA)*, madrasah, sekolah, hingga Perguruan Tinggi (PT), merupakan suatu institusi pendidikan yang bersifat artifisial. Keberadaannya, dilaksanakan karena kebutuhan, sebagai petunjuk peran pendidikan keluarga. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab keluarga dalam meneruskan watak anak didik. Fokus pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan (formal) adalah penanaman nilai-nilai fitri manusia, yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian sebagai faktor bawaan manusia. Nilai tersebut mengacu kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia senang dengan yang benar dan benci yang salah, senang hal yang baik dan benci yang buruk, serta senang yang indah dan benci yang jelek.<sup>31</sup>

Di Amerika Serikat dikenal dengan adanya sistem pendidikan untuk dua tahun pertama S1 dengan sistem yang dinamakan *Liberal Arts Education*. Sistem ini berusaha mendidik seorang memiliki kapasitas pribadi yang dapat dikembangkan secara dinamis untuk menghadapi situasi yang berbeda sejak dini. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menjadikan mahasiswa terdidik atau '*educated*' dalam bahasa Arab disebut '*mutsaqqof*'. Di Amerika Serikat sendiri mata kuliah '*literature*' misalnya dirancang untuk membangkitkan '*daya hidup*', etos kerja, dan semangat belajar mahasiswa dengan menganalisis daya juang para tokoh serta ungkapan-ungkapan bijak dan '*literature*' mereka. Sayangnya, sistem tersebut cenderung menafikan peranan pemilik sumber daya dan potensi yang Mahaagung (*transcendental epistemology*), di mana ada daya manusia yang agak tereduksi, yakni daya kalbu.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. ix-x.

<sup>31</sup>Jalaluddin, *op.cit.*, hlm. 189.

<sup>32</sup>Dalam literatur-literatur Islam, Sumber Daya Manusia (SDM) dikenal dengan empat sumber daya minimal yang ada pada diri manusia yang dapat dikembangkan, yakni daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup (semangat). Menurut Al-Qur'an, manusia diciptakan dari debu-tanah dan roh. Tanah itu diolah sehingga melahirkan sosok manusia menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan roh ilahi kepadanya:

Empat daya utama (*daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup*) menghasilkan ratusan atau ribuan daya dalam diri manusia. Itu sebabnya ada sebuah hadis yang mengatakan: *Inna al-Laha khalaqa Adam 'ala suratihi'* ('Allah menciptakan Adam sesuai dengan peta-Nya'). Dalam pengertian, dia diberi potensi untuk berkemampuan yang dahsyat dengan cara meneladani sifat-sifat (daya) Tuhan: *Takhalaq bi Akhlaqillah* ('berakhlaklah dengan akhlak Allah'). Di sinilah, timbul pikiran bagaimana menerapkan sistem yang *compatible* dengan *liberal arts education* yang sesuai dengan pengembangan empat sumber daya manusia menurut tutunan Islam. Bertalian dengan usaha menuju keunggulan dalam bidang akademik dan karakter yang agung, perlu dimulai dengan minimal, melakukan pengembangan *daya qalbu, akhlak, dan daya hidup*.<sup>33</sup>

Dalam tataran aplikasinya, institusi pendidikan dasar (SD s/d SLTP/MTs) memiliki peran penting dalam pembentukan sistem nilai melalui tata tertib yang ketat. Penekanan terhadap ketertiban merupakan 'siasat' supaya anak didik terbiasa terhadap sikap yang diharapkan. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya sifat disiplin, jujur, tanggung jawab, adil, dan cinta kebenaran, yang tertanam dalam diri anak didik. Pendidikan formal pada level menengah (SLTA/MA), berada pada usia remaja (prepubertas). Periode perkembangan ini, dikatakan William Starbuck ditandai dengan karakteristik tertentu, yang meliputi: perkembangan berpikir rasional, etika, estetika, sosial, minat, dan agama. Peran institusi pendidikan pada level ini, adalah memberi bimbingan agar potensi mental spiritual anak didik agar dapat berkembang dengan optimal. Pada level

---

*'fa iza sawwaituhu wanafakhtu fih min faqa'uu lahu saajidin'* ('kalau sudah sempurna kejadiannya dan ditiupkan roh kepadanya, maka wahai malaikat sujudlah'). Debu-tanah itulah yang menjadikan manusia memiliki fisik. Itulah sebabnya kalau manusia meninggal dikembalikan ke tanah dan dia bercampur dengan tanah. Ada juga unsur lain, yakni roh. roh memiliki tiga: sisi pikir manusia; sisi kalbu yang membuat mereka mengenali Tuhannya dan dapat memberi manfaat sesamanya; dan sisi daya hidup, yang membuat mereka jadi kreatif, inovatif, dan produktif. Daya qalbu jika diasah bisa mengantar seorang berhubungan dengan potensi Tuhan, bisa mengantar seorang memiliki indra keenam, bisa menghasilkan suatu aktivitas, suatu kegiatan di mana orang lain tidak percaya bahwa itu dapat terjadi. Lihat: (Azhar Arsyad, Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi', *Makalah the Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Pangkal Pinang, Bangka-Belitung, 10-13 Oktober 2011, hlm. 6).

<sup>33</sup>*ibid.*, hlm. 6.

perguruan tinggi di mana mahasiswa berada pada tahap *adolescence*. Pada tahap perkembangan ini, mahasiswa akan mengalami masa krisis yang ditandai gejolak batin, dan kelihatan ragu dalam menentukan sikap. Hal ini merupakan proses *natural* dalam perjalanan menuju ke pembentukan kepribadian yang mantap.<sup>34</sup>

Al-Ghazali<sup>35</sup> mengatakan bahwa seorang guru/pendidik memiliki pengaruh sebagai *paramount*. Pendidik sebagai '*exemplar moral*' dan '*moral guide*', di mana seorang anak belajar dengan meniru apa yang 'dilakukan guru' ketimbang apa yang 'dikatakan guru'. Guru tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga bertanggung jawab terhadap perkembangan personalitas (*personality*), karakter (*character*), kapasitas mengambil keputusan (*decision making capacity*), dan perilaku yang baik (*good behaviors*). Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidik memiliki pengaruh yang maksimal dalam pengembangan moral anak didik. Pada periode infansi (*infancy*), anak-anak ingin diasumsikan dan menyenangkan mainan dan aktivitas praktik. Pada periode anak-anak (*childhood*) mereka lebih ditarik oleh penampilan luar (*fascinated by external appearances*); sebagai remaja (*adolescents*) mereka mengembangkan pesatnya pertumbuhan, mereka mungkin memperoleh dominasi pikiran-pikiran (mereka) oleh imajinasi-imajinasi seksual. Sebagai orang dewasa muda (*young adults*) mereka menunjukkan untuk posisi tanggung jawab, kekuasaan (*power*) dan kepemimpinan (*leadership*). Tetapi, sebelum umur 40 tahun, mereka menjadi lebih spiritual, lebih menyadari terhadap dunia akan datang, dan lebih antusias untuk mengembangkan pengetahuan terhadap Tuhan. Pendidikan moral (*moral education*) membawa disiplin dan kontrol moral untuk kehidupan anak-anak dalam suatu 'cara' atau 'jalan' pengembangannya.

Adi Sasono dalam Azhar Arsyad (2011), dalam buku *Leading to Revolution*, mengatakan adanya kompetisi kekuatan yang sedang tumbuh, antara kekuatan birokrasi dan formalitas pengetahuan yang sedang

---

<sup>34</sup>Bandingkan dengan Jalaluddin: ("Peranan Lembaga Pendidikan....", *op.cit.*, hlm. 190).

<sup>35</sup>Hamid Reza Alavi, "Al-Ghazali on Moral Education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007, hlm. 309-319.

tumbuh dengan kekuatan yang didasarkan pada kreativitas dan jaringan. Yang cepat mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Dunia pendidikan umumnya kurang menyadari keadaan ini, dibandingkan dunia industri, sehingga banyak sarjana yang menganggur. Hanya beberapa pendidikan tinggi yang menyadari perubahan tersebut. Bukan karena kesempatan tidak ada tetapi *cara* mencari kesempatan yang berbeda. Alumni perguruan tinggi yang tidak kreatif dan imajinatif kadang tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup, dibanding orang biasa yang kreatif dan imajinatif yang harus disadari karena ternyata *power* akan bergeser dari hierarki pengetahuan formal ke hierarki kreativitas dan imajinasi.<sup>36</sup> Di sinilah urgensinya alumni perguruan tinggi memiliki dan mengembangkan *akhlakul karimah*<sup>37</sup> sebagai *power* dalam mengakselerasi terhadap pengembangan *soft-skills*, *inner-capacity*, *liberal art education*, dan *intra-entrepreneurship*.

Permasalahan pendidikan, sering kali hanya mengartikannya secara sempit, dan belum mengangkatnya ke dalam permasalahan yang lebih luas. Padahal, tanpa memerhatikan kondisi makro—seperti: kekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi—yang berkembang, masalah besar yang sifatnya mendasar dalam proses pendidikan akan sulit tersentuh. Bertalian dengan tantangan perkembangan zaman pada masyarakat modern, sumber daya manusia (*man power*) sering diabaikan yang seharusnya dipersiapkan. Padahal, SDM unggul terbukti lebih menentukan kemajuan suatu bangsa.<sup>38</sup>

John I. Goodlad mengatakan bahwa harapan masyarakat dan generasi muda (anak didik) di Amerika Serikat, diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang memadai:

*Reduce inequality among individuals and groups by eliminating illiteracy and cultural deprivation; Improve the economy and economic opportunity*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>37</sup>Dalam buku *Attarbiyah wa al-Ta'lim*, Mahmud Yunus mengatakan tiga alternatif tujuan pendidikan untuk: a) mempermudah mencari rezki (*kasbu al-rizqi*); b) memperoleh ilmu pengetahuan (*al-ilmu*); dan c) karakter serta akhlak mulia. Lihat: Mahmud Yunus, *Attarbiyatu wa al-Ta'lim*, Jilid 1, Al-Maktabah al-Sa'diyah, Padang Panjang, 1942, hlm. 12-15).

<sup>38</sup>Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Penyunting Mudjahid AK dan Achmad Syahid, Jakarta, 2003, hlm. 57-58.

by raising the nation's supply of intelligence and skill; Spread capacity for personal fulfilment by developing talents, skills, and creating the fruits of liberal education; Prove to be unlifting influence in the nation's cultural life by broadly diffusing the fruits of liberal education; Reduce alienation and mistrust while building a new sense of community among people of similar education and similar values; reduce prejudice and misunderstanding by fostering contact among diverse groups; and improve the quality of civic and political life.<sup>39</sup>

Sumber Daya Manusia suatu bangsa bertalian erat dengan peranan sektor pendidikan. Dalam UU No. 20/2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Antara pendidikan dan peranan negara/pemerintah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (*man power*) atau SDM satu negara, yang diukur, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI itulah yang menjadi dasar klasifikasi sebuah negara menjadi negara maju (*developed country*), negara berkembang (*developing country*), dan negara terkebelakang (*under developing country*).

Pada 2011, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melorot tajam, yakni berada pada peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia turun drastis, di mana sebelumnya,

<sup>39</sup>John I. Goodlad, *A Place Called School, Prospects for the Future*, New York: McGraw-Hill Paperbacks, 1984, hlm. 61.

<sup>40</sup>Lihat: ("Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3" dalam *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008).

pada 2010, berada di posisi 108 dari 169 negara. Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Development Program/UNDP*) merilis IPM tersebut, di mana dalam Laporan UNDP 2011, IPM Indonesia hanya 0,617 atau berada di peringkat kelima di ASEAN. Ironisnya, IPM Indonesia justru melorot di bidang pendidikan, padahal di bidang itulah yang memperoleh alokasi dana terbesar dari APBN. Dalam APBN 2011, tercatat Rp246 triliun (20%) dari total belanja negara Rp1.229,6 triliun dialokasikan untuk pendidikan.<sup>41</sup>

Jepang dan Cina merupakan negara yang aktif dan agresif dalam pengembangan sumber daya manusia generasi mudanya. Bangsa Indonesia juga memiliki tantangan untuk unggul bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia. IPM Indonesia pada 2010 menempatkan pada peringkat 108. Tetapi, peringkat itu masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia (peringkat 57), Thailand (peringkat 92), dan Filipina (peringkat 97).<sup>42</sup> Hal itu sungguh ironis karena Malaysia melakukan akselerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan sejak era 1970-an dengan program *affirmative actions*, di mana mereka pernah berguru dengan Indonesia. Ketika itu mereka mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar ke Indonesia. Sejumlah pendidik (guru dan dosen) juga mengajar di Malaysia. Hal ini merupakan upaya bangsa Jiran itu untuk menciptakan daya saing generasi muda yang kompetitif pada masa depan.

Agung Laksono,<sup>43</sup> Menkokesra (2009-2014), mengungkapkan bahwa UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Pada *Laporan IPM* kali ini, lembaga tersebut mencatat rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, yakni hanya 5,8 tahun (tidak lulus SD). Meski IPM Indonesia melorot, dikatakan Agung, penurunan tersebut hanya untuk bidang pendidikan, sementara untuk dua bidang

---

<sup>41</sup>IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang Singapura yang berada pada peringkat 26 dari 187 negara dengan angka indeks 0,866. Brunei berada di urutan 33 (0,838), disusul Malaysia di urutan 61 (0,761), Thailand di urutan 103 (0,682), dan Filipina di urutan 112 (0,644). Posisi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di urutan 128 (0,583), Laos di urutan 138 (0,524), Kamboja di urutan 139 (0,523), dan Myanmar di urutan 149 (0,483). Lihat: (*Media Indonesia*, 4 November 2011).

<sup>42</sup>*Media Indonesia*, 7 November 2011.

<sup>43</sup>*Media Indonesia*, 4 November 2011.

lainnya: kesehatan dan kesejahteraan ekonomi/pendapatan perkapita, mengalami kemajuan. UNDP mencatat angka per kapita Indonesia pada 2011 mencapai USD 3.716 yang dihitung dari 243,3 juta penduduk, atau pendapatan per kapita naik 180% dari IPM sebelumnya. Pemerintah akan melakukan sejumlah pembenahan kebijakan pendidikan, antara lain: penaikan cakupan biaya operasional sekolah lewat dana bantuan operasional (BOS), yang tadinya hanya mengover 70% kebutuhan menjadi 100%, pada tahun depan.

Penduduk bekerja di Indonesia, masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang dengan jumlah penduduk bekerja 109,7 juta orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja itu, pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah mendominasi dengan jumlah 54,2 juta orang (49,4%). Di sisi lain, pekerja dengan pendidikan sarjana hanya 5,6 juta orang atau 5,15%. Hal ini, tampak bahwa hampir separuh pekerja berlatar belakang SD dan tidak tamat SD. Dalam hal pengangguran, pada Agustus 2011, mencapai 7,7 juta orang, atau turun 420 ribu dari jumlah pengangguran pada Februari 2011 sebesar 8,12 juta orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya, pengangguran lebih banyak berlatar belakang SMA (10,66%), SMK (10,43%), SD/tidak tamat SD (3,56%), SMP (8,37%), Diploma (8,37%), dan Sarjana (8,02%).<sup>4</sup> Banyak lulusan SMK yang menjadi penganggur, yang sebetulnya mereka memiliki keterampilan khusus tetapi tidak terserap dalam lapangan kerja. Suatu hal yang patut menjadi bahan introspeksi bagi dunia pendidikan, terutama bertalian dengan urgensi evaluasi, inovasi, dan aktualisasi kurikulum SMK.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pula bahwa dari angkatan kerja 118,2 juta orang pada Agustus 2013, jumlah yang bekerja mencapai 110,8 juta orang atau berkurang 3,2 juta orang dibandingkan Februari

---

<sup>4</sup>Tekanan industri padat karya bertambah oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif tinggi. Perusahaan memilih mengurangi karyawan dan mengganti sistem produktif dengan otomatisasi. UMP DKI 2014 misalnya sebesar Rp2,4 juta per bulan atau naik dari UMP 2011 yang nilainya Rp1.529.150 dan UMP 2012 Rp2,2 juta. Lihat: (*Media Indonesia*, 8 November 2011).

2013 sebesar 114 juta orang. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2013 mencapai 6,25%, naik dibandingkan Februari 2013 sebesar 5,92% dan Agustus 2012 sebesar 6,14%. Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tri wulan III 2013 ini mengakibatkan industri tertekan. Akibatnya, sekitar 44 ribu pekerja sektor industri terkena PHK terjadi diindustri padat karya, seperti tekstil, sepatu, sandang, dan kulit.<sup>45</sup>

Pertumbuhan dan pembinaan karakter generasi muda, dan justru paling strategis, terletak pada kebijakan negara/pemerintah. IPM meningkat idealnya akan memperbaiki proses pembinaan karakter generasi muda suatu bangsa. Sama halnya, optimalisasi, keseriusan, dan konsistensi peran pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan pembangunan, dengan merujuk dimensi IPM (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi), akan sangat mungkin dapat meningkatkan IPM dan juga kualitas pembangunan karakter generasi muda Indonesia yang lebih baik. Karena, jika dimensi-dimensi IPM ini meningkat, proses pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda diharapkan akan lebih baik seperti diharapkan, dan pada akhirnya, diharapkan dapat mereduksi beragam permasalahan sosial berbangsa, dan juga dapat menguatkan *national character building*.

Seperti diketahui bahwa maju mundurnya suatu bangsa, lebih ditentukan kualitas pendidikan di mana telah melahirkan SDM yang berkarakter dan berkpribadian yang diinginkan bangsa itu. Sementara itu, institusi pendidikan, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam menciptakan iklim akademik yang diharapkan mampu membentuk suatu karakter anak didik sebagai generasi masa depan yang dapat beradaptasi dan mengaplikasikan ilmu dan pengalaman dalam masyarakat. Karena itu, institusi pendidikan memiliki peranan signifikan dalam menentukan dan menciptakan cita-cita dan masa depan bangsa, berbagai upaya optimalisasi kegiatan akademik hendaknya tidaknya hanya mengedepankan kognitif, afektif, tetapi juga psikomotorik. Dengan kata lain, aktivitas pembelajaran di sekolah/madrasah dan aktivitas

---

<sup>45</sup>Republika, 9 November 2013.

perkuliahan di perguruan tinggi (PTU/PTAI) diharapkan berupaya menciptakan anak didik atau mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang sains-teknologi tetapi juga unggul dalam sains-agama (nilai-nilai karakter, *akhlakul karimah*). Pada akhirnya, maju dan mundurnya masyarakat/bangsa, sebagai *stakeholders*, akan ditentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter, berakhlak yang harus 'direkayasa' melalui proses pendidikan nasional.

## B. Keluarga dan Karakter Anak

Dalam Islam, orangtua/keluarga merupakan institusi sosial terpenting dalam membentuk generasi dan keturunan yang baik. Orangtua dalam keluarga selanjutnya memiliki peranan strategis dalam membentuk anak yang baik dan jauh dari keburukan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa seperempat dari Al-Qur'an berhubungan dengan moralitas: 783 ayat berhubungan dengan murni moralitas, dan 748 ayat Al-Qur'an berhubungan dengan aplikasi/praktik moralitas. Tiada yang lain dalam praktik pengajaran Islam sepenting moralitas. Al-Ghazali mendefinisikan moralitas sebagai suatu pernyataan mantap dari jiwa yang memungkinkan bagi seorang melakukan pekerjaan dengan mudah dan dengan cepat. Dia juga mengungkapkan betapa pentingnya seseorang Muslim menghindari tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Sang Khalik.<sup>46</sup>

Al-Ghazali juga mengidentifikasi tiga bentuk moralitas: *philosophical morality*, *morality based on religious prescription* dan *mystical morality*. *Philosophical morality* meliputi moral suci-luhur seperti kearifan, kesederhanaan, keadilan, dan tata-krama yang baik yang menunjukkan ciri-ciri teks filsafat klasik. Dia mengatakan bahwa tata krama yang buruk seperti marah dan ingin mencoba menundukkan dan menjadikannya sebagai budak mereka. *Religious morality* berhubungan dengan keluhuran dan kesucian secara langsung ditunjukkan oleh agama yang meliputi kepatuhan terhadap kebenaran firman-firman-Nya dan hanya dapat diperoleh melalui harapan akan karunia dan kasih sayang-Nya. *Mystical morality* muncul dari kesadaran untuk berhubungan antara hati seorang dengan dunia kesurgaan. Hal

<sup>46</sup>Hamid Reza Alavi, 'Al-Ghazali on Moral Education', *Journal of Moral Education*, vol. 36, No. 3, September 2007, hlm. 309.

itu merupakan sentral inspirasi, yakni suatu hubungan yang lebih dekat dengan Sang Khalik, Allah Swt. dan adanya mistik kesalehan spiritual di luar suatu kesadaran untuk mencintai-Nya, daripada adanya kekhawatiran terhadap *funishment* untuk perilaku immoral.<sup>47</sup>

Kesalehan orangtua, dengan kata lain, sangat dituntut dalam membentuk keturunan (anak-anak) yang baik. Orangtua, karenanya, senantiasa berdoa, seperti tercantum dalam Al-Qur'an: "Tuhan kami. Berikanlah istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa".<sup>48</sup> Dalam Al-Qur'an, Nabi Zakaria a.s. berdoa: "Anugerahilah aku dari Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai!".<sup>49</sup> Dalam QS Ali Imran [3]: 38: "Tuhanku! Berikanlah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."<sup>50</sup>

Nabi Ibrahim a.s. dan putranya berdoa: "Tuhan kami! Jadikan kami dua yang berserah diri kepada-Mu dan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu".<sup>51</sup> Nabi Ibrahim a.s. juga berdoa: "Tuhanku! Berikanlah aku (keturunan) dari orang-orang yang saleh!".<sup>52</sup> Rasulullah Saw. sering berdoa untuk anak-anaknya, selain untuk anak-anak kaum muslimin keseluruhan. Nabi berdoa untuk Hasan ibn Ali r.a.: "Ya Allah! Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia".<sup>53</sup>

Dari beberapa kutipan ayat Al-Qur'an dan al-Hadis di atas, menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memerhatikan betapa pentingnya mempersiapkan anak-anak yang saleh. Anak yang saleh hanya akan dapat dipersiapkan dari orangtua dan keluarga yang saleh pula. Bahkan Nabi tidak hanya sering berdoa untuk anak-anaknya, tetapi juga sering berdoa untuk anak-anak kaum muslimin lainnya. Dalam suatu riwayat, dikatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah berdoa untuk anak-anak Ja'far: "Ya Allah!

<sup>47</sup>Ibid., hlm. 309.

<sup>48</sup>QS Al-Furqan [25]: 74.

<sup>49</sup>QS Maryam [19]: 5-6.

<sup>50</sup>QS Ali Imran [3]: 38.

<sup>51</sup>QS Al-Baqarah [2]: 128.

<sup>52</sup>QS Ash-Shaffat [37]: 100.

<sup>53</sup>Hadis Riwayat al-Bukhari.

Berikanlah Ja'far pengganti di dalam keluarganya dan berkatilah usaha Abdullah!" Rasulullah mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali.<sup>54</sup>

Orangtua yang saleh tidak akan berdoa kepada anak-anaknya dengan doa yang tidak baik. Karena jika doa yang buruk atau tidak baik itu terkabulkan, orangtua lah yang merasakan dampak buruknya. Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, sebuah hadis panjang dari Jabir, bahwasanya ada seorang yang mengutuk untanya: "Semoga Allah Swt. melaknatmu!". Rasulullah Saw. pun bertanya:

"Siapa yang melaknat untanya ini?". Orang itu menjawab: "Aku, wahai Rasulullah Saw." Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda: "Turunlah! Jangan ada sesuatu yang terlaknat bersama kami! Janganlah kalian berdoa tidak baik untuk diri kalian sendiri! Jangan mendoakan tidak baik untuk anak-anak kalian! Jangan mendoakan harta kalian dengan doa tidak baik untuk anak-anak kalian! Jangan mendoakan harta kalian dengan doa tidak baik dan bertepatan dengan waktu (mustajab), yang jika kalian meminta di waktu itu akan di waktu itu akan dikabulkan".<sup>55</sup>

Zakiah Daradjat<sup>56</sup> mengatakan bahwa orangtua diharapkan tidak menagtakan anak nakal, karena perilaku yang buruk dan bertentangan dengan nilai moral. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang menderita jiwa dan tidak memperoleh bimbingan yang membawanya kepada kehidupan yang penuh dengan nilai moral. Agamalah yang dapat menjamin pembinaan moral manusia, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Karenanya, yang pertama yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlak anak adalah orangtua, sekolah (guru), dan selanjutnya masyarakat.

Syaikh Musthafa al-'Adawy, dalam buku *Fikih Pendidikan Anak (Fiqh Tarbiyah Abna' wa Tha'ifah min Nasha'ih al-Athibba')*, mengatakan bahwa kesalehan jiwa dan perilaku orangtua memiliki dampak besar dalam membentuk kesalehan anak. Bahkan, akan membawa manfaat bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, perilaku buruk dari orangtua,

<sup>54</sup>Syaikh Musthafa al-'Adawy, *Fikih Pendidikan Anak, Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini, Dilengkapi dengan Nasihat Para Dokter dan Psikolog Anak*, Cetakan ke-3, Jakarta: Qisthi Press, 2009, hlm. 15.

<sup>55</sup>Hadis Riwayat Muslim.

<sup>56</sup>Zakiah Daradjat, 'Membina Nilai-Nilai Moral.....', *op.cit.*, hlm. 124.

akan berdampak tidak baik bagi pendidikan anak. Pengaruh atau dampak itu terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya: berkah dan balasan Allah Swt. atas amal-amal saleh, misalnya kesalehan, perlindungan, pemeliharaan, keluasan rezeki dan kesehatan yang dikaruniakan kepada anak. Kecaman dan balasan Allah Swt. atas amal-amal buruk, berupa, misalnya kesehatan, musibah, penderitaan, penyakit dan persoalan-persoalan kompleks yang menimpa anak. Karena itulah, orangtua mesti memperbanyak amal saleh di mana amal-amal tersebut berpengaruh terhadap anak.<sup>57</sup>

Pentingnya kesalehan orangtua terhadap pendidikan anak, telah dimuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

*Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.*<sup>58</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an selanjutnya Allah Swt. berfirman:

*Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (qaul sadid).*<sup>59</sup>

Ayat di atas menjelaskan adanya dampak antara perkataan yang benar (*qaul sadid*), dalam urusan anak yatim, dan pendidikan anak-anak "si wali yatim". Dalam ajaran Islam, orangtua senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. dengan selalu mengucapkan kata-kata yang benar (*qaul sadid*), terutama bertalian dengan anak yatim. Ketika melihat suatu keliruan yang dilakukan anak-anak didorong untuk mengucapkan *qaul sadid* dan mereka dengan niat mencari ridha Allah Swt. Dengan *qaul*

---

<sup>57</sup>Syaikh Musthafa al- 'Adawy, "Fikih Pendidikan Anak, Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini, Dilengkapi dengan Nasihat Para Dokter dan Psikolog....", *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>58</sup>QS Al-Kahfi [18]: 82.

<sup>59</sup>QS An-Nisa' [4]: 9.

*sadid* akan melenyapkan kezaliman, menegakkan keadilan, menyelamatkan anak-cucu, dan sebagai pahala kebaikan di akhirat.

Orangtua merupakan *teladan* bagi anak-anaknya. Anak-anak yang sering melihat orangtuanya berzikir, bertahlil, bertahajud, bertasbih dan bertakbir, akan meniru ucapan seperti: *la ilahailallah, subhanallah, alhamdulillah, dan allahu akbar* dari orangtuanya. Anak-anak juga cenderung meniru perilaku orangtuanya dalam banyak hal: berbaik-baik dengan nenek-kakeknya, menenangkan hati, memenuhi kebutuhan mereka, kebiasaan ibu berjilbab, dan berdoa: "*Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan kedua orangtuaku dan rahmatilah keduanya seperti ketika mereka mendidikku di waktu kecil*". Ajaran Islam mendorong umatnya, orangtua, agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt., menjadi teladan bagi putra-putrinya dalam hal agama, kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, akhlak, perangai, dan tutur kata.

Ajaran Islam, selanjutnya, melarang orangtua, melarang sesuatu tetapi mereka melakukannya. Adalah aib jika orangtua melarang putra-putri untuk berbohong tetapi justru melakukan dusta di hadapan mereka. Terdapat banyak hal tentunya bertalian dengan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban mesti selaras antara ucapan dan perilaku orangtua dengan anak-anaknya yang diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an dikatakan:

*Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.*<sup>60</sup>

Amal-amal saleh yang dilakukan orangtua dapat membuat anak dihargai orang lain nantinya. Perilaku buruk orangtua akan berdampak buruk bagi kepribadian anak. Sehingga, Allah Swt. selalu menyebut kesalehan para leluhur di hadapan para anak. Dengan ini, sebenarnya Allah Swt. mengajar para anak-anak untuk beriman, bersyukur dan beramal saleh, sebagaimana dilakukan para leluhur mereka. Allah Swt. berfirman: "*Keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya ia adalah hamba*

<sup>60</sup>QS Ash-Shaff [61]: 2-3.

yang bersyukur".<sup>61</sup> Yang dimaksudkan keturunan orang-orang yang beriman di sini adalah mereka yang beriman bersama Nabi Nuh a.s. dalam perahu, di mana orangtua mereka merupakan orang-orang yang beriman—karena naik perahu Nuh hanyalah mereka yang beriman. Nabi Nuh merupakan seorang yang pandai bersyukur dan saleh, yang perlu diikuti keluhurannya.

Ketika seorang anak tidak mampu mencapai kesalehan orangtuanya, Allah Swt. akan mengikuti sang anak kepada ayahnya, tanpa sedikit pun mengikuti hak-hak sang ayah. Seperti Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

*Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*<sup>62</sup>

Dalam menciptakan suatu keluarga yang saleh mesti dimulai dari calon istri dan suami dalam pembentuk keluarga atau rumah tangga baru. Seorang laki-laki beriman yang berkehendak untuk menikah, hendaklah memilih calon istri yang baik, yakni wanita salehah yang taat beragama, karena nantinya wanita itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dari ibulah anak akan terbentuk kepribadiannya, di mana dari air susu ibu anak menyusui dan dari akhlak ibu akan terbentuk kepribadian anak-anak. Sebaliknya, seorang wanita yang hendak akan menikah dianjurkan untuk memilih calon ayah yang saleh untuk anak-anaknya yang taat beragama dan berakhlak baik. Dianjurkan juga untuk memilih calon suami yang memang memiliki ilmu dan terpandang, agar ia dapat mengajarkan putra-putrinya.

Jadi, secara konseptual, Islam sangat menganjurkan agar orangtua (ayah dan ibu) dalam kehidupan keluarga bersama anak-anaknya, dapat menjadi teladan atau kesalehan yang akan diikuti anak-anaknya. Kesalehan orangtua akan berdampak pada perkembangan kepribadian anak-anaknya, yang nantinya akan berdampak baik pula terhadap kehidupan anak di tengah masyarakat karena keluhuran orangtuanya. Orangtua, karenanya, sedapat mungkin dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Swt.

<sup>61</sup>QS Al-Isra' [17]: 3.

<sup>62</sup>QS Ath-Thur [52]: 21.

sebagai modal dan inspirasi bagi anak-anak dalam mengikuti perilaku dan kesalehan orangtuanya.

Islam merupakan ajaran yang sangat memerhatikan anak dan perkembangannya. Dalam kaitannya antara etika Islam dan anak-anak pun telah diajarkan Rasulullah Saw. Terdapat banyak etika Islam dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembinaan akhlak anak. Bertalian dengan etika makan misalnya, Rasulullah Saw. mengajarkan etika kepada Umar ibn Abi Salamah, ketika beliau melihat tangannya mengacak-acak hidangan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar ibn Abi Salamah ra., ia berkata, "adalah aku dalam asuhan Rasulullah Saw. dan tanganku menjulur di atas hidangan ke sana dan ke mari". Maka beliau bersabda kepadaku: "*Wahai anakku! Sebutlah nama Allah! Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu!*".

Imam Muslim, dalam *Shahih Muslim* meriwayatkan, dari Hudzaifah ra., ia berkata: '*Jika kami bersama Nabi Saw., kami tidak pernah meletakkan tangan kami di atas makanan sebelum beliau memulainya. Kemudian, datang seorang anak perempuan, sepertinya ia sangat lapar. Ia hendak meletakkan tangannya pada makanan. Lalu, datanglah seorang badui, sepertinya ia sangat lapar, dan melakukan hal yang sama dengan anak perempuan tadi. Nabi pun mengambil tangan si badui. Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya setan akan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya ia datang bersama anak perempuan ini agar dapat memakan makanannya. Karena itu, aku pegang tangannya. Kemudian ia datang bersama orang badui ini agar dapat memakan makanannya. Karena itu, aku juga pegang tangannya. Demi Dzat yang jiwaku dalam genggamannya! Sesungguhnya tangannya berada di tanganku bersama tangan gadis itu"*'.<sup>63</sup>

Jika seorang yang sedang makan lupa menyebut nama Allah di awal makan, hendaknya mengucapkan: "*bismillaahi awwaluhu wa akhiruhu*" ('*Dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya*').

Hadis Rasulullah Saw. mengajarkan kepada orangtua agar dapat mendidik anak-anaknya:

*Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, sebutlah nama Allah ketika ia masuk dan ketika ia hendak makan. Maka setan berkata, 'Aku tidak akan menginap dan makan malam bersama kalian'. Dan jika ia masuk tanpa nama Allah, maka setan*

<sup>63</sup>Hadit Riwayat Muslim.

berkata, 'Aku menginap bersama kalian'. Dan jika tidak menyebut nama Allah ketika ia hendak makan, maka setan berkata, 'Aku menginap dan makan malam bersama kalian'.<sup>64</sup>

Hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Umamah ra., bahwasanya Nabi Saw. jika telah selesai dari makan, beliau mengucapkan: *Alhamdulillahiladzi kafaanaa waarwaanaa ghoiraa makfiyyau wala makfuri* ("Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku dan memberiku minum tanpa minta balasan dan diingkari nikmat-Nya."). Orangtua juga dianjurkan untuk mengajarkan anak-anaknya berdoa untuk orang yang memberi makanan: *'Aftoro 'indakumushshooimuuna waakkala tho'aamakumul abrooru washallatu 'alaikumul malaaiikatu* ("Semoga orang-orang yang berpuasa di tempat kalian. Semoga orang-orang yang baik memakan makanan kalian. Dan semoga para malaikat mendoakan kalian"). Orangtua juga dianjurkan mengajarkan anak-anaknya berdoa: *"Allahumma baarik lahum fiima roazaktahum waghfirlahum warhamhum"* ("Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan kasihanilah mereka!").<sup>65</sup>

Hadis-hadis yang dikutip di atas, dari sekian banyak hadis Rasulullah Saw. yang berhubungan dengan etika Islam tentang makan yang perlu diajarkan kepada anak-anak, menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan tentang tata cara makan dan minum. Orangtua, sebagai elemen penting dalam keluarga, memiliki peranan penting dan terdepan dalam mendidik anak-anaknya untuk berperilaku dan bertata cara makan dan minum sesuai dengan ajaran Islam dan Sunah Rasulullah Saw. Hal ini logis dan wajar tentunya mengingat pada usia anak-anak, waktu mereka lebih banyak berada di rumah dan secara emosional anak masih banyak tergantung dengan keluarga (orangtua). Islam, dalam hal ini, telah mengatur tentang etika dalam hal makan dan minum.

Kemudian, bertalian dengan pentingnya kejujuran dan tidak ingkar janji, Islam mengajarkan kepada orangtua agar tidak pernah berbohong dan ingkar janji kepada anak-anak. Karena mereka akan belajar berbohong dan ingkar janji kepada orangtua pula. Rasulullah Saw. bersabda: "Tanda

<sup>64</sup>Lihat: (Syaikh Musthafa al-'Adawy, "Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini...", op.cit., hlm. 233.

<sup>65</sup>Ibid., hlm. 234-235.

orang munafik ada tiga: apabila berkata, ia berbohong, bila berjanji ia ingkar dan bila dipercaya ia berkhianat." Nabi juga bersabda:

*Empat perkara apabila semuanya ada pada diri seorang, maka ia menjadi orang munafik yang sebenarnya, dan apabila dalam dirinya ada salah satu dari empat perkara itu, maka ia memiliki sebagian dari sifat munafik, sehingga ia meninggalkannya. Empat perkara itu ialah: Bila dipercaya ia khianat, bila berkata ia bohong, bila berjanji ia ingkar, dan bila berselisih ia jahat.*<sup>66</sup>

Apa pun beragam bentuk ingkar dan bohong tidak diperkenankan dilakukan orangtua dihadapan anak-anaknya. Ingkar janji dan bohong di hadapan anak-anak hanya akan menyebabkan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap orangtua.

Setelah itu, bertalian dengan bertalian dengan cara berpakaian, dalam Islam, orangtua Muslim perlu mengatur pakaian yang cocok untuk anak-anaknya. Islam, pada prinsipnya, telah mengatur tentang ketentuan pakaian laki-laki dan perempuan. Pakaian anak-anak perlu diatur sesuai dengan usia dan badan mereka agar tidak menimbulkan fitnah. Di antara ulama ada yang memakruhkan pakaian sutra untuk anak laki-laki, berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw. bertalian dengan sutra dan emas dalam hadis berikut: *"Dua benda ini haram atas laki-laki umatku, dan halal untuk perempuan mereka"*. Hadis Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, ibn Majah, dan Ahmad, dari Ali ibn Abi Thalib ra., ia berkata, *"Nabi mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, kemudian mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya dua benda ini haram atas laki-laki umatku".* Ibn Majah menambahkan: *"Halal untuk kaum perempuan mereka"*.<sup>67</sup>

Islam juga mengatur tentang pakaian yang pantas dan tidak pantas dipakai anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak laki-laki makruh memakai emas, karena Rasulullah melarang memakainya. HR Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Barra 'ibn Azib ra., ia berkata: *"Nabi Saw. melarang kita dari tujuh perkara. Beliau melarang memakai cincin emas"*.

Segelintir dari sekian banyak ilustrasi-ilustrasi di atas merupakan segelintir contoh adab dan ajaran Islam tentang pentingnya mengajarkan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 235.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 239.

anak-anak mengenai etika Islam dalam berbagai sendi kehidupan. Sangat luas pandangan Islam tentang pentingnya mendidik akhlak anak dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentu, dalam hal ini, hanya sekelumit ilustrasi etika Islam tentang mendidik anak tentang etika makan, pakaian, dan berkata jujur. Idealnya, pengajaran etika Islam tentang akhlak dan karakter islami sedapat mungkin berkesinambungan antara keluarga/orangtua, sekolah dan masyarakat. Karenanya, orangtua, guru, dan warga masyarakat merupakan pendidik dan teladan bagi anak-anak dan generasi muda. Di sinilah pentingnya nilai-nilai agama, budaya, tradisi, adat istiadat yang konstruktif perlu dilestarikan agar generasi muda paham mana saja nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang tidak baik.

Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa karena orangtua merupakan pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya kelak, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orangtuanya di permulaan hidupnya dahulu. Perasaan anak terhadap orangtuanya sebenarnya begitu kompleks, yang merupakan campuran dari berbagai emosi dan dorongan yang selalu melakukan interaksi, pertentangan dan memuncak pada umur menjelang 3 tahun. Yakni umur di mana hubungan anak dengan ibunya tidak lagi terbatas pada kebutuhan akan bantuan fisik, tetapi telah meningkat pada hubungan emosi, di mana ibu menjadi objek yang dicintai dan butuh akan kasih sayang, takut akan terjatuh darinya atau kehilangan kesayangannya. Bahkan pula memiliki rasa permusuhan bercampur bangga, butuh, takut dan cinta kepadanya sekaligus. Di sinilah muncul perasaan dosa yang disebabkan bukan karena kesalahan yang diperbuat, tetapi karena adanya keinginan untuk melakukan yang terlarang.<sup>68</sup>

<sup>68</sup>Maka untuk menyelamatkan diri dari pertentangan batin itu, si anak mengambil sifat-sifat kepribadian bapak atau ibunya untuk dirinya. Dengan sebagian dari kekuatan luar berpindah dalam dirinya (*super ego*) yang akan jadi pengawas dari keinginan dan dorongan yang terlarang, maka dengan itu ia mencari keridaannya. Anak-anak dapat mengorbankan sebagian dari keinginannya, guna menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ketika itu anak dapat melakukan hubungan positif dengan orang yang sebenarnya kurang disenanginya. Maka rasa cinta dapat mengalahkan rasa bencinya semula. Pada umur kira-kira 3 tahun, si anak telah dapat menekan perasaan negatif terhadap bapaknya, segala segi-segi yang tidak menyenangkan yang terdapat ada bapaknya, dapat dialihkannya pada suatu yang tidak jelas di luar, maka bapaknya dalam pandangannya merupakan suatu pribadi ideal yang sangat sempurna, yang memiliki

Sebagai upaya memudahkan anak menerima pemikiran tentang Tuhan, perlulah dikemukakan kepadanya sifat-sifat Tuhan yang baik, pengasih, penyayang, dan lain-lain, di mana dapat mendorong anak merasa aman dan hendaknya dijauhkan dari prasangka buruk terhadap Tuhan, seperti sifat jahat, keras, dan kejam. Lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap agar anak menerima tentang Tuhan, baik dengan tindakannya yang lemah lembut atau dengan selalu minta dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal ini, pemikiran tentang Tuhan mulai masuk ke dalam jiwa anak. Sikap anak-anak terhadap agama memiliki kekaguman dan penghargaan. Bagi mereka upacara-upacara agama dan dekorasi (keindahan) rumah ibadah, lebih menarik perhatian. Anak-anak dalam kepercayaannya egosentris, yang berarti semua sembahyang dan doa-doa adalah untuk memperoleh keinginan-keinginan pribadi, misalnya dia mau baik karena akan mendapat upah. Anak menggambarkan Tuhan sebagai orang yang akan menolongnya dalam memperoleh sesuatu, karena dia sudah biasa ditolong oleh orang dewasa, terutama kedua orangtuanya. Jika ingin agama mempunyai arti bagi anak-anak, sebaiknya disajikan lebih konkret, dengan bahasa yang dipahaminya dan kurang bersifat dogmatik. Anak ingin supaya kebutuhannya untuk tahun (*curiosity*) saat dipenuhi.<sup>69</sup>

---

kemampuan yang tidak terbatas. Pandangan seperti inilah nantinya membawa si anak pada pikiran seolah-olah bapaknya itulah Tuhan (yang tidak mati). Dalam pandangan anak, ibu dan bapaknya merupakan orang yang sempurna. Anak tidak memandang bapaknya seperti apa adanya tetapi sesuai dengan apa yang dikhayalkannya. Dari sinilah mulai muncul pokok-pokok rasa agama. Pada umur kira-kira 4 tahun, seiring dengan perkembangan anak, anak mulai menyadari bahwa bapaknya memiliki keterbatasan bapaknya, sehingga terjadi ketidakstabilan dalam diri anak. Selanjutnya, anak mulai mempercayai adanya perasaan-perasaan tertentu adanya Tuhan dan mulai menerimanya dan mungkin juga menentang-Nya. Perlu diingat bahwa perubahan kepercayaan di mana Allah Swt. menggantikan bapaknya merupakan gambaran lahiriah dari perubahan yang lebih umum, meliputi kemajuan emosi dan pikiran sekaligus. Lihat: (Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 46-47).

<sup>69</sup>Latihan-latihan agama dilalakan pada waktu kecil, atau diberikan dengan cara kaku, salah atau tidak cocok, dengan anak-anak, maka pada masa dewasa nanti, bisa saja cenderung ke arah ateis atau kurang peduli terhadap agama, atau kurang merasakan pentingnya agama bagi dirinya (*allport*). Sebaliknya, semakin banyak anak memperoleh latihan-latihan keagamaan pada waktu kecil, sewaktu dewasanya nanti akan semakin terasa, sedang masa antara keduanya itu, adalah masa sibuknya anak dalam sentuhannya kepada agama. Lihat: (Zakiah Daradjat, 'Ilmu Jiwa Agama', *op.cit.*, hlm. 49).

Pada usia anak sebelum 7 tahun, perasaan anak terhadap Tuhan, pada dasarnya adalah negatif, yakni takut, menentang dan ragu. Dia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sementara gambarnya terhadap Tuhan sesuai dengan emosinya. Pada masa kedua (7 tahun ke atas), perasaan anak terhadap Tuhan telah berganti dengan yang lebih positif (cinta dan hormat) dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan merasa aman. Tidak tampaknya Tuhan tidak membuat anak gelisah dan anak lebih condong betul-betul ingin melihat Tuhan dan mengetahui rahasianya. Anak mulai berpandangan positif terhadap Tuhan. Hingga anak umur 8 tahun, hubungan anak dengan Tuhan berupa hubungan individual, hubungan emosional antara dia dengan sesuatu yang tidak terlihat yang dibayangkan dengan caranya sendiri. Adapun kepercayaan tentang Tuhan dan keyakinan yang diajarkan oleh lingkungannya pada umur ini, belum betul-betul menjadi bagian dari pembinaan pikirannya, kecuali pada usia yang lebih besar lagi nantinya (masa anak-anak terakhir). Perkembangan pemikiran tentang Tuhan terjadi pada semua anak, kendatipun berbeda lingkungannya yang memiliki garis pokok yang sama. Hal ini terlihat pada masa anak-anak pertama (sampai sekitar umur 7 tahun) dan masa adolesen (13-21 tahun).<sup>70</sup>

Jelas sekali bahwa perilaku keagamaan anak-anak pada usia permulaan hingga menjelang dewasa (*adolescent*) sangat ditentukan oleh keluarga, kedua orangtuanya. Zakiah Daradjat<sup>71</sup> mengungkapkan selanjutnya bahwa bila suatu keluarga jarang pergi ke tempat ibadah, anak-anak pun akan kurang aktif dalam masalah-masalah agama. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang kurang menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, perhatian anak-anak terhadap agama akan kurang pula. Karenanya, penanaman nilai-nilai dan latihan-latihan keagamaan serta keteladanan

---

<sup>70</sup>Pada masa ini, perasaan agama terdiri dari dinamika pribadi, sedangkan masa antara keduanya itu, adalah masa sibuknya anak dalam hubungan sosial, yakni masa tunduknya kekuatan-kekuatan spontan terhadap pengaruh-pengaruh sosial dari luar. Pikiran anak-anak pada awal perkembangannya, menunjukkan bahwa setiap kejadian itu disangkanya karena keinginan dan pikirannya, kemudian dibangsakan kepada bapaknya, hal ini bertalian dengan kepercayaan anak tentang kemampuan pikiran anak-anak yang oleh Piaget disebut *egocentricity*. Piaget menemukan bahwa pikiran-pikiran anak-anak pada masa *egocentricity* itu, sunyi dari pikiran tentang mati. Lihat kembali: (Zakiah Daradjat, 'Ilmu Jiwa Agama', *op.cit.*, hlm. 53-55).

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 55-69.

orangtua sangat penting dalam upaya mengenal Sang Khalik dan melatih melaksanakan ajaran agamanya. Hubungan orangtua sesama mereka sangat memengaruhi jiwa anak. Hubungan serasi, penuh pengertian dan kasih sayang, akan membawa kepada pembinaan pribadi yang terang, terbuka dan mudah dididik, karena anak mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, hubungan orangtua yang tidak serasi dapat membawa anak kepada suatu keadaan pertumbuhan pribadi yang sulit dibentuk. Bila anak sudah sekolah, tugas pembinaan pribadi anak di sekolah tidak hanya tugas seorang guru agama saja, tapi tugas semua guru pada umumnya, bersama orangtua anak-anak. Guru agama dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat orangtua (terhadap anak-anaknya), selanjutnya, bersama guru lain dapat membantu pembinaan anak.

# Bab 6

## PENDIDIKAN PESANTREN, MADRASAH DAN *LEADERSHIP*

Ada tiga 'iklim' pendidikan yang berpengaruh kuat terhadap proses perkembangan anak didik, yakni pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiganya tidak terpisah satu sama lain, bahkan saling bertautan dan membutuhkan dengan rangkaian tahapan-tahapan. Keluarga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak, dan sama-sama bertanggung jawab dalam masalah pendidikan. Orangtua bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan pengarahan yang benar yakni dengan menanamkan ajaran agama dan *akhlak al karimah*.<sup>1</sup> Pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan pengetahuan dan membina akhlak anak didik. Pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini, antara lain, meliputi: pesantren, madrasah dan mata pelajaran PAI di sekolah.

### A. Pesantren

*Pesantren* memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan bangsa Indonesia, sejak periode pra-kolonial hingga kemerdekaan. Pesantren dan madrasah, merupakan pendidikan Islam meskipun dalam proses,

<sup>1</sup>Wahyoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 21.

kurikulum (*subject matters*), dan metodologi pembelajaran tidak selalu sama. Ada munculnya pesantren dengan mengadopsi madrasah. Sering kali, pesantren dinamakan pendidikan Islam tradisional karena umumnya mengajarkan ilmu agama semata; dan madrasah merupakan pendidikan Islam modern, dengan mengaplikasikan ilmu agama dan ilmu umum. Tapi, ada pula terdapat sebutan pesantren modern karena ilmu umum pun diajarkan. Suatu hal pasti bahwa baik pesantren maupun madrasah memiliki peranan strategis dalam perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan (*syi'ar Islam*) di tanah air.

Taufik Abdullah berpendapat pada fase ketiga, sekitar abad ke-11 dan 13 M, Islam datang dari Cina, Gujarat, India, atau Turki. Terlepas adanya perbedaan mengenai hal itu, agama ini telah diterima luas oleh bangsa Melayu karena sifatnya yang egaliter dan populis. Islam tidak terdapat sistem kasta, kependetaan, yang memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Faktor penting lainnya yang mendorong cepatnya penyebaran agama Islam ini dikarenakan tiga kekuatan: *istana*, *pesantren*, dan *pasar*. Istana memberi legitimasi politis untuk disebarkan ke rakyat yang bernaung di bawahnya. *Pesantren* yang dikelola oleh kalangan tarekat memberikan penjelasan tentang esensi sebagai agama yang membumi dan mudah dicerna. Sifat pesantren yang terbuka untuk siapa pun menjadikan lembaga ini menjadi tempat belajar masyarakat untuk mempelajari dan memperdalam ajaran Islam. Dan pasar, sebagai tempat daerah pemukiman saudagar, kaum terpelajar, dan kelas menengah yang berhadapan langsung dengan situasi kultural sedang berkembang. Dengan didukung tiga kekuatan tersebut, pengaruh Islam di masyarakat Melayu semakin pesat. Secara kultural, Islam disebarkan melalui pesantren dan pasar, dan secara politik dilegitimasi oleh istana. Adapun pengetahuan seperti *syariah*, *tasawuf*, *kalam*, *tafsir*, dan *hadis*, dan ilmu umum: *hisab*, *perkapalan*, *estetika*, *astronomi*, *logika*, *ekonomi* dan *perdagangan*, dan lain-lain, di mana pengaruh Islam berkembang pesat.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Perkembangan keimanan dan keilmuan secara bersama-sama menempatkan Islam sebagai poros bagi kehidupan masyarakat Melayu yang memengaruhi semua dimensi kehidupan mereka. Terdapat suatu ungkapan yang populer yang secara eksplisit menunjukkan kuatnya pengaruh Islam, '*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*'. Tetapi, patut dicatat bahwa Islam menjadi mayoritas masyarakat Melayu yang hidup

Pesantren berasal dari kata *santri* yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang bermakna *tempat para santri*. Ada pula yang mengatakan pesantren sebagai gabungan kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti *tempat pendidikan manusia baik-baik*. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan dianggap sebagai budaya asli (*indigenous*) Indonesia. Pesantren memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan sistem pendidikan pesantren telah ada jauh sebelum kedatangan Islam ke negeri ini, yakni pada masa Hindu-Budha. Pada saat itu, pesantren merupakan lembaga keagamaan yang berfungsi mencetak elit agama Hindu-Budha.<sup>3</sup> *Pondok pesantren* berasal dari dua: kata *pondok* berasal dari kata Arab '*funduk*' berarti hotel atau asrama;<sup>4</sup> sedangkan kata *pesantren* berasal dari kata *santri* yang diberi awalan '*pe*' dan akhiran '*an*' yang berarti *tempat tinggal para santri*.<sup>5</sup> Keduanya memiliki konotasi yang sama, yakni menunjukkan pada suatu kompleks untuk kediaman dan belajar santri. Jadi, *pondok pesantren* dapat diartikan asrama tempat tinggal para santri.

Ada pula yang mengatakan kata *santri* berasal dari bahasa Tamil (India), yakni *shastra* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Artinya, pesantren adalah bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Pendapat ini dikaitkan dengan anggapan bahwa pesantren dimodifikasi dari pura Hindu.<sup>6</sup> Istilah *santri* dikatakan pula, yakni peserta didik yang biasanya tinggal di asrama atau pondok, kecuali *santri* yang rumahnya dekat dengan pesantren. Karel A. Steenbrink<sup>7</sup> mengatakan, secara terminologis, pendidikan pesantren dapat dilihat dari sisi bentuk

---

di kawasan perkotaan tetapi tidak menjadi agama mayoritas di daerah pedalaman. Lihat: (Abdullah Idi, 'Orang Melayu: Asal-Usul, Jati Diri dan Globalisasi', *Seminar Nasional Islam Melayu Nusantara*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 29 September 2014).

<sup>3</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 108.

<sup>4</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 18.

<sup>5</sup>M. Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Butche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1986, hlm. 99.

<sup>6</sup>Ali Ghazi, *Pramuka Santri, dalam Bina Pesantren Bina Pesantren Media Informasi & Artikulasi Dunia*, Edisi 02/Tahun I/Nopember 2006, hlm. 37.

<sup>7</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 20.

dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa.

Mastuhu<sup>8</sup> mengungkapkan terdapat sejumlah unsur sistem pendidikan pesantren: (1) tujuan; (2) filsafat dan tata nilai; (3) struktur organisasi pesantren; status kelembagaan, status organisasi, gaya kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan; (4) lingkungan kehidupan pesantren; (5) kiai dan ustaz; (6) santri; (7) pengurus; (8) interaksi pelaku; (9) kurikulum dan sumber belajar; (10) proses belajar-mengajar dan evaluasi; (11) pengelolaan dan dana; (12) sarana dan alat-alat pendidikan.

Kapan pastinya pesantren mulai muncul sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia, agaknya belum ada kesepakatan dari kalangan akademisi. Arif Subhan mengungkapkan bahwa asal-usul pesantren dihubungkan dengan tradisi Indonesai pra-Islam *mandala*, tempat pertapaan sekaligus pembelajaran bagi para calon pendeta. Pandangan lain menghubungkan asal-usul pesantren dengan desa *perdikan* dan *wakaf*. Desa *perdikan* merupakan desa yang memperoleh perlakuan khusus (*privilege*) dari raja, yang memiliki fungsi: memelihara makam tokoh keagamaan, tempat pembelajaran, dan masjid. *Wakaf* merupakan mekanisme dalam Islam di mana seorang, baik penguasa maupun rakyat biasa yang lebih mampu secara ekonomi mendermakan harta miliknya untuk kepentingan agama. Steenbrink mencatat jumlah pesantren yang berasal dari dana *wakaf* tidak terlalu banyak, walaupun angkanya tidak disebutkan. Agaknya, persentuhan budaya (*cultural encounter*) antara tradisi *mandala*, desa *perdikan*—sebagai tradisi lokal—ajaran *wakaf*, ajaran Islam tentang *talab al-'ilm* dan tradisi pembelajaran Islam yang sudah berlangsung sejak awal perkembangan Islam, sebagai faktor yang mendorong proses pelembagaan (*institutionalized*) pesantren.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm. 174-175.

<sup>9</sup>Apalagi tradisi pembelajaran pesantren dalam Islam yang mengambil bentuk *halagah* sudah ditemukan pada masa Samudra-Pasai dan Malaka, dua buah kerajaan Islam penting dan berpengaruh pada abad ke-13. Dari pandangan ini, keberadaan pesantren, yang hanya dapat diidentifikasi setelah abad ke-18, jelas tidak bisa dipisahkan dari tradisi pembelajaran Islam sendiri. Lihat: (Arief Subhan, *Lembaga*

Pesantren diperkirakan mengalami perkembangan pesat sebagai lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19, yang didukung data berikut. *Pertama*, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada 1873 menyebutkan jumlah pesantren yang besar sekitar 2.000-25.000 dengan jumlah santri 300.000 orang. *Kedua*, 'catatan perjalanan' Snouck Hurgronje pada abad ke-19 di beberapa wilayah Indonesia. Catatan itu menginformasikan bahwa telah terdapat sejumlah pesantren terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kunjungannya, antara lain, Snouck menemukan pesantren di Garut di Jawa Barat dan mencatat Pesantren Caringin (Haji Muhammad Rafi'i), Pesantren Sukaregang (Kiai Adrangi), dan Pesantren Kiara Koneng (Haji Mu'allim). Diinformasikan pula ada pesantren lainnya di Jawa Barat, seperti Cianjur, Bandung, Bogor, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Snouck juga mencatat bahwa terdapat beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan dikatakan bahwa sebagian pimpinan pesantren pernah menuntut ilmu di Makkah.<sup>10</sup>

Para pelajar Melayu-Indonesia di kota Makkah, yang disebut 'komunitas Jawi', telah terlibat dan berinteraksi dalam sejumlah diskusi tentang topik-topik yang bertalian perkembangan Islam di Melayu-Nusantara, termasuk topik lembaga pendidikan Islam, seperti ditulis Snouck Hurgronje. Komunitas Jawi inilah yang kemudian menjadi aktor penting dan menentukan dalam perkembangan Islam Melayu-Indonesia. Dalam kaitannya dengan pesantren, terdapat sejumlah tokoh seperti: Syaikh Nawawi al-Bantai (wafat 1897), Syaikh Mahfud al-Tarmisy (wafat 1919), Kiai Khalil Bangkalan (wafat 1924), Kiai Asnawi Kudus (wafat

---

*Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 80).

<sup>10</sup>Makkah dan Madinah (Haramayn) penting dipertimbangkan dalam melihat perkembangan pesantren di Indonesia. Keduanya, selain Mesir—sebagai pusat pembelajaran Islam adalah jaringan internasional Islam Indonesia (Nusantara) yang telah terbentuk sejak abad ke-17. Melalui jaringan tersebut tradisi intelektual Islam yang berkembang di pesantren terintegrasi dengan pusat-pusat keilmuan Islam. Dalam hal ini, haji dan tradisi perjalanan *talab al-'ilm* (belajar) ke Timur Tengah, merupakan dua hal penting yang telah memperkuat terbentuknya jaringan intelektual itu. Bertambahnya jumlah jemaah haji akibat perbaikan sistem transportasi laut dan pembukaan Terusan Suez pada 1869 menjadikan Makkah sebagai jantung dinamika Islam di Melayu-Nusantara. Lihat kembali: (Arif Subhan, 'Lembaga Pendidikan Islam...', *op.cit.*, hlm. 80-81).

1959), dan Kiai Hasyim Ash'ari (wafat 1947) merupakan para arsitek pesantren di Indonesia. Dari komunitas Jawa ini pula tradisi pembelajaran Islam di pesantren, dan Islam di Melayu-Indonesia, secara umum semakin terintegrasi ke dalam arus ulama perkembangan Islam yang berbasis Timur Tengah, dengan indikator utamanya: besarnya dan beragamnya kitab-kitab yang digunakan di pesantren, dan juga digunakan dengan luas di berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia Muslim, terutama mereka yang berafiliasi ke Mazhab Syafi'i, seperti dikatakan Martin van Bruinessen.<sup>11</sup>

Samsul Nizar<sup>12</sup> mengatakan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan nonformal. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat Muslim tanpa membedakan status sosial, menerima tamu yang datang dari masyarakat umum dengan motif berbeda. Sebagai lembaga penyiaran agama Islam, masjid pesantren berfungsi sebagai masjid umum, yakni sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi para jemaah.

Mastuhu<sup>13</sup> mengungkapkan terdapat sejumlah unsur sistem pendidikan pesantren: (1) tujuan; (2) filsafat dan tata nilai; (3) struktur organisasi pesantren; status kelembagaan, status organisasi, gaya kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan; (4) lingkungan kehidupan pesantren; (5) kiai dan ustaz; (6) santri; (7) pengurus; (8) interaksi pelaku; (9) kurikulum dan sumber belajar; (10) proses belajar-mengajar dan evaluasi; (11) pengelolaan dan dana; (12) sarana dan alat-alat pendidikan. Zamakhsyari Dhofier<sup>14</sup> mengatakan bahwa setidaknya ada lima elemen dasar yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lain:

---

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 82.

<sup>12</sup>Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 288.

<sup>13</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm. 174-175.

<sup>14</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 44-60.

1. *Kiai*. *Kiai* adalah tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan pengajaran. Selain itu, *kiai* mempunyai peran paling penting dalam pendirian, pertumbuhan dan perkembangan sebuah pesantren;
2. *Santri*. *Santri* adalah elemen penting dalam perkembangan sebuah pesantren. Langkah pertama dalam pendirian pesantren mesti ada murid untuk belajar dengan orang alim. Bila murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang itu disebut *kiai*, dan mulai membangun fasilitas lebih lengkap untuk membangun pondoknya.<sup>15</sup>
3. *Masjid* adalah sebagai pusat kegiatan ibadah. Di samping berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjemaah, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar-mengajar. Biasanya waktu belajar-mengajar di pesantren bertalian dengan waktu shalat berjemaah, baik sebelum dan sesudahnya. Dalam perkembangannya, sesuai dengan perkembangan jumlah santri dan tingkatan pelajaran, dibangun tempat atau ruangan-ruangan khusus untuk *halaqoh*. Akan tetapi, masjid-masjid tetap digunakan sebagai tempat belajar-mengajar. Pada sejumlah pesantren, masjid juga berfungsi sebagai tempat *i'tikaf* dan melaksanakan latihan-latihan (*suluk*), zikir dan amalan-amalan lainnya dalam kehidupan tarekat sufi.<sup>16</sup>
4. *Pondok* berasal dari bahasa Arab, *funduk*, yang berarti hotel atau asrama. Dalam kaitannya dengan pesantren, pondok atau asrama adalah tempat tinggal sederhana yang merupakan tempat tinggal *kiai* bersama para santrinya. Tanpa memerhatikan jumlah santrinya, asrama santri putra selalu dipisahkan dengan asrama santri putri. Sistem asrama

<sup>15</sup>Santri biasanya terdiri dari dua kelompok: *santri kalong* dan *santri mukim*. *Santri kalong* adalah santri yang tidak menetap dalam pondok. Setelah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren, para santri pulang ke rumah masing-masing. *Santri kalong* biasanya berasal dari daerah di sekitar pesantren. Sementara itu, *santri mukim* adalah santri menetap di pondok pesantren. Biasanya mereka berasal dari daerah yang jauh dari pesantren. Yang membedakan antara pesantren besar dan pesantren kecil biasanya terletak perbandingan antara kedua kelompok santri tersebut. Pesantren besar, seperti Gontor-Ponorogo, Tebuireng-Jombang, Darussalam-Martapura, dan lainnya, memiliki jumlah santri lebih besar dibandingkan dengan jumlah *santri kalong*. Sedangkan pesantren yang dalam kategori kecil memiliki lebih banyak *santri kalong*.

<sup>16</sup>Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren....", *op.cit.*, hlm. 136.

ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan lainnya.

5. *Kitab Islam Klasik*. Kitab-kitab agama Islam klasik dengan tulisan Arab dalam bahasa Melayu kuno atau dalam bahasa Arab, biasanya dikarang oleh ulama-ulama Islam (Arab) pada abad pertengahan. Isinya berisikan beragam macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Dalam tradisi pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering dinamakan 'kitab kuning' karena warna kertas pada isi kitab kebanyakan berwarna kuning.<sup>17</sup>

Pada abad ke-21, latar belakang berdirinya pondok pesantren memiliki pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika pada masa sebelumnya, pondok pesantren berdiri di sekitar wilayah lingkungan desa, perkampungan sekaligus cikal-bakal desa setempat; dalam perkembangan selanjutnya, pondok pesantren berdiri pada lingkungan desa di mana masyarakatnya sudah ramai dan eksis. Ada pula pondok pesantren yang berdiri di mana penduduknya tidak hanya ramai tetapi sudah padat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang relatif baik dan dapat dikatakan sudah mapan. Para pendiri dan pengasuh pondok pun tidak hanya berasal dari desa setempat tetapi berasal dari desa atau daerah lainnya, atau dari luar kota yang mendapat amanah untuk mendirikan, mengelola, dan mengasuh pondok pesantren yang dimaksudkan. Kendatipun begitu, baik pondok pesantren yang didirikan pada masa lalu ataupun sekarang, keduanya tetap memiliki misi sama, yakni untuk mentransmisikan ajaran Islam, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah oleh pemeluknya.<sup>18</sup>

Perubahan sosial dapat dimaknai sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sama halnya, adanya perubahan pada dunia pesantren saat ini tidak lain

<sup>17</sup>Setidaknya, ada delapan jenis bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab klasik, seperti *nahwu dan sharaf, fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf dan akhlak*, dan cabang lainnya misalnya *tarikh dan balaghah*.

<sup>18</sup>Martin Van Bruinessen, *Pesantren dan Kitab Kuning, Pemeliharaan dan Kesinambungan Tradisi Pesantren*, Jakarta: Ulumul Qur'an II, 1992, hlm. 73.

hanyalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat meskipun masih ada beberapa pondok pesantren yang senantiasa mempertahankan sistem pelajaran tradisional yang menjadi ciri khasnya, misalnya pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya yang 'ukhrawiyah', dan memperkenalkan pengajaran ilmu pengetahuan umum yang bersifat pragmatis- 'duniawiyah'.

Pondok pesantren pertama kali di Indonesia berada di Jawa, Desa Gapura Gresik pada abad ke-15 Masehi. Pendirinya adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat, India. Selanjutnya, tokoh yang pertama kali yang dianggap berhasil mendidik para ulama dan mengembangkan pondok pesantren adalah Sunan Ampel, pendiri Pesantren di Kembang Kuning Surabaya. Selanjutnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta Surabaya dan mencapai kesuksesan dalam misinya menyiarkan agama Islam yang semakin lama semakin berpengaruh dan menjadi terkenal di pesantren seluruh wilayah Jawa Timur, yang akhirnya dikenal sebagai Sunan Ampel.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, pesantren, selanjutnya, dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Pesantren Tradisional (Salafiah)*. Mastuhu<sup>20</sup> mengatakan bahwa pesantren tradisional, yaitu pesantren yang masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menggunakan sistem 'halaqah'. Artinya diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan oleh kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang diajarkan oleh kitab, karena mereka memahami bahwa kiai tidak akan mungkin mengajarkan hal-hal yang salah serta yakin bahwa kitab yang dipelajari benar.

---

<sup>19</sup>A. Sunyoto, 'Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi Kasus', *Tesis (Tidak Dipublikasikan)*, FPS IKIP Malang, Jawa Timur, 1990, hlm. 53.

<sup>20</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hlm. 61.

2. *Pesantren Modern (Khalafiyah)*. Zamakhsyari Dofier<sup>21</sup> mengatakan bahwa pesantren berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang hanya sekadar pelengkap yang diubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Perkembangan ini sangat menarik untuk diamati, sebab hal ini dapat memengaruhi totalitas sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan, agama, dan pandangan hidup, bahkan yang lebih menarik lagi ialah tampaknya para kiai telah siap menghadapi perkembangan zaman.
3. *Pondok Pesantren Komprehensif*. Pondok pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan dan pengajaran antara tradisional dan modern, artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan (individu), bandongan dan wetonan (kolektif), namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.

Pesantren diharapkan tidak hanya mampu menjalankan fungsi tradisionalnya tetapi pesantren dalam mengembangkan pendidikan formalnya, menyebabkan keberadaan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam masyarakat sedikit mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini dan masa datang. Bagaimanapun juga dalam memilih lembaga pendidikan anak-anaknya, orangtua setidaknya mempertimbangkan tiga hal penting: nilai (agama), status sosial, dan cita-cita.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, Abdurrahman Mas'ud<sup>23</sup> menulis bahwa hakikat dan watak pesantren baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai sosio-kultural politik, merupakan refleksi pesantren sebagai sebuah budaya yang unik. Karakteristik budaya pesantren, antara lain: *Modeling*

---

<sup>21</sup>Zamakhsari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Kasus tentang Kehidupan Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 44.

<sup>22</sup>A. Malik Fajdar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 9.

<sup>23</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 26-34.

(ajaran Islam/*uswatun khazanah*), *cultural resistance* (mempertahankan budaya) dan budaya keilmuan yang tinggi.

## B. Madrasah

Kata '*madrasah*' dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata 'keterangan tempat' (*zharaf makan*) dari kata '*darasa*'. Secara harfiah, *madrasah* diartikan sebagai 'tempat belajar para pelajar', atau 'tempat untuk memberikan pelajaran'. Dari kata '*darasa*' juga bisa diturunkan kata '*midras*' yang berarti 'buku yang dipelajari' atau 'tempat belajar'. Kata '*al-midras*' juga diartikan sebagai 'rumah untuk mempelajari kitab Taurat'. Kata '*madrasah*' juga didapatkan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yakni '*darasa*' berarti 'membaca dan belajar' atau 'tempat duduk untuk belajar'. Dari kedua bahasa itu, kata '*madrasah*' memiliki arti yang sama: 'tempat belajar', dalam bahasa Indonesia, '*madrasah*' berarti 'sekolah', di mana sekolah itu sendiri berasal dari bahasa asing, yakni *school* atau *scola*.<sup>24</sup>

Arief Subhan<sup>25</sup> mengungkapkan bahwa madrasah di Indonesia mengalami proses perkembangan terkait dengan sejumlah faktor yang kompleks. Pesantren, gerakan pembaruan (*Islamic reform movement*), dan sistem pendidikan Belanda adalah tiga faktor yang secara bersama menyediakan sebuah *environment* bagi kemunculan madrasah modern Indonesia. Pesantren, lembaga pendidikan Islam tradisional, merupakan basis penyebaran sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Gerakan pembaruan merupakan jembatan yang menjadi media transmisi gagasan

<sup>24</sup>Dalam praktiknya memang ada *madrasah* yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*) juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Selain itu, ada *madrasah* yang hanya mengajarkan hanya pada pelajaran ilmu-ilmu agama yang dinamakan *madrasah diniyyah*. (Lihat: Khoiriyah, *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 183-185).

<sup>25</sup>*Madrasah* di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang dinamis, di mana interaksi *madrasah* dengan modernisasi yang berlangsung dengan berkelanjutan telah mendorong timbulnya beberapa model lembaga pendidikan Islam ala Indonesia. Selain *madrasah*, di Indonesia timbul pula model lain, berupa konsep Sekolah Islam yang secara formal berbeda dengan *madrasah*. Para reformis Muslim Indonesia pada awal abad ke-20 telah melakukan eksperimen pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern sebagai cikal-bakal keragaman lembaga pendidikan Islam Indonesia. Lihat: (Arief Subhan, 'Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas', *loc.cit.*, hlm. 73-74).

modern dalam pengelolaan pendidikan dari Timur Tengah ke Indonesia. Sekolah Eropa atau sekolah kolonial Belanda merupakan inspirator dan juga kompetitor kaum Muslim Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

*Madrasah* dalam bahasa Arab dinamakan 'keterangan tempat', sehingga kata *madrasah* bermakna 'tempat belajar'. Perkembangan *madrasah* sendiri dalam tradisi Islam dianggap sebagai tonggak baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.<sup>26</sup> Pada awalnya, *madrasah* merupakan salah satu jenis pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang. Yakni berawal dari pendidikan yang bersifat informal dalam bentuk dakwah islamiyah, selanjutnya mengalami peningkatan dalam bentuk *halaqoh*, setelah itu berkembang dalam institusi pendidikan formal atau *madrasah*.<sup>27</sup>

*Madrasah* merupakan khazanah lembaga pendidikan Islam yang diwariskan generasi Muslim terdahulu. Pada periode modern, *madrasah* digunakan sebagai bentuk lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri modern. Pada abad ke-20, di mana sebagai periode kebangkitan *madrasah* di Indonesia, kaum muslimin menggunakan *madrasah* sebagai simbol lembaga pendidikan Islam modern dengan ciri-ciri lembaga pendidikan klasikal, kurikulum terstruktur, ujian direncanakan periodik, kenaikan kelas dan sertifikat tanda lulus. Seperti telah disebutkan, *madrasah* modern sebagai hasil interaksi budaya, antara tradisi pembelajaran dalam Islam, baik yang terlembagakan dalam *madrasah* tradisional maupun pesantren, dengan sekolah-sekolah modern yang datang bersama kolonialisme. *Madrasah* sebagai simbol modernitas mengalami diseminasi progresif di kalangan kaum Muslim melalui jalur gerakan-gerakan Islam, termasuk pesantren—yang selanjutnya menjadikan *madrasah* sebagai media transmisi ilmu-ilmu keislaman yang biasanya disampaikan secara tradisional.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Ahmad Sya'abi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah, Nuzumuha, Falsafatuha, Tarikhuha*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mashriyah, 1987, hlm. 43.

<sup>27</sup>Supriyanto Abdullah, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003, hlm. 87.

<sup>28</sup>Arief Subhan, 'Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas', *op.cit.*, hlm. 316.

Perkembangan madrasah ini terjadi sejalan dengan upaya formalisasi pendidikan Islam, ketika berkorelasi dengan kepentingan pemerintahan tertentu. Pada tahap ini keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi mengalami kemajuan dan perkembangan pesat. Madrasah pertama di dunia Islam didirikan oleh *Nizam al-Mulk*, yakni *Madrasah Nizamiyyah*, Baghdad. Madrasah ini merupakan madrasah yang terkenal, di mana berdasarkan catatan Ibn-al-Jawzi, mulai dibangun pada tahun 457M/1065H dengan membutuhkan bangunan istana tua di pinggir Sungai Tigris dan mengambil bahan bangunan itu untuk pembangunan madrasah. Ada yang mengatakan bahwa madrasah itu terletak di sebelah Timur Tigris; ada pula yang mengatakan, seperti pendapat Mahmud Yunus, madrasah itu dibangun di pinggir Sungai Jah, berada di tengah pasar Salasah.<sup>29</sup>

Agaknya tipikal madrasah (perguruan tinggi) era klasik telah menjadi rujukan perkembangan madrasah di Indonesia. Tetapi, berbeda dengan istilah madrasah awal yang merujuk pada institusi Pendidikan Tinggi Islam (*al-Jami'ah*), madrasah di Indonesia merujuk pada institusi pendidikan dasar dan menengah (*Ibtida'iyah*, *Tsanawiyah*, *'Aliyah*). Seperti madrasah klasik, madrasah di Indonesia juga sebagai produk formalisasi pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh pemerintah. Karel A. Steenbrink mengatakan sistem pendidikan Islam kini merupakan hasil penyesuaian diri ke dalam sistem pendidikan umum.<sup>30</sup>

Anton Timur Jaelani<sup>31</sup> mengatakan bahwa madrasah di Indonesia muncul sekitar abad ke-20, yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: *Pertama*, kuatnya pengaruh semangat pembaruan Islam yang berasal dari Timur Tengah (Saudi Arab). *Kedua*, respons umat Islam dalam bidang pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah-sekolah umum. *Ketiga*, adanya ketidakpuasan sebagian komponen umat Islam terhadap sistem pendidikan yang telah ada, yakni pesantren yang hanya menitikberatkan

---

<sup>29</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cetakan ke-4, Jakarta: Hikarya Agung, 1986, hlm. 74.

<sup>30</sup>Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 7.

<sup>31</sup>Anton Timur Jaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta: Dermaga, 1982, hlm. 19.

perhatian pada pendidikan agama dan sistem pendidikan umum yang memfokuskan perhatian pada pendidikan umum.

Jadi, pendirian madrasah pada dasarnya merupakan upaya untuk merespons kondisi aktual pendidikan pada awal abad ke-20, yang dipandang hanya mengedepankan pendidikan di sekolah umum. Madrasah muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan umum yang didirikan Belanda. Hal ini agaknya sebagai alasan bagi sebagian umat Islam yang berlatar belakang pendidikan Belanda, namun masih kuat berpegang pada tradisi keislaman. Mereka juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya memerhatikan pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama.<sup>32</sup>

Akibatnya, dikatakan Imam Bawani<sup>33</sup> bahwa telah muncul suatu generasi muda yang memiliki kesadaran duniawi dan moralitas yang baik. Mereka selanjutnya diharapkan memiliki kesadaran terhadap kenyataan historis bahwa bangsa Indonesia telah dikelabui dengan adanya sejumlah doktrin pemerintah kolonial Belanda yang menganjurkan umat Islam agar terus menekuni dalam urusan akhirat (*ukhrawi*) dan mengabaikan urusan duniawi yang dikatakan hanya mengandung fitnah belaka. Abdul Mujib Muhaimin<sup>34</sup> mengatakan bahwa dengan semangat keagamaan dan nasionalisme, umat Islam mendirikan madrasah sebagai bentuk: (1) manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam; (2) penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum; (3) adanya sikap mental pada sebagian umat Islam, terutama santri yang terpukau dengan sistem pendidikan Barat; (4) upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilaksanakan pesantren dan sistem pendidikan modern ala Barat.

<sup>32</sup>Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 66.

<sup>33</sup>Imam Bawani, *Segi-Segi Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1987, hlm. 108.

<sup>34</sup>Abdul Mujib Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993, hlm. 305.

Ada pula sumber yang menunjukkan bahwa madrasah yang disinyalir kuat pertama kali didirikan adalah *Madrasah 'Adabiyah (Adabiyah School)*, di Sumatera Barat, Padang (1909), oleh Syaikh Abdullah Ahmad. Awalnya madrasah ini bercorak keagamaan semata, namun pada 1915 berubah menjadi *Holand Inland School (HIS) 'Adabiyah*. Sehingga, madrasah ini merupakan sekolah HIS yang pertama kali memasukkan pelajaran agama ke kurikulum pendidikannya.<sup>35</sup> Pada 1909, Syaikh H.M. Thaib Umar mendirikan sebuah madrasah di Batu Sangkar, yakni *Madras School (sekolah agama)*. Madrasah ini mengkaji kitab-kitab besar dalam sistem *halaqah*, yang sayangnya tidak berumur panjang karena kekurangan tempat, hingga 1913 harus ditutup. Namun, madrasah ini selanjutnya dihidupkan kembali oleh Mahmud Yunus pada 1918, hingga 1923 berubah nama menjadi *Diniyah School*. HIS selanjutnya menjadi yang pertama kali mengembangkan diri hampir di semua pelosok nusantara, yang berupa pesantren, surau, ataupun berdiri secara independen.<sup>36</sup>

Pada 1916, sebuah madrasah Salafiyah didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Madrasah ini ditujukan sebagai persiapan bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan pada pesantren. Pada 1929 oleh Kiai Ilyas, madrasah ini mulai mengadopsi kurikulum pendidikan umum dalam sistem kurikulumnya.<sup>37</sup> Pada 1918, di Yogyakarta, berdiri sebuah Madrasah Muhammadiyah (*Kweekschool Muhammadiyah*), yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Pendirian madrasah ini sebagai bentuk realisasi aktual dari cita-cita pembaruan pendidikan K.H. Ahmad Dahlan.<sup>38</sup>

Sistem pendidikan madrasah juga pada awalnya ditujukan dalam bentuk sistem klasikal di mana siswa dapat memperoleh pendidikan agama dan umum dengan berimbang. Tetapi, dalam praktiknya kemudian madrasah hanya mampu menerapkan sistem klasikal, di mana kurikulum

<sup>35</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986, hlm. 272.

<sup>36</sup>Mahmud Yunus, "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia", *loc.cit.*, hlm. 54.

<sup>37</sup>Hasbullah, "Kapita Selekta Pendidikan Islam", *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>38</sup>Mahmud Yunus, "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia", *op.cit.*, hlm. 272.

yang diajarkan bermuatan komponen agama saja. Karena itu, pada tahap awalnya madrasah tidak memiliki keunikan dibandingkan pesantren kecuali sistem klasikal yang diterapkan.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya, pada awal kemerdekaan, peran dan kontribusi madrasah sangat signifikan, karena peran Departemen Agama RI yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama RI dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri.<sup>40</sup> Departemen Agama RI sudah banyak melakukan perubahan dan kebijakan dalam memajukan madrasah kendatipun belum optimal. Faktanya, hingga 1990-an, masyarakat masih memiliki interes yang lebih tinggi terhadap sekolah umum yang dinilai memiliki *prestise* yang lebih baik daripada madrasah. Di samping alasan kualitas lebih baik, dengan masuk sekolah umum agaknya dipandang lebih terbuka terhadap beragam jenis lapangan pekerjaan. Kini, *image* itu telah mulai berubah karena sejumlah madrasah di kota-kota besar mulai menunjukkan kualitasnya yang lebih baik dan sejajar dengan sekolah umum. Salah satu kelebihan madrasah, kurikulumnya cenderung universal dan tidak mendikotomikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.

<sup>39</sup>Sistem pendidikan madrasah selanjutnya sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan pesantren. Karena di madrasah mulai dimasukkan pelajaran umum, seperti sejarah, ilmu bumi, dan pelajaran umum lain. Metode pengajarannya pun sudah tidak lagi menggunakan sistem *halaqah*, tetapi sudah menggunakan ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis dalam proses pembelajaran seperti di sekolah umum.

<sup>40</sup>Perkembangan pendidikan Islam terus meningkat dengan drastis. Pada 1960-an, keberadaan madrasah sudah tersebar di berbagai daerah di semua provinsi di tanah air. Jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu telah mencapai 13.057 buah dengan sedikitnya 1.927.777 siswa yang tersedap untuk memperoleh pendidikan agama. Jumlah madrasah tingkat pertama (Tsanawiyah) yang mencapai 776 buah dengan jumlah siswa 87.932. Jumlah madrasah tingkat Aliyah mencapai 16 buah dengan jumlah siswa 1.888. Berdasarkan laporan ini, maka jumlah total madrasah telah mencapai 13.849 dengan jumlah siswa sebanyak 2.017.590. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal pendidikan madrasah memberikan kontribusi signifikan dalam mencerdaskan dan membina akhlak bangsa. Lihat: (Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 123).

### C. PAI di Sekolah

Sejak awal kemerdekaan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dimasukkan ke kurikulum sekolah umum dalam berbagai jenjangnya. Dalam perkembangannya, PAI telah diajarkan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan juga Perguruan Tinggi Umum (PTU). Secara konstitusional, kehadiran mata pelajaran PAI di sekolah umum, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi umum relevan dengan makna dan tujuan yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan: *'Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab'*. Atas dasar itu, maka dalam batang tubuh UUD 1945 diatur hal yang berhubungan dengan ketuhanan, seperti tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.<sup>41</sup>

Sebagai konsekuensi pentingnya sikap hidup agamais dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah membentuk Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Tugas pokok Departemen Agama adalah mengurus permasalahan bertalian dengan kehidupan beragama bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masalah pendidikan agama.<sup>42</sup>

Perkembangan pendidikan agama Islam di sekolah sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, sebagai realisasi usulan Badan

<sup>41</sup>UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

<sup>42</sup>Dalam upaya memenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak 1946, pemerintah mengharuskan pemberian pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri pada setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaannya terus diperbaiki dan disempurnakan dengan keluarnya berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama. Ruang lingkup pendidikan agama tidak hanya terbatas pada sekolah agama saja (Pesantren dan Madrasah) namun juga bertalian dengan sekolah umum dan perguruan tinggi umum. Lihat: (Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw. sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012, hlm. 386).

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kepada kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Yakni, baru dilaksanakan pada masa Menteri PP dan K dipegang oleh Mr. Swandi (2 Oktober 1946 s/d 27 Juni 1947), dengan jalan membentuk panitia penyelidik pengajaran, yang antara lain programnya adalah pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah, para guru diangkat oleh departemen agama, diadakan latihan bagi guru agama, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.<sup>43</sup>

Perkembangan Mata Pelajaran PAI di sekolah pada masa Orde Baru hingga lahirnya UU No. 2/1989. Setelah G-30-S/PKI mengalami kegagalan, maka lahirlah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, posisi pendidikan agama Islam benar-benar kuat dalam rangka pemberantasan komunis hingga tuntas ke akar-akarnya. Hal ini, sekaligus sebagai bentuk terima kasih pemerintah kepada umat Islam yang telah berupaya keras menyelamatkan ideologi Pancasila dan NKRI. Karenanya, pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Sebagai tindak lanjut dari keputusan Panitia Penyelidik Pengajaran keluarlah putusan resmi tentang pengajaran agama berupa: a). Lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan No. 12/1954, di mana pada BAB XII Pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah negeri berbunyi: (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orangtua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.; (2) cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. b). Peraturan bersama Dua Menteri antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama: No.1432/Kab. 20 Januari 1951 (*Pendidikan*) dan No. K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (*Agama*). Peraturan ini terdiri dari 11 pasal, inisialnya pendidikan agama diberikan di sekolah rendah dan sekolah lanjutan. c). Keluarnya Peraturan Bersama Dua Menteri tanggal 16 Juli 1951 antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: No. 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951 (*Pendidikan*) dan No. K/I/1980 Tanggal 16 Juli 1951 (*Agama*). Lebih jelasnya, lihat: (Ramayulis, "Sejarah Pendidikan Islam....", *op.cit.*, hlm. 386-389).

<sup>44</sup>Untuk merealisasikannya, maka Sidang Umum MPRS 1966 No. XXVII/MPRS/1966, Pasal I menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas (universitas negeri). Di samping itu, TAP MPRS/1966, Pasal 4 tentang isi pendidikan semakin memperkuat pendidikan agama, yakni pada poin (a) berbunyi: "Mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama". Ketetapan MPRS tersebut diikuti pula dengan Peraturan Bersama Dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 23 Oktober 1967, di mana ditetapkan kelas I dan II sekolah dasar diberikan mata pelajaran agama 2 jam per minggu, kelas III, 3 jam per minggu, dan kelas IV, 4

Perkembangan Mata Pelajaran PAI di sekolah selanjutnya, terlihat dalam UU RI No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional diungkapkan dalam Bab II Pasal 4 UUSPN (1989):

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>45</sup>

Dalam Bab IX Pasal 39, Ayat 2 UU SPN 1989, tentang Isi Kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.<sup>46</sup> Dapat dijelaskan, bahwa dalam UU SPN itu, pendidikan agama menjadi pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan agama merupakan upaya memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dianut, menghargai agama berbeda, memperkuat kerukunan, dan mewujudkan persatuan nasional. PT juga mempunyai kekuasaan khusus dapat menambah bobot mata pelajaran sesuai dengan ciri khususnya. Sekolah umum bernapaskan agama dapat menambah bobot mata pelajaran agama melebihi ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya, memperkuat kedudukan dan posisi Pendidikan Agama Islam. Hal ini, terlihat dalam kurikulum sekolah/madrasah. Dalam Pasal 37 ayat (1) terlihat bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan

---

jam per minggu. Hal ini juga berlaku juga bagi SMP dan SMA. Untuk Perguruan Tinggi PAI diberikan 2 jam per minggu. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah umum, pemerintah melakukan peningkatan bidang kurikulum, dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 68/31 Oktober 1974, yang menetapkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk SD, SMP, dan SMA dengan nama Kurikulum 1975. Lihat: (Ramayulis, "Sejarah Pendidikan Islam....", *op.cit.*, hlm. 389-391).

<sup>45</sup>UU RI No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 4.

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IX Pasal 39, Ayat 2.

#### D. Madrasah dan *Leadership*

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang dinamakan bawahan.<sup>55</sup> Untuk memastikan keberhasilan akhir dari sebuah organisasi hendaklah memenuhi tiga persyaratan perilaku penting: *Pertama*, organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu armada/tim kerja yang mantap yang terdiri dari para personil terampil. *Kedua*, organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para personilnya, dalam hal ini, setiap personil bukan saja dituntut untuk bersedia berkarya, tetapi juga harus melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya. *Ketiga*, para personil harus mengusahakan dengan bertingkah laku spontan dan inovatif, dengan demikian setiap personil jangan hanya bertingkah laku secara pasif.<sup>56</sup>

Steers menunjukkan bahwa syarat pertama yang diajukan berkisar pada masalah keterikatan dengan organisasi. Persyaratan kedua dan ketiga bertalian dengan tingkat dan prestasi kerja dalam organisasi. Aspek-aspek itu merupakan suatu proses yang didasarkan pada perilaku dan struktur organisasi dan diarahkan pada pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam suatu organisasi selalu ada seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sejumlah orang untuk bekerja sama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Organisasi itu sendiri terdiri dari sejumlah individu dan kelompok. Efektivitas suatu organisasi tergantung pada individu dan kelompok. Efektivitas organisasi tidak hanya sekadar terletak pada totalitas tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan totalitas bagian-bagiannya.

<sup>55</sup>Sondang P. Siagian dalam Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Etika dan Perilaku Organisasi*, Program S2, Magister Administrasi Publik (MAP), STISIPOL Candradimuka, 2013.

<sup>56</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 135.

Steers<sup>57</sup> mengatakan terdapat tiga perspektif utama dalam menganalisis efektivitas organisasi: *Pertama*, perspektif optimalisasi tujuan, yakni, efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuan yang layak dicapai. Konsentrasi perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikendalinya secara jelas beragam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan. *Kedua*, perspektif sistem, yakni efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor bertalian dengan pola, *input*, konversi, *output*, umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. *Ketiga*, perspektif perilaku manusia. Yakni, konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang memengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Di sini, dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi itu.

Moore dalam Sutarto<sup>58</sup> mengatakan bahwa setidaknya terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, antara lain: unit kerja; rentangan kontrol; kontrol; kepemimpinan; pendelegasian wewenang; ide-ide bawahan; motivasi; dan spesialisasi. Stephen P. Robbins<sup>59</sup> mengemukakan, terdapat empat fungsi manajemen yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yakni perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. *Perencanaan* meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi dan pengembangan rencana untuk mengoordinasikan kegiatan. *Pengorganisasian* meliputi penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan di mana

---

<sup>57</sup>Dalam perspektif ini, tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Tercapainya beragam tujuan jangka pendek dapat diperlakukan sebagai *input* baru untuk penetapan tujuan selanjutnya. Jadi, tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antarkomponen, baik faktor berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Lihat: (Richard M. Steers, "Efektivitas Organisasi....", *loc.cit.*, hlm. 5-7).

<sup>58</sup>Sutarto, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 45.

<sup>59</sup>Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: Prenhallindo, 1996, hlm. 3.

keputusan harus diambil. *Kepemimpinan* meliputi motivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik. *Pengendalian* merupakan kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

Gullick dan Urwick dalam Sutarto<sup>60</sup> mengungkapkan bahwa faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi, yakni: penempatan orang pada struktur; kepemimpinan; kesatuan perintah; staf khusus dan umum; unit kerja; pelimpahan dan pemakaian asas pengecualian; keseimbangan tanggung jawab dan wewenang; dan rentangan kontrol. Pendapat itu menggambarkan bahwa dalam penempatan seseorang dalam struktur organisasi harus benar-benar efektif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dikarenakan, semua itu akan berdampak pada kinerja seseorang dan produktivitas organisasi. Mengenai kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi, dikarenakan, kepemimpinan bertalian dengan proses memengaruhi dan menggerakkan seluruh anggota organisasi agar dapat bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi diperlukan adanya kesatuan perintah, sebagai upaya menghindari kebingungan, keraguan dan menimbulkan tidak jelasnya tanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, hampir semua upaya pencapaian tujuan organisasi menggunakan pendekatan efektivitas. Kendatipun terdapat sejumlah model yang terkesan tidak langsung

---

<sup>60</sup>Garis-garis satuan harus jelas menunjukkan dari siapa seorang menerima perintah dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Staf khusus dan umum diperlukan dalam organisasi karena pekerjaan dan aktivitas organisasi beragam jenisnya, dan ada yang perlu penanganan secara khusus, yang memerlukan keahlian tertentu. Unit kerja diperlukan karena dalam organisasi terdapat aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja atau fungsi tertentu. Dengan pelimpahan setiap pejabat pucuk pimpinan sampai pejabat paling bawah memiliki wewenang tertentu dalam bidang tugasnya, sehingga tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat. Faktor keseimbangan diperhatikan, di mana satuan-satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan perannya, satuan organisasi yang memiliki peranan sama penting ditempatkan pada jenjang organisasi yang setingkat. Sedangkan rentangan kontrol dimaksudkan untuk menentukan jumlah bawahan langsung yang ideal yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Lihat: (Sutarto, 'Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi...'; *loc.cit.*, hlm. 42).

menggunakan dasar seperti ini, bila dianalisis lebih jauh agaknya tetap mengarah pada konsep tujuan. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah suksesnya organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut konsideran pandangan pihak luar tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi itu. Karena organisasi memiliki tujuan-tujuan tersendiri, sehingga keunikan pun akan terjadi ketika melakukan evaluasi terhadap objek tertentu.

Gary Yulk<sup>61</sup> mendefinisikan *leadership* sebagai 'perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama'. Definisi lain, kepemimpinan adalah 'pengaruh antarpribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu'. *Kepemimpinan* didefinisikan 'peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi'. Selanjutnya, *kepemimpinan* didefinisikan 'sebuah proses memberi pengarahan terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.'

Kepemimpinan (*leadership*) memiliki sifat universal dari suatu gejala sosial. Artinya, kepemimpinan dapat ditemukan dan terjadi di mana saja dalam setiap aktivitas bersama asalkan memiliki unsur-unsur berlaku. Misalnya, adanya orang yang memengaruhi dan dipengaruhi serta mengarahkan pada proses tercapainya suatu tujuan. S. Pamudji<sup>62</sup> mengungkapkan bahwa kepemimpinan memiliki sifat universal yang merupakan jenis gejala kelompok atau gejala sosial. Dikatakan universal karena selalu ditemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan atau usaha bersama. Artinya, setiap kegiatan atau usaha bersama diperlukan seorang pemimpin dan kepemimpinan. Kegiatan tersebut bisa melibatkan dua orang atau lebih, jenis kegiatan bisa sederhana ataupun kompleks, dan ukuran kegiatannya bisa besar atau lebih kecil. *Kepemimpinan* merupakan gejala kelompok atau gejala sosial, karena pemimpin dan kepemimpinan

---

<sup>61</sup>Gary Yulk, *Leadership in Organization*, New York: Prentice-Hall International Inc, 1994, hlm. 2.

<sup>62</sup>S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: Bumi Aksara, 1993, hlm. 1-2.

itu hanya dapat dirasakan dan tampak apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan usaha bersama, dengan kata lain, adanya suatu kehidupan sosial.

Aktivitas kolektif dalam kelompok dalam proses mencapai tujuannya dibutuhkan seorang pemimpin (*leader*). Seorang pemimpin merupakan seorang yang diberi tugas dan wewenang dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Selain itu, terdapat juga unsur manusia yang diarahkan atau dipimpin untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diberikan seorang pemimpin. Miftah Thoha mengatakan kepemimpinan adalah 'aktivitas untuk memengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi'.<sup>63</sup> Karenanya, sifat-sifat kepemimpinan dipandang memiliki kelengkapan yang lebih dibandingkan dengan manajer. Di sekolah atau madrasah, karenanya, seorang kepala madrasah yang tidak hanya berfungsi sebagai *leader, teacher, motivator, manager, fasilitator, dan problem solver*.

*Kepemimpinan* dalam organisasi publik selalu dimulai dari sistem peranan formal yang diwujudkan dalam hierarki kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan legitimasi, yakni kekuasaan melekat pada suatu jabatan untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang ada. Pemimpin administrasi publik atau pemimpin birokrasi merupakan pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat berwenang. Seorang yang mengepalai satu unit organisasi tertentu dapat dikatakan sebagai pemimpin organisasi publik. Dikatakan sebagai pemimpin publik, karena wujudnya dia bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan orang dipimpinya.

Ada beberapa sifat umum yang dapat menentukan keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi: *Pertama*, kecerdasan. Pada umumnya, hasil riset memperlihatkan bahwa pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan dipimpin. Meskipun, dengan catatan, seorang pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan bawahan dipimpinya. *Kedua*, kedewasaan dan hubungan sosial yang

<sup>63</sup>Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 227.

lebih luas. Pemimpin rata-rata memiliki pengendalian emosi yang stabil, matang dan memiliki suatu jaringan sosial yang luas di masyarakat. *Ketiga*, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Secara relatif, seorang pemimpin memiliki dorongan motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Mereka berusaha mendapatkan penghargaan secara intrinsik dibandingkan ekstrinsik. *Keempat*, sikap-sikap hubungan manusiawi, di mana seorang pemimpin memiliki perhatian dan orientasi pada anggotanya.<sup>64</sup>

Dapat dijelaskan seorang kepala madrasah, perlu menciptakan iklim madrasah yang kondusif sebagai upaya menciptakan iklim harmonis dan kooperatif. Dia tidak hanya sebagai seorang kepala madrasah tetapi juga sebagai pengayom bagi orang lain dan bawahannya agar mereka berperan aktif dan berkontribusi bagi kemajuan madrasah. Sebagai pemimpin madrasah, seorang kepala madrasah selanjutnya perlu menjadi teladan bagi orang lain atau bawahannya, sehingga para guru dan staf administrasi, dapat berinteraksi edukatif dan menyampaikan usulan pendapat tidak kaku. Interaksi yang diteladani pimpinan diharapkan akan mendorong terciptanya iklim kerja dan kinerja madrasah yang menjadi tujuan bersama. Fullan dalam James H. Stronge, Holly B. Richard dan Nancy Catano mengatakan:

... peran kepala sekolah menekankan, pentingnya bertindak dengan integritas dan keadilan menggunakan tata cara beretika. Deskripsi ini adalah contoh sekaligus ringkasan mengenai ekspektasi terhadap kepala sekolah atau lebih tepatnya, bagaimana seharusnya kepala sekolah berperilaku dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesionalnya. Kepala sekolah bisa saja mengerjakan aspek-aspek lainnya dengan benar, namun kegagalan dalam aspek perilaku berakibat kepala sekolah tidak dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik atau dalam beberapa kasus kepala sekolah bahkan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika etika perilaku merupakan yang berkualitas adalah syarat mutlak untuk kesuksesan kepala sekolah ataupun profesi lainnya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 251-252. Lihat pula: T Hani Handoko, *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1996, hlm. 286-287.

<sup>65</sup>James H. Stronge, Holly B. Richard, dan Nancy Catano, *Kualitas Kepala Sekolah yang Efektif*, Jakarta: PT Indeks, 2013, hlm. 122.

Hal ini menunjukkan sebagai ciri-ciri utama yang memengaruhi sukses suatu kepemimpinan kepala madrasah. Di mana, seorang kepala madrasah perlu memiliki kemampuan intelegensia, kematangan, keluasan pandangan sosial, berintegritas dan beretika. Hal ini, diharapkan agar dia dapat mengendalikan keadaan yang kritis dan memiliki keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, memiliki motivasi dan keinginan berprestasi yang datang dari internal, dan mampu melakukan hubungan antarmanusia di madrasah. Jadi, keberhasilan suatu madrasah dalam mencapai tujuannya juga ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh seorang kepala madrasah.

Fullan (2002) mengungkapkan tujuan moral sebagai 'tanggung jawab sosial terhadap orang lain dan terhadap lingkungan'. Para pemimpin sekolah yang memiliki tujuan moral berusaha membuat perbedaan dalam kehidupan siswa (mengubah siswa menjadi lebih baik--penerjemah). Mereka memerhatikan adanya jurang perbedaan antara sekolah pencapaian tinggi dan sekolah pencapaian rendah, dan berusaha meningkatkan kinerja siswa berpencapaian rendah untuk menutup jurang perbedaan dengan siswa berpencapaian tinggi. Mereka bertindak dengan tujuan membuat perbedaan positif di sekolah yang dipimpinnya, sekaligus membantu meningkatkan kondisi di sekolah lainnya.<sup>66</sup>

Dalam konteks analisis perilaku tugas dan perilaku hubungan, Hersey Blanchard dalam Sutarto<sup>67</sup> mengatakan telah memunculkan empat gaya kepemimpinan. Yakni: (1) *Telling*, yakni gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: tinggi tugas rendah hubungan; pemimpin memberi perintah khusus, pengawasan diberikan dengan ketat; pemimpin menerangkan pada bawahan apa yang harus dikerjakan; bagaimana cara mengerjakan; kapan harus dilaksanakan dan di mana harus dilakukan. (2) *Selling*, yakni gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: tinggi tugas dan tinggi hubungan, pemimpin menerangkan keputusan, memberikan pengarahan, dan komunikasi dilakukan dengan cara dua arah. (3) *Participating*. Yakni, gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: tinggi hubungan dan rendah tugas; pemimpin maupun bawahan saling memberikan gagasan dan membuat

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

<sup>67</sup>Sutarto, 'Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi....', *op.cit.*, hlm. 137-138.

keputusan bersama. (4) *Delegating*. Yakni, gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: rendah hubungan dan rendah tugas; pemimpin melimpahkan pembuat keputusan dan pelaksanaannya kepada bawahan sepenuhnya.

Dalam teori kepemimpinan partisipatif atau teori pengambilan keputusan normatif Vroom dan Yetton dalam Gary Yukl<sup>68</sup> memiliki empat tahap dalam proses pengambilan keputusan: (1) *otoritatif*, yakni seorang pemimpin sebagai pembuat keputusan sendiri tanpa menanyakan saran kepada bawahan. Bawahan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan itu karena mereka tidak terlibat di dalamnya; (2) *Konsultasi*, yakni seorang pemimpin menanyakan opini dan saran bawahan, kemudian mengambil keputusan sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran dan ide bawahan; (3) *Keputusan bersama*, yakni seorang pemimpin mendiskusikan suatu keputusan dengan bawahan, mengambil keputusan bersama, dan pemimpin selanjutnya, tidak mengintervensi pelaksanaan keputusan itu. (4) *Pendelegasian*, yakni seorang pemimpin memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada bawahan untuk membuat keputusan dengan hanya memberikan suatu spesifikasi batas terakhir harus berada, dan keputusan itu dapat dilaksanakan oleh bawahan.

Jadi, agar dapat mengerti sifat kepemimpinan, seorang kepala sekolah/madrasah perlu memahami terlebih dahulu sifat kekuasaan (madrasah). Hal ini, dikarenakan pemimpin (kepala madrasah) merupakan bentuk khusus kekuasaan yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Supaya hubungan itu dapat dikembangkan, seorang pemimpin diharapkan dapat memadukan kebutuhan organisasional dan kebutuhan pribadi sedemikian rupa, sehingga memperkenankan orang dan organisasi mencapai puncak tujuan dan kepuasan bersama. Seorang pemimpin diharapkan dapat membuat suatu dikerjakan dan dapat mengerjakannya, sebagai solusi dan pemberi kemudahan yang membantu melancarkan jalan dalam proses pencapaian tujuan madrasah. Dalam melaksanakan kepemimpinan memerlukan kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab yang harus diimplementasikan secara baik, tepat, dan benar.

<sup>68</sup>Gary Yukl, 'Leadership in Organization....' *op.cit.*, hlm. 133-134.

Demi suksesnya kepemimpinan madrasah, seorang kepala madrasah perlu memiliki kompetensi dalam memotivasi bawahan (guru, tenaga administrasi). Malayu S.P. Hasibuan<sup>69</sup> mengatakan bahwa motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya dalam mencapai kepuasan. Hasibuan menjelaskan bahwa motivasi diperlukan terhadap bawahan dikarenakan: *Pertama*, karena seorang pemimpin membagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik. *Kedua*, karena adanya bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi kurang bergairah mengerjakannya. *Ketiga*, untuk memelihara dan meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. *Keempat*, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya.

Jadi, dimensi *leadership* kepala madrasah memiliki dampak secara asimetris terhadap tingkat efektivitas organisasi madrasah. Tanpa adanya kepemimpinan kepala madrasah, sulit mencapai tujuan organisasi madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah memiliki posisi yang strategis karena perannya membawa organisasi pada pencapaian tujuan yang diinginkan dan ditetapkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan memengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

Sondang P. Siagian<sup>70</sup> mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.

<sup>69</sup>Motivasi menjadi krusial ketika ukuran kinerja dipermasalahkan. Dari jenjang efektivitas dapat diketahui bahwa terdapat efektivitas individu yang akan bergabung menjadi efektivitas kelompok, dan selanjutnya akan tergabung dalam efektivitas organisasi. Untuk merespons pertanyaan bagaimana rasional hubungan asimetris antara faktor motivasi dengan efektivitas organisasi, motivasi seorang dalam suatu organisasi berdampak langsung pada arah pencapaian tujuan organisasi. Prestasi kerja atau kinerja individual yang didorong motivasi, secara otomatis akan memengaruhi kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lihat Malayu S.P. Hasibuan dalam: (Abdullah Idi, *Materi Kuliah Etika dan Perilaku Organisasi*, Program Magister Administrasi Publik (MAP), STISIPOL Candradimuka, 2013).

<sup>70</sup>Sondang P. Siagian dalam Abdullah Idi, *Bahan Kuliah S2*, Program Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka Palembang, 2013.

dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang dinamakan bawahan. Richard M. Steers<sup>71</sup> mengungkapkan bahwa untuk memastikan keberhasilan akhir dari sebuah organisasi hendaklah memenuhi tiga persyaratan perilaku penting: *Pertama*, organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu armada/tim kerja yang mantap yang terdiri dari para personil terampil. *Kedua*, organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para personilnya, dalam hal ini, setiap personil bukan saja dituntut untuk bersedia berkarya, tetapi juga harus melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya. *Ketiga*, para personil harus mengusahakan dengan bertingkah laku spontan dan inovatif, dengan demikian setiap personil jangan hanya bertingkah laku secara pasif.

Dapat dijelaskan bahwa dari pendapat Steers itu tampak bahwa syarat pertama yang diajukan berkisar pada masalah keterikatan pada organisasi. Persyaratan kedua dan ketiga bertalian dengan tingkat dan prestasi kerja dalam organisasi. Aspek-aspek itu merupakan suatu proses yang didasarkan pada perilaku dan struktur organisasi dan kemudian diarahkan pada pencapaian hasil yang diharapkan.

Dari perspektif administrasi dan manajemen, dalam suatu organisasi (madrasah) selalu ada seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sejumlah orang untuk bekerja sama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Organisasi itu sendiri terdiri dari sejumlah individu dan kelompok. Sama halnya, efektivitas organisasi madrasah juga tergantung pada individu dan kelompok, para guru, staf, dan lainnya. Jadi, efektivitas organisasi madrasah tidak hanya sekadar terletak pada totalitas tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan totalitas bagian-bagiannya.

Richard M. Steers<sup>72</sup> mengatakan bahwa terdapat tiga perspektif utama dalam menganalisis efektivitas suatu organisasi. *Pertama*, perspektif optimalisasi tujuan. Yakni, efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuan yang layak dicapai. Konsentrasi perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan

---

<sup>71</sup>Richard M. Steers, 'Efektivitas Organisasi....', *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 5-7.

dikendalikannya secara jelas beragam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan. *Kedua*, perspektif sistem. Yakni efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor bertalian dengan pola, *input*, konversi, *output*, umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Dalam perspektif ini, tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Tercapainya beragam tujuan jangka pendek dapat diperlakukan sebagai *input* baru untuk penetapan tujuan selanjutnya. Jadi, tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antarkomponen, baik faktor berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). *Ketiga*, perspektif perilaku manusia. Yakni, konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang memengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Di sini, dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi itu.

Moore dalam Sutarto<sup>73</sup> mengatakan bahwa setidaknya terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Yakni: unit kerja; rentangan kontrol; kontrol; kepemimpinan; pendelegasian wewenang; ide-ide bawahan; motivasi; dan spesialisasi. Stephen P. Robbins<sup>74</sup> mengemukakan, terdapat empat fungsi manajemen yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi (madrasah): *perencanaan*, *pengorganisasian*, *kepemimpinan* dan *pengendalian*. *Perencanaan* meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. *Pengorganisasian* meliputi penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan di mana keputusan harus diambil. *Leadership* meliputi: motivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik. *Pengendalian* merupakan kegiatan

<sup>73</sup>Sutarto, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 45.

<sup>74</sup>Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: Prenhallindo, 1996, hlm. 3.

untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

Gullick dan Urwick dalam Sutarto<sup>75</sup> selanjutnya mengungkapkan bahwa faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi, yakni: penempatan orang pada struktur; kepemimpinan; kesatuan perintah; staf khusus dan umum; unit kerja; pelimpahan dan pemakaian asas pengecualian; keseimbangan tanggung jawab dan wewenang; dan rentangan kontrol. Pendapat itu menggambarkan bahwa dalam penempatan seseorang dalam struktur organisasi harus benar-benar efektif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dikarenakan, semua itu akan berdampak pada kinerja seseorang dan produktivitas organisasi. Mengenai kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi, dikarenakan, kepemimpinan bertalian dengan proses memengaruhi dan menggerakkan seluruh anggota organisasi agar dapat bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi diperlukan adanya kesatuan perintah, sebagai upaya menghindari kebingungan, keraguan dan menimbulkan tidak jelasnya tanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, hampir semua upaya pencapaian tujuan organisasi menggunakan pendekatan efektivitas. Kendatipun terdapat sejumlah model yang terkesan tidak langsung menggunakan dasar seperti ini, bila dianalisis lebih jauh agaknya tetap mengarah pada konsep tujuan. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah suksesnya organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut konsideran pandangan pihak luar tentang apa yang seharusnya dilakukan

---

<sup>75</sup>Garis-garis satuan harus jelas menunjukkan dari siapa seorang menerima perintah dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Staf khusus dan umum diperlukan dalam organisasi karena pekerjaan dan aktivitas organisasi beragam jenisnya, dan ada yang perlu penanganan secara khusus, yang memerlukan keahlian tertentu. Sementara itu, unit kerja diperlukan karena dalam organisasi terdapat aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan disertai bidang kerja atau fungsi tertentu. Dengan pelimpahan setiap pejabat pucuk pimpinan sampai pejabat paling bawah memiliki wewenang tertentu dalam bidang tugasnya, sehingga tiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat. Faktor keseimbangan diperhatikan, di mana satuan-satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan perannya, satuan organisasi yang memiliki peranan sama penting ditempatkan pada jenjang organisasi yang setingkat. Sedangkan rentangan kontrol dimaksudkan untuk menentukan jumlah bawahan langsung yang ideal yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Lihat: (Sutarto, 'Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi....', *loc.cit.*, hlm. 42).

organisasi itu. Karena organisasi memiliki tujuan-tujuan tersendiri, sehingga keunikan pun akan terjadi ketika melakukan evaluasi terhadap objek tertentu.

*Madrasah* merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. Carlisle dalam Dede Rosada mengatakan bahwa sebagai sebuah organisasi, sekolah/madrasah memiliki berbagai ciri organisasi. Yakni, *pertama*, memiliki ciri-ciri distingtif dalam proses dan prosedur kerja yang didasarkan pada tugas dan kewenangan masing-masing unit kerjanya. *Kedua*, organisasi madrasah juga akan memiliki hierarki kewenangan antara kepala sekolah dan wakil kepala madrasah, dengan guru, dengan tata usaha, dan dengan lainnya. *Ketiga*, madrasah juga akan memiliki sistem koordinasi dan kontrol serta pengawasan yang berbeda dengan organisasi jasa lainnya. *Keempat*, sebagai sebuah organisasi, madrasah juga akan memiliki identitas kolektif yang menjadi ciri dan membedakannya dari komunitas organisasi lainnya. *Kelima*, madrasah memiliki tujuan bersama antara kepala sekolah, guru, tata usaha, dan unsur-unsur organisasi sekolah lainnya.<sup>76</sup>

Kepala madrasah merupakan seorang pemimpin. Hemhill & Coons; Tannenbaum, Wesehler & Massarik; Stogdill; dan Katz & Kahn; Gary Yulk<sup>77</sup> mendefinisikan kepemimpinan (*leadership*) sebagai 'perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama'. Definisi lain, kepemimpinan adalah 'pengaruh antarpribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu'. Kepemimpinan didefinisikan 'peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi'. Selanjutnya, kepemimpinan didefinisikan 'sebuah proses memberi pengarahan terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.'

---

<sup>76</sup>Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 226.

<sup>77</sup>Gary Yulk, *Leadership in Organization*, New York: Prentice-Hall International Inc, 1994, hlm. 2.

*Kepemimpinan* memiliki sifat universal dari suatu gejala sosial. Artinya, kepemimpinan dapat ditemukan dan terjadi di mana saja dalam setiap aktivitas bersama asalkan memiliki unsur-unsur berlaku. Misalnya, adanya orang yang memengaruhi dan dipengaruhi serta mengarahkan pada proses tercapainya suatu tujuan. S. Pamudji<sup>78</sup> mengungkapkan bahwa kepemimpinan memiliki sifat universal yang merupakan jenis gejala kelompok atau gejala sosial. Dikatakan universal karena selalu ditemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan atau usaha bersama. Artinya, setiap kegiatan atau usaha bersama diperlukan seorang pemimpin dan kepemimpinan. Kegiatan itu bisa melibatkan dua orang atau lebih, jenis kegiatan bisa sederhana atau kompleks, dan ukuran kegiatannya bisa besar atau kecil. Kepemimpinan merupakan gejala kelompok atau gejala sosial, karena pemimpin dan kepemimpinan itu hanya dapat dirasakan dan tampak apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan usaha bersama. Dengan perkataan lain, adanya suatu kehidupan sosial.

Aktivitas kolektif dalam kelompok dalam proses mencapai tujuannya dibutuhkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin merupakan seorang yang diberi tugas dan wewenang dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Selain itu, terdapat juga unsur manusia yang diarahkan atau dipimpin untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diberikan seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah 'aktivitas untuk memengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi'.<sup>79</sup> Karenanya, sifat-sifat kepemimpinan dipandang memiliki kelengkapan yang lebih dibandingkan dengan manajer.

---

<sup>78</sup>S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 1-2.

<sup>79</sup>*Kepemimpinan dalam organisasi publik selalu dimulai dari sistem peranan formal yang diwujudkan dalam hierarki kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan legitimasi, yakni kekuasaan melekat pada suatu jabatan untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan di bawahnya telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang ada. Pemimpin administrasi publik atau pemimpin birokrasi merupakan pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat berwenang. Seorang yang mengepalai satu unit organisasi tertentu dapat dikatakan sebagai pemimpin organisasi publik. Dikatakan sebagai pemimpin publik, karena wujudnya dia bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan orang yang dipimpinnya. Lihat: (Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 227).*

Miftah Thoha<sup>80</sup> mengungkapkan, ada beberapa sifat umum yang dapat menentukan keberhasilan kepemimpinan organisasi: *Pertama*, kecerdasan. Pada umumnya, hasil riset memperlihatkan bahwa pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dipimpin. Meskipun, dengan catatan, seorang pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan bawahan yang dipimpinnya. *Kedua*, kedewasaan dan hubungan sosial yang lebih luas. Pemimpin rata-rata memiliki pengendalian emosi yang stabil, matang dan memiliki suatu jaringan sosial yang luas di masyarakat. *Ketiga*, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Secara relatif, seorang pemimpin memiliki dorongan motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Mereka berusaha mendapatkan penghargaan secara intrinsik dibandingkan ekstrinsik. *Keempat*, sikap-sikap hubungan manusiawi. Seorang pemimpin memiliki perhatian dan orientasi pada anggotanya.

Dari pendapat Thoha, dapat dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah perlu menciptakan iklim sekolah/madrasah yang kondusif sebagai upaya menciptakan iklim yang harmonis dan kooperatif. Dia tidak hanya sebagai seorang pemimpin tetapi juga sebagai pengayom bagi bawahannya, agar mereka berperan aktif dan berkontribusi bagi kemajuan organisasi. Sebagai kepala madrasah, seorang pemimpin selanjutnya perlu menjadi teladan bagi bawahannya, sehingga guru dan karyawan dapat berinteraksi dan menyampaikan usulan pendapat tidak kaku. Interaksi yang diteladani pimpinan diharapkan akan mendorong terciptanya iklim kerja dan kinerja yang menjadi tujuan madrasah.

Pandangan di atas memperlihatkan sebagai ciri-ciri utama yang memengaruhi sukses suatu kepemimpinan sekolah/madrasah. Di mana, seorang kepala sekolah/madrasah perlu memiliki kemampuan inteligensia, kematangan dan keluasan pandangan sosial. Hal ini, diharapkan agar seorang kepala madrasah dapat mengendalikan keadaan yang kritis dan memiliki keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, memiliki motivasi dan keinginan berprestasi yang datang dari internal, dan mampu melakukan hubungan antarmanusia. Jadi, keberhasilan suatu organisasi

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 251-252. Lihat pula: T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1996, hlm. 286-287.

dalam mencapai tujuannya juga ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi.

Dalam konteks analisis perilaku tugas dan perilaku hubungan, Hersey Blanchard dalam Sutarto<sup>81</sup> mengatakan telah memunculkan empat gaya kepemimpinan: (1) *Telling*, yakni gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: tinggi tugas rendah hubungan; pemimpin memberi perintah khusus, pengawasan diberikan dengan ketat; pemimpin menerangkan pada bawahan apa yang harus dikerjakan; bagaimana cara mengerjakan; kapan harus dilaksanakan dan di mana harus dilakukan. (2) *Selling*, yakni gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: tinggi tugas dan tinggi hubungan, pemimpin menerangkan keputusan, memberikan pengarahan, dan komunikasi dilakukan dengan cara dua arah. (3) *Participating*. Yakni, gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: hubungan dan rendah tugas; pemimpin maupun bawahan saling memberikan gagasan dan membuat keputusan bersama. (4) *Delegating*. Yakni, gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri: rendah hubungan dan rendah tugas; pemimpin melimpahkan pembuat keputusan dan pelaksanaannya kepada bawahan sepenuhnya.

Dalam teori kepemimpinan partisipatif, Gary Yulk<sup>82</sup> mengatakan memiliki empat tahap dalam proses pengambilan keputusan: (1) *Otoritatif*, yakni seorang pemimpin sebagai pembuat keputusan sendiri tanpa menanyakan saran kepada bawahan. Bawahan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan itu karena mereka tidak terlibat di dalamnya; (2) *Konsultasi*, yakni seorang pemimpin menanyakan opini dan saran bawahan, kemudian mengambil keputusan sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran dan ide bawahan; (3) *Keputusan bersama*, yakni seorang pemimpin mendiskusikan suatu keputusan dengan bawahan, mengambil keputusan bersama, dan pemimpin selanjutnya, tidak mengintervensi pelaksanaan keputusan itu. (4) *Pendelegasian*, yakni seorang pemimpin memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada bawahan untuk membuat keputusan dengan hanya memberikan suatu spesifikasi batas terakhir harus berada, dan keputusan itu dapat dilaksanakan oleh bawahan.

---

<sup>81</sup>Sutarto, 'Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi....', *op.cit.*, hlm. 137-138.

<sup>82</sup>Gary Yulk, 'Leadership in Organization....', *op.cit.*, hlm. 133-134.

Jadi, agar dapat mengerti sifat kepemimpinan di sekolah/madrasah, seorang kepala madrasah perlu memahami terlebih dahulu sifat kekuasaan. Hal ini, dikarenakan kepala madrasah merupakan bentuk khusus kekuasaan yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Supaya hubungan itu dapat dikembangkan, seorang pemimpin diharapkan dapat memadukan kebutuhan organisasional dan kebutuhan pribadi sedemikian rupa, sehingga memperkenankan orang dan organisasi mencapai puncak tujuan dan kepuasan bersama. Seorang kepala sekolah/madrasah diharapkan dapat membuat suatu dikerjakan dan dapat mengerjakannya. Ia merupakan solusi dan pemberi kemudahan yang membantu melancarkan jalan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rangka mengefektifkan organisasi (sekolah/madrasah), seorang pemimpin memerlukan dan memiliki kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab yang harus diimplementasikan secara baik, tepat, dan benar.

Untuk suksesnya kepemimpinan organisasi, seperti madrasah, seorang kepala madrasah perlu memiliki kompetensi dalam memotivasi bawahan (staf dan guru-guru). Malayu S.P. Hasibuan<sup>83</sup> mengatakan bahwa motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya dalam mencapai kepuasan. Hasibuan menjelaskan motivasi diperlukan terhadap bawahan dikarenakan: *Pertama*, karena seorang pemimpin membagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik. *Kedua*, karena adanya bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi kurang bergairah mengerjakannya. *Ketiga*, untuk memelihara dan meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. *Keempat*, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya.

Motivasi menjadi krusial ketika ukuran kinerja dipermasalahkan. Dari jenjang efektivitas dapat diketahui bahwa terdapat efektivitas individu yang akan bergabung menjadi efektivitas kelompok, dan selanjutnya akan tergabung dalam efektivitas organisasi. Untuk merespons pertanyaan

---

<sup>83</sup>Abdullah Idi, *Materi Kuliah Etika dan Perilaku Organisasi*, Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang, 2013.

bagaimana rasional hubungan asimetris antara faktor motivasi dengan efektivitas organisasi, Richard M. Steers<sup>84</sup> mengungkapkan bahwa motivasi perseorangan dalam suatu organisasi berdampak langsung pada arah pencapaian tujuan organisasi. Prestasi kerja atau kinerja individual yang didorong motivasi, secara otomatis akan memengaruhi kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Alison Atwell mengungkapkan keberadaan suatu manajemen pendidikan (sekolah/madrasah) akan turut menentukan berlangsungnya program pendidikan secara sistematis dan kontinu dan menjadi suatu keharusan dalam dunia pendidikan, manajemen sebagai suatu sistem berarti yang menjadi aturan main (*rule of the game*) yang mengikat seluruh personal yang ada di dalamnya, dan dengan menjadikan manajemen sebagai sistem kontinuitas, maka program dapat dijamin, dan tujuan jangka panjang diharapkan dapat direalisasikan. Suatu manajemen sekolah yang efektif melibatkan keberadaan berbagai proses sehingga sekolah dapat terlaksana dengan baik. Manajemen hendaknya didasarkan pada aspek keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan kesinambungan, dan menempatkan kontrol kemajuan bagi semua aspek sekolah secara erat di tangan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) masyarakat sekolah.<sup>85</sup>

Dalam proses manajemen sekolah/madrasah, terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin: (1) *Fungsi perencanaan (planning)*, adalah menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program; (2) *Fungsi pengorganisasian (organizing)*, adalah penentuan fungsi, hubungan

---

<sup>84</sup>Jadi, dimensi *leadership* memiliki dampak secara asimetris terhadap tingkat efektivitas organisasi sekolah/madrasah. Tanpa adanya kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, sulit mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan kepala madrasah memiliki posisi yang strategis karena perannya membawa sekolah/madrasah pada pencapaian tujuan yang diinginkan dan ditetapkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan memengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. *Ibid.*

<sup>85</sup>Alison Atwell, *Peningkatan Sekolah Efektif (Modul)*, Jakarta, 2013, hlm. 73.

dan struktur. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk menerapkan rencana; (3) Fungsi kepemimpinan (*leadership*), adalah menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi para bawahan (karyawan, staf dan guru) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan kooperatif; dan (4) Fungsi pengawasan (*controlling*), adalah penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan bertalian kuat dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur, mendayagunakan rencana pendidikan sebagai ukuran yang dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan suatu rencana pendidikan.<sup>86</sup>

Manajemen sekolah/madrasah merupakan sistem pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada madrasah yang mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga yang ada di sekolah atau madrasah sesuai dengan standar dan pelayanan mutu yang ditetapkan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota).<sup>87</sup> Manajemen madrasah merupakan sistem pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah sebagai respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat. Supaya manajemen dapat mencapai tujuan sebaik-baiknya, diperlukan adanya sarana alat dan unsur manajemen (*tool*), yang meliputi: *men* (tenaga manusia digerakkan), *money* (dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan), *methods* (cara/sistem untuk mencapai tujuan), *material* (bahan-bahan sebagai sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan), *market* (pasar tempat untuk melempar hasil produksi).<sup>88</sup> Unsur-unsur manajemen ini memerlukan koordinasi secara berimbang dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

---

<sup>86</sup>Jamal Ma'mur, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*, Yogyakarta: Diva Press, 2009, hlm. 71.

<sup>87</sup>Departemen Agama, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>88</sup>Muhammad Rohman, *Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm. 61.

Hal ini dikarenakan, pendidikan (sekolah/madrasah) memiliki tujuan yang akan dicapai, dan untuk merealisasikannya perlu didukung kurikulum yang jelas, pembelajaran dengan sarana-prasarana, sumber daya manusia berkualitas dan profesional, dana, informasi, lingkungan yang kondusif, yang dikelola melalui proses yang sistematis. Manajemen madrasah, dalam konteks ini, menempatkan sebagai suatu totalitas proses kerja sama antara manusia dalam mengelola sumber daya, sumber dana, dan sumber pendukung lainnya, kerja sama antara pemimpin dengan bawahannya, antarstruktur, antarguru dengan staf karyawan, antarguru dengan siswa, dan lainnya. Hal ini perlu didukung dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan kepemimpinan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya kerja sama antarelemen sistem sosial sekolah, akan sulit tercapainya tujuan pendidikan.

Selain permasalahan manajemen madrasah, suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah *leadership*. Berbagai definisi tentang kepemimpinan yang telah dikembangkan para ahli, tetapi, suatu hal jelas bahwa kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang itu menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan pemimpin. Muhaimin<sup>69</sup> mengungkapkan bahwa adanya perbedaan definisi dikarenakan bertitik tolak dari teori yang berbeda, terutama *teori sifat*, *teori situasional*, dan *teori transformasional*. *Teori sifat* mengatakan bahwa pemimpin haruslah memiliki sifat-sifat unggul yang mampu membawa orang lain pada suatu kondisi tertentu. *Teori situasional*, mengatakan bahwa seorang pemimpin lahir dari situasi yang ada, dan selanjutnya memengaruhi orang lain menuju suatu perubahan sesuai dengan tuntutan situasi yang ada. Sedangkan, *teori transformasional* mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu mentransformasi keluar dari budaya yang ada, menuju suatu budaya baru yang lebih baik.

Pada prinsipnya, definisi kepemimpinan (*leadership*) bertitik tolak pada tiga hal: penekanan pada kepribadian, kompetensi untuk memimpin, dan

---

<sup>69</sup>Muhaimin, *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 30.

penekanan pada kegiatan dan perilaku pemimpin, serta penekanan pada proses interaksi antara pemimpin dengan bawahan dalam situasi tertentu. Jadi, pada hakikatnya kepemimpinan adalah suatu kegiatan membimbing dalam suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan kelompok itu, sebagai tujuan bersama.

Seperti diketahui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, di mana maju-mundurnya suatu organisasi terletak pada kualitas kepemimpinan. Suatu lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) juga memerlukan seorang pemimpin yang handal, motivator, inspirator dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Karenanya, seorang pemimpin, tidak hanya sebagai manajer, tetapi juga sebagai seorang pembangun mental, moral, spirit, dan kolektivitas dengan jajarannya. Seorang pemimpin idealnya tidak hanya memiliki aturan tertulis tetapi juga sikap perilaku, sepak terjang dan keteladanan dalam melakukan agenda transformasi ke arah yang lebih baik.<sup>90</sup>

Kepemimpinan madrasah/sekolah, sebagai sebuah sistem yang kuat dan dinamis dalam proses mencapai tujuan, dengan membutuhkan alat berupa manajemen yang baik dan kuat. Kunci keberhasilan proses manajemen dalam mengelola manajemen pendidikan di madrasah terletak pada kompetensi pemimpin (*leader*), dalam hal ini kepala madrasah. Untuk menjadi pemimpin madrasah yang baik, diperlukan beberapa persyaratan, dengan memiliki: (1) *visi*, dengan cara memiliki pikiran yang terbuka sebagai upaya memperkaya wawasan, (2) *keberanian*, dengan mencintai pekerjaannya, seorang pemimpin akan mengerjakannya dengan hati. Dengan adanya kecintaan terhadap pekerjaannya, seorang akan berkorban dengan suka rela dan melakukan terobosan-terobosan baru, yang merupakan unsur dari keberanian, (3) *realistis*, di mana seorang pemimpin bekerja dengan dasar fakta dan realitas bukan opini. Jika sekolah/madrasah belum memiliki sumber daya yang mencukupi, seorang pemimpin harus mampu menggunakan fasilitas yang ada, dengan secara berproses berupaya memenuhi sumber daya itu, dan (4) *sensitif dan kepedulian*, di mana seorang pemimpin memiliki kepedulian dan sensitivitas

<sup>90</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*, Yogyakarta: Diva Press, 2009, hlm. 91.

yang tinggi terhadap orang yang dipimpinnya, bekerja dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dan memberi sanksi hukum bagi mereka yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu.<sup>91</sup>

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296 Tahun 1996 dikatakan bahwa kepala sekolah/madrasah adalah guru yang memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. Menurut ketentuan ini masa tugas kepala sekolah adalah empat tahun yang dapat diperpanjang satu kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki jabatan dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali apabila sudah melewati tenggang waktu minimal satu kali masa tugas. Bagi mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik dapat ditugaskan di sekolah lain tanpa tenggang waktu. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga berperan/berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pembaru dan motivator.<sup>92</sup>

Dalam menjalankan sejumlah peran/fungsinya kepala madrasah melaksanakan tugas yang banyak dan kompleks: (1) Sebagai *pendidik*, kepala sekolah bertugas: membimbing guru, karyawan, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran; (2) Sebagai *manajer*, kepala sekolah bertugas: menyusun program, menyusun pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah dan mengendalikan kegiatan; (3) Sebagai *administrator*, kepala sekolah bertugas: mengelola administrasi, KBM dan BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, persuratan dan urusan rumah tangga sekolah; (4) Sebagai *supervisor*, kepala sekolah bertugas menyusun program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil supervisi; (5) Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, dan melakukan komunikasi; (6) Sebagai *pembaru*, kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaruan dalam berbagai aspek, mendorong guru, staf dan orangtua untuk memahami dan

<sup>91</sup>Muhaimin, 'Manajemen Pendidikan...', *op.cit.*, hlm. 31-32.

<sup>92</sup>Seperti dikutip Daryanto, 'Administrasi dan Manajemen Sekolah...', *loc.cit.*, hlm. 111.

memberikan dukungan terhadap pembaruan yang ditawarkan; dan (7). Sebagai *motivator*, kepala sekolah bertugas merekayasa lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang sistemik.<sup>93</sup>

Kinerja kepala madrasah adalah segala upaya yang dilakukan dengan hasil yang dapat dicapai oleh kepala madrasah dalam mengimplementasikan MBM di madrasah untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dalam MBM dapat dilihat berdasarkan kriteria: (1) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, pancar dan produktif; (2) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; (3) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah/madrasah dan pendidikan; (4) Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah/madrasah; (5) Bekerja dengan tim manajemen, serta (6) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>94</sup>

Secara kuantitatif, perkembangan madrasah di Indonesia, sangat menggembirakan. Kini, terdapat ribuan madrasah telah berdiri di berbagai pelosok tanah air. Sebagian kecil dari jumlah tersebut berstatus negeri dan sebagian besarnya masih bersatus swasta. Mayoritas madrasah swasta belum menunjukkan kualitas yang diharapkan. Hal ini berkonsekuensi terhadap kualitas lulusan yang dapat bersaing dan seimbang dalam bidang sains-teknologi dan sains-agama, selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam yang universal. Ke depan, masih diperlukan upaya ekstra keras dari berbagai elemen bangsa agar dapat meningkatkan kualitas madrasah yang memiliki andil besar dalam membantu dan mendorong pemerintah dalam mencitakan sumber daya manusia (*human-resources*) yang handal dan siap berkiprah di zamannya, abad ke-21.

Harus diakui bahwa madrasah, dari waktu ke waktu sudah mengalami perkembangan yang memadai. Akan tetapi, tentu masih

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

banyak permasalahan yang dihadapi madrasah, antara lain bertalian dengan permasalahan madrasah di era Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama pada 2007<sup>55</sup> bahwa sejumlah permasalahan madrasah pada era Otonomi Daerah keterkaitan dengan: tentang kedudukan madrasah dalam instansi pemerintah. Secara struktural, madrasah berada di bawah instansi vertikal (Kementerian Agama), namun berdasarkan domisili madrasah tersebut berada di wilayah kekuasaan pemerintah daerah (kota/kabupaten). Kondisi demikian berdampak pada terjadinya kesenjangan antara operasional dan pertanggung jawabannya. Secara operasional, madrasah merujuk ada peraturan otonomi daerah. Dari segi pertanggungjawaban, keberadaan madrasah masih bersifat sentralistik. Kondisi demikian mengakibatkan manajemen di madrasah tidak dapat berjalan maksimal. Permasalahan lain bertalian dengan keberadaan madrasah juga sangat kompleks, bertalian dengan: pendanaan, ketenagaan, sarana-prasarana, dan kurikulum. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintahan otonomi daerah.

---

<sup>55</sup>Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Problematika Madrasah Era Otonomi Daerah*, Editors: Imran Siregar dan Umul Hidayati, Cetakan ke-2, Jakarta: Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007, hlm. 245-246.

# Bab 7

## **PLURAL-SOCIETIES, PENDIDIKAN KARAKTER DAN TOLERANSI**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak etnik, agama, bahasa, budaya, kelompok sosial dan nilai memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang paling pokok berupa bagaimana mengelola dan meramu semua itu entitas perbedaan yang *incummensurable* itu menjadi suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Tantangan ini bukan hanya tugas yang mesti dipikul oleh mereka yang terjun di dunia politik. Meskipun disadari, panggilan politik merupakan upaya menata kehidupan bersama dan berjuang untuk meramu segala perbedaan menjadi suatu *well-ordered-society*. Tampak bahwa permasalahan persamaan dan perbedaan sering kali justru memberi dan menciptakan ruang bagi ancaman perpecahan dan disintegrasi bangsa. Jika ini yang terjadi, pluralitas (*plurality*), perbedaan (*difference*), diversitas (*diversity*) bukan lagi dipandang sebagai kekayaan atau mata rantai yang memperkokoh rasa kesatuan, tetapi sebaliknya, sebagai ancaman yang bisa mencederai demokrasi dan toleransi.<sup>1</sup>

Dalam sejarah berbangsa, isu pluralitas dan toleransi sesungguhnya bukan saja hanya persoalan relasi antara umat Islam (*majority*) dengan umat minoritas (*minority*), tetapi juga persoalan relasi dalam internal

---

<sup>1</sup>Felix Baghi, SVD (Editor), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, Yogyakarta: Ledalero, 2012, hlm. 8.

menangkal bahaya dominasi mayoritas liberal dalam arus globalisasi dewasa ini.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan suatu negara di mana masyarakatnya memiliki keberagaman budaya (*cultural-pluralis*). Faisa Tamim mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika yang hidup dalam masyarakat multikultural dalam beragam karakteristik dan memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Secara geografis, negara ini juga memiliki bentangan pada garis pantai 108.920 km<sup>2</sup>, negara terluas ke delapan setelah Australia, Kanada, Brazil, Amerika Serikat, RRC, India dan Nigeria. Luas lautan sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri 17.506 pulau, dan tahun 2003 terdapat 11.506 pulau yang belum punya nama. Sumber daya alam (*natural resources*) melimpah, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan belum berpenghuni.<sup>6</sup>

J.S. Furnivall (1980) mengatakan, Indonesia, sebagai *plural society*, merupakan suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan dikuasai memiliki perbedaan ras. Pada zaman Hindia Belanda, orang Belanda sebagai kelompok minoritas jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga (*inlander*) di negerinya sendiri. Orang Timur Asing, terutama Cina, Arab, dan India memiliki hierarki vertikal kelas dua, di antara kelompok Eropa dan pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common-will*) di mana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain berdasarkan perbedaan ras, masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari

<sup>5</sup>Felix Baghi, SVD (Editor), 'Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi', *op.cit.*, hlm. 15-16.

<sup>6</sup>Faisal Tamim, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta: Blantika, 2004, hlm. 41-42.

buruh-buruh mereka. Sama halnya, orang Timur Asing, seperti orang Cina, seperti orang Belanda, mereka datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan ekonomi.<sup>7</sup>

Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai 'pelayan' di negeri sendiri. Furnivall juga mengungkapkan bahwa Indonesia menampakkan suatu struktur yang memiliki dua ciri: (1) *secara horizontal*, ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat istiadat dan daerah; dan (2) *secara vertikal*, ditandai suatu struktur masyarakat yang memiliki adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan *plural society*, suatu istilah yang pertama digunakan Furnivall untuk mendeskripsikan masyarakat Hindia Belanda, yakni suatu masyarakat yang memiliki dua atau lebih elemen yang hidup terpisah satu sama lain dalam satu kehidupan politik.<sup>8</sup>

Seorang Antropolog, Clifford Geertz berpendapat serupa bahwa ketika Belanda "hengkang" meninggalkan negeri ini, sifat "majemuk" atau "pluralistik" masih tersisa. Hanya saja, menurut Geertz, sifat pluralistik itu tidak lagi vertikal melainkan pluralistik horizontal, yakni adanya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat Indonesia yang didasari pada ikatan primordial (*primordial attachments*), seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama, dan etnis (suku bangsa). Menurut Geertz, primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, seperti dalam organisasi sosial formal dan informal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintah, partai politik, dan organisasi-organisasi bertujuan ekonomi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>J.S. Furnivall, "Plural Societies", *Society as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1980, hlm. 86.

<sup>8</sup>Lihat J.S. Furnivall dalam: (Abdullah Idi, "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia, *Jurnal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* Vol. 7, Nomor 2, Desember 2007, hlm. 151-153).

<sup>9</sup>Clifford Geertz dalam: (Yando R. Zakaria, "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", dalam Noer Fauzi, dkk., *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah: Pergeseran Politik di bawah Problem Agraria*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000, hlm. 32).

Pandangan J.S. Furnivall dan Clifford Geertz itu agaknya lebih bertalian dengan dimensi formal dan normatif dari diskursus masyarakat pluralistik. Diungkapkan Burhanuddin dan Kusnadi, bahwa konsep masyarakat pluralistik senantiasa berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan umat manusia. Usman Pelly menuturkan pula, bahwa kompleksitas masyarakat pluralistik tidak hanya ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan secara vertikal, yakni capaian yang diperoleh melalui prestasi (*attachment*), yang ditandai dengan adanya perbedaan pendidikan, tingkat sosial-ekonomi, kedudukan politik, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman. Dari perspektif pandangan ini, pluralistik vertikal dapat saja terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terkategori ke dalam pengelompokan secara horizontal. Dengan dimasukkannya aspek capaian/prestasi (aspek dinamis) dari unsur pembeda di dalam masyarakat plural/majemuk, dengan sendirinya, pada dasarnya karakter kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia sudah sejak lama dicirikan oleh pembeda-pembeda secara vertikal dan horizontal itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara ras, etnis/suku bangsa, bahasa, dan agama; melainkan juga, dapat dibedakan berdasarkan daya adaptasinya (sebagai hasil dari suatu proses pencapaian tertentu) atas perkembangan-perkembangan aktual yang ada di sekitar mereka, baik yang terjadi di dalam kelompok-kelompok horizontal itu sendiri, dan lebih penting antarkelompok-kelompok horizontal tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pluralistik Indonesia belum cukup hanya diartikan dari dimensi 'horizontal' tetapi juga dimensi 'vertikal', terutama vertikalisasi antara kelompok-kelompok yang dalam kategori horizontal. Karena, perbedaan daya adaptasi antarkelompok-kelompok yang berbeda secara ras, etnis/suku bangsa, agama, dan bahasa, dapat menjadikan kelompok-kelompok masyarakat yang masih hidup pada tingkatan perkembangan kebudayaan yang lebih rendah. Interaksi antarkelompok dalam perbedaan vertikal antaretnis (ataupun pengelompokan secara horizontal lainnya) lebih berdimensi "kalah-menang" yang berdampak pada munculnya suatu kekuatan yang cenderung mendominasi (*superordinate*) dan didominasi (*subordinate*). Proses kondisi

---

<sup>10</sup>Abdullah Idi, "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia....", *op.cit.*, hlm. 156.

seperti itu, tentunya sangat mungkin berdampak pada ketidakseimbangan dan kesenjangan yang bisa saja mengarah ke arah "konflik sosial" antarras, antaretnis, dan antarkelompok agama, dan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), yang bila terus meluas, hal itu bisa mengancam "integrasi sosial" dan bahkan 'integrasi bangsa'. Lebih jauh, sebagaimana diungkapkan Zakaria (2000), bahwa dilihat dari tingkat perkembangan dan kemajuan sistem teknologi, sistem pengetahuan, pola-pola pengeksploitasian dan penguatan sumber-sumber daya ekonomi, dan jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, kelompok-kelompok suku bangsa atau sub-suku bangsa di Indonesia setidaknya dapat dibagi ke dalam sejumlah kategori yang setiap kategori memiliki tingkat daya adaptasi yang berbeda.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Yakni, dengan kategori: *Pertama*, kelompok masyarakat dalam kategori *tribal society*, yang biasanya hidup dalam persekutuan dan masing-masing persekutuan tidak terintegrasi dalam persekutuan politik yang lebih luas. Mata pencaharian mereka berburu dan meramu (*hunting and gathering*). Bertalian dengan sistem pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biasanya pola pemukiman kelompok masyarakat ini bersifat *nomaden* (berpindah-pindah tempat), meskipun batas-batas wilayah pengembaraan itu tetap dapat ditentukan secara pasti. Di Indonesia, *tribal society* atau masyarakat pemburu, peramu, dan berkebun (dengan teknologi sederhana) ini meliputi: Orang Kubu (Suku Anak Dalam) yang hidup di wilayah belantara Jambi, Sumatera Selatan, Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Koentjaraningrat menyebut masyarakat ini sebagai "masyarakat berkebun". *Kedua*, kelompok masyarakat perladangan berputar (*rotary-cultivation*) atau kelompok masyarakat perladangan berpindah (*shifting cultivation*). Karena dalam sistem teknologi pertanian yang dikembangkannya ada unsur pekerjaan menebas dan membakar, teknik ini juga dinamakan *slash and burn cultivation*. Demikian pula, karena kegiatan pertanian itu tidak diselenggarakan secara terus-menerus pada satu bidang tanah, kegiatan pertanian ini dinamakan pula *extensive agriculture*. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang telah dapat bercocok tanam untuk menghasilkan bahan makanan pokoknya (*food producing*) sendiri. Sebagian besar kelompok masyarakat ini berada di luar Jawa, dengan sedikit pengecualian di beberapa tempat tertentu saja, seperti pada masyarakat Badui. Komposisi demografis kelompok ini lebih besar dari kelompok pertama, yakni mencapai angka ribuan jiwa. Hubungan masyarakat satu dengan lainnya masih menekankan pada sistem kekerabatan (*kinship system*).

*Ketiga*, kelompok masyarakat petani (*peasant society*). Kelompok masyarakat ini mengembangkan sistem pertanian menetap (*sedenter*) dengan cara produksi pertanian intensif (*intensive agriculture*), yang di Indonesia dikenal dengan sistem pertanian lahan basah atau pertanian persawahan. Sistem ini dikenal oleh kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTB. Karena sistem pertanian ini mampu menghasilkan surplus hasil yang cukup besar, kegiatan ekonomi kelompok ini telah terintegrasi ke dalam sistem sosio-ekonomi dan sosio-politik lebih besar dan lebih luas. Keterkaitan antaranggotanya tidak lagi berdasarkan sistem kekerabatan

Jadi, fakta sosial historis bangsa Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya pluralistik merupakan suatu "keunikan" dan sekaligus "kekuatan" tersendiri. Tetapi, dalam perkembangannya, terutama ketika memasuki era Reformasi (1998), kekayaan nilai-nilai pluralistik sering kali memperlihatkan "kurang bersahabat" terhadap satu sama lain. Konflik sosial bernuansa etnis, agama, sosial, ekonomi, dan politik yang terkesan tidak pernah berakhir, telah menghantarkan pada suatu kesimpulan bahwa bangsa ini memerlukan solusi mendasar apabila ingin menjadi diperhitungkan pada masa depan. Pendidikan Islam (dalam arti: pesantren, madrasah, dan mata pelajaran PAI), menurut hemat penulis, memiliki peranan strategis dalam membentuk individu anak didik (generasi muda) yang berkarakter dalam upaya memperkuat kembali *the national and character-building*.

Indonesia, sebagai negara, sesungguhnya telah dikembangkan berdasarkan nasionalisme politik dari beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki "keunikan" dan budaya sendiri. Kini, persoalan budaya mulai mengemuka ke permukaan. Hal ini terjadi karena suatu ikatan sosial hanya terjadi apabila para anggotanya memandang bahwa ikatan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhannya. Jika harapan dan kebutuhan yang beragam itu tidak dapat dipenuhi oleh negara, akibatnya akan muncul tribalisme. Kini nasionalisme dipertentangkan dengan

---

melainkan berdasarkan ikatan-ikatan sosio-politik dan sosio-ekonomi yang lebih formalistik, seperti organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi. Keempat, kelompok masyarakat perkotaan. Kelompok ini merupakan suatu masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan pemukiman tertentu di mana para penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar setempat. Biasanya barang-barang itu dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedalaman (pedesaan), yang biasa dinamakan sebagai daerah yang melindungi desa. Titik awal gejala kota adalah timbulnya kelompok literasi (intelektual, pujangga, dan agamawan) atau berbagai kelompok spesialis yang berpendidikan dan nonagraris, sehingga pembagian kerjanya sangat kompleks. Dilihat dari peran sosio-ekonomi dan sosio-politiknya dalam suatu jaringan kehidupan yang lebih luas, masyarakat perkotaan ini juga dinamakan kelompok elit ekonomi dan politik. Di bawah kelompok elit kota ini, terdapat suatu kelas menengah perkotaan yang jumlahnya lebih besar, yakni para pegawai pemerintah dan swasta, intelektual, dan pengusaha mandiri. Dilihat dari cara hidup kelas menengah ini tidak jauh berbeda dengan kelompok elit, sehingga dapat dikategorikan ke dalam super kultur metropolitan atau sudah masuk ke dalam peradaban global. Lebih jauh, lihat: (Yando R. Zakaria, "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", *op.cit.*, hlm. 156-159).

tribalisme. Tribalisme merupakan suatu kekuatan primordialisme yang justru memiliki andil kuat dalam mengikat para anggota dari suatu masyarakat. Aspek emosional yang muncul dari pertemuan tatap muka (*face to face*) begitu kuat dalam memadu rasa persatuan. Dapat diyakini, rasa persatuan yang berlebihan akan memunculkan rasa fanatisme kelompok dan akan menjadi penghalang terbentuknya rasa solidaritas dari suku bangsa. Apalagi, jika negara-bangsa itu terdiri dari heterogenitas suku dengan budaya berbeda-beda pula.<sup>12</sup>

Akankah tribalisme bertentangan dengan proses demokratisasi? Bila proses demokratisasi berjalan dengan baik, maka tribalisme akan menjadi arena penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan cara mengenal, menghargai, dan mengadopsi nilai-nilai budaya etnis yang lain, akan terjadi apa yang dinamakan *koalisi antarsubbudaya* di dalam membangun rangkaian sejarahnya sehingga kebudayaan tersebut terus berkembang. Ini merupakan Teori Levi-Staruss tentang kemajuan kebudayaan. Tetapi, sebaliknya, bila tribalisme berdasarkan primordialisme akan berbahaya bagi kesatuan bangsa jika tidak diupayakan ke arah "kesamaan" dan menghindari "perbedaan". Dalam masyarakat demokrasi atau dalam proses demokratisasi, kelompok etnis berbeda dapat belajar banyak dari kelompok etnis lainnya. Dalam masyarakat majemuk atau pluralistik diperlukan toleransi.<sup>13</sup>

Pentingnya generasi muda yang berkarakter dalam masyarakat pluralistik, bahwa karena dengan memiliki sikap "toleransi" dapat memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Hamdi Muluk mengatakan bahwa "tanpa toleransi, beragam sentimen primordialisme akan muncul dan masyarakat akan berakibat terpecah-pecah".<sup>14</sup> Dalam konteks ini, UNESCO (1998) dalam H.A.R. Tilaar telah menetapkan lima prinsip toleransi: (1) toleransi sebagai proses pemahaman sejarah dan kebudayaan setiap kelompok, suku, agama, ras, lingkungan adat, dan bahasa; (2) toleransi merupakan sikap menghormati perbedaan ciri-ciri

<sup>12</sup>H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 81.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

<sup>14</sup>Hamdi Muluk, "Etno-Nasionalisme dan Disintegrasi", *Kompas*, 22 November 2000.

khusus yang terdapat pada masing-masing kelompok, seperti bentuk fisiknya, warna kulit, logat dan ucapan, sikap dan gaya pergaulan, adat-istiadat, cara beribadah dalam agama berbeda; (3) toleransi memanfaatkan perbedaan ciri khusus dalam upaya memperkokoh rasa kebangsaan karena akan saling memperkaya kebhinnekaan; (4) toleransi merupakan upaya membangun kepercayaan antarsesama anggota masyarakat dalam pemecahan masalah bersama secara damai, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya; dan (5) toleransi adalah upaya untuk memantapkan keadilan sosial dalam menghadapi perubahan yang cepat akibat teknologi dan ekonomi karena gelombang globalisasi.<sup>15</sup>

Pluralitas menuntut warga masyarakat untuk bersikap toleran satu-sama lain, yakni memahami dan menghargai keyakinan dan kebiasaan orang lain. Dengan sikap toleran, setiap warga negara diharapkan dapat menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan toleransi, setiap warga negara diharapkan dapat menerima adanya perbedaan antara beragam latar belakang sosial-ekonomi, budaya, politik, agama, dan pendidikan. Bersikap toleran berarti pula tidak memaksakan pemikiran, keyakinan dan kebiasaannya sendiri terhadap orang lain. Seperti diungkapkan Rawls (1999)<sup>16</sup> bahwa toleransi menjadi penting ketika kebebasan-kebebasan nurani individu bertemu dalam wilayah publik. Dari persektif keadilan, orang harus menghormati hak orang untuk beragama berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada interpretasi tertentu dari kebenaran agama dapat diakui sebagai mengikat seluruh warga pada umumnya; juga tidak dapat disetujui bahwa harus ada suatu otoritas yang memiliki hak untuk menjawab permasalahan doktrin teologis. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan apa kewajiban-kewajiban agamanya. Sama halnya, kebebasan yang dijamin oleh keadilan itu tidak ada ditentukan bahwa seseorang selalu bebas untuk mengubah keimanannya dan hak ini tidak tergantung pada usahanya yang telah melakukan kehendaknya untuk memilih secara regular atau menggunakan

<sup>15</sup>H.A.R. Tilaar, "Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Transformatif...", *op.cit.*, hlm. 81-82.

<sup>16</sup>Muhammad Mustari, *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan*, Penagantar: Didik Suhardi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 168-169.

inteleknnya. Prinsip toleransi menjustifikasi bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hukum atau politik yang lebih besar kebebasannya daripada orang itu sendiri.

Suatu “negara-bangsa” memiliki identitas. Suatu generasi muda Indonesia masa depan yang berkarakter, akan menghargai beragam perbedaan, *kebhinnekaan*, yang berupa perbedaan: etnis, agama, budaya. Hal ini akan merupakan “potensi” kekuatan bangsa Indonesia, sebagai salah satu negara-bangsa. Kekuatan karakter juga merupakan identitas suatu negara-bangsa. Potensi kekuatan karakter yang mengarah kepada identitas suatu bangsa memiliki kekuatan dalam menghadapi dampak globalisasi, sebagai efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi, akan mempercepat rasa persatuan dan sentimen primordialisme dari kelompok etnis berbeda. Membangun karakter generasi muda Indonesia melalui pendidikan, ‘Pendidikan Islam’, diimpikan adanya suatu *output* pesantren, madrasah, dan sekolah umum, yang memiliki karakter atau identitas positif dalam membangun integrasi sosial dan memperkuat integrasi nasional.

## B. Pendidikan Karakter dan Toleransi

Salah satu indikator globalisasi adalah terjadinya perubahan nilai-nilai. Perubahan nilai-nilai suatu negara akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mondial. Nilai-nilai moralitas pun bergeser sejalan dengan pengaruh iptek dan komunikasi. Alfin Toffler, dalam buku *Future Shock*, telah memprediksi akan terjadinya ‘keterkejutan budaya’ (*cultural shock*). Globalisasi, sebagai suatu produk modernisasi, telah mengubah cara hidup manusia, secara individual maupun warga negara dan dunia. Setiap individu, agaknya mesti berhadapan dengan dua pilihan: bertindak sebagai ‘pemain’; atau bertindak sebagai ‘korban’ (*victims*).

Institusi Pendidikan Islam berupa: pesantren; madrasah, sejak Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN); dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, serta berbagai jenis Sekolah Islam Terpadu (SIT) diyakini memiliki peranan strategis dalam merespons

dampak globalisasi, dalam menciptakan anak didik atau generasi muda<sup>17</sup> berkarakter yang dapat bertindak sebagai 'pemain'. Sama halnya dengan pesantren, sejak lama memiliki peran strategis pula dalam menciptakan perubahan sosial, termasuk peran para elit pesantren dalam kiprah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua bentuk institusi pendidikan Islam ini, madrasah dan pesantren, karenanya memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi berkarakter sehingga mereka diharapkan mampu mengantisipasi kecenderungan berbagai fenomena sosial yang dalam kenyataannya bisa saja mengancam disintegrasi sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Sejumlah pihak berharap, bahwa sebagai 'pemain', generasi muda Indonesia, khususnya lulusan *pesantren, madrasah dan sekolah (umum)* memiliki beragam 'bekal', yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (sains-tek) yang pragmatis dan juga sains-religius (sains-rel) yang diharapkan memiliki integritas dan karakter, sebagaimana diharapkan tujuan pembangunan nasional. Karena, tanpa mengedepankan karakter, *akhlakul karimah*, suatu bangsa akan sulit menjadi maju seperti diharapkan, karena negara menjadi maju selalu berkorelasi dengan kekuatan basis karakter dimiliki generasi mudanya.

Fakta sosial memperlihatkan bahwa sebagian generasi muda bangsa ini cenderung menjadi 'korban' globalisasi, yang mengedepankan: pragmatisme, hedonisme, materialisme, dan budaya cepat saji.<sup>18</sup> Pada konteks kenegaraan, kita dihadapkan tingginya angka kemiskinan, angka putus sekolah, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas, dan lain-lain. Sebagian generasi muda terlibat dalam aktivitas dan perilaku negatif, seperti: *konflik antaretnis, konflik bernuansa agama, tawuran, obat terlarang,*

---

<sup>17</sup>Generasi muda dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pandangan: pertama, dalam hal ini generasi muda dimasukkan ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja atau produktif antara 15-40 tahun. Pada 2007, jumlah penduduk dalam kategori generasi muda 40.234.823. Kedua, dari sudut pandang sosial budaya, di mana generasi muda memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili/tempat tinggal, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perkantoran/birokrasi, dan lain-lain. Hal ini juga menggambarkan adanya beragam karakter generasi muda Indonesia. Lihat: (<http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: 22/10/2011)).

<sup>18</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 235.

*pergaulan bebas, kriminal, kebutan-kebutan, hura-hura, dan hedonisme.* Jika, kondisi-kondisi ini terus-menerus terjadi menjadi kebiasaan selanjutnya akan menjadi karakter dan perilaku yang tidak mustahil dapat berdampak buruk bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Beragam persoalan berbangsa saat ini, menurut hemat penulis hanya mungkin dapat diperbaiki oleh individu generasi muda masa depan Indonesia yang memiliki karakter: cerdas, berkualitas, beretika, disiplin, jujur, kerja keras, dan *akhlakul-karimah*

Dalam praktik pendidikan, peserta didik dan pendidik terkesan tidak memiliki kesempatan dan ruang ekspresi kebebasan dalam menempa jati diri masa depan. Kedua subjek pendidikan itu dipaksa menjadi robot untuk menghafal segala rumus bahkan menghafal semua materi pelajaran yang diujikan, termasuk teks-teks kitab rujukan pembelajaran. Mulai dari sekolah tingkat terendah sampai menengah atas, semangat berpikir pragmatis dan instan serta sekadar menghafal tanpa ada ruang menganalisis, menjelma menjadi budaya belajar generasi saat ini. Konsekuensinya, pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan peserta didik aktif mengembangkan potensi diri, baik potensi keagamaan, emosi, moral, dan kreativitas, menjadi gagal. Satu kunci dalam problem pendidikan semacam ini adalah karena ketiadaan aspek pembebasan dalam ruang belajar, atau tiadanya dimensi kemanusiaan dalam pendidikan. Persoalan pendidikan semacam itu berlanjut dengan tumbuhnya generasi yang tidak memiliki nilai-nilai dasar seperti keteguhan dalam berprinsip, solidaritas sosial, dan toleran terhadap perbedaan, karena semua diseragamkan dalam satuan sistem, yaitu eksakta lulus dan tidak lulus, pinter dan bodoh, atau bermutu dan tidak bermutu. Segala hasil dari proses pendidikan hanya diukur berdasarkan skala kuantitatif dan hafalan.<sup>19</sup>

Kecenderungan pola pendidikan itu berimplementasi pada model pergaulan peserta didik yang memasung sekat sosial masing-masing. Komunitas pandai akan bersama dengan orang-orang yang pandai, begitu pun peserta didik yang kurang kemampuan intelektualnya akan

<sup>19</sup> Seperti dikutip dari Muh. Khamdan, "Pendidikan Agama dan Multikulturalisme", diakses pada 28/8/2012.

disisihkan bersama orang-orang yang bodoh lainnya dengan dalih agar lebih mudah dikembangkan tingkat prestasi akademiknya. Dampak psikologis dari pilihan semacam itu adalah anak-anak yang mendendam untuk meruntuhkan sekat sosial yang sengaja memarginalkannya. Tidak heran, jika produk komunitas terpinggirkan itu akan senantiasa menghiiasi forum tawuran pelajar, pemaksaan kehendak, dan penyimpangan sistem sosial lain. Bagi kalangan ini, pendidikan menjelma menjadi media kekecewaan dan arena kesadaran sosial kolektif tentang ketidakadilan yang telah mengekangnya, dan secara tidak langsung tidak menghargai keberadaannya. Ada satu hal yang kiranya sama-sama memiliki andil besar atas terjadinya peristiwa tragis tersebut, yaitu dikembangkannya tradisi pendidikan berupa pendoktrinan materi dan pewarisan budaya, tanpa adanya semangat pembebasan untuk merespons alternatif pemecahan atas problem sosial yang ada.

Kondisi demikian, juga masih terjadi dalam institusi pendidikan Islam, baik di lokalitas Indonesia dan di global di kawasan lainnya. Dalam menghadapi perkembangan zaman, eksistensi pendidikan Islam justru dimanfaatkan untuk menjaga normativitas keagamaan. Peserta didik dipaksa tunduk dalam pasungan kebenaran tunggal dari pendidik. Pola ini melahirkan model kepandaian "menimbun fakta-fakta" dengan menghafalkannya, tanpa sedikitpun diberikan ruang menganalisis atau sekadar merelasikan dengan problem sosial. Akibatnya, stagnansi pemikiran menjurus pada terbangunnya kebenaran secara turun temurun tanpa memiliki ikatan kesesuaian dengan perkembangan zaman. Hanya ada satu jawaban kebenaran sebagaimana diajarkan guru dan yang sesuai dengan kelompoknya sendiri sehingga berhak menyesatkan kelompok lain. Pada akhirnya bangunan keberagaman berupa teologi menjadi problem tradisi di masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak mampu memproduksi optimal dalam menghadirkan perubahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tantangan zaman, karena adanya hegemoni kebenaran dan klaim sepihak sebagai perusak kemurnian agama atau sekularis, manakala berupaya mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan, atau sekadar mempelajari kebenaran di luar kebenaran yang diyakininya. Inilah pentingnya memahami paradigma berpikir yang mampu menghargai

perbedaan dan dapat dijadikan mitra kerja sama ataupun unsur yang dapat dipersatukan dalam wujud multikulturalisme.<sup>20</sup>

Keberbedaan (*diversity*) dalam kehidupan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi pertikaian di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersimbolkan aneka perbedaan. Ironisnya, konflik yang disulut adanya pertentangan agama atau ideologi pemikiran keberagamaan yang masih mendominasi. Mengembangkan paradigma multikulturalisme melalui dunia pendidikan di era sekarang ini, adalah mutlak segera "dilakukan" terutama atas pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati. Pendidikan agama perlu segera menampilkan ajaran agama yang toleran melalui kurikulum pendidikan dengan tujuan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Pendidikan agama *an sich* semacam *fiqih*, *tafsir* tidak harus bersifat tunggal, namun menggunakan pendekatan lainnya. Ini menjadi sangat penting, karena anak akan senantiasa memiliki pilihan sikap yang jelas atas dua pilihan yang berbeda, dan perbedaan yang ada tentu membutuhkan alasan perbedaannya. Misalnya tentang alasan dan cara wudhu yang berbeda, atau bisa juga tentang cara membaca satu kata tafsir namun memiliki makna yang banyak. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial berupa proses interaksi sosial, siswa juga harus diberikan materi pengenalan lintas agama atau ideologi tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antaragama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam.<sup>21</sup>

Kebijakan pemerintah, dikatakan Arisetyanto Nugroho,<sup>22</sup> untuk kembali memprioritaskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk *national character building* generasi muda Indonesia. Pembangunan karakter generasi muda Indonesia ini diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di tengah era globalisasi

<sup>20</sup>Muh. Khamdan, "Pendidikan Agama dan Multikulturalisme", diakses pada 28/8/2012.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Media Indonesia*, 7 November 2011.

dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno, kerap kali mengungkapkan slogan *national character building*. Suksesnya pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa besar, dikatakan Bung Karno, mesti dimulai dengan pembangunan manusianya, yang diistilahkan beliau dengan *man behind the gun*. Selo Soemardjan menyebutnya dengan manusia pembangunan, yang di antara cirinya adalah memiliki watak yang bermoral tinggi.<sup>23</sup>

Parlin dalam M. Abdul Karim (2007) mengungkapkan karakter atau moral bangsa ialah bagaimana sikap, tingkah laku, dan perbuatan suatu bangsa. Moral bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari aneka ragam moral yang ada, baik yang berasal dari adat istiadat secara turun-temurun maupun dari berbagai macam agama yang silih berganti memasuki Indonesia, di antaranya yang lebih menonjol adalah unsur-unsur budaya Islam. Hal tersebut jelas dari bagian barat Kepulauan Nusantara, sedangkan semakin ke timur makin berkurang hingga daerah-daerah di Papua, hampir tidak terlihat.<sup>24</sup>

Proses perkembangan moral bangsa, di samping dipengaruhi moral atau nilai-nilai Islam, juga oleh moral atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari pengembangan budaya kaum Muslim di Indonesia dengan jalan mengisi keinginan masyarakat melalui penggalian secara mendalam atas jiwa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Moral Islam, berfungsi sebagai *filter* yang memberikan seleksi terhadap moral yang ada, dalam arti moral yang bersesuai atau tidak bertentangan

<sup>23</sup>Desire Zuraidah dan Jufrina Rizal (eds.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 35.

<sup>24</sup>Dari lintasan sejarah dapat dikatakan bahwa proses pembinaan moral bangsa di Indonesia dimulai sejak timbulnya cita-cita kemerdekaan, yang terlihat dengan jelas dipengaruhi moral Islam baik pada masa permulaan maupun pada masa timbulnya pergerakan kemerdekaan yang kemudian terpadu dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat-saat bangsa Indonesia mengisi kemerdekaannya. Pada masa Orde Baru, moral bangsa Indonesia diidentifikasi sebagai moral Pancasila. Lihat: (M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007, hlm. 84).

dengan Islam dibiarkan terus berkembang, sementara yang bertentangan disisihkan, diganti dengan moral yang bersesuaian dengan Islam. Terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, moral Islam sangat diperlukan untuk menyeleksi agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan agama Islam, yakni memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.<sup>25</sup> Moral, dalam komunitas Islam, terkenal dengan *al-akhlaq al-karimah*, memuat sekumpulan nilai yang harus dijunjung tinggi.<sup>26</sup> Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah mempertimbangkan secara matang tentang urgensi moral atau *al-akhlaq-al-karimah* dalam kehidupan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam suatu diskusi tentang 'Memelihara Keutuhan Pembangunan Karakter Bangsa: Generasi Muda Indonesia di Tengah Gelombang

<sup>25</sup>Jika ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan tujuan Islam, maka harus dicegah, tetapi apabila bersesuaian harus didukung dan dikembangkan. Perkembangan moral bangsa Indonesia adalah hasil dari proses percampuran budaya, bersifat *penetration pacifique*. Masing-masing moral keagamaan ikut mengisi dalam pembinaan moral bangsa di Indonesia. Karena Indonesia yang mayoritas Islam, maka pengaruh Islam terhadap pembinaan moral bangsa sangat dominan di mana moral Islam dapat menghablur dalam moral bangsa tanpa adanya penekanan dan kekerasan. Untuk memelihara kesatuan bangsa akibat pergolakan moral dari berbagai macam agama, dibentuk konsep yang disebut dengan kerukunan beragama. Dari struktur budaya seperti inilah bangsa Indonesia mendapatkan moral dasar dalam pembentukan kehidupan bermasyarakat yang memiliki ikatan yang kuat, buka saja dalam kehidupan sosial, akan tetapi sangat berguna bagi kehidupan ideologi negara, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan nasional, suatu struktur kemasyarakatan yang memberikan modal dasar bagi terbinanya moral bangsa. Dasar pembinaan moral Islam ini sebagai manifestasi dari bimbingan wahyu, lahir dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Sementara moral yang lain, jiwanya tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu, tetap berkembang dan dibiarkan berkembang sesuai dengan sikap Islam yang terkenal dengan *mura'ah al-'urf*: mengendalikan 'urf, bahkan ada di antara beberapa moral yang merupakan akulturasi di antara Islam dengan budaya-budaya yang berkembang. Kebudayaan Islam telah meresap pada rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 90% beragama Islam dipastikan mewarnai nilai-nilai moral bangsa, sehingga kebudayaan Islam yang merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Lihat: (M. Abdul Karim, "Islam Nusantara", *op.cit.*, hlm. 85).

<sup>26</sup>Dari beragam pendapat pemikir Islam, diketahui bahwa *al-akhlaq-al-karimah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah kumpulan nilai yang pertama mendasari kehidupan manusia bermasyarakat secara religius. Dalam perjalanan sejarah, *al-akhlaq al-karimah*, telah menjadi payung memelihara keutuhan bangsa. Selama moral suatu bangsa masih terpelihara dan dijunjung tinggi, maka bangsa itu dapat berkembang. Sebaliknya, jika moral bangsa sudah diabaikan, maka bangsa itu akan segera hancur menemui kebinasaan. Lihat: (M. Abdul Karim, *op.cit.*, hlm. 183-184).

Globalisasi', di UI, Depok (2007), Meutia Hatta<sup>27</sup> mengatakan berbagai sisi kehidupan manusia selama ini luput dari pembangunan karakter, jiwa dan raga manusia. Sering kali perhatian generasi muda terfokus pada pembangunan ekonomi dan orientasi fisik-material. Dengan karakter demikian, tidak mengherankan jika dikalangan generasi muda tumbuh subur sifat-sifat materialisme, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan perilaku kurang terpuji lainnya. Karakter sebagian generasi muda ini sudah mengabaikan pembangunan kemanusiaan. Karakter sebagai gambaran mentalitas sebagian generasi muda saat ini, sejalan dengan pendapat seorang antropolog terkemuka, Koentjaraningrat, yakni: *pertama*, mentalitas meremehkan mutu; *kedua*, mentalitas suka menerabas; *ketiga*, sifat tidak percaya kepada diri sendiri; *keempat*, sifat tidak berdisiplin murni; dan *kelima*, sifat tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dikatakan Mutia Hatta, menghadapi globalisasi, karakter generasi muda harus lebih meningkatkan.

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orangtua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan. Cerdas dan pintar saja tentunya tidak cukup, tetapi juga diperlukan juga sifat yang pantang menyerah, sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab, memiliki harapan dan motivasi tinggi, peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan berkepribadian baik, *berakhlakul karimah*, agar anak-anak atau generasi muda menjadi tangguh dan mampu meraih impian masa depan yang lebih baik. Karakter anak ideal yang didambakan banyak orangtua antara lain adalah hormat dan berbakti kepada orangtua guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh inisiatif, sehat dan mencintai tanah air. Karakter ini senada dengan karakter anak generasi platinum.<sup>28</sup>

<sup>27</sup><http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: tanggal 22/10/2011).

<sup>28</sup>Generasi platinum yang kadang kala disebut juga generasi Z memiliki karakter khusus, di antaranya: fisik yang sehat dan kuat, kecerdasan *multiple*, percaya diri, optimis, kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi, pantang putus asa, serta berakhlak mulia. Lihat: (Rubrik: "Karakter Anak Ideal untuk Masa Depan", *Kompas*, 4 Desember 2011).

Dalam sebuah buku terbitan *International Association of Character Cities* (2006), karakter (*character*) adalah motivasi batiniah untuk melakukan yang benar berapa pun "harga" yang harus dibayar. Pengertian ini, karakter dikaitkan dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai, moral, atau etika dalam kehidupan. Perbuatan dan nilai-nilai itu sedemikian pentingnya sehingga dirasa mutlak untuk dilakukan dan siap dibayar dengan "harga" berapapun. Karakter terkait dengan upaya mengembangkan kualitas, seperti: kejujuran, kesabaran, kesetiaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa karakter itu harus dimulai dari berbagai nilai-nilai moral yang ada dalam pikiran dan hati seorang, kemudian nilai-nilai itu kita wujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Berikutnya, tindakan itu kita lakukan secara terus sehingga menjadi kebiasaan, serta dari kebiasaan itulah terbangun karakter. Hasilnya, karakter yang terbangun dapat mengarahkan upaya seorang dalam mencapai tujuan hidup.<sup>29</sup>

Alford dalam Supiana (2011), mengatakan, ada istilah yang pengertiannya hampir sama dengan karakter, yakni *personality characteristic* yang memiliki arti: bakat, kemampuan, sifat, dan lain sebagainya yang secara konsisten diperagakan oleh seorang, seperti pola perilaku, sifat-sifat fisis dan ciri-ciri kepribadian. *Trait* merupakan kecenderungan untuk memberi respons kepada berbagai tipe stimulus dalam cara yang sama. *Personality* merupakan sifat dan perilaku khas seorang yang membedakannya dengan orang lain; integrasi karakteristik dan struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang; dan segala sesuatu tentang diri seorang seperti diketahui oleh orang lain. *Habit* merupakan perilaku yang diperoleh dan dimanifestasikan secara konsisten; tindakan yang telah dipelajari dan menjadi mapan serta relatif otomatis melalui pengulangan terus-menerus. Dalam Bahasa Arab, *character*, diartikan *khuluq*, *sajiyah*, *thab'u* artinya budi pekerti, *tabiat* atau *watak*.<sup>30</sup>

<sup>29</sup><http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-tv> (22/10/2011).

<sup>30</sup>Seperti dikutip Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam", *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 5.

Yusuf al-Qardhawi mengkalifikasikan *akhlaq* menjadi tujuh kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam kehidupan Muslim: *akhlaq* berhubungan dengan diri-sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (*animal world*); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*).<sup>31</sup> *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (*a plural world*) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau “*a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation*”. Banyak ilmuwan terkenal Muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Razi, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. ‘*Ilm-al-akhlaq* (*knowledge of moral values*) merupakan komponen mayor daripada *Islamic Studies* pada semua level pendidikan Islam, di samping komponen lainnya, seperti ‘*Ilm al-Fiqh*.<sup>32</sup>

*Karakter*, dengan demikian, merupakan kumpulan dari beragam aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. *Karakter* merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karena itu, dikatakan Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa *character education* sebagai *pendidikan akhlak*.<sup>33</sup> Sifat-sifat yang ada dalam diri seorang itu, terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang memengaruhinya. Pendidikan, dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

Dengan demikian, *karakter* merupakan kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (*fitrah* atau *nature*) dan

---

<sup>31</sup>Yusuf al-Qardawi dalam kutipan J. Mark Halstead, “Islamic Values: a distinctive framework for moral education” *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, hlm. 285.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 285.

<sup>33</sup>Supiana, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam...”, *op.cit.*, hlm. 6.

lingkungan (sosialisasi atau lingkungan, *nurture*). Potensi karakter yang baik dimiliki seorang sebelum dilahirkan harus terus-menerus dikembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan. Garbarino dan Brofenbrenner (Vasta, 1992) mengatakan jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, perlu memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang adil dan tidak adil, dan apa yang patut dan tidak patut.

Memahami “aturan main” atau “aturan sosial” dalam kehidupan dan menginternalisasikannya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orangtua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, *antre*, mematuhi aturan lalu lintas, mandiri, jujur, toleran, disiplin, tepat janji, dan sejenisnya, merupakan pemahaman yang baik anak didik terhadap “aturan sosial” sebagai hasil dari perkembangan kualitas moral dan mental seorang anak didik yang disebut *karakter (character)*.

Tentu saja kebiasaan baik atau buruk pada diri seseorang anak didik dan generasi muda— yang mengindikasikan kualitas karakter ini – tidak terjadi dengan sendirinya. Selain faktor *nature*, faktor *nurture* juga berpengaruh. Lebih jauh, *proses sosialisasi atau pendidikan* dalam proses pembentukan karakter anak didik, setidaknya, terletak pada peranan: *orang tua/keluarga, institusi pendidikan, dan negara/pemerintah*.

Dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan (karakter) pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orangtua pada anaknya. *Pola asuh* dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orangtua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Baumrind mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu pola asuh: *democratic; authoritative; dan permissive*.<sup>34</sup> Keluarga memiliki peranan terdepan dalam memberikan

<sup>34</sup>*Pola asuh permisif* yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana

kebiasaan-kebiasaan, keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama.

Djaka Datuk Sati mengungkapkan, psikologi kepribadian mengidentifikasi, bahwa unsur kepribadian meliputi temperamen dan watak (*character*). Temperamen terbentuk dari komposisi kimiawi (cairan) dalam tubuh, dan bersifat tetap. Sebaliknya, watak merupakan unsur bentukan.<sup>35</sup> Sama halnya dengan pandangan Gilbert Highest (1969), bahwa 90% dari kebiasaan anak dibentuk oleh keluarga, di mana proses pembentukannya berlangsung sejak dari bangun tidur hingga anak kembali ke tempat tidur.<sup>36</sup>

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar atau pertama dan utama. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, sehingga Rasulullah Saw. menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah: "*Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tanggung jawab kedua orangtuanyalah yang bakal menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi*".<sup>37</sup> Al-Ghazali, dalam hal ini, mengungkapkan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas

---

pun anak tetap memerlukan arahan dari orangtua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab. Orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggung jawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Arkoff dalam (Badingah, 1993), mengatakan bahwa anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara otoriter atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan. Anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

<sup>35</sup>Dikutip Jalaluddin, "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 187.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>37</sup>*Ibid.*

putih), di mana orangtua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orangtualah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya di kemudian hari.<sup>38</sup>

Antara peran keluarga/orangtua dan pengembangan karakter pribadi anak didik tidak dapat dipisahkan. Jika, anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap kemajuan bangsa ini. Haryatmoko (2010)<sup>39</sup> menulis bahwa integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam organisasi. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi (pribadi berkarakter) itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya: akuntabilitas dan transparansi

Pendidikan Islam, merupakan suatu institusi pendidikan bersifat artifisial. Keberadaannya, dilaksanakan karena kebutuhan, sebagai petunjuk peran pendidikan keluarga. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab keluarga dalam meneruskan watak anak didik. Fokus pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan (formal) adalah penanaman nilai-nilai fitri manusia, yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian sebagai faktor bawaan manusia. Nilai tersebut mengacu kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia senang

<sup>38</sup>Hamid Reza Alavi, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007, hlm. 283-296.

<sup>39</sup>Kini, di Indonesia, etika publik menjadi isu penting. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik. Ada yang menafsirkan hanya sekadar etiket bermasyarakat, dan ada juga berpandangan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika. Etika publik mulai serius dibahas setelah kasus *Watergate*. Kasus itu mendorong pengesahan *The Ethics in Government Act of 1978*. Sejak itu, orang mulai menggunakan istilah *etika publik* bukan *etika pemerintahan* karena fokus pada pelayanan publik. Etika publik menekankan tidak hanya kode etik atau norma, tetapi juga dimensi refleksinya. Etika publik membantu dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Maka, fokus ditujukan kepada modalitas etika, yakni bagaimana menjembatani jurang antara *norma moral* (apa yang semestinya dilakukan) dan *tindakan faktual*. Keprihatinan etika publik pada modalitas membedakan diri dengan ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain. Lihat: (Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. ix-x).

dengan yang benar dan benci yang salah, senang hal yang baik dan benci yang buruk, serta senang yang indah dan benci yang jelek.<sup>40</sup>

Di Amerika Serikat dikenal dengan adanya sistem pendidikan untuk dua tahun pertama S1 dengan sistem yang dinamakan *Liberal Arts Education*. Sistem ini berusaha mendidik seorang memiliki kapasitas pribadi yang dapat dikembangkan secara dinamis untuk menghadapi situasi yang berbeda sejak dini. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menjadikan mahasiswa terdidik atau "*educated*" dalam bahasa Arab disebut "*mutsaqqof*". Di Amerika Serikat sendiri mata kuliah "*literature*" misalnya dirancang untuk membangkitkan "daya hidup", etos kerja, dan semangat belajar mahasiswa dengan menganalisis daya juang para tokoh serta ungkapan-ungkapan bijak dan "*literature*" mereka. Sayangnya, sistem tersebut cenderung menafikan peranan pemilik sumber daya dan potensi yang maha agung (*transcendental epistemology*), di mana ada daya manusia yang agak tereduksi, yakni *daya kalbu*.<sup>41</sup>

Empat daya utama (*daya fisik, daya pikir, daya qalbu, dan daya hidup*) menghasilkan ratusan atau ribuan daya dalam diri manusia. Itu sebabnya ada sebuah hadis yang mengatakan: *Inna al-Laha khalaqa Adam 'ala suratihi* ("Allah menciptakan Adam sesuai dengan peta-Nya"). Dalam pengertian, dia diberi potensi untuk berkemampuan yang dahsyat dengan cara meneladani

---

<sup>40</sup>Jalaluddin, *op.cit.*, hlm. 189.

<sup>41</sup>Dalam literatur-literatur Islam, sumber daya manusia (SDM) dikenal dengan empat sumber daya minimal yang ada pada diri manusia yang dapat dikembangkan, yakni daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup (semangat). Menurut Al-Qur'an, manusia diciptakan dari debu-tanah dan roh. Tanah itu diolah sehingga melahirkan sosok manusia menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan roh Ilahi kepadanya: "*fa iza sawwaituhu wanafakhtu fih min faqa'uu lahu saajidin*" ("kalau sudah sempurna kejadiannya dan ditiupkan roh kepadanya, maka wahai malaikat sujudlah"). Debu-tanah itulah yang menjadikan manusia memiliki fisik. Itulah sebabnya kalau manusia meninggal dikembalikan ke tanah dan dia bercampur dengan tanah. Ada juga unsur lain, yakni roh. roh memiliki tiga: *sisi pikir manusia*; *sisi kalbu* yang membuat mereka mengenali Tuhannya dan dapat memberi manfaat sesamanya; dan *sisi daya hidup*, yang membuat mereka jadi kreatif, inovatif, dan produktif. Daya *qalbu* jika diasah bisa mengantar seorang berhubungan dengan potensi Tuhan, bisa mengantar seorang memiliki indra keenam, bisa menghasilkan suatu aktivitas, suatu kegiatan di mana orang lain tidak percaya bahwa itu dapat terjadi. Lihat: (Azhar Arsyad, Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi", *Makalah the Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011, hlm. 6).

sifat-sifat (daya) Tuhan: *Takhalaq bi Akhlaqillah* ("berakhlaklah dengan akhlak Allah"). Di sinilah, timbul pikiran bagaimana menerapkan sistem yang *compatible* dengan *liberal arts education* yang sesuai dengan pengembangan empat sumber daya manusia menurut tuntunan Islam. Bertalian dengan usaha menuju keunggulan dalam bidang akademik dan karakter yang agung, perlu dimulai dengan minimal, melakukan pengembangan *daya qalbu, akhlak, dan daya hidup*.<sup>42</sup>

Dalam tataran aplikasinya, Institusi pendidikan dasar (SLTP/MTs) memiliki peran penting dalam pembentukan sistem nilai melalui tata-tertib yang ketat. Penekanan terhadap ketertiban merupakan "siasat" supaya anak didik terbiasa terhadap sikap yang diharapkan. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya sifat disiplin, jujur, tanggung jawab, adil, dan cinta kebenaran, yang tertanam dalam diri anak didik. Pendidikan formal pada level menengah (SLTA/MA), berada pada usia remaja (*prepubertas*). Periode perkembangan ini, dikatakan William Starbuck ditandai dengan karakteristik tertentu, yang meliputi: perkembangan berpikir rasional, etika, estetika, sosial, minat, dan agama. Peran institusi pendidikan pada level ini, adalah memberi bimbingan agar potensi mental spiritual anak didik dapat berkembang dengan optimal. Pada level perguruan tinggi di mana mahasiswa berada pada tahap *adolescence*. Pada tahap perkembangan ini, mahasiswa akan mengalami masa krisis yang ditandai gejolak batin, dan kelihatan ragu dalam menentukan sikap. Hal ini merupakan proses *natural* dalam perjalanan menuju ke pembentukan kepribadian yang mantap.<sup>43</sup>

Al-Ghazali<sup>44</sup> mengatakan bahwa seorang guru/pendidik memiliki

<sup>42</sup>Azhar Arsyad, "Strategi dan Implementasi...", *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>43</sup>Bandingkan dengan Jalaluddin: ("Peranan Lembaga Pendidikan...", *op.cit.*, hlm. 190).

<sup>44</sup>Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidik memiliki pengaruh yang maksimal dalam pengembangan moral anak didik. Pada periode infansi (*infancy*), anak-anak ingin diasumsikan dan menyenangkan mainan dan aktivitas praktik. Pada periode anak-anak (*childhood*) mereka lebih ditarik oleh penampilan luar (*fascinated by external appearances*); sebagai remaja (*adolescents*) mereka mengembangkan pesatnya pertumbuhan, mereka mungkin memperoleh dominasi pikiran-pikiran (mereka) oleh imajinasi-imajinasi seksual. Sebagai orang dewasa muda (*young adults*) mereka menunjukkan untuk posisi tanggung jawab, kekuasaan (*power*) dan kepemimpinan (*leadership*). Tetapi, sebelum umur 40 tahun, mereka menjadi lebih spiritual, lebih menyadari terhadap

Antara pendidikan dan peranan negara/pemerintah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index/HDI* adalah alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (*man power*) atau SDM satu negara, yang diukur yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI itulah yang menjadi dasar klasifikasi sebuah negara menjadi negara maju (*developed country*), negara berkembang (*developing country*), dan negara terkebelakang (*under developing country*).

Pada 2011, Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melorot tajam, yakni berada pada peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia turun drastis, di mana sebelumnya, pada 2010, berada di posisi 108 dari 169 negara. Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Development Program/UNDP*) merilis IPM tersebut, di mana dalam Laporan UNDP 2011, IPM Indonesia hanya 0,617 atau berada di peringkat kelima di ASEAN. Ironisnya, IPM Indonesia justru melorot di bidang pendidikan, padahal di bidang itulah yang memperoleh alokasi dana terbesar dari APBN. Dalam APBN 2011, tercatat Rp 246 triliun (20%) dari total belanja negara Rp 1.229,6 triliun dialokasikan untuk pendidikan.<sup>50</sup>

Jepang dan Cina merupakan negara yang aktif dan agresif dalam pengembangan sumber daya manusia generasi mudanya. Bangsa Indonesia juga memiliki tantangan untuk unggul bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia. IPM Indonesia pada 2010 menempatkan pada peringkat 108. Tetapi, peringkat itu masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia (peringkat 57), Thailand (peringkat 92), dan Filipina (peringkat 97).<sup>51</sup>

---

dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008).

<sup>50</sup>IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang Singapura yang berada pada peringkat 26 dari 187 negara dengan angka indeks 0,866. Brunei berada di urutan 33 (0,838), disusul Malaysia di urutan 61 (0,761), Thailand di urutan 103 (0,682), dan Filipina di urutan 112 (0,644). Posisi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di urutan 128 (0,583), Laos di urutan 138 (0,524), Kamboja di urutan 139 (0,523), dan Myanmar di urutan 149 (0,483). Lihat: (*Media Indonesia*, 4 November 2011).

<sup>51</sup>*Media Indonesia*, 7 November 2011.

Hal itu sungguh ironis karena Malaysia melakukan akselerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan sejak era 1970-an dengan program *affirmative actions*, di mana mereka pernah berguru dengan Indonesia. Ketika itu mereka mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar ke Indonesia. Sejumlah pendidik (guru dan dosen) juga mengajar di Malaysia. Hal ini merupakan upaya bangsa Jiran itu untuk menciptakan daya saing generasi muda yang kompetitif pada masa depan.

Agung Laksono<sup>52</sup>, Menkokesra, mengungkapkan bahwa UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Pada *Laporan IPM* kali ini, lembaga tersebut mencatat rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, yakni hanya 5,8 tahun (tidak lulus SD). Meski IPM Indonesia melorot, dikatakan Agung, penurunan tersebut hanya untuk bidang pendidikan, sementara untuk dua bidang lainnya: kesehatan dan kesejahteraan ekonomi/pendapatan per kapita, mengalami kemajuan. UNDP mencatat angka per kapita Indonesia pada 2011 mencapai USD 3.716 yang dihitung dari 243,3 juta penduduk, atau pendapatan per kapita naik 180% dari IPM sebelumnya. Pemerintah akan melakukan sejumlah pembenahan kebijakan pendidikan, antara lain: penaikan cakupan biaya operasional sekolah lewat dana bantuan operasional (BOS), yang tadinya hanya mengkaver 70% kebutuhan menjadi 100%, pada tahun depan.

Sementara itu, penduduk bekerja di Indonesia, masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang dengan jumlah penduduk bekerja 109,7 juta orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja itu, pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah mendominasi dengan jumlah 54,2 juta orang (49,4%). Di sisi lain, pekerja dengan pendidikan sarjana hanya 5,6 juta orang atau 5,15%. Hal ini, tampak bahwa hampir separuh pekerja berlatar belakang SD dan tidak tamat SD. Dalam hal pengangguran, pada Agustus 2011, mencapai 7,7 juta orang, atau turun 420 ribu dari jumlah pengangguran pada Februari 2011 sebesar 8,12 juta orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya, pengangguran lebih banyak berlatar belakang SMA

<sup>52</sup>Media Indonesia, 4 November 2011.

(10,66%), SMK (10,43%), SD/Tidak tamat SD (3,56%), SMP (8,37%), Diploma(8,37%), dan Sarjana (8,02%).<sup>53</sup>

Banyak lulusan SMK yang menjadi penganggur, yang sebetulnya mereka memiliki keterampilan khusus tetapi tidak terserap dalam lapangan kerja. Suatu hal yang patut menjadi bahan introspeksi bagi dunia pendidikan, terutama bertalian dengan urgensi evaluasi, inovasi, dan aktualisasi kurikulum SMK.

Pertumbuhan dan pembinaan karakter generasi muda, dan justru paling strategis, terletak pada kebijakan negara/pemerintah. IPM meningkat idealnya akan memperbaiki proses pembinaan karakter generasi muda suatu bangsa. Sama halnya, optimalisasi, keseriusan, dan konsistensi peran pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan pembangunan, dengan merujuk dimensi IPM (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi), akan sangat mungkin dapat meningkatkan IPM dan juga kualitas pembangunan karakter generasi muda Indonesia yang lebih baik. Karena, jika dimensi-dimensi IPM ini meningkat, proses pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda diharapkan akan lebih baik seperti diharapkan, dan pada akhirnya, diharapkan dapat mereduksi beragam permasalahan sosial berbangsa, dan juga dapat menguatkan *national character building*.

Bertolak dari berbagai krisis sosial berbangsa, sejak memasuki era-Reformasi 1998, Indonesia telah mendorong pentingnya membangun karakter generasi muda, sebagai upaya membangun integrasi sosial dan memperkuat integrasi bangsa. Institusi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional, memiliki peranan strategis dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang mampu beradaptasi dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan teknologi dan beradaptasi dalam perilaku sosial di tengah masyarakat yang majemuk atau *cultural pluralism*.

Berbagai upaya optimalisasi kegiatan akademik di madrasah/sekolah; dan program perkuliahan di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU), diharapkan dapat menciptakan anak didik dan mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang sains-

---

<sup>53</sup>Media Indonesia, 8 November 2011.

teknologi (sains-tek) tetapi juga unggul dalam sains-religius (sains-ref), sebagai 'cita-cita' tujuan pembangunan nasional. Proses pembelajaran dan perkuliahan yang berkualitas, karenanya, sudah esensia dilaksanakan dan dioptimalkan. Dari *output* 'pendidikan Islam' yang berkualitas itu akan menghasilkan para individu yang berkarakter yang menghargai perbedaan atau "toleran" terhadap masyarakat *cultural pluralism*. Sehingga, 'pendidikan Islam', diharapkan dapat memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa.

# Bab 8

## ABAD KE-21 DAN ORIENTASI PENDIDIKAN NASIONAL

Pada era global, pendidikan berperan strategis dalam menentukan posisi sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan menghantarkan suatu bangsa pada kemajuan. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei.<sup>1</sup> Peningkatan kualitas pendidikan perlu segera diupayakan agar bangsa ini tidak semakin tertinggal. Maka, peningkatan mutu pendidikan perlu ditinjau dari berbagai aspek demi tercapainya sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Salah satu perspektif yang perlu kita perhatikan dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang ideal dan sesuai dengan karakter bangsa adalah perspektif sosiologi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kompas, 3 Maret 2011.

<sup>2</sup>Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas pendidikan baik dari lingkup keluarga, kehidupan sosio-kultur masyarakat maupun pada tingkat nasional. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah gambaran objektif tentang relasi-relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di negara kita. Maka, segala bentuk wawasan dan pengetahuan sosiologis untuk membedah tubuh pendidikan menjadi perlu untuk dibahas agar proses-proses pengajaran tidak bias ke arah yang

Bernard T. Adeney menuturkan bahwa kebudayaan modern dan post-modern berdampak pada perubahan sosial dalam berbagai sendi kehidupan dengan arus kecepatan yang deras. Perubahan itu, dipicu oleh pertukaran informasi pada setiap detiknya oleh cybermedia, televisi, radio dan media lainnya. Media-media informasi itu mengaburkan batas-batas fisik dan budaya –oleh Arjun Appadurai disebut ‘deteritorialisasi’ sehingga menciptakan dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Irwan Abdullah mengatakan proses ‘deteritorialisasi’ ini merupakan suatu proses krusial dikarenakan sebagai titik balik peradaban kontemporer memiliki implikasi yang luas dalam beragam proses sosial dan budaya. Implikasi positif atau negatif dapat terjadi dalam proses sosial dan budaya itu, yang dimulai dari cara berpikir dan cara memandang dunia. Upaya-upaya menduniakan nilai-nilai luhur Melayu menjadi penting sebagai penyeimbang ide dan gagasan dari luar dunia Melayu yang cenderung destruktif.<sup>3</sup>

Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas pendidikan baik dari lingkup keluarga, kehidupan sosio-kultur masyarakat maupun pada tingkat nasional. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah deskripsi objektif tentang relasi-relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di suatu negara. Maka, segala bentuk wawasan dan pengetahuan sosiologis untuk membedah tubuh pendidikan menjadi perlu untuk dibahas agar proses-proses pengajaran tidak bias ke arah yang kurang relevan dengan kebutuhan bangsa.

Sosiolog Emile Durkheim memandang pendidikan sebagai “*social thing*” atau disebut juga dengan ikhtiar sosial. Menurut Durkheim, masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan sosial di dalamnya merupakan sumber cita-cita yang dilaksanakan lembaga

---

kurang relevan dengan kebutuhan bangsa. Lihat: (Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan, S2/S3 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang*, 2014).

<sup>3</sup>Mahyudin Al Mudra, ‘Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Kemelayuan Dua Bangsa Serumpun’, *Melayu Online.com* (diakses, 27/9/2014).

pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat tingkat homogenitas yang memadai di kalangan warganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini di kalangan anak-anak. Tetapi, di balik itu, suatu kerja sama apa pun tentunya tidak mungkin tanpa adanya keanekaragaman. Keanekaragaman yang penting tersebut, oleh pendidikan dijamin dengan pelaksanaan pendidikan yang beraneka ragam, baik dalam jenjang maupun spesialisasinya. Berawal dari pandangannya bahwa pendidikan sebagai "*social thing*", Durkheim mengungkapkan bahwa pendidikan itu bukanlah satu bentuk, dalam arti ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Seberapa banyak macam yang dimaksud, mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, akan menentukan tipe-tipe pendidikan yang diselenggarakan.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial (*the individual self, and the social self, the I and the We, or homoduplex*) menjadi paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Penyelaman dan pencernaan nilai-nilai dan disiplin oleh Durkheim dianggap sebagai syarat inisiasi anak terhadap masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tumbuh kembang masyarakat. Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan di tengah masyarakat yang memiliki tata nilai tertentu. Persiapan itu diperlukan karena pemuda pada dasarnya belum siap memasuki kehidupan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah mengembangkan kekuatan fisik, intelektual, dan moral yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat. Pendidikan dipersepsikan oleh Durkheim sebagai satu kesatuan utuh dari masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan sebagai dasar masyarakat menentukan proses alokasi dan distribusi sumber-sumber perubahan. Pendidikan juga berfungsi sebagai "*baby sitting*" yang bertugas agar warga masyarakat tidak ada yang memiliki perilaku menyimpang. Untuk mengemas pendidikan

---

<sup>4</sup>Abdullah Idi, Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan, S2/S3 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2014.

agar menjalankan fungsi tadi harus ditetapkan prioritas yang tepat. Pendidikan harus bisa memaksimalkan bakat siswa. Pendidikan juga harus didekatkan pada masyarakat luas.

Mengenai perencanaan pendidikan, Durkheim memandang pentingnya orientasi pendidikan sebagai upaya penyediaan *human capital* (modal sumber daya manusia). Pendidikan merupakan sebuah investasi. Dalam tataran pembelajaran, desain pembelajaran diatur menganut prinsip 'bank konsep' di mana sekolah/guru berperan sebagai 'deposan', sementara murid sebagai 'penerima uang deposan'. Durkheim melihat bahwa pada masing-masing masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam memilih format pendidikan. Masyarakat dan pendidikan saling berinteraksi dan saling memberikan pengaruh. Pendidikan selalu berkaitan erat dengan institusi yang lain. Pendidikan selalu ditumbuhkembangkan berdasar nilai-nilai kolektif dan keyakinan suatu masyarakat. Sehingga moralitas umum harus masuk dalam kurikulum dan guru harus memiliki komitmen untuk mentransformasikannya kepada siswa di sekolah, dengan memulai dari guru itu sendiri. Secara tegas Durkheim menyatakan bahwa suatu keharusan, dunia pendidikan melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan arus deras transformasi yang berlangsung dalam perkembangan masyarakat modern. Ia menyimpulkan, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada pendekatan sosiologi bagi para guru.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, menurut Durkheim, pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) *Memperkuat solidaritas sosial*. Membuat individu merasa menjadi bagian dari kelompok dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan. (2) *Mempertahankan peranan sosial*. Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mempunyai hierarki, aturan, tuntutan yang sama dengan "dunia luar". Sekolah mendidik orang muda memenuhi berbagai peranan; (3) *Mempertahankan pembagian kerja*. Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan. Mengajar siswa untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

Perspektif sosiologi sebagai pisau bedah dalam menganalisis pendidikan sangat bermanfaat bagi perbaikan berbagai permasalahan pendidikan yang kini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Kajian dan analisis terhadap keterkaitan fenomena sosial dalam proses pendidikan penting untuk diketahui, diinformasikan dan digunakan dalam pengambilan keputusan, kebijakan maupun strategi dalam praktik pendidikan terkait dengan fungsi sosiologi pendidikan, yaitu menyediakan visi, pemahaman dan kemampuan terhadap proses pendidikan, dan kemampuan bekerja dalam pendidikan dengan memanfaatkan dinamika struktural dan proses sosial terkait dengan proses pendidikan, dikarenakan kehidupan sosial baik dalam maupun luar lembaga pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap proses dan hasil-hasil pendidikan.

Adanya sosiologi pendidikan bisa membantu memberi bahan yang berharga dalam rangka melihat proses pendidikan dengan berbagai masalah dan implikasi yang ditimbulkan. Dalam hal ini sosiologi membantu meningkatkan kepekaan dalam melihat nilai-nilai, institusi, budaya, dan kecenderungan yang ada di masyarakat. Sosiologi pendidikan juga memberi jalan kepekaan untuk melihat nilai-nilai, institusi, budaya, dan kecenderungan lainnya yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Selain itu, sosiologi pendidikan dapat membantu memahami perencanaan, proses implementasi, dan implikasi penerapan program mana pun kebijakan pendidikan tertentu.

Pengembangan pendidikan seharusnya dilandasi konsep dan teori sosial, alasannya; *pertama*, pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan itu. *Kedua*, praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Dan alasan yang *ketiga*, adalah pendidikan memerlukan perangkat pisau analisis sosiologis, karena ia bukan sekadar mesin atau teknologi pembelajaran *an sich*. Dengan bantuan perspektif sosiologis, sekolah dan guru akan dapat memahami lingkungan sosial, proses-proses sosial seperti terjadinya konflik, integrasi, pelapisan dan proses sosialisasi. Sosiologi akan membantu meningkatkan

kepekaan budaya sehingga memungkinkan praktisi pendidikan mampu mengelola pembelajaran berbasis multikultural, melakukan antisipasi terhadap dampak budaya global.

Ke depan, karenanya, keberadaan pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi 'motivator' dan 'lokomotif' terhadap perubahan sosial yang lebih baik. Dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 3 dikatakan:

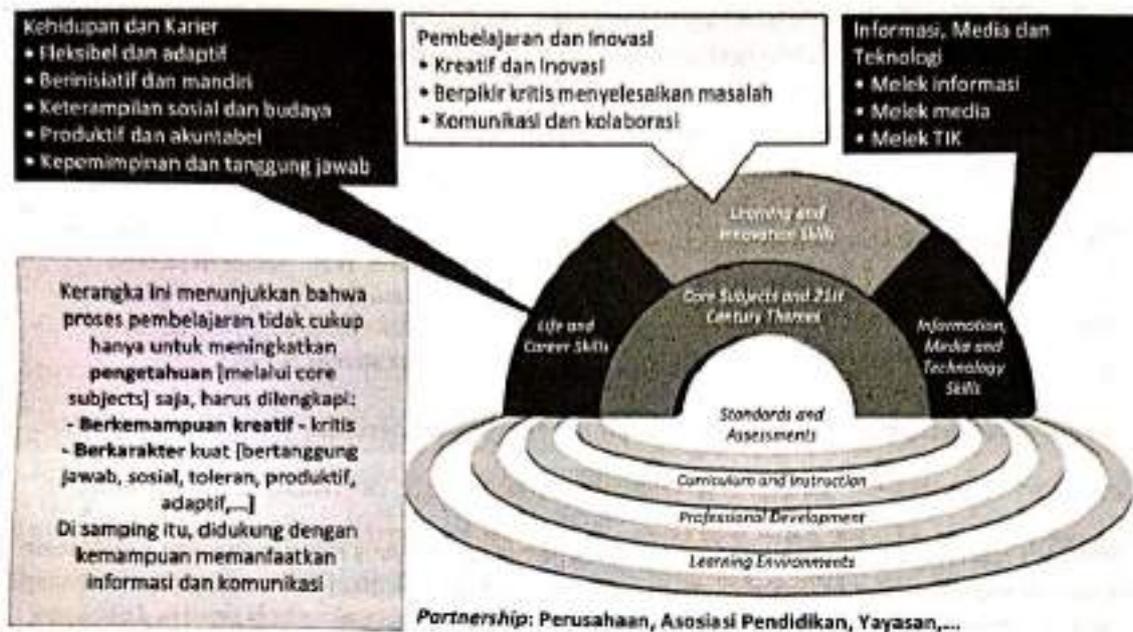
'Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab'.<sup>7</sup>

Dalam UU Sisdiknas di atas, tampak bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai salah satu faktor perubahan sosial atau pengembangan potensi/kompetensi peserta didik. Perubahan-perubahan tersebut adalah: (1) pengembangan kemampuan (baik intelektual maupun interaksi sosial); (2) pembentukan watak; (3) pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat di mata bangsa lain; (4) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tantangan ke depan bagi suatu masyarakat dan bangsa, tentunya, akan semakin lebih kompleks. Setiap zaman memiliki tantangan berbeda bagi masyarakatnya. Pada abad ke-21, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan ditentukan dari proses pembelajaran yang tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan; tetapi perlu dilengkapi pembelajaran dan inovasi; dan adanya informasi, media serta teknologi. Seperti terlihat pada Gambar<sup>8</sup> 8.1.

<sup>7</sup>UU Guru dan Dosen dan UU Sisdiknas, 2006.

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.



Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008

**Gambar 8.1** Kerangka Kompetensi Abad ke-21

Ke depan, diperlukan proses pembelajaran yang merespons pentingnya kreativitas. Artinya, bahwa keberhasilan anak didik nantinya dalam kehidupan di era global, tidak hanya ditentukan pentingnya pengembangan dan optimalisasi intelektual, tetapi juga mengembangkan bakat, minat, dan potensi terhadap kreativitas. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang mendukung kreativitas menjadi orientasi penting dalam pembelajaran di sekolah, karena 2/3 kemampuan kreativitas anak didik diperoleh melalui pendidikan; sementara itu, kemampuan inteligensia sekitar 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Lebih lanjut, dapat dilihat pada Gambar<sup>9</sup> 8.2.

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

Dyers, J.H. et al [2011], Innovators DNA, Harvard Business Review:

- 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik.

- Kebalikannya berlaku untuk kemampuan Inteligensia yaitu: 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik.

- Kemampuan kreativitas diperoleh melalui:

- *Observing* [mengamati]
- *Questioning* [menanya]
- *Associating* [menalar]
- *Experimenting* [mencoba]
- *Networking* [membentuk jejaring]

Personal

Pembelajaran berbasis inteligensia tidak akan memberikan hasil signifikan (hanya peningkatan 50%) dibanding yang berbasis kreativitas (sampai 20%)

Inter-personal

Perlunya merumuskan kurikulum berbasis proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar dan mencoba [observation based learning] untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di samping itu, dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan melalui *collaborative learning*.

### Gambar 8.2 Proses Pembelajaran yang Mendukung Kreativitas

Melihat nilai-nilai perubahan sosial yang terangkum dalam fungsi pendidikan nasional, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan nasional di tengah kehidupan global, pada abad ke-21 ini, memiliki muatan nilai sebagai 'motivator' dan 'lokomotif' terjadinya perubahan sosial, khususnya dalam hal pengembangan potensi/kompetensi peserta didik sebagai salah satu bagian dari sistem sosial. Sebagaimana pandangan pendidikan transformatif bahwa individu bukanlah sebagai suatu *entity* yang telah jadi, tetapi yang sedang menjadi. Individu mempunyai peran emansipatif di dalam kehidupan sosial budaya, termasuk melalui proses pendidikan dalam lingkungan keluarga (*batih*) dan sekolah/madrasah. Di dalamnya peranannya yang emansipatif tersebut, maka individu bukan hanya sebagai 'objek' dari perubahan sosial, tetapi sekaligus pula berperan sebagai faktor 'subjek', pengubah dan pengarah dari perubahan sosial.

Jika fungsi pendidikan nasional memang dapat menjadi 'motivator' dan 'lokomotif' perubahan sosial, khususnya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ke depan, seharusnya, bangsa ini harus mulai lepas dari 'predikat' sebagai salah satu negara terkorup di dunia, berbagai jenis kejahatan yang merajalela, pelanggaran etika lingkungan di mana-mana. Tidak ada pilihan bangsa maju, mandiri, dan bermartabat, maka fungsi pendidikan nasional haruslah benar-benar diprioritaskan dalam proses pembangunan agar dapat menjadi 'motivator' dan 'lokomotif' perubahan sosial yang lebih baik, maju, berperadaban dengan nilai-nilai keagamaan, dan moral/akhlak mulia, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Jika begitu adanya, jika harus memilih antara 'kekayaan' sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*human resources*), haruslah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kebijakan prioritas dalam proses pembangunan nasional. Untuk 'hijrah' dari negara terbelakang (*underdeveloping country*) atau negara sedang berkembang (*developing country*) menuju negara maju (*developed country*), bukanlah perkara sederhana, tetapi perlu adanya keberpihakan nyata dari pihak otoritas dalam membangun SDM melalui kebijakan pendidikan nasional. Hal yang sama dilakukan sejumlah negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan, yang telah memperlihatkan banyak hal mengalami kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, serta berbagai sendi kehidupan lainnya. Ada korelasi positif antara keunggulan SDM dengan kemajuan suatu bangsa. Jika bangsa Indonesia ingin menjadi suatu negara maju dan berkiprah luas di era global, kualitas SDM menjadi prioritas. Karenanya, 'investasi' pendidikan merupakan pilihan mutlak bagi kebijakan pembangunan dalam upaya menuju negara yang kompetitif dengan negara lainnya.

Dengan prerioritas pembangunan pendidikan, Indonesia akan memiliki peluang menjadi negara maju, kompetitif, dan berkiprah di era global. Hal ini didukung dengan adanya "bonus" demografi, yakni berupa banyaknya penduduk usia produktif di negeri ini. Tetapi, fakta sosial memperlihatkan bahwa potensi besar yang membutuhkan generasi muda terdidik itu masih banyak menghadapi banyak persoalan krusial, di antaranya kualitas pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia. Permasalahan ini seperti dalam suatu

seminar bertajuk: "*Pendidikan Indonesia: Harapan dan Konyataan*" di SMA Kolese Gonzaga, Jakarta, 5 Mei 2012. Anita Lie, salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa belum ada kesejajaran tujuan politis dengan tujuan pembangunan. Lie, mengatakan "anggaran pendidikan besar tetapi indikator pencapaian pendidikan di Indonesia masih rendah". Mengutip Bank Dunia, Lie mengatakan:

Rata-rata lama bersekolah di Indonesia masih 8,0 tahun untuk laki-laki dan 7,5 tahun untuk perempuan. Secara gamblang data ini menunjukkan kegagalan program wajib belajar sembilan tahun yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam waktu dekat segera akan muncul isu populer wajib belajar 12 tahun. Ini bisa menguntungkan kepentingan politik pemerintah sekarang saja.<sup>10</sup>

Sonny Harry B. Harmadhi, Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya, pembangunan penduduk, terutama mereka yang berusia muda atau usia remaja masih belum diperhatikan dengan optimal. Fokus pembinaan remaja masih diserahkan ke sekolah. Padahal tidak semua remaja bisa mengakses sekolah formal. Hal ini terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). APM SLTP pada 2009-2010 mencapai 74,25%, dan SLTA 55,75%. Energi yang dimiliki remaja besar, tetapi tidak semua memiliki kesempatan belajar di sekolah.<sup>11</sup>

Budi Wahyuni, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang aktualisasi diri remaja membuat jalanan, mal, kafe dan fasilitas lainnya menjadi pelarian remaja. Padahal, tidak semua remaja mampu mengakses fasilitas berbayar itu. Akibatnya, berbagai aksi kriminal pun dilakukan remaja, mulai dari tawuran, kekerasan geng motor, konsumsi narkoba, prostitusi remaja, hingga tindak kriminal lain. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga memicu meningkatnya kasus perilaku

<sup>10</sup>Anita Lie, "Pendidikan Berkualitas Masih Sekadar harapan", *Kompas*, 7 Mei 2012.

<sup>11</sup>Sonny Harry B. Harmadhi, "Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan", *Kompas*, 7 Mei 2012.

seks pranikah, pernikahan dini, dan kekerasan terhadap perempuan. Jumlah usia remaja sangat besar, yakni mereka yang dikategorikan usia 12-18 tahun, jumlahnya sekitar 30,3 juta orang. Sayangnya, pemerintah daerah kurang memberikan perhatian kepada mereka. Pembangunan remaja adalah "investasi" yang dampaknya baru bisa dirasakan 5-10 tahun ke depan. Pemerintah daerah lebih tertarik berinvestasi pada bidang yang menghasilkan nilai ekonomis langsung dan bila ada dampak positif pada citranya.<sup>12</sup>

Dari mobilitas antarnegara akan semakin tinggi saat pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif berlaku pada 1 Januari 2015. Pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang pekerja asing bekerja di Indonesia sepanjang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan internasional. Sofjan Wanandi mengemukakan bahwa jumlah pekerja terampil berkualitas Indonesia masih kalah jauh dari negara lain. Jika tidak dibenahi dengan serius, bisa saja kita hanya bisa mengirimkan tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke negara lain dan pasar kerja formal kita diisi pekerja terampil asing.<sup>13</sup>

Sumarna A.F., Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mengatakan bahwa Indonesia mengalami tantangan kesiapan pekerja terampil. Di sektor jasa, baru pekerja bidang pariwisata yang siap bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lain. Tenaga kerja di bidang kesehatan, logistik, telekomunikasi, dan transportasi udara masih belum siap bersaing di pasar regional. Hal ini mesti memperoleh prioritas untuk meningkatkan kualitas dengan mengembangkan sistem pendidikan berbasis kompetensi, supaya mereka bisa bersaing dengan negara lain.<sup>14</sup> Dalam catatan BPS, penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2012 masih didominasi pekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebesar 55,5 juta orang (49,21%) dan SMP sebesar 20,3 juta (17,99%). Pekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 10,3 juta orang, dengan 3,1 juta orang (2,77%) berpendidikan diploma dan 7,2 juta orang (6,43%) berpendidikan universitas. Angka-

<sup>12</sup>Budi Wahuni, "Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan", *Kompas*, 7 Mei 2012.

<sup>13</sup>Sofjan Wanandi, 'Kualitas SDM Harus Dibenahi', *Kompas*, 15 November 2013.

<sup>14</sup>Sumarna AF, 'Kualitas SDM Harus Dibenahi', *Kompas*, 15 November 2013.

angka itu jelas menunjukkan masih rentannya jumlah pengangguran terdidik, terutama di perguruan tinggi.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, *skill* merupakan mata uang global abad ke-21 yang tak bisa dihindari setiap negara. Jika dalam sebuah negara aspek pembangunan keterampilan diabaikan, para pekerja akan mengalami stagnasi dalam perkembangan karier. Selain itu, rendahnya partisipasi dan kerja sama dunia pendidikan dengan korporasi dalam meningkatkan keterampilan akan ikut menyumbang dalam rendahnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Itu berarti kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap angkatan kerja harus masuk ke kerangka program pendidikan yang adaptif dan inovatif, serta merupakan usaha yang tidak boleh berhenti.<sup>16</sup>

Dalam bidang ekonomi, berdasarkan data World Bank, seperti disampaikan Perwakilan Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves<sup>17</sup> di Jakarta, bahwa Indonesia rawan akan penambahan angka kemiskinan. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh ke jurang kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Sebab, pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Sehingga ketika ada guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana, atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin. Penurunan kemiskinan di Indonesia terus melambat, tingkat penurunannya hanya 0,7% pada 2012-2013. Hal ini akan mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pada dasarnya berhasil mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3% pada 2014, dibandingkan 24% pada 1999.

Payaman Simanjuntak mengungkapkan bahwa dari sisi kompetensi dan keahlian berbahasa, pekerja Filipina memiliki kemampuan lebih baik daripada Indonesia. Indonesia juga tertinggal dari sisi indeks sumber daya manusia. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran karena persaingan mendapatkan pekerjaan di pasar kerja formal semakin ketat. Pemerintah

<sup>15</sup>Ahmad Baedowi, 'Kerangka Keterampilan Abad Ke-21', *Media Indonesia*, 18 November 2013.

<sup>16</sup>*Media Indonesia*, 18 November 2013.

<sup>17</sup>Disampaikan Perwakilan World Bank untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves, di Jakarta, pada 23/9/2014 (Sumber: Okezone.com).

harus memperkuat daya saing pekerja nasional dalam menghadapi arus pasar kerja bebas Asia Tenggara. Memperbanyak pelatihan dan lokakarya komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerja. Pembekalan khusus keahlian kerja dengan sertifikasi kompetensi kerja untuk penyetaraan kemampuan pekerja nasional di pasar kerja regional,<sup>18</sup> seperti pada tabel berikut:

**Tabel 8.1.** Kesiapan SDM Hadapi MEA 2015<sup>19</sup>

Mutual recognition Arrangement (MRA) yang telah disepakati oleh ASEAN, yaitu insinyur, keperawatan, arsitek, *surveying qualification*, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), dan jasa-jasa akuntansi.

Dokter Gigi		25.218 orang (2012)
Dokter dan Dokter spesialis yang teregistrasi		110.521 orang (terdiri dari 88.311 dokter dan 22.210 dokter spesialis yang berasal dari 16 spesialis kedokteran)
Perawat		220.573 orang (2012)
Akuntan		Hampir 10.000 orang
Insinyur		600.000 orang
Arsitek		11.583 orang (Saat ini hanya ada 250 insinyur dan arsitek yang bersertifikat untuk wilayah ASEAN)

Dalam seminar bertema “*Building Awareness of Best Practice in Supply Chain Management*” yang diselenggarakan *Indonesian Association for Supply Management*, diungkapkan bahwa sumber daya manusia Indonesia lemah untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kejujuran, disiplin, loyalitas, dan kemampuan *soft skill* menjadi modal di dunia profesionalisme. Padahal, “dalam dunia bisnis, seorang harus memiliki integritas, apalagi dalam pengadaan barang.

<sup>18</sup>Payaman Simanjuntak,, *Kompas*, 15 November 2013.

<sup>19</sup>Sumber: Litbang “*Kompas*, Edisi Jum’at, 15 November 2013”/INO, diolah dari kementerian Perdagangan, IAI, IDI, dan PDGI.

Pekerjaan itu banyak mendapatkan tekanan dan godaan. Sebanyak 70% kasus korupsi di Indonesia berada di bidang pengadaan barang”.<sup>20</sup> Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih serius dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja Indonesia agar mereka tidak menjadi penonton di pasar kerja domestik, karena lemah dalam kompetensi dan profesionalisme serta integritas.

Untuk mengantisipasi persaingan di ASEAN saat dimulainya Komunitas/Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai akhir 2015, sejumlah negara ASEAN lain pun telah bersiap dengan membangun infrastruktur strategis. Thailand misalnya, sedang berencana mengalokasikan dana 69,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp812 triliun untuk pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi dan infrastruktur lainnya. Jaringan KA kecepatan tinggi itu, antara lain akan menghubungkan Bangkok dengan kawasan perbatasan Laos dan Malaysia. Jika diloloskan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand, pembangunan infrastruktur itu akan membutuhkan waktu tujuh tahun. Jika berhasil dilakukan, pembangunan ini akan menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Thailand. Jika dinyatakan lolos oleh MK dan Raja Thailand, salah satu proyek yang akan dibangun adalah jalur KA cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Chiang Mai di Thailand Utara hingga perbatasan Laos, perbatasan Malaysia, zona industri di Thailand Timur.<sup>21</sup>

Pendidikan, karenanya, merupakan suatu harapan terpenting dalam menciptakan SDM yang handal dan kompetitif demi kemajuan bangsa. Albert Barita Marulam Sihombing menulis bahwa dalam mengoreksi kehidupan berbangsa, tidak salahnya bila belajar dari pengalaman bangsa Taiwan. Di Taiwan, sangat minim dari gangguan kriminal dan hampir tidak ada korupsi. Padahal, banyak penduduk Taiwan tidak beragama (menganut agama tertentu) tetapi mereka lebih beradab. Hal ini dikarenakan setidaknya ada empat pilar yang menopang kesadaran hukum di Taiwan:

1. *Pilar pendidikan.* Sejak kurang lebih empat dasawarsa yang lalu, pemerintah Taiwan mencanangkan wajib belajar Sekolah Dasar

<sup>20</sup>Seperti diungkapkan Lambok Hamonangan Hutaauruk. Lihat: ('Kualitas SDM Harus Dibenahi', *Kompas*, 15 November 2013).

<sup>21</sup>Lihat: ('Thailand Genjot Infrastruktur', *Kompas*, 22 November 2013).

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan wajib belajar ini dilakukan hingga pelosok desa, dan ada orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya akan diproses secara hukum. Alhasil, penanaman budi pekerti sejak dini dan bagi semua anak Taiwan.

2. *Pilar kesehatan.* Semua warga wajib memiliki kartu asuransi kesehatan (Askes) dengan besarnya iuran beragam berdasarkan pendapatan. Hampir 95% rumah sakit dan praktik dokter memiliki kerja sama dengan perusahaan Askes. Siapa pun yang memegang Askes akan dilayani dengan optimal tanpa diskriminasi dan menanggung berbagai jenis penyakit (dari jenis penyakit ringan hingga berat). Hal ini menimbulkan kesadaran masyarakat untuk "patuh" atau "loyal" kepada pemerintah.
3. *Pilar ekonomi.* Pemerintah Taiwan menyadari bahwa konsep ketimpangan sosial akan berdampak pada tindakan kriminal dan konflik sosial. Upaya pembangunan ekonomi dilakukan dengan membangun infrastruktur jalan hingga ke penjuru desa. Para petani dibantu dengan "suntikan" modal yang memadai untuk pengelolaan pertaniannya. Dampaknya, kesejahteraan ekonomi petani pun semakin meningkat dan tingkat urbanisasi mengalami penurunan karena pedesaan telah menjadi "sentra" ekonomi yang handal.
4. *Pilar riset dan pengembangan sumber daya.* Mengingat Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas, tidak ada pilihan lain bagi Taiwan harus menggali dan mencari potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup. Penelitian dan Pengembangan merupakan penjabaran penelitian sesungguhnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun berkembang pesat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas sumber daya. Etos kerja pun meningkat dan timbul kesadaran, dengan semboyan: "*jangan makan kalau tidak bekerja*". Kesadaran inilah berdampak pada minimnya kasus kejahatan konvensional, seperti pencopetan dan pencurian. Budaya malu itu berimbas terhadap kehidupan sosial lainnya, seperti rendahnya pungli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kasus gelandangan dan pengemis juga hampir tidak ada.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Albet Barita Marulam Sihombing, "Pendidikan dan Budaya Hukum, Belajar dari Pengalaman Taiwan", *Media Indonesia*, 30 April 2012.

Implementasi terhadap keempat pilar di atas, tampaknya telah memengaruhi dalam menciptakan sistem yang mendorong bangsa Taiwan menempatkan hukum sebagai "panglima". Kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada tarik-menarik kepentingan (*vested-interest*) tetapi lebih didasarkan pada kesadaran bagi kepentingan berbangsa. Anak-anak Taiwan sejak dini telah diajarkan dan dididik untuk memahami dan menghormati supremasi hukum melalui pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang tidak koruptif tetap dipelihara dengan peningkatan kesejahteraan dan diperkuat dengan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai bagian dari "rekayasa sosial" ke arah kehidupan yang lebih baik. Di sini, supremasi hukum sebagai "panglima" bertalian erat dengan kemajuan pembangunan sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan salah satu teori perubahan sosial, yakni teori analitik<sup>23</sup> bahwa kemajuan suatu masyarakat ditandai dengan berbagai aspek: ekonomi, politik, keluarga, mobilitas sosial dan agama yang semuanya itu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi (pendidikan).

Kehadiran pilar pendidikan dalam menuju kemandirian bangsa tidak terlepas dari upaya mempersiapkan "sumber daya manusia" (*man power*) yang diperlukan. Diungkapkan Molijarto Tjokrowinoto<sup>24</sup> bahwa terdapat dua pandangan yang melatarbelakangi pengembangan sumber daya manusia Indonesia: *Pertama*, pendidikan dalam konotasinya dengan *production centred development* yang memandang pendidikan sebagai hubungan antara guru sebagai *depositor* dan murid sebagai *depositories*. *Banking concept* pendidikan ini dipandang sebagian kalangan kurang memiliki makna, karena anak didik cenderung menerima yang disampaikan sebagai *passive intetis*.

Paul Suparno<sup>25</sup> selanjutnya mengkritisi bahwa pendidikan nasional belum melakukan pendekatan holistik dalam upaya menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Suparno mengungkapkan pendidikan karakter

<sup>23</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013, hlm. 219.

<sup>24</sup>Molijarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 28-29.

<sup>25</sup>Diungkapkan keduanya, Paul Suparno dan Daoed Joesoef, dalam seminar bertajuk "Pendidikan Indonesia: Harapan dan Kenyataan", *Kompas*, 7 Mei 2012.

memang dicanangkan dan dijalankan, tetapi belum menjadi bagian dari seluruh pendidikan nasional. Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Orde Baru) yang mengatakan pula bahwa pendidikan nasional Indonesia mesti bisa berperan untuk membentuk warga bangsa. Ia mengatakan sistem pendidikan nasional perlu menyadari anak didiknya adalah warga Indonesia, bukan anak suku yang lahir dari salah satu daerah di Indonesia”.

Sri Edi Swasono<sup>26</sup>, pada Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 2012 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, selanjutnya, mengatakan reformasi pendidikan kini telah mengalami kehilangan roh. Reformasi pendidikan tanpa roh itu tidak terlepas dari peran pendidik yang belum mendesain kurikulum sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Dampaknya, reformasi pendidikan dan pembangunan nasional yang ada kini berjalan tanpa *platform* kebangsaan dan kerakyatan. Padahal *platform*-nya sudah jelas, *back to basic*, yakni Pancasila dan UUD 1945. Menurut Edi Swasono, agar kembali pada reformasi dengan *platform*, penting bagi para pendidik untuk mengetahui doktrin nasional bangsa Indonesia, yakni doktrin kebangsaan dan kerakyatan. *Doktrin kebangsaan* terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini adalah pendidikan mesti menekankan pentingnya nilai pluralisme dan multikulturalisme pada peserta didik. Menghormati keberagaman sangat penting agar bangsa Indonesia tak terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok dan golongan sehingga cita-cita reformasi yang diimpikan tercapai dengan penuh damai.

Edie Swasono juga mengatakan bahwa pendidikan harus diabdikan pada kepentingan rakyat. Dikatakan lebih lanjut bahwa *world class education* yang sering didengungkan selama ini telah berdampak terhadap pemberian izin kepada orang asing untuk mendirikan sekolah di Indonesia. Keberadaan mereka dengan kurikulum yang dibawa dari luar negeri bisa mengabaikan keindonesiaan, budaya Indonesia, bahkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam totalitas. Tidak cuma itu, konsep *world class education*, itu pun membangun sekolah-sekolah mahal hingga hanya keluarga-keluarga

---

<sup>26</sup>Sri Edi Swasono, “Reformasi Pendidikan Kehilangan Roh”, *Media Indonesia*, 8 Mei 2012.

kaya yang dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Hal ini telah menciptakan eksklusivisme dan kepentingan rakyat jadi rendahkan. Edi Swasono berharap bahwa para tokoh pedagogis harus secepatnya menyusun kurikulum dan silabus efektif, untuk penataran baru Pancasila sebagai penerapan terhadap penataran P4 masa lampau<sup>7</sup>. Sri Sultan Hamengkubowono K<sup>9</sup> mengungkapkan selain aspek kebangsaan dan kerakyatan, harmonisasi peran Tri Pusat Pendidikan, yakni keluarga, Sekolah, dan masyarakat perlu diperhatikan pada kondisi masyarakat saat ini. Sultan mengemukakan kebudayaan pun jangan ditinggalkan generasi muda bangsa ini dalam kurikulum pendidikan nasional.

Ke depan, perlu adanya upaya sadar dalam menyesuaikan beragam fenomena proses adaptasi atau "krisis" etika sosial di tengah masyarakat dalam upaya memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Pendidikan dalam hal ini, sekolah madrasah, sebagai salah satu institusi sosial, memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi muda/sewa yang memiliki kepribadian dengan sikap toleran, ahlak, dan rukun dalam masyarakat pluralistik atau majemuk sebagai karakteristik atau kepribadian individu dan kelompok. Hal ini, akhir-akhir ini disadari betul oleh pemerintah dengan mendorong pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik.

Omar Muhammad al-Jumay al-Syathany dalam *Jalaluddin* mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukanlah aksioma dengan proses selesai jadi.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Sri Sultan Hamengkubowono K, "Keistimewaan Pendidikan Keluarga Rab", *Majalah* terbitan: 4 Mei 2012.

<sup>9</sup>*Jalaluddin, Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindar Persada, 2005, hlm. 76.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."<sup>30</sup>

Ahli pendidikan Islam dunia, pada 1980, melakukan kongres ke-2 tentang rumusan pendidikan Islam. Dinyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia yang secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan dan pancaindra. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengembangkan semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, keilmuan bahasa, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong aspek-aspek tersebut ke arah kebaikan dan arah pencapaian kesempurnaan hidup.<sup>31</sup>

Dapat dijelaskan bahwa konsep pendidikan di atas mementingkan pengembangan kepribadian seorang anak didik/siswa secara totalitas. Lebih jauh lagi, dalam konsep pendidikan Islam dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan Sang Khalik, Allah Swt., hendaklah didorong perkembangan jasmani dan rohani atau intelektual, *qolbu*, dan fisiknya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Jika elemen-elemen dari konsep pendidikan Islam ini dapat dikembangkan dengan optimal, maka peran individual dan kolektif umat manusia (Islam) akan dapat membantu ke arah kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam suatu hadis dikatakan: "*Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda (dengan zaman kamu).*"

Apa yang diharapkan secara konseptual tentang definisi pendidikan sering kali tidak selalu berjalan simetris dengan implementasi konsep tersebut ke dalam dunia pendidikan. Sama halnya, sebagai upaya mewujudkan sikap dan perilaku arif dan rukun pada anak didik/siswa memiliki *hambatan-hambatan*. Sering kali tawaran strategi dan solusi terhadap menumbuhkan sikap arif dan rukun yang menjadi kepribadian

---

<sup>30</sup>Lihat: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Beserta Penjelasannya, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2008, hlm. 2).

<sup>31</sup>Jalaluddin, "Teologi Pendidikan....", *op.cit.*, hlm. 76.

anak didik tersebut bersifat parsial, sehingga dari hari ke hari kita tetap selalu menyaksikan perilaku menyimpang pada anak didik. Tidak sedikit dari mereka (anak didik) terlibat obat terlarang (narkoba), miras, pornografi, perkelahian, kekerasan dan kriminal, karena masalah sesungguhnya sangatlah sistemik dan komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menganalisis hambatan-hambatan dalam membentuk perilaku arif, bijaksana, dan rukun sebagai kepribadian anak didik/siswa, setidaknya bertalian dengan tiga hal pokok dari kontak sosial anak didik:

*Pertama*, bertalian dengan sejauhmana peran institusi keluarga (orangtua) dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik pertama dan utama. Kebiasaan menghormati sesama, sikap arif dan rukun anak didik berawal dari apa yang mereka alami di tengah keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing saling memengaruhi, membutuhkan. Seorang anak yang terbiasa mendapat kasih sayang dari anggota keluarga, saling tolong-menolong, jujur, disiplin, toleran dan sederhana, diharapkan akan membantu mereka dalam pergaulan di luar rumah nantinya, terutama di sekolah. Keadaan sosial-ekonomi sosial-keagamaan keluarga dapat pula berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kepribadian anak. Orangtua berupaya dalam mengembangkan fisik, mental, dan jasmani anak dengan wajar dan optimal.

*Kedua*, bertalian dengan peran sekolah/madrasah, di mana seorang pendidik diharapkan dapat meneruskan nilai-nilai edukatif yang telah tertanam dalam keluarga dan mengembangkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang terlihat dalam silabus dan kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan ditempu anak didik. Sekolah terdiri dari pendidik/guru, anak didik/siswa, dan staf administrasi saling membutuhkan. Terlebih pentingnya kualitas seorang pendidik/guru, yang disebut pendidik profesional, sangat dituntut dalam menumbuhkan nilai-nilai edukatif pada anak didik sebagai generasi harapan keluarga dan harapan bangsa. Dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah mendorong pendidik (guru dan dosen) agar menjadi seorang profesional dalam tugasnya melalui program sertifikasi. Seorang guru bersertifikasi juga berhak memperoleh tunjangan sertifikasi dan insentif

lainnya. Kontak sosial antara murid dengan murid menunjukkan suasana edukatif. Sesama murid saling berkawan, berolahraga, saling bercerita, dan saling berdisiplin agar tidak menyinggung perasaan temannya. Dari kontak sosial kedua ini, seorang guru profesional diharapkan anak didik/siswa nantinya dapat memiliki "bekal" nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang memadai di mana mereka akan berkiprah, mandiri, dan berkompetitif di masyarakat pada era global.

Ketiga, peran masyarakat. Kontak sosial ketiga ini merupakan tempat pergaulan sesama manusia dan merupakan lapangan pendidikan yang luas, yakni adanya hubungan antara dua orang atau lebih tak terbatas.<sup>32</sup> Hubungan sekolah dan masyarakat, di mana sekolah sebagai lembaga masyarakat perlu memerhatikan: relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat; metode yang digunakan harus mampu merangsang anak didik/siswa untuk mengenal kehidupan nyata di masyarakat; menumbuhkan sikap pada anak didik/siswa untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya; sekolah selalu berinteraksi dengan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan kedua pihak akan terpenuhi; dan sekolah diharapkan dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaruan tata kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam membentuk perilaku arief, toleran, rukun, dan beretika pada seorang anak didik sebagai upaya menuju Indonesia yang berperadaban dipastikan memerlukan suatu proses waktu yang panjang. Hambatan-hambatan anak didik dalam berperilaku arif dan rukun sesungguhnya perlu dilihat pada tiga bentuk kontak sosial yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan (*mutual-symbiosis*) dalam membentuk seorang anak didik/siswa menuju suatu kepribadian yang diharapkan (arif, bijak, toleran, jujur, disiplin, dan rukun), yakni kontak sosial di keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat. Apa pun bentuk perilaku anak didik/siswa apakah positif

<sup>32</sup>Tonnies membedakan pergaulan dalam dua kategori: (1) *Gemeinschaft* (*persekutuan*) yakni hubungan yang dibentuk oleh kodrat seperti hubungan antara seorang dengan orangtua, dengan masyarakat, dengan pejabat, dengan tokoh agama, dan lain-lain; dan (2) *Gesellschaft* (*perbuatan*) yakni hubungan yang dibentuk oleh ikatan organisasi seperti hubungan seorang dengan pimpinan organisasi massa, organisasi kelembagaan, organisasi politik, organisasi koperasi, dan lain-lain. Lihat: (Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, Tiara Wacana, 2011, hlm. 106).

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

atau negatif sebetulnya sebagai *produk* dan *sketsa* dari kiprah dan peran ketiga institusi sosial tersebut.

Peran pemerintah dalam menempatkan pendidikan berkualitas sebagai investasi negara tidak dapat dihindari, bila mengharapkan adanya suatu generasi yang kuat bagi bangsa ke depan. Baik atau buruknya perilaku anak didik, generasi muda, dan masyarakat berkorelasi kuat dengan perhatian dan komitmen keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah terhadap pentingnya 'investasi' pendidikan. Dengan orientasi pendidikan nasional pada abad ke-21 yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global diyakini akan meningkatkan *human resources* yang kompetitif dengan bangsa lain. Selain itu, produk pendidikan nasional yang diinginkan ke depan adalah mereka yang memiliki 'jati diri' bangsa di tengah pergaulan dengan bangsa lainnya.

# Bab 9

## PENUTUP

### Anak Didik, Etika Pendidikan, dan Masa Depan Bangsa

Dalam pandangan seorang psikolog, Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa tiada bayi yang lahir dalam keadaan bermoral, berakhlak atau beretika. Karena itu, suatu hal yang wajar jika anak hingga umur tiga atau empat tahun berbuat sesuka hatinya. Dia bisa bermain bersama teman sejawat, berlari, dan riang gembira tanpa peduli dengan terganggu tidaknya orang lain di sekitarnya. Anak baru bermain atau menjerit-jerit sambil bermain bila mendapat teguran dari orangtuanya.<sup>1</sup> Di sini, orangtua (ayah dan ibu) berfungsi sebagai *teladan* bagi anak-anaknya.

Lawrence Kohlberg (1927-1967), yang dikutip Sarlito Wirawan Sarwono<sup>2</sup> dalam penelitiannya di Amerika menyebutkan bahwa perilaku anak pada usia tertentu menunjukkan perbedaan perilaku, sebagai *tahap paling awal* dari perkembangan moral, yang dinamakan tahap taat karena ganjaran (*reward*) atau hukuman (*punishment*). Ketika seorang anak sudah menempuh usia enam hingga sepuluh tahun, dia tidak menunggu dimarahi atau diimingi suatu hadiah, melainkan sudah menilai situasi yang menguntungkan atau merugikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tahap perkembangan moral ini disebut Kohlberg sebagai tahap

<sup>1</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, 'Moral Manusia Indonesia', *Koran Sindo*, 24 November 2013.

<sup>2</sup>*Ibid.*

perkembangan moral tingkat pertama (TPM 1) yang dinamakannya *tahap prakonvensional*, yang lazim ditemukan anak-anak.

Ketika anak sudah beranjak dewasa, ia mulai masuk ke TPM 2, *tahap konvensional*, yang terbagi lagi menjadi dua subtahap perkembangan moral, yakni *subtahap konformitas* dan *subtahap tegakkan aturan*. Pada tahap ini, seorang anak berusaha menjadi anak yang baik, saleh, dan tidak menyusahkan orangtua serta tidak meresahkan masyarakat. Pada subtahap tegakkan aturan, dia berusaha untuk mengendalikan lingkungannya agar selalu tertib, aman dan terkendali. Ia mengingatkan teman-temannya yang berisik agar orang lain tidak terganggu privasinya.

Pada usia dewasa, sampai seorang anak pada TPM 3, sebagai TPM tertinggi yang dinamakan *TPM pascakonvensional*, yang juga terbagi pada dua subtahap: *subtahap kontrak sosial* dan *subtahap etika universal*. Ciri dari TPM3 adalah sangat memerhatikan kepentingan orang lain, dan mengalahkan kepentingan pribadi. Orang yang telah mencapai subtahap kontrak sosial, misalnya selalu menepati janji. Karena janji adalah utang, tidak mau menyusahkan dan mengingkari orang lain. Pada subtahap yang tertinggi, etika universal, seorang tidak lagi memandang manusia berdasarkan ras, jenis kelamin, golongan, politik, kelas sosial, atau agama. Dalam pandangannya, semua manusia sama, karena itu, kebaikan harus diberlakukannya pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Jika merujuk hasil penelitian Kohlberg ini, sudah pasti ada kontradiksi dengan realitas dan fenomena dalam kehidupan berbangsa terkini, di mana terdapat banyak kasus anak-anak dan generasi muda yang mengalami proses 'kerapuhan' etika dan akhlak yang mengarah pada perilaku menyimpang (*social deviance*). Seperti telah diungkapkan sebelumnya, tidak sedikit usia pelajar dan mahasiswa, serta generasi muda yang terlibat berbagai bentuk kenakalan dan bahkan perilaku kriminal: tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, *free-sex*, miras, narkoba, begal, dan berbagai bentuk kriminal lainnya. Apa sesungguhnya yang menyebabkan perilaku demikian? Tentu, banyak teori dan pendekatan yang dapat menjelaskan kecenderungan proses merapuhnya etika sosial, *akhlakul karimah*, atau moralitas mereka. Tergantung perspektif yang digunakan seorang dalam melihat dan menganalisis fenomena yang ada di tengah masyarakat.

Beberapa *stressing* dari buku ini, antara lain: *pertama*, bangsa Indonesia memasuki proses kehidupan demokrasi atau demokratisasi dengan '*plus-minus*'nya. Salah satu permasalahan mendasar yang dialami kehidupan berbangsa di era demokrasi ini, adalah kecenderungan terjadinya proses degradasi nilai-nilai etika, akhlak dan moral di masyarakat, sehingga telah memunculkan terjadinya beragam bentuk anomali sosial dan degradasi moralitas dalam berbagai bentuknya. *Kedua*, kedudukan manusia dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai khalifah di bumi. Kata *khalifah* dalam Al-Qur'an disebutkan sekurangnya sepuluh kali. Banyak pengertian yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dengan kata ini di antaranya: mereka yang datang kemudian, sesudah kamu, yang diperselisihkan, silih berganti, berselisih, dan pengganti. Namun, pengertian *khalifah* dalam hal kedudukan manusia adalah pengganti. Jadi, *khalifah Allah* berarti pengganti Allah. Sedangkan *tugas manusia* sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan jalan memanifestasikan potensi Tuhan dalam dirinya.

*Ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru setidaknya memiliki sejumlah tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih, dan peneliti. Sebagai *pendidik* bermakna meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup terhadap anak didik. Sebagai *pengajar* bermakna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai *pelatih* bermakna mengembangkan beragam keterampilan pada siswa. Sebagai *peneliti*, merupakan suatu upaya inovasi dan pembaruan sebagai pengajar di kelas agar lebih berkualitas. *Keempat*, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, karakter, moral, atau *al-akhlak al-karimah*, pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan *keluarga/orangtua* pada anaknya. *Pola asuh* dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan dan minum) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman dan kasih sayang), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

*Kelima*, *leadership* di sekolah/madrasah, seorang guru memerlukan beberapa persyaratan, dengan memiliki: (1) *visi*, dengan cara memiliki pikiran yang terbuka sebagai upaya memperkaya wawasan, (2) *keberanian*, dengan mencintai pekerjaannya, seorang pemimpin akan mengerjakannya

dengan hati. Dengan adanya kecintaan terhadap pekerjaannya, seorang akan berkorban dengan sukarela dan melakukan terobosan-terobosan baru, yang merupakan unsur dari keberanian, (3) *realistis*, di mana seorang pemimpin bekerja dengan dasar fakta dan realitas bukan opini. Jika sekolah/madrasah belum memiliki sumber daya yang mencukupi, seorang pemimpin harus mampu menggunakan fasilitas yang ada, dengan secara berproses berupaya memenuhi sumber daya itu, dan (4) *sensitif dan kepedulian*, di mana seorang pemimpin memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap orang yang dipimpinnya, bekerja dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dan memberi sanksi hukum bagi mereka yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu. Keenam, pendidikan Islam (madrasah, pesantren, PAI di sekolah dan sekolah Islam terpadu) memiliki peranan strategis dalam menciptakan anak didik, santri dan generasi muda yang handal, kompetitif, beriptek dan berimtak, yang dibutuhkan di era-global. Lulusan pendidikan Islam diharapkan tidak hanya memiliki bekal keilmuan pragmatis duniawi tetapi juga bekal bangunan spiritual ukhrawi, sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.

Selanjutnya, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, karakter, moral, atau *al-akhlak al-karimah*, sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan *keluarga/orangtua* pada anaknya. *Pola asuh* dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orangtua dengan anak dalam rangka pendidikan akhlak dan karakter anak. Baumrind mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu: *democratic; authoritative; dan permissive*.<sup>3</sup> Keluarga memiliki

---

<sup>3</sup>*Pola asuh permisif* yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. *Pola asuh demokratis* tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam

peranan terdepan dalam memberikan kebiasaan, keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama.

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar atau pertama dan utama. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, sehingga Rasulullah Saw. menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah: '*Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tanggung jawab kedua orangtuanyalah yang bakal menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi*'.<sup>4</sup> Al-Ghazali, mengungkapkan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), di mana orangtua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian perkembangan bahasa, tradisi, kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orangtua sangat berperan dalam mengembangkan akhlak dan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya kemudian hari.<sup>5</sup>

Dalam pengembangan akhlak, etika, dan karakter anak didik, *keluarga/orangtua* memiliki peran signifikan dan terdepan. Jika, anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap kemajuan bangsa ini. Haryatmoko menulis bahwa integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam organisasi. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi (pribadi berakhlak dan berkarakter) itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya: akuntabilitas dan transparansi. Kini, di

---

kemandirian dan tanggung jawab. Orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggung jawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Arkoff dalam (Badingah, 1993), mengatakan bahwa anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara *otoriter* atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan. Anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>5</sup>Hamid Reza Alavi, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 283-296.

Indonesia, akhlak, etika sosial atau etika publik menjadi isu terpenting dalam sejarah perjalanan kemerdekaan bangsa ini.

Di sisi lain, membangun akhlak dan etika sosial anak didik dalam berbangsa memerlukan proses waktu yang panjang. Etika sosial anak didik harus dimulai dengan membangun etika mereka sebagai calon-calon individu warga negara masa depan yang didambakan dalam zamannya. Membangun etika sosial generasi masa depan berbangsa pun harus dimulai dari keluarga, sekolah, komunitas, masyarakat, dan negara, sebagai suatu sistem sosial yang interkoneksi. Artinya, etika individu dan etika berbangsa akan berkembang seperti yang diharapkan memerlukan fungsi dan peranan strategis semua elemen terkait: keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan politik pemerintah yang berpihak kepada pendidikan anak didik dan generasi muda. Indonesia, sebagai negara yang sangat mengedepankan nilai-nilai religius-keagamaan memiliki modal terpenting dalam membangun etika individu dan etika sosial berbangsa.

Dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terkandung nilai-nilai penting dalam membangun warga negara yang diharapkan dalam tujuan pembangunan: menciptakan manusia Indonesia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berketerampilan—berimtak dan beriptek. Dalam Pancasila terdapat lima sila dan dalam UUD 1945 dengan pasal dan ayat-ayatnya yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara. Karenanya, dalam konteks bernegara dan berbangsa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan pedoman 'wajib' untuk menjadi warga negara yang baik atau beretika sosial. Inilah konsep berbangsa yang telah dipikirkan dan diciptakan para pendiri bangsa (*founding fathers*) terdahulu, bagi anak-anak dan generasi muda bangsa.

Tetapi, dalam konteks realitas dan pengalaman perjalanan bangsa, sejak 1945, seiring dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat yang terus berubah, menunjukkan telah terjadinya kesenjangan (*gap*) antara apa yang diharapkan (*das sein*) dan yang menjadi kenyataan (*das sollen*). Sudah banyak prestasi berbangsa yang telah dicapai, tetapi, masih banyak pula prestasi yang belum dicapai. Bahkan, dalam banyak hal tujuan dan praktik pembangunan terkesan adanya disorientasi dari inspirasi nilai-nilai religius dan humanis yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Sejumlah

fakta sosial berbangsa menunjukkan, terlebih sejak era Reformasi 1998, telah terjadi degradasi etika sosial berbangsa dan bernegara: tingginya angka korupsi, rusaknya lingkungan akibat penambangan, *illegal logging*, terlalu mengandal bantuan asing, tingginya utang luar negeri, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka kriminal, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, tingginya angka kriminal dan ancaman bahaya narkoba.

Dari perspektif sosial, kecenderungan terjadinya degradasi etika akhlak anak didik, *social deviance*, yang terjadi pada akhir-akhir ini merupakan suatu anomali sosial yang berdampak buruk terhadap masa depan bangsa. Sebagai proses penguatan etika sosial berbangsa, sekurangnya ada sejumlah hal yang perlu dilakukan ke depan: *Pertama*, bangsa Indonesia harus memanfaatkan *momentum* setiap Pemilu untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar menjadi aspirasi rakyat. Semua pihak berharap tentunya para elit eksekutif dan legislatif yang diberi amanah memimpin negeri ini, pada level nasional dan daerah, diharapkan memiliki kompetensi, cerdas, integritas, *track records*, tetapi juga moralitas. Hal ini penting, mengingat merekalah yang akan menentukan ke mana arah bangsa ini ke depan, di tengah pergaulan global yang berpihak kepada daya saing bangsa. Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa hanya akan terwujud jika para pemimpin yang terpilih nantinya memang betul-betul memahami aspirasi rakyat dan berupaya mengaktualisasinya dengan baik.

*Kedua*, secara substansi, apa pun bentuk persoalan berbangsa, etika sosial berbangsa, sesungguhnya berawal dari rendahnya moralitas, *akhlakul karimah*, dan mentalitas berbangsa, seperti yang telah diteladani para *founding fathers*. Terjadinya banyak kasus korupsi yang prestisius pada era Reformasi dan era 'Transisi Demokrasi' sesungguhnya menunjukkan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya keteladanan pemimpin di era reformasi. Karenanya, kesejahteraan bangsa hanya akan membawa 'angin segar' jika pada masa datang bangsa ini terbebas dari 'virus' korupsi dengan seoptimal mungkin. Di sini, pihak penegak hukum, diharapkan dapat bekerja dengan maksimal dan perlunya adanya *support moral* dari semua elemen bangsa.

Ketiga, perlu adanya upaya meningkatkan nasionalisme dan penguatan identitas nasional di tengah pergaulan dan globalisasi dunia. Tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya: beriman, bertakwa, berpengetahuan, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur—beriptek dan berimtak—harus menjadi cita-cita dan komitmen setiap elemen bangsa. Pancasila dan UUD 1945, sudah memberi jalan dan pedoman bagi warga bangsa ini, dalam kehidupan berbangsa. Jika, masih banyak perilaku menyimpang dan masih tingginya angka kemiskinan berarti nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 belum berjalan dan diaplikasikan dalam 'rel'-nya. Kemakmuran dan kesejahteraan bangsa hanya akan terwujud apabila dalam praktik berbangsa dan bernegara menempatkan rakyat menjadi tuan di negerinya. Dalam banyak hal, faktanya, posisi masyarakat berada pada pihak yang lemah (*subordinate*) di tengah posisi negara yang *super ordinate*. Relasi hubungan yang tidak seimbang itu akan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Setiap pemerintahan baru dari setiap hasil Pemilu, sedapat mungkin mampu mencari *solusi* tepat terhadap kesenjangan relasi rakyat-negara, sebagai upaya menjadi tuan di negerinya dengan tetap terjaganya identitas sebagai bangsa Indonesia.

Dari perspektif agama, sebagai suatu bangsa multikultural pluralistik yang mengedepankan nilai-nilai religius keagamaan berdasarkan ajaran agama masing, terkesan belum tercermin optimal dalam perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa seharusnya. Sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945, dirasakan belum berlangsung optimal dalam interaksi antarindividu dan antarkelompok (internal dan eksternal) pengikut agama-agama yang ada. Terkadang masih terjadi konflik sosial bernuansa etnis dan agama di berbagai tempat di tanah air. Agama dan etnis sesungguhnya suatu *fitrah* dan 'kekayaan' dimiliki bangsa ini.

Adanya struktur sosial ekonomi dan politik yang masih timpang, telah berdampak pada terjadinya beragam konflik sosial selama ini. Dari beberapa hasil riset tentang konflik sosial bernuansa etnis dan agama, sebetulnya bukanlah berdiri sendiri, tetapi salah satunya dapat dikarenakan faktor sosial, ekonomi dan politik, yang kurang berpihak kepada sebagian

kalangan masyarakat. Potensi konflik dapat juga terjadi karena adanya *vested interest* elit politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu di daerah. Motif sosial-ekonomi dan politik tersebut karenanya salah satu menjadi faktor 'pemicu' dalam berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi di tanah air. Konflik sosial selanjutnya berkembang, seperti terjadinya konflik antarkelompok agama, antaretnis, antar-geng, antardesa, antarbatas, antara masyarakat-perusahaan, dan antara mahasiswa-pemerintah (di mana tidak jarang berbenturan dengan aparat petugas).

Dari perspektif pendidikan, sebagai upaya revitalisasi peran pendidikan agama dalam kehidupan berbangsa, diperlukan peran dari berbagai elemen bangsa. Dalam institusi keluarga, orangtua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan agama anak-anaknya, sebagai pendidikan pertama dan utama dalam membangun karakter, kepribadian dan etika sosial anak nantinya. Institusi sekolah/madrasah, merupakan tempat belajar lanjutan daripada anak-anak dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa pun pengetahuan yang didalami anak dan profesi dijalannya di tengah masyarakat nantinya, sesungguhnya, sebagai pengabdian terhadap masyarakat dan bukti ketertundukan kepada Sang Khalik. Selanjutnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahwa baik pendidikan agama maupun pendidikan umum sejajar dan sama pentingnya dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karenanya, diperlukan optimalisasi peran dan fungsi keluarga/orangtua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mendorong dan membangun moralitas dan etika sosial anak-anak dan generasi muda melalui beragam saluran pendidikan (umum dan agama).

Tanpa mengabaikan pembangunan pada sektor lainnya, pembangunan sektor pendidikan paling penting menjadi prioritas. Anggaran pendidikan memang sudah mengalami peningkatan berarti, tetapi, ternyata belum cukup untuk menjadikan upaya penyiapan 'anak bangsa' dapat berkompetisi ke depan. Sudah banyak guru dan dosen yang sudah bersertifikasi sehingga akan berdampak positif terhadap penghasilan dalam mendukung kinerja yang lebih baik. Tetapi, masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum sekolah atau putus sekolah. Peran pemerintah (pusat dan daerah) ke depan perlu dioptimalkan dan mesti sinergis sebagai upaya menciptakan

- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Atwell, Alison. 2013. *Peningkatan Sekolah Efektif (Modul)*. Jakarta.
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2003. *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Penyunting Mudjahid AK dan Achmad Syahid. Jakarta.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2007. *Problematika Madrasah Era Otonomi Daerah*. Cetakan ke-2. Editors: Imran Siregar dan Umul Hidayati. Jakarta: Sekretariat Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Baghi, Felix, SVD (Editor). 2012. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Yogyakarta: Ledalero.
- Barnadib, Sutari Imam. 1994. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Basyuni, M. M. 2006. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Badan Litbang dan Diklat. Departemen Agama RI.
- Brent, M. Low. 2005. 'Self Esteem is Related to Aggression, Anti Social Behavior, and Delinquency. Research Article'. *Journal of American Psychological Society* 2005. Pp. 328-335.
- Budi Wahuni. 2012. 'Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan', *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Craig A. Anderson dan Brad J. Bushman. 2001. 'Effect Of Violent Video Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognitiom, Aggressive Affect, Physiological Arousal, And Prosocial Behavior'. *Journal of American Psychological Society*, 2001. Pp. 353-359.
- Dhakidae, Daniel. 2013. 'Kapital, Korupsi, dan Keadilan'. *Prisma*, Vol. 32, 2013. Hlm. 84-87
- Departemen Agama RI. 2006. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat. Departemen Agama RI.

Departemen Agama. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*. Jakarta.

Diekmann, Andreas. 1996. 'Social Status and Aggression'. *The Journal of Social Psychology*, 1996, 136(6). hlm.761-768.

Dimitriadis, Greg and Kamberelis, Greg. 2006. *Theory for Education*. New York, London: Routledge.

Daradjat, Zakiah. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.

\_\_\_\_\_. 2005. *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang.

\_\_\_\_\_. 1971. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Darwis, M. 2013. 'Demokrasi Berlabel Amuk Massa'. *Kompas*, 4 April 2013.

Daniel U. Livine and Robert J. Havighurst. 1989. *Society and Education*. Seven Edition. Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, and Toronto.

Dhakidae, Daniel. 2013. 'Kapital, Korupsi, dan Keadilan'. *Prisma*. Volume 32, 2013.

Dhofier, Zamakshyari 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Ellis, Arthur K., Cogan, John J., and Howey Kenneth R. 1986. *Introduction to the Foundations of Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

E. Mulyasa. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_. 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Edi Harapan dan Syarwani Ahmad. 2014. *Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani Dalam Organisasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fajdar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_. 1999. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.

- Freedman, A.L. 2001. 'The Effect of Government Policy and Institutions on Chinese Overseas Acculturation: The Case of Malaysia'. *Journal of Modern Asian Studies*. Volume 35 Number (2001).
- Furnivall, J.S. 1980. 'Plural Societies', *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. New York: Oxford University Press. Oxford.
- Gary Graig, Tania Burchardt, and David Gordon (Editors). 2008. *Social Justice and Public Policy: Seeking fairness in diverse societies*. University of Bristol. UK: The Policy Press.
- Goodlad, John I. 1984. *A Place Called School, Prospects for the Future*. New York: McGraw-Hill Paperbacks.
- Hadi, Sofyan. 2006. 'Islam Melawan Korupsi'. *Dakwah Transformatif*. Editor: Mujtaba Hamdi. Pengantar Lilis Nurul Husna. Jakarta: PP LAKPESDAM NU.
- Handoko, T Hani. 1996. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- H.A.R. Tilaar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Hasan Shadily. 1984. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Ikhtiar.
- Hasbullah Bakry. 1992. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.
- Harmadhi, Sonny Harry B. 2012. 'Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan', *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halstead, J. Mark, 'Islamic Values: a distinctive framework for moral education', *Journal Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007.
- Haryatmoko, 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Held, David. 2005. *Demokrasi dan Tataan Global: dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Penerjemah: Damanhuri. Penyunting: Khamdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, Rahmad. 2014. *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Idi, Abdullah dan Jalaluddin. 2013. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.

Idi, Abdullah dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Pengantar: J.Suyuthi Pulungan. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Idi, Abdullah. 2014. *Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan*. S2/S2 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang.

\_\_\_\_\_. 2014. 'Orang Melayu: Asal-Usul, Jati Diri dan Globalisasi'. *Seminar Nasional Islam Melayu Nusantara*. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. 29 September 2014.

\_\_\_\_\_. 2014. 'Sosiologi Korupsi'. *Etika dan Perilaku Organisasi*. Program Magister Administrasi Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang.

\_\_\_\_\_. (Pengantar). 2011. *Kegelisahan Spiritual Masyarakat Modern dan Pendidikan Islam*. Ditulis Jamalaluddin Umar LR. Sumatera Selatan: Tunas Gemilang Press.

\_\_\_\_\_. 2005. 'Reformasi Pendidikan Tinggi Islam: Urgensi Perubahan IAIN menjadi UIN bagi Masyarakat Sumatera Selatan'. *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Editor: Toto Suharto, et al., Kerja sama Penerbit Circle of Raden Fatah Postgraduate Students (CORPUS) dengan Global Pustaka Utama. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2007. 'Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial'. *Makalah disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang*. Academic Centre IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007.

\_\_\_\_\_. 2010. 'Dari Kuli ke Politisi: Pergeseran Peran Ekonomi ke Politik Etnis Cina/Tionghoa Bangka Belitung pada PascaReformasi'.

- Jurnal Administrasi Publik Vol. 05 No. 01 Januari 2010. Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana STISIPOL. Candradimuka Palembang. Sumatera Selatan, Indonesia.*
- \_\_\_\_\_. 2011. 'The Challenges and Requirements of Teachers of Madrasah in Indonesia'. *Mozaik Pemikiran: Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenerian Agama RI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Kerjasama The Centre of Inter-Ethnics, Religious and Educational Studies (CIERES) dan Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2005. 'Reformasi Pendidikan Tinggi Islam: Urgensi Perubahan IAIN menjadi UIN bagi Masyarakat Sumatera Selatan'. *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*. Editors: Toto Suharto, Munir, dan Abdullah Idi. Diterbitkan Kerjasama CIRPUS (Circe of Raden Fatah Postgraduate Students dengan Global Pustaka Utama). Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. 'Asimilasi Orang Cina di Bangka'. *Jurnal Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat Vol. 10/No. 1/Juni 2004*. Terakreditasi SK. No. 49/DIKTI/Kep. 2003 Tanggal 9 Desember 2003. Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang.
- \_\_\_\_\_. (Translator). 2003. *Sejarah Islam Spanyol (A History of Islamic Spain, Montgomery Watt, 1992)*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- \_\_\_\_\_. 2006. "RUU PDRE dan Masalah Mayoritas-Minoritas". *Sumatera Ekspres*, 17 Maret 2006.
- \_\_\_\_\_. 2006. 'Etnisitas, Agama dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis Terhadap PBM No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006'. *Makalah Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang*. Tanggal 29 November 2006.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Bangka: Sejarah Sosial Cina & Melayu*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Idiyanto, Agus dan Kuswanjono, Arqom. 2012. *Agama, Budaya, dan Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Yogyakarta: Kerja sama Penerbit Mizan dan CRCS-UGM.

Jalaluddin dan Usman Said. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Pengembangan Pemikirannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jalaluddin. 2006. 'Peran Lembaga Pendidikan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi'. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Editor: Suyitno dan Heri Junaidi. Yogyakarta: Gama Media.

\_\_\_\_\_. 2003. *Teologi Pendidikan*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jamal Ma'mur. 2009. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: Diva Press.

James H. Stronge, Holly B. Richard, dan Nancy Catano. 2013. *Kualitas Kepala Sekolah yang Efektif*. Jakarta: PT Indeks.

J.S. Furnivall, 1980. 'Plural Societies', dalam *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers. New York: Oxford University Press.

J.S. Nasikun, 2005. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Jujun Srisumantri. 2000. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.

Khaeron Herman. 2013. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Khairul A. Mastro, Putai Jin dan Martin Cooper, 2000. 'Malay Culture and Personality', *Journal of American Behavioral Scientist*, Vol. 44, No. 1, September 2000.

Khoiriyah. 2012. *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.

Kivimaki, Timo, 2005. *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*. Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Glendd Smith, Roger Tol, yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-Jakarta. Jakarta.

Kompas, 3/10/2010.

- K. Berten. 2011. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koehn, Daryl. 2000. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karel A. Steenbrink. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Kelly, A.V. 2006. *The Curriculum: Theory and Practice*. Fifth Edition. London: Sage Publication Limited.
- Kivimaki, T. 2005. 'The Study of Ethnic Conflicts in Multicultural Societies', dalam Dewi Fortina Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol, R. (Eds.). *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific, Histories, Political Economies and Policies*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta.
- Kompas*, 17 Oktober 1997.
- \_\_\_\_\_, 3 Maret 2011.
- Kurokawa, M. (Ed.). 1972. *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*. New York: Randam House.
- Liddle, R.W. 1997. 'Coercian, Co-optation and the Management of Ethnic Relations in Indonesia', *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pasific*. Editors: Michael E. Brown and Sumit Ganguly. CSIA Studies in International Security. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. 'Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya'. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Edisi Tahun 2008. Jakarta.
- Levine, D.U and Havighurst, R.j. 1989. *Society and Education*. Seventh Edition. USA.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke-10. (Original English Edition: *Organizationa Behavior 10th Edition*, Copyright The MacGrew-Hill Companies, Inc., 2005) Penerjemah; Vivin Andhika Yuwono, Shekar Purwanti, Th. Arie P, dan Winong Rosari. Yogyakarta: Andi.
- Lombard, Dennys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mackie, J.A.C. 1991. 'Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai', dalam Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu (Eds.), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Merton, Robert K. 1949. *Social Theories and Social Structure*. Illionis: The Free Press.
- M.N.J. Court, 1821. *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country*, London: Prabury & Allen.
- Manfred Ziemek. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Pengantar: Kamanto Sunanto. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mauludi, Sahrul. 2012. *Ibnu Khaldun: Perintis Ilmu Sosial Modern*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Maya, H. 2012. *Kesalahan-kesalahan Umum Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Miftah Thoha. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Zainal Abidin. 2015. 'Berdiri Bersama Memberantas Korupsi'. *Kompas*. Tanggal 11 Februari 2015.
- Munir Amin, Syamsul. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Murphy, Daniel. 2007. *Professional School Leadership-Dealing with Dilemmas*. Scotland: Dunedin Academic Press.
- Muchtar Buchori. 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2011. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasa*. Jakarta: Kencana.

- Mustari, Muhammad. 2014. *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan*. Penagantar: Didik Suhardi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mohan, E. 2007. 'Challenging Multiculturalism: Is it Right for Everyone?' *Journal of Cases in Educational Leaderships*, Volume 10 Number 1, March 2007 (7-13). The University of Council for Educational Administration.
- Musthafa al-'adawy, Syaikh. 2009. *Fiqih Pendidikan Anak*. Jakarta: Qisthi Press.
- Nawawi, Rif'at Syauki. 2011. *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Nordholt, Henk Schulte dan Samuel, Hanneman (Eds.). 2004. 'Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories'. *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parson, Talcot 1966. 'A Paradigm for the Analysis of Social System and Change', dalam N.J. Demerath and A. Richard Peterson (Ed.). *Sistem of Change and Conflict*. New York: The Free Press.
- Parekh, Bhikhu. 2002. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Paul Suparno dan Daoed Joesoef. 2012. "Pendidikan Indonesia: Harapan dan Kenyataan". *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Rodrigo A. Chaves. 2014. 'Perwakilan World Bank untuk Indonesia', *Press Conference*. Jakarta. Diakses dari Okezone.com, 23/9/2014.
- Rohman, Muhammad. 2012. *Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Rozi, Safuan 2003. 'Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia'. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No. 1/2003.
- Reza Alavi, Hamid. 2007. 'Islamic Values: a distinctive framework for moral educatio', *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007.
- Richard M. Steers, 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibata Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Siagian, Sondang P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Schroeder, Ralph. 1992. *Max Weber and the Sociology of Culture*. London, Newbury Park. New Delhi: Sage Publications.
- Simpson, G.E dan Yinger, J.M. 1972. *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*. Haper and Row Publication. New York.
- Sjarkawi. 2011. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Sultan Hamengku Buwono X. 2012. 'Reformasi Pendidikan Kehilangan Roh'. *Media Indonesia*, 8 Mei 2012.
- Suparlan, S. 2003. 'Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia'. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center of Languages and Cultures. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Frans Magniz, 2003. 'Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan', dalam *Konflik* Nordholt, H.S dan Samuel, H. (Eds.). 2004. 'Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories'. *Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society', 'Region', and 'Crisis'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Pamudji. 1993. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Suprayogo, Imam. 2005. "Madrasah dan Masala jati Diri Pendidikan Islam". *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret 2005. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

## BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.** lahir di Bangka pada tanggal 27 September 1965. Penulis menamatkan Sekolah Dasar/*Diniyah* (1979), SLTP (1982), SLTA (1985) di Bangka; S1 (Drs.) Jurusan PAI/Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang (1991); Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1991); *Master of Education (M.Ed.)*, *School of Education*, *University of Tasmania, Australia* (1994) atas beasiswa *Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB)*; dan Doktor Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2006). Meraih Guru Besar Sosiologi (SK Mendiknas RI 1/12/ 2006).

Penulis sejak 1991-sekarang, menjadi Dosen Tetap-PNS pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Memberi kuliah di: Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (2006-sekarang), Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka (2006-sekarang); Program Pascasarjana (S2) Universitas PGRI Palembang (2007-sekarang); dan Program Pascasarjana (S2 Sosiologi) Unsri (2011-sekarang). Menjadi Pembantu Rektor III IAIN Raden Fatah Palembang (2003-2007), Direktur Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang (2008-2011), dan Direktur

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2012-sekarang). Wakil Ketua (Bidang Riset dan Pengembangan) MUI Sumatera Selatan (2010-2015). Wakil Ketua Ikatan Sarjana Sosiologi (ISI) Sumatera Selatan (2013-sekarang). Wakil Ketua Forum Intelektual Sumatera Selatan (2015-sekarang).

Adapun karya tulis penulis, yakni *Filsafat Pendidikan*, Edisi Revisi (ke-5), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014; *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Edisi ke-4 (Revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014; *The Conditions for Learning at University: A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia: A Cross Socio-Cultural Studies (Tesis S2)*, Unsri Press, 2001; *Islam: dalam Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan*, Unsri Press (2001, Co-Author); *Sejarah Perkembangan Islam di Eropa (A History of Islamic Spain)*, Montegomerry Watt, Edinburgh University, 1992, Pustaka Raja Yogyakarta, 2003 (Translator); *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, et al*, Global Pustaka Yogyakarta (2005), (Co-Author); *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Tiara Wacana Yogyakarta (bersama: Dr. Toto Suharto, 2006); *Sejarah Sosial Cina dan Melayu Bangka*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta (2006), Edisi ke-1 dan Edisi ke-2, 2011, Tiara Wacana, Yogyakarta; *Asimilasi Melayu dan Cina di Bangka*, Yogyakarta: Tiara Wacana 2009; *Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*, Idea Press Yogyakarta dan Corpus Yogyakarta, 2010 (Co-Author); *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, Edisi ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Selain menulis adapun kegiatan penulis lainnya, yakni melakukan riset bertalian dengan sosiologi, sosiologi agama, dan pendidikan. Penulis artikel di jurnal, media massa, dan mengikuti pertemuan ilmiah *workshop*, seminar dan konferensi nasional dan internasional. Peserta *Short Course on Social Welfare*, McGill University, Montreal-Canada (2007); *suervisor* pada *Research Fellowships Program* bagi Dosen PTAI se-Indonesia, *The University of Melbourne, Victoria, Australia* (2010); peserta *Professor Fellowships*, *Gottingen Universitat, Germany* (2012).



**Hj. Safarina HD., M.Pd., M.Si.** lahir di Palembang pada tanggal 14 Juni 1971. Bekerja sebagai guru (PNS) pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Menamatkan S1 FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa dan Seni Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya (1996); S2 Program Pendidikan Bahasa dan Seni Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2003); dan S2 Program Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka Palembang (2010).

Adapun karya-karya penulis, yakni penulis artikel sastra di jurnal dan media massa, novel dan puluhan cerpen dipublikasi, seperti: *Cinta Yang Terpaut*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008; *Antologi Puisi "Parkit"*, Adiwacana, Yogyakarta, 2011; *Cinta Yang Terpaut*, Kata Hati, Yogyakarta, 2011 (novel); *Biarkan Parkit Itu Pergi*, DEO, Surakarta, 2014 (novel); *Ibu*, DEO, Surakarta, 2014 (antologi cerpen); dan editor beberapa buku. Penulis juga pernah memperoleh Penghargaan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (2006).